



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

29. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023.

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII PENUTUP

**Pasal 3**

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Juli 2022

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

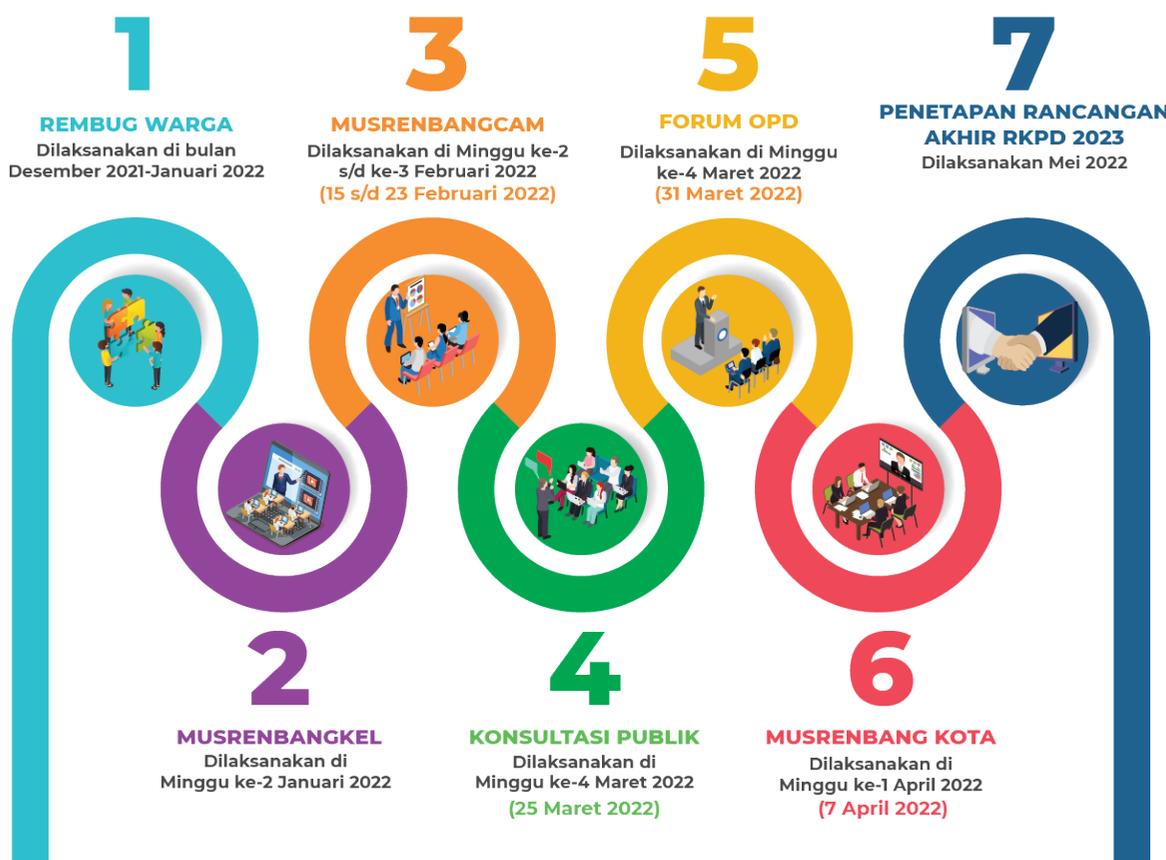
1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan, maka penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain itu, substansi penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menganut konsep *money follows program* melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 untuk menjamin keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah, serta tetap memperhatikan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPG)/ *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Penyusunan dokumen RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Proses penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan dalam jaringan (*online*) melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mulai dari proses Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta penyusunan dan penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD, dilakukan penjangkaran saran dan masukan dari *stakeholder* melalui kegiatan Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, serta hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD. Selain itu, dilakukan pula penyelarasan dan sinkronisasi program dan kegiatan melalui kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah.

RKPD Kota Semarang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD, serta dengan memperhatikan kondisi aktual pandemi Covid-19, maka rencana kerja pembangunan Kota Semarang pada tahun 2023 diarahkan pada “Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Daya Saing Daerah yang didukung Potensi Unggulan Daerah”. Selanjutnya, dokumen RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Gambar 1.1  
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

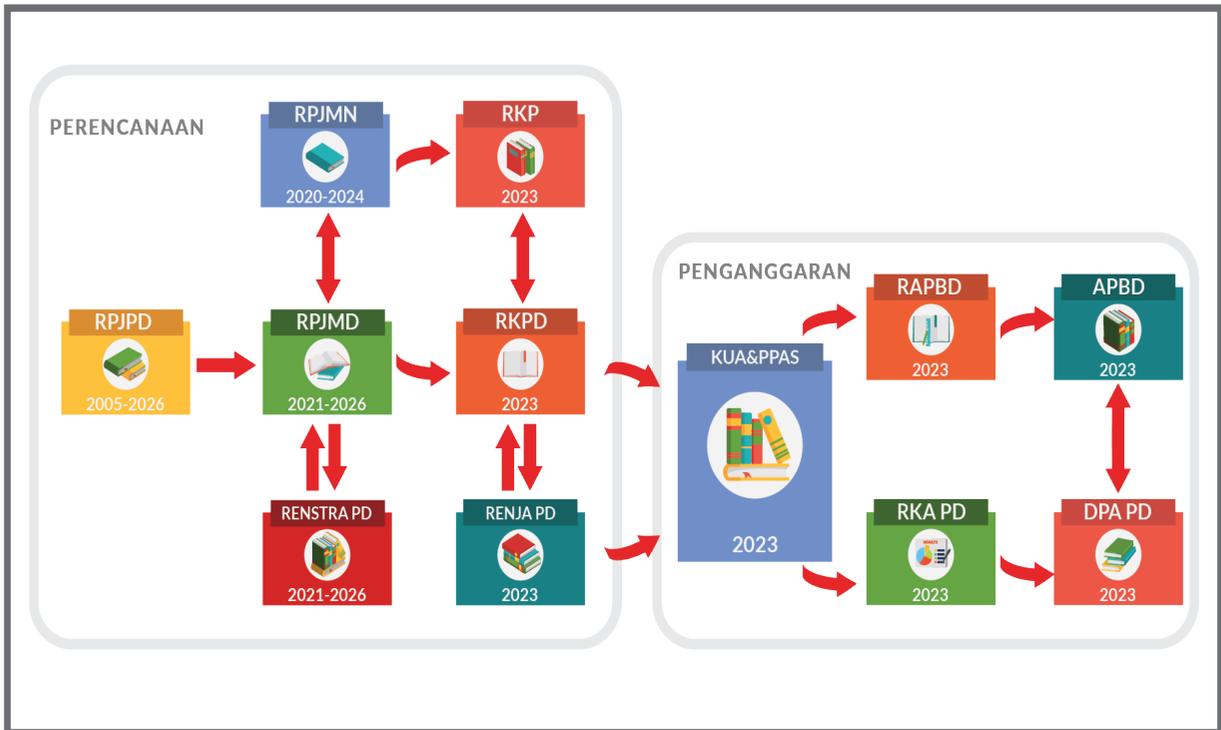
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun anggaran yang akan datang. Untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan tidak melenceng dari tujuan pembangunan jangka panjang, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait, terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJMD menjabarkannya dalam arah pembangunan tiap lima tahun. RPJMD kemudian dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahunan dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. Selain itu, RKPD juga diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD juga menjadi acuan Renja PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 Kota Semarang diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2021. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk menjamin akuntabilitas dan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan penggunaan sistem berbasis *web* yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi lain yang terkait yang ada di Kota Semarang.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang; *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; serta Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.



Gambar 1.2  
 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Semarang yang terkait dengan RKPDP tahun 2023 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031; Rencana Induk Semarang Kota Cerdas; *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; serta dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kota Semarang. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka penentuan tema pembangunan di tahun 2023.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPDP Kota Semarang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Sedangkan tujuan dari dokumen RKPDP Tahun 2023 ini adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2023;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

## 1.5. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan pada bab ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh *stakeholder* khususnya dalam hal menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, perubahan rencana pembangunan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu, serta pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan. Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Semarang Tahun 2023 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun yang disusun dengan mendasarkan kepada tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi, prioritas dan target yang telah ditetapkan. RKPD Kota Semarang juga disinkronkan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Nasional. Prioritas pada RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026.
2. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2023, serta menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
3. Perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 beserta kinerja, indikator, dan satuannya dapat dilakukan dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 1.6. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 dan realisasi capaian terhadap target RPJMD 2021-2026, serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dihadapi.

- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**  
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun 2021 serta perkiraan tahun 2022-2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**  
Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, keterkaitannya dengan RPJMD dan RPJPD, serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**  
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
- BAB VII PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Kota Semarang adalah Ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota yang paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Semarang berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi mencakup antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang.

##### 2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

###### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup> dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

sebelah barat	:	Kabupaten Kendal
sebelah timur	:	Kabupaten Demak
sebelah selatan	:	Kabupaten Semarang
sebelah utara	:	Laut Jawa

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Luas Wilayah Kota Semarang

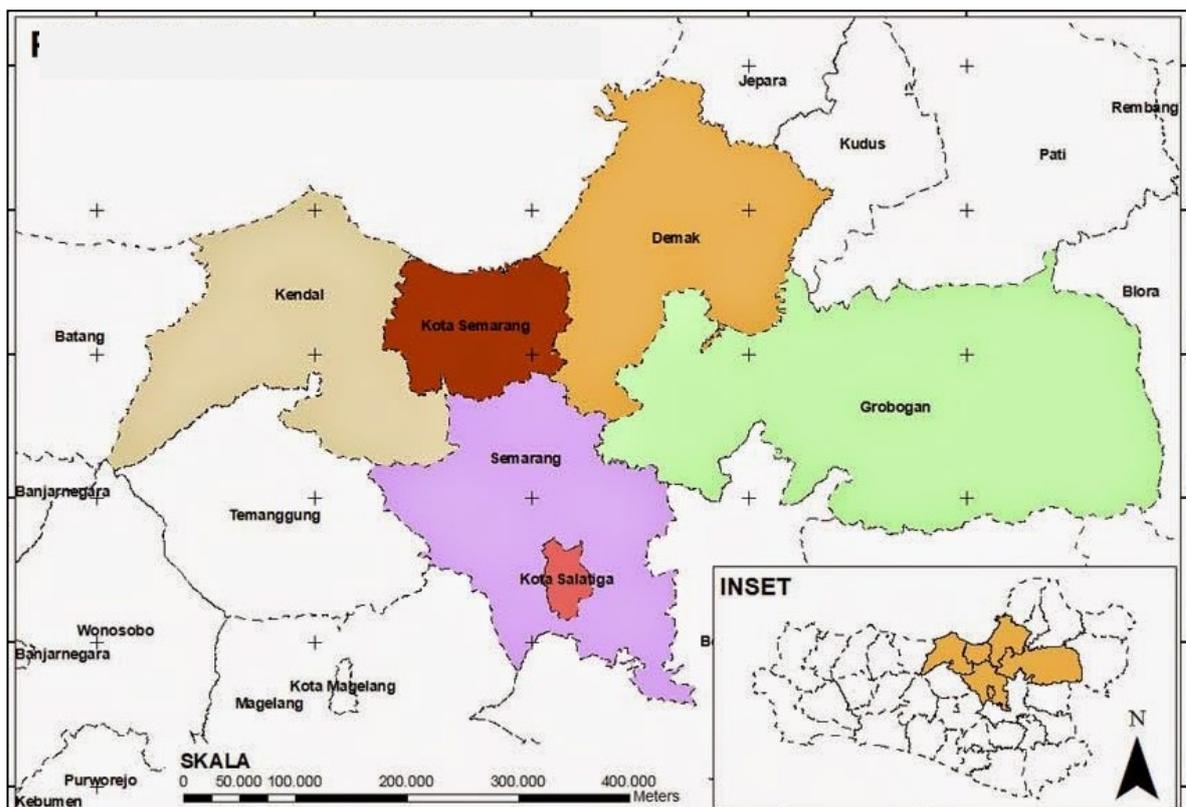
No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber: BPS Kota Semarang, 2022

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor Pantai Utara; koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak/Kabupaten Grobogan; dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1  
Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk ke dalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal-Kab. Demak-Kab. Semarang-Kota Semarang-Kota Salatiga-Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

### c. Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain:

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota Bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan di bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 - 348,00 mdpl.

#### d. Geologi

Kondisi geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur *joint* (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kaligarang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan.

Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua, sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

#### e. Hidrologi

Kondisi hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar drainase yaitu:

1. *Sistem Drainase Mangkang* sebagaimana terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); dan Sub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).
2. *Sistem Drainase Semarang Barat* terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambakharjo dan Sungai Tugurejo); Sub Sistem Sungai Silandak; Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); dan Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).
3. *Sistem Drainase Semarang Tengah* terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru.
4. *Sistem Drainase Semarang Timur* terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedor), Sub Sistem Sungai Pedurangan.

#### f. Klimatologi

Secara klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembapan relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembapan lebih rendah, dan jarang mendung.

Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1°C pada September ke 24,6°C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9°C ke 32,9°C. Kelembapan relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global berdampak pada kehidupan makhluk hidup, terjadinya bencana alam, wabah penyakit, serta fenomena lainnya. Kota Semarang pada tahun 2018 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim, serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan, emisi GRK Kota Semarang selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif yaitu selalu mengalami penurunan, dari tahun 2016 sebesar 5.937,63 ton CO<sub>2</sub>e menurun menjadi 3.626,26 ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2020 dimana besaran emisi tersebut tidak memperhitungkan emisi dari penggunaan listrik, karena di Kota Semarang listrik merupakan aktivitas tidak langsung penghasil emisi.

#### 2.1.1.2. Zonasi Pola Ruang Kota Semarang

Mendasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain:

##### a. Kawasan Peruntukan Lindung

Adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut mencakup:

- Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Ruang Terbuka Hijau
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi:

- Kawasan Rawan Bencana Rob disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (*land subsidience*) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik
- Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi
- Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal
- Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah
- Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang

#### b. Kawasan Budidaya

Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya ini mencakup:

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Olah Raga
- Kawasan Wisata
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan Keamanan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Kesehatan
- Kawasan Peribadatan
- Kawasan Campuran
- Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori

#### c. Kawasan Strategis

- Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi
- Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas
- Pengembangan kawasan Waduk Jatibarang
- Pengembangan kawasan Reklamasi Pantai
- Peningkatan kawasan Masjid Agung Semarang

- Peningkatan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah
- Peningkatan kawasan pendidikan
- Peningkatan kawasan Gedong Batu
- Pengembangan kawasan Kota Lama

### 2.1.1.3. Demografi

Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 berjumlah 1.687.222 jiwa, terdiri dari 835.404 jiwa (49,51%) penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sejumlah 851.818 jiwa (50,49%). Jika dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (1.685.909 jiwa), terdapat penambahan sejumlah 1.313 jiwa atau tumbuh sebesar 0,07%.

Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 12.031 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.070 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rinci, jumlah penduduk dengan data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan sex ratio per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			%	SEX RATIO (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km <sup>2</sup> )
		LAKI- LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)			
1	Semarang Tengah	28.201	30.596	58.797	3,48	92,17	9.576
2	Semarang Barat	76.870	79.382	156.252	9,26	96,84	7.187
3	Semarang Utara	60.744	62.285	123.029	7,29	97,53	11.215
4	Semarang Timur	34.546	36.426	70.972	4,21	94,84	9.217
5	Gayamsari	36.188	36.784	72.972	4,32	98,38	11.808
6	Gajah Mungkur	29.252	30.046	59.298	3,51	97,36	6.538
7	Genuk	61.055	60.536	121.591	7,21	100,86	4.439
8	Pedurungan	97.802	99.257	197.059	11,68	98,53	9.511
9	Candisari	38.793	39.892	78.685	4,66	97,25	12.031
10	Banyumanik	70.602	72.283	142.885	8,47	97,67	5.562
11	Gunungpati	48.718	48.973	97.691	5,79	99,48	1.805
12	Tembalang	93.041	93.649	186.690	11,06	99,35	4.224
13	Tugu	17.070	16.942	34.012	2,02	100,76	1.070
14	Ngaliyan	70.257	70.943	141.200	8,37	99,03	3.717
15	Mijen	39.179	39.289	78.468	4,65	99,72	1.363
16	Semarang Selatan	33.086	34.535	67.621	4,01	95,80	11.403
	TAHUN 2021	835.404	851.818	1.687.222		98,07	4.515
	TAHUN 2020	835.138	850.771	1.685.909	-	98,16	4.511
	TAHUN 2019	828.848	845.510	1.674.358	-	98,03	4.480
	TAHUN 2018	825.992	841.139	1.667.131	-	98,20	4.461
	TAHUN 2017	823.173	835.379	1.658.552	-	98,54	4.438

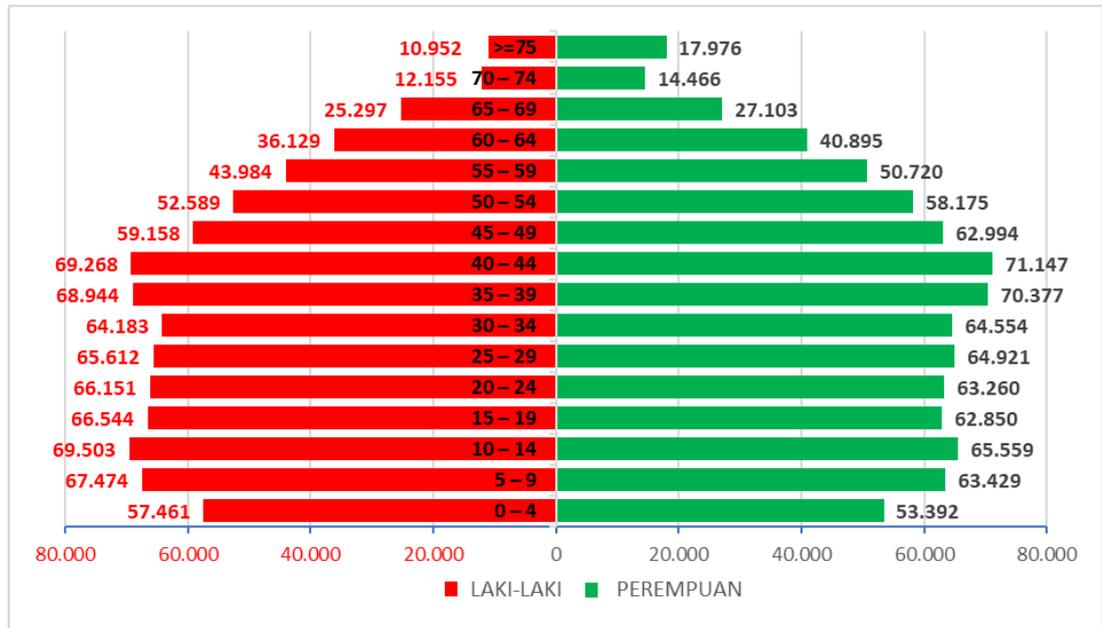
Sumber: Dispendukcapil (data diolah), 2022

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2021 sejumlah 1.202.455 jiwa (71,26%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 484.767 jiwa (28,73%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (dependency ratio). Rasio beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2021 adalah sebesar 40,31%. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.031 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	(%)
0 – 4	57.461	53.392	110.853	6,57
5 – 9	67.474	63.429	130.903	7,76
10 – 14	69.503	65.559	135.062	8,00
15 – 19	66.544	62.850	129.394	7,67
20 – 24	66.151	63.260	129.411	7,67
25 – 29	65.612	64.921	130.533	7,74
30 – 34	64.183	64.554	128.737	7,63
35 – 39	68.944	70.377	139.321	8,26
40 – 44	69.268	71.147	140.415	8,32
45 – 49	59.158	62.994	122.152	7,24
50 – 54	52.589	58.175	110.764	6,56
55 – 59	43.984	50.720	94.704	5,61
60 – 64	36.129	40.895	77.024	4,57
65 – 69	25.297	27.103	52.400	3,11
70 – 74	12.155	14.466	26.621	1,58
>=75	10.952	17.976	28.928	1,71
Jumlah	835.404	851.818	1.687.222	100

Sumber: Dispendukcapil, 2022



Gambar 2.2

### Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang dengan persentase terbesar adalah SLTA/MA sederajat sebesar 26,85 %, disusul dengan penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 14,41%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 13,25%, yang terdiri dari Diploma I/II sebesar 0,32%, Akademi/Diploma III/Sarjana sebesar 3,09%, Diploma IV/Strata I sebesar 8,89%, Strata II sebesar 0,9% dan S3 sebesar 0,05%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

Tabel 2.4.

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak / belum sekolah	458.448	27,17%
2	Belum tamat SD / sederajat	243.100	14,41%
3	Tamat SD/MI sederajat	98.802	5,86%
4	SLTP/MTs / sederajat	205.202	12,16%
5	SLTA/MA/ sederajat	452.938	26,85%
6	Diploma I / II	5.432	0,32%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	52.497	3,11%
8	Diploma IV/Strata I	154.384	9,15%
9	Strata II	15.457	0,92%
10	Strata III	962	0,06%
J U M L A H		1.687.222	100,00%

Sumber: SIPD, Dispendukcapil (data diolah) 2022

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (29,51%), mengurus rumah tangga (12,2%), wiraswasta (4,68%) dan PNS/TNI/POLRI (2,72%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 29,11% dan pelajar/mahasiswa sebesar 13,02%. Mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun secara persentase kecil namun ragamnya cukup banyak. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2021

JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
Karyawan Swasta	497.914	29,51%	Mekanik	284	0,02%
Mengurus RumahTangga	205.820	12,2%	Apoteker	342	0,02%
Wiraswasta	79.014	4,68%	Industri	196	0,01%
PNS/TNI/POLRI	45.847	2,72%	Wartawan	177	0,01%
Buruh Tani/Perkebunan	30.220	1,79%	Pengacara	178	0,01%
Buruh Harian Lepas	14.634	0,87%	Konstruksi	140	0,01%
Pensiunan	14.273	0,85%	Konsultan	139	0,01%
Guru	14.041	0,83%	Transportasi	129	0,01%
Pedagang	9.696	0,57%	Arsitek	103	0,01%
Petani/Pekebun/Peternak	8.047	0,48%	Notaris	125	0,01%
Karyawan BUMN	6.253	0,37%	Seniman	119	0,01%
Dosen	3.967	0,24%	Buruh Nelayan/Perikanan	59	0,00%
Dokter	3.023	0,18%	Akuntan	43	0,00%
Perawat	2.797	0,17%	Psikiater/Psikolog	39	0,00%
Nelayan/Perikanan	1.297	0,08%	Pilot	21	0,00%
Perdagangan	1.114	0,07%	Buruh Peternakan	17	0,00%
Karyawan Honorer	1.422	0,08%	Peneliti	14	0,00%
Karyawan BUMD	787	0,05%	Lainnya	29.888	1,77%
Bidan	655	0,04%	Belum/Tidak Bekerja	491.145	29,11%
Pelaut	488	0,03%	Pelajar/Mahasiswa	219.662	13,02%

Sumber: Dispendukcapil, diolah 2022

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2021 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

## 1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017–2021) mengalami peningkatan dari Rp. 160 292 032,03 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 205 385 442,81 Juta Rupiah pada tahun 2021. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 123 279 891,91 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 144 710 662,93 juta rupiah pada tahun 2021. Kontribusi terbesar disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 27,92%), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 26,70%) dan Perdagangan Besar dan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Eceran ( rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 13,63% ). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut – turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.  
Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kota  
Semarang Tahun 2017 – 2021

NO	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2017 – 2021 (dalam Juta Rupiah)				
			2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Juta	1 404 226,61	1 492 496,11	1 554 988,92	1 610 973,92	1 721 153,01
		Kontribusi kategori (%)	0,88	0,85	0,81	0,85	0,84
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Juta	280 760,74	292 189,96	342 417,72	359 638,42	373 922,13
		Kontribusi kategori (%)	0,18	0,17	0,18	0,19	0,18
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	44 267 345,24	47 723 226,29	52 553 750,15	54 017 573,15	58 850 643,47
		Kontribusi kategori (%)	27,62	27,24	27,46	28,62	28,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Juta Rupiah)	183 645,15	199 425,14	211 545,11	214 511,11	216 995,01
		Kontribusi kategori (%)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Juta Rupiah)	123 562,33	129 671,52	137 527,90	147 830,49	163 717,58
		Kontribusi kategori (%)	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	42 604 159,26	47 073 905,67	51 435 483,55	49 078 351,88	55 765 200,87
		Kontribusi kategori (%)	26,58	26,87	26,88	26,00	27,15

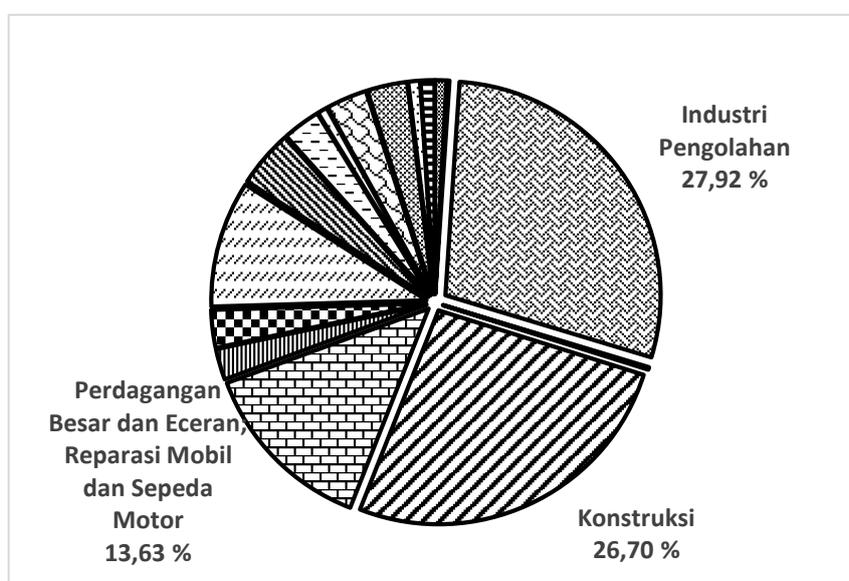
NO	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2017 – 2021 (dalam Juta Rupiah)				
			2017	2018	2019	2020*	2021**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	22 136 696,98	24 075 888,76	26 068 402,17	25 511 976,71	27 650 589,86
		Kontribusi	13,81	13,74	13,62	13,52	13,46
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	6 044 420,04	6 726 749,58	7 557 855,89	4 435 881,99	4 776 120,66
		Kontribusi kategori (%)	3,77	3,84	3,94	2,35	2,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Juta Rupiah)	5 480 082,35	6 032 076,65	6 386 727,80	5 247 888,72	5 682 097,62
		Kontribusi kategori (%)	3,42	3,44	3,34	2,78	2,77
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	11 850 881,04	13 291 170,23	15 015 401,77	18 085 585,13	19 045 862,69
		Kontribusi kategori (%)	7,39	7,59	7,85	9,58	9,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	7 156 233,30	7 657 051,28	8 038 379,59	8 155 860,66	8 718 462,78
		Kontribusi kategori (%)	4,46	4,37	4,20	4,32	4,24
L	Real Estate	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4 611 569,20	5 020 024,37	5 375 785,46	5 407 698,63	5 685 162,42
		Kontribusi kategori (%)	2,88	2,86	2,81	2,86	2,77
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1 073 775,25	1 246 818,43	1 407 451,29	1 324 332,84	1 379 617,05
		Kontribusi kategori (%)	0,67	0,71	0,74	0,70	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Juta Rupiah)	5 268 159,62	5 525 529,45	5 824 863,87	5 774 580,42	5 821 366,18
		Kontribusi kategori (%)	3,29	3,15	3,04	3,06	2,83
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4 584 482,55	5 091 568,75	5 565 051,86	5 567 513,73	5 659 479,92
		Kontribusi kategori (%)	2,86	2,91	2,91	2,95	2,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1 321 649,63	1 543 778,38	1 579 927,03	1 823 714,23	1 850 878,22
		Kontribusi kategori (%)	0,82	0,88	0,83	0,97	0,90
R,S, T, U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1 900 382,74	2 101 630,69	2 309 317,03	1 993 277,30	2 024 173,34
		Kontribusi kategori (%)	1,19	1,20	1,21	1,06	0,99
		Jumlah (dalam Juta Rupiah)	160.292.032,03	175.223.201,26	191.352.036,29	188.757.189,33	205.385.442,81
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2022

\*) Data sementara

\*\* Data Sangat Sementara

*Grafik. 1. Tiga Sektor Terbesar Rata-rata kontribusi PDRB ADHB di Kota Semarang Tahun 2017-2021*



Sedangkan untuk Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010), perkembangan dari tahun 2017-2021 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.7.  
Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Semarang Tahun 2017-2021

NO	Kategori / Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2017 - 2021				
			2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.037.036,63	1.068.074,36	1.089.568,62	1.106.075,31	1 141 636,28
		Kontribusi kategori (%)	0,84	0,81	0,78	0,79	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Juta Rupiah)	159.732,52	146.381,38	169.460,22	173.672,37	179 610,57
		Kontribusi kategori (%)	0,13	0,11	0,12	0,12	0,13
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	31.740.254,40	33.198.261,47	35 950 392,27	36.025.359,27	37 961 090,77
		Kontribusi kategori (%)	25,75	25,29	25,64	25,70	27,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Juta Rupiah)	153.250,03	161.535,48	171.171,05	174.545,29	176 286,48
		Kontribusi kategori (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Juta Rupiah)	110.513,45	114.494,74	120 682,92	123.675,86	131 244,82
		Kontribusi kategori (%)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	32.118.682,33	34.109.910,59	35 908 409,94	34 031 869,00	36 482 025,24
		Kontribusi kategori (%)	26,05	25,99	25,61	24,27	26,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Juta Rupiah)	18.264.412,76	19.393.066,60	20 520 786,24	19 756 742,60	21 039 604,89
		Kontribusi kategori (%)	14,82	14,77	14,64	14,09	15,01
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.490.252,35	4.847.426,76	5 320 835,61	3 184 249,46	3 424 046,83
		Kontribusi kategori (%)	3,64	3,69	<b>3,80</b>	2,27	2,44

NO	Kategori / Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2017 - 2021				
			2017	2018	2019	2020*	2021**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.025.898,01	4.320.765,67	4 547 720,42	3 770 093,27	4 050 073,13
		Kontribusi kategori (%)	3,27	3,29	3,24	2,69	2,89
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai(dalam Juta Rupiah)	12.400.830,53	13.921.172,35	15 505 401,77	18 654 548,87	19 253 896,53
		Kontribusi kategori	10,06	10,61	11,06	13,31	13,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	5.041.604,30	5.204.954,11	5 364 004,67	5 457 980,50	5 560 381,79
		Kontribusi kategori (%)	4,09	3,97	3,83	3,89	3,97
L	Real Estate	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.866.352,72	4.102.158,48	4 338 390,91	4 334 920,20	4 497 479,70
		Kontribusi kategori (%)	3,14	3,13	3,09	3,09	3,21
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	775.945,07	859.075,36	948 798,65	873 422,85	900 145,95
		Kontribusi kategori (%)	0,63	0,65	0,68	0,6	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.793.826,09	3.933.818,27	4 087 630,57	3 996 117,03	3 937 299,58
		Kontribusi kategori (%)	3,08	3,00	2,92	2,85	2,81
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	2.940.944,59	3.257.655,02	3 368 213,94	3 283 671,77	3 287 612,18
		Kontribusi kategori (%)	2,39	2,48	2,40	2,34	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Juta Rupiah)	922.443,85	1.052.235,24	1 068 683,44	1 197 887,27	1 212 980,65
		Kontribusi kategori (%)	0,75	0,80	0,76	0,85	0,87
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.437.912,28	1.575.376,69	1 719 366,12	1 464 881,26	1 475 247,54
		Kontribusi kategori (%)	1,17	1,20	1,23	1,05	1,02
TOTAL PDRB ADHK		Juta Rupiah	123.279.891,91	131.266.362,57	140 199 517,36	137 609 712,18	144 710 662,93
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2022 (Data Diolah)

\*) Data sementara

\*\* Data Sangat Sementara

Tabel 2.8.  
PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran  
Tahun 2017 – 2021

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019*	2020**	2021***
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51.059.821,81	54.188.402,68	57.078.162,34	54.271.355,00	55.713.035,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	734.925,42	796.112,91	896.563,97	871.924,03	914.209,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.160.552,80	13.637.316,79	14.298.744,36	13.597.027,50	13.896.630,00

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019*	2020**	2021***
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	82.252.090,47	86.262.472,38	90.264.290,69	82.578.486,07	87.457.759,00
5. Perubahan Inventori	301.878,79	249.478,45	568.794,90	1.100.876,35	812.982,00
6. Ekspor Barang dan Jasa	(24.229.377,38)	(23.867.420,64)	(22.897.163,60)	(14.809.956,00)	(14.083.953,00)
Produk Domestik Regional Bruto	123.279.891,91	131.266.362,57	140.209.392,66	137.951.302,07	144.710.663,00

Sumber : BPS Kota Semarang Data diolah, 2022

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum sama dengan konsep investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan (Koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan stok. Pada tahun 2021 PMTB memiliki porsi kontribusi kedua terbesar terhadap PDRB Kota Semarang yakni sebesar 60,43 %.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

Tabel 2.9.  
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2017-2021

Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,64	2,99	2,01	1,51	3,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,27	-8,36	15,77	2,49	3,42
C	Industri Pengolahan	5,84	4,59	8,29	0,21	5,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,21	5,41	5,96	1,97	1,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,29	3,60	5,40	2,48	6,12
F	Konstruksi	6,37	6,20	5,27	-5,23	7,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,63	6,18	5,82	-3,72	6,49
H	Transportasi dan Pergudangan	7,13	7,95	10,13	-40,16	7,53
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,50	7,32	5,25	-17,10	7,43
J	Informasi dan Komunikasi	10,43	12,26	11,38	20,31	3,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	3,24	3,06	1,75	1,88
L	Real Estate	8,56	6,10	5,76	-0,08	3,75
M,N	Jasa Perusahaan	9,87	10,71	9,50	-7,94	3,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,46	3,69	3,91	-2,24	-1,47
P	Jasa Pendidikan	8,75	10,77	3,39	-2,51	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan	12,71	14,07	1,56	12,09	1,26

Kategori/Sub Kategori	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Kegiatan Sosial					
R,S,T,U Jasa lainnya	9,25	9,56	9,14	-14,80	0,71
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK	6,70	6,48	6,81	-1,85	5,16

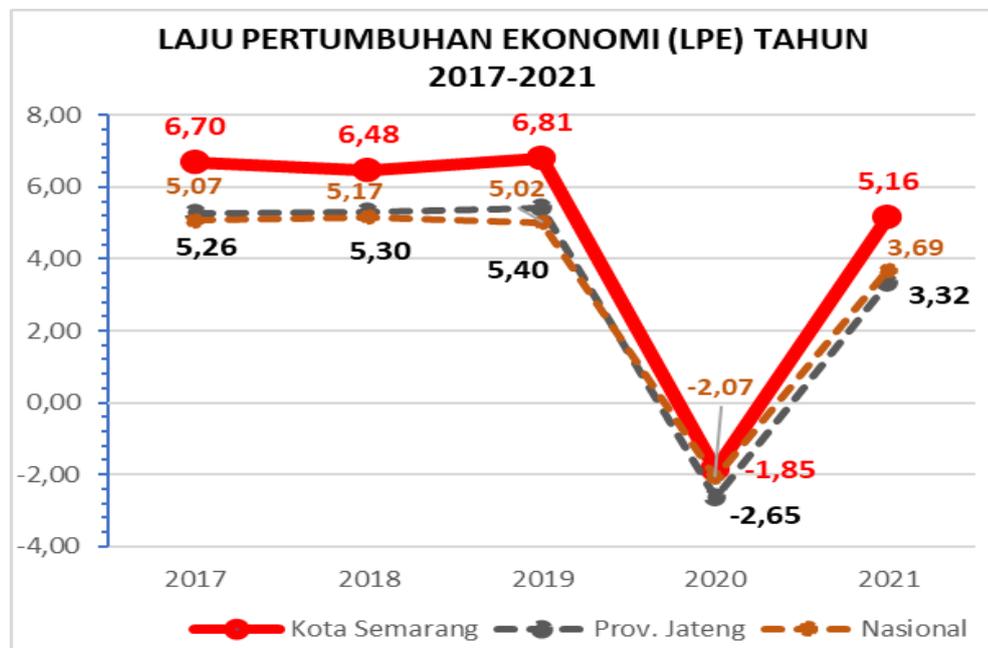
Sumber : BPS Kota Semarang, 2022 (Data diolah)

\*) Data sementara

\*\* Data Sangat Sementara

Rata-rata pertumbuhan tiga terbesar terjadi pada lapangan usaha Informasi Komunikasi sebesar 11,52%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,34%, serta Jasa Perusahaan sebesar 5,04%. Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 7,53%, disusul sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum sebesar 7,43% serta sektor Konstruksi sebesar 7,20%.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2017–2021) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,61 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Tidak hanya Kota Semarang, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi di kabupaten/kota lain bahkan sampai ke tingkat nasional. Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2016-2020 :



Sumber : BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2022 (Data diolah)

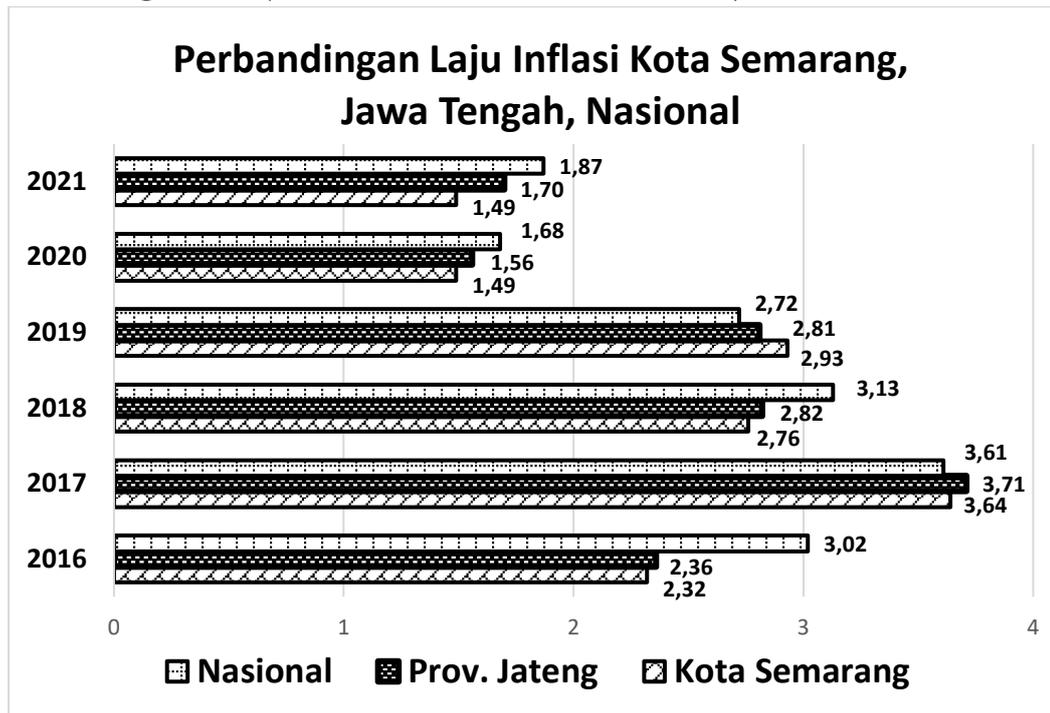
Gambar 2.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng & Nasional Tahun 2017 – 2021

## 2. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta

akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Inflasi Kota Semarang pada tahun 2016-2021 sangat fluktuatif, khususnya pada Tahun 2017 sebagai inflasi tertinggi sebesar 3,64 % sempat menurun dan kembali naik pada akhir tahun 2019 (kasus covid-19 pertama di Wuhan, namun berdampak global) dan bertahan pada angka 1,49% pada tahun 2020 dan 2021. Selama tujuh tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang meski kondisi pandemi pada 2 tahun belakangan ini lebih disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).



Sumber : BPS Prov. Jateng, BPS 2022

Gambar 2.4

Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021

### 3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan proyeksi jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

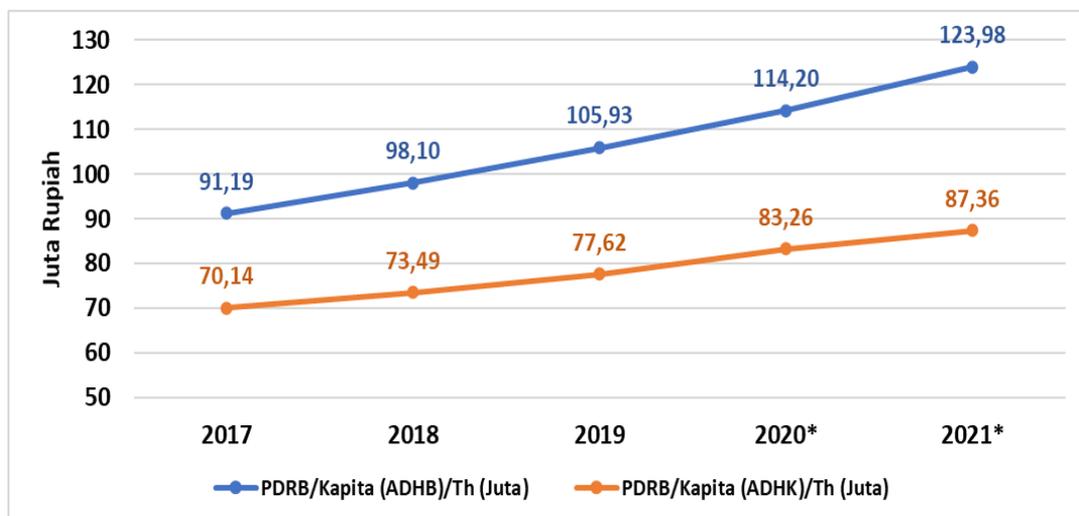
Tabel 2.10.

## Pendapatan per kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun 2017 - 2021

Uraian	Rp (000.000)				
	2017	2018	2019*	2020*	2021*
PDRB ADHB (Juta)	160 292 032,03	175 223 201,26	191 352 036,29	188 757 189,33	205 385 442,81
PDRB ADHK (Juta)	123 279 891,91	131 266 362,57	140 199 517,36	137 609 712,18	144 710 662,93
PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)	91,19	98,10	105,93	114,20	123,98
PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)	70,14	73,49	77,62	83,26	87,36

Sumber : Data diolah dari BPS Prov Jateng , Disduk Capil, 2022

Dari data di atas, diperoleh pendapatan perkapita atas dasar berlaku (memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 123,98,- juta rupiah per jiwa/tahun. Trend PDRB perkapita yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun dengan asumsi sebaran kemakmurannya merata.



Sumber : BPS Kota Semarang, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.5

## Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2017-2021

## 4. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 ( $0 < \text{Koefisien Gini} < 1$ ).

Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,35$  → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$  → pemerataan / ketimpangan sedang
- $G > 0,50$  → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Perkembangan indeks Gini Kota Semarang menunjukkan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 masih bertahan sebesar 0,35 sempat menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,31 dan selanjutnya kembali naik sehingga data sementara sebesar 0,33. Besaran indeks Gini sebesar 0,33 menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat Kota Semarang termasuk kategori tinggi. Dan keadaan ini jauh dibawah rata-rata gini ratio Jawa Tengah dan Nasional. Rata-rata gini ratio Kota Semarang sebesar 0,334, sedangkan rata-rata gini ratio provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing- masing sebesar 0,369 dan 0,396.



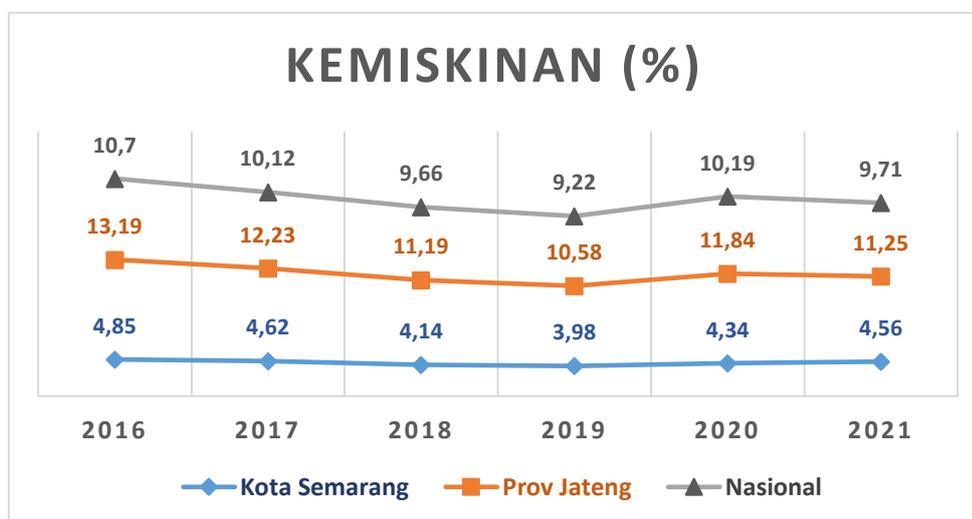
Sumber : BPS, BPS Kota Semarang, 2022 ( Data diolah )

Gambar 2.6

Gini Ratio Nasional, Prov Jateng, Kota Semarang Tahun 2011 – 2020

## 5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya cenderung menurun sejak tahun 2015 – 2019, namun dikarenakan adanya wabah pandemi yang juga berimbas pada menurunnya perekonomian mengakibatkan persentase penduduk miskin di Kota Semarang sedikit meningkat menjadi sebesar 4,56 % di Tahun 2021, meski demikian angka ini masih yang terendah dibandingkan angka kemiskinan kab/kota lain di Jawa Tengah. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi, mulai dari pemberian bansos, relaksasi kredit/pembiayaan/pajak, juga refocusing anggaran di daerah baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya, namun dampak pukulan ekonomi masih tidak bisa dihindarkan. Pada periode enam tahun terakhir (2016-2021), terlihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebagai berikut:

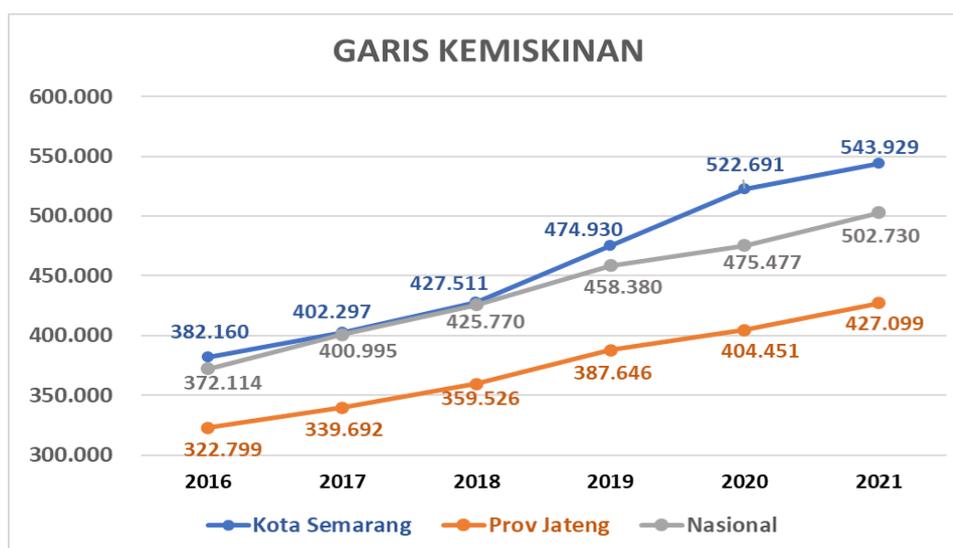


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.7

Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Provinsi Jateng dan Nasioanl Tahun 2016 – 2021

Garis Kemiskinan sebagai garis batas ukuran seseorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak, merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok lebih tinggi (diatas) garis kemiskinan , maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin, demikian pula sebaliknya. Dilihat dari perbandingan Garis Kemiskinan antara Kota Semarang , Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, terlihat bahwa batas ukuran kemiskinan di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Artinya orang miskin di Kota Semarang, belum tentu tergolong miskin jika diukur menggunakan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

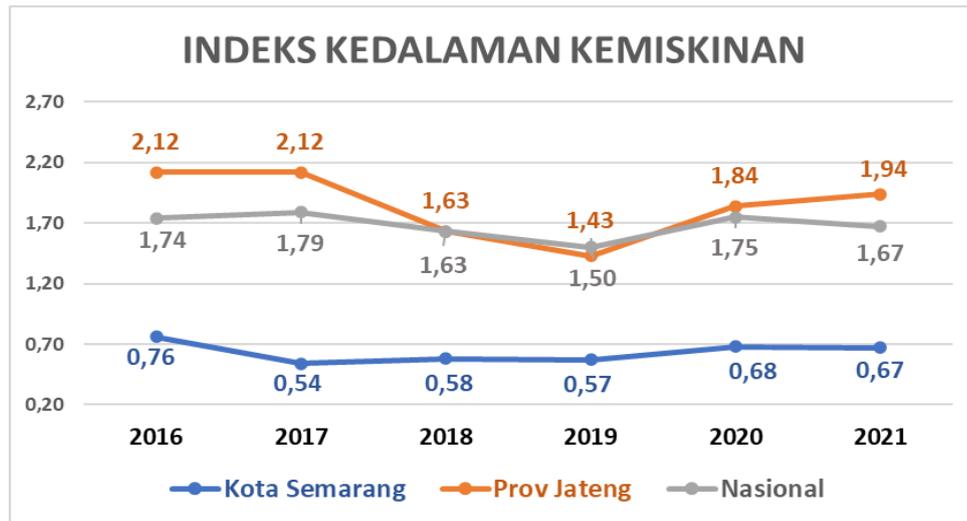


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.8

Garis Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasioanl Tahun 2016 – 2021

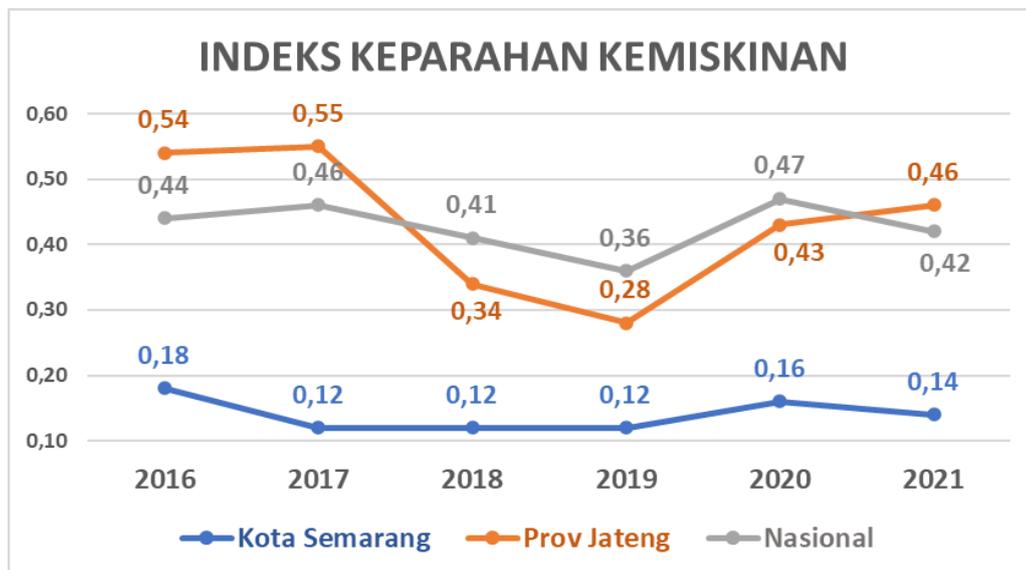
Indeks Kedalaman Kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Gambaran Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kota Semarang lebih rendah, dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Artinya mengentaskan warga miskin di Kota akan lebih mudah dilakukan karena kesenjangan terhadap garis kemiskinan tidak terlalu jauh.



Gambar 2.9

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016 – 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama tahun 2016-2021, indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang selalu menduduki peringkat terbawah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Gambar 2.10

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016 – 2021

Dengan terbitnya UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Tabel 2.11.

Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kota Semarang				Prov Jateng		Nasional	
		Versi Pemkot Smg/ BDT Kemensos		Versi BPS		Versi BPS		Versi BPS	
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	2017	303.715	18,3	80,86 ribu	4,62	4.197,49 ribu	12,23	26 582,99 ribu	10,12
2	2018	280.211	16,8	73,65 ribu	4,14	3.867,42 ribu	11,19	25 674,58 ribu	9,66
3	2019	229.564	13,8	71,97 ribu	3,98	3.679,40 ribu	10,58	24 785,87 ribu	9,22
3	2020	271.396	16,15	79,58 ribu	4,34	3 980,90 ribu	11,84	27 549,69 ribu	10,19
4	2021	407.363	24,23	84,45 ribu	4,56	3 934,01 ribu	11,25	26 503,65 ribu	9,71

Sumber : Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015, [Jateng.bps.go.id](http://Jateng.bps.go.id) ; [bps.go.id](http://bps.go.id) , Dinas Sosial ,2022

Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Kota Semarang, data update Januari 2022 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2021 menyentuh angka 4,56 % atau sebesar 84,45 ribu jiwa dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 3.934,01 ribu jiwa (11,25%). Sedangkan meningkatnya angka kemiskinan berdasarkan data BDT menjadi sebesar 24,23% pada tahun 2021 disebabkan terdapat kebijakan dari KL terkait angka DTKS pada tahun 2021 adalah angka kesejahteraan sosial yang meliputi: usulan daerah, fitur usul sanggah aplikasi cek bansos, data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda dan *geo tagging* data spasial dari citra satelit. Selain itu juga data penerimaan bantuan dari KL lain selain Kemensos.

Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam *Sustainable Development Goals* (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

## 6. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Disisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 5 tahun dari tahun 2017 – 2021, jumlah tindak pidana menonjol (*crime index*) menurut jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12.

Jumlah Tindak Pidana Menonjol (*Crime Index*) Menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2017 – 2021

Jenis Tindak Pidana	Jumlah di Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Pencurian dgn pemberatan	4	1	1	0	14
b. Pencurian ranmor	121	83	19	33	31
c. Pencurian dgn kekerasan	10	10	2	4	7
d. Penganiayaan	10	13	30	19	38
e. Pembunuhan	1	5	1	3	1
f. Perkosaan	1	1	2	0	0
g. Uang palsu	0	3	0	0	NA
h. Narkotika	1	4	NA	NA	NA
i. Perjudian	0	0	0	0	1
j. Pemerasan / Ancaman	1	1	4	3	3
k. Lainnya	1479	1.322	1.092	1.268	1.084
Jumlah	1.628	1.443	1.151	1.330	1.253

Sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2022 (Data Diolah)

Dalam kurun tahun 2017-2021, dapat disimpulkan bahwa jumlah angka kriminalitas di Kota Semarang mempunyai kecenderungan menurun pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 1.253 kejadian. Jika pada tahun 2020 kasus paling tinggi terjadi pada pencurian motor sebanyak 33 kasus, di tahun 2021 justru terjadi pada tindakan penganiayaan yang mencapai 38 kasus, selain itu juga terjadinya peningkatan pada kecelakaan lalu lintas yang menjadi salah satu komponen pada jenis tindak pidana lainnya.

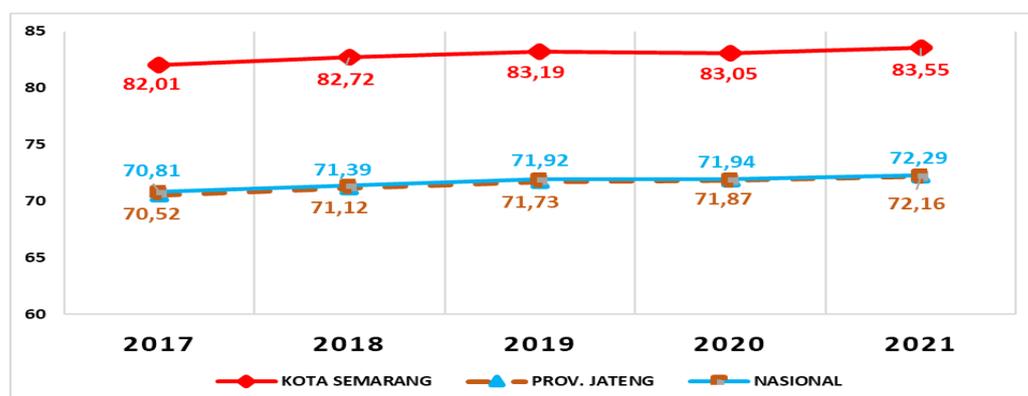
### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan, kecuali dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dari semula 83,19 menjadi 83,05 namun kembali naik di tahun 2021 menjadi 83,55. IPM yang sempat merosot di tahun 2020 dan kembali naik di tahun 2021 menunjukkan keseriusan

pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang terutama di masa pandemi Covid-19.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.11

### Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2017 - 2021

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Tabel 2.13.

### Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata2 Lama Sekolah (RLS)	Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)
2017	77,21	15,20	10,50	14.334,-
2018	77,23	15,50	10,51	14.895,-
2019	77,25	15,51	10,52	15.550,-
2020	77,34	15,52	10,53	15.243,-
2021	77,51	15,53	10,78	15.425,-

Sumber : BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian  $\geq 80$ . Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Semarang antara lain: selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat termasuk diantaranya wajib penggunaan masker apabila ditempat umum, menghindari kerumunan yang berpotensi menjadi penularan virus, pemberian vaksin sesuai ketentuan pemerintah, karena hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta aksara dan penurunan angka putus sekolah. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan serta sarpras penunjang terkait dengan pembelajaran daring harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan

pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli, apalagi selama pandemi sektor ini banyak mengalami kelesuan, di samping sektor hiburan, wisata, serta sektor ekonomi lainnya.

b. Kesempatan kerja

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Merupakan perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan pada akhirnya berimbas pada sektor ketenagakerjaan, yaitu mulai dari tidak bekerja sampai dengan pengurangan jam kerja. Selain itu pandemi menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang akhirnya membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari tempat kerja dengan jam kerja yang monoton.

Untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi, perlu mempersiapkan SDM pekerja sebaik mungkin, meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi yang tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja paska pandemi.

Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% dari sebelumnya yang hanya sebesar 4,54% dan kembali menurun di Tahun 2021 menjadi sebesar 9,54%. Secara umum TPT Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,95% dan juga nasional yang sebesar 6,49%. Selain dampak pandemi Covid-19 yang secara global terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga banyak perusahaan untuk bisa tetap mempertahankan usaha diantaranya dengan mengurangi Tenaga Kerja selain adanya pembatasan kegiatan usaha dengan penerapan protokol kesehatan. Di luar pandemi covid penyebab tingginya TPT di Kota Semarang juga disebabkan minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Semarang guna memperbaiki kesejahterannya. Namun diantaranya kurang berbekal dengan ketrampilan dan pendidikan yang memadai. Sementara itu dari komposisi profesi/pekerjaan penduduk kota Semarang terdapat peningkatan untuk jenis Mengurus Rumah Tangga dan Pelajar/Mahasiswa yang bukan sebagai komponen penyumbang Angkatan Kerja. Selain itu juga kemungkinan metodologi pendataan yang perlu pendalaman, khususnya pekerja sektor non formal (online shop dll). Sebagaimana diketahui bersama saat ini kecenderungannya justru sektor non formal yang lebih mendominasi, karena dinilai lebih praktis dan menjanjikan untuk konsumen perkotaan. Hal inilah diantaranya yang

menjadikan TPT Kota Semarang angkanya tergolong tinggi dalam lima tahun terakhir.

## 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran di atas 65%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga.

Perkembangan TPT dan TPAK dari tahun 2017 hingga 2021 secara lengkap tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.14.

Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Jateng	Kota Semarang	Prov. Jateng	Kota Semarang
2017	4,57	6,61	69,11	69,87
2018	4,51	5,29	68,56	65,56
2019	4,49	4,54	68,62	66,42
2020	6,48	9,57	69,43	69,89
2021	5,95	9,54	69,58	69,41

Sumber: BPS Prov. Jateng, 2022

Tabel 2.15.

Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja:					
Bekerja	899.796	872.827	907.937	925.963	936.076
Pengangguran Terbuka	63.700	48.724	43.198	98.001	98.718
Total Angkatan Kerja	963.496	921.551	951.135	1.023.964	1.034.794

Sumber: BPS Prov. Jateng 2022

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal berbasis vokasi.

c. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Semarang dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang positif. Namun mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, hal ini disebabkan AHH perempuan merupakan satu- satunya variable IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki, sedangkan variable komposit lainnya lebih rendah. Pada tahun 2017 nilai IPG Kota Semarang mencapai 95,69% terus meningkat hingga kemudian menjadi 95,55% pada tahun 2019, sempat menurun menjadi 95,49% di tahun 2020 dan akhirnya kembali meningkat pesat menjadi sebesar 95,67% dan pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jateng dan IPG Nasional. Hal ini menandakan bahwa telah terdapat kesetaraan dan keadilan gender dalam hasil pembangunan manusia di Kota Semarang.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.12

Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2021

Meskipun IPG Kota Semarang pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 95,49 % , namun lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18% dan Nasional sebesar 91,06% . Dibandingkan 5 Kota Lainnya di Jawa Tengah, Kota Semarang menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Surakarta yang mencapai angka 96,84% seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Prov Jateng, 2022

Gambar 2.13

Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota sekitar di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021

d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan perkembangan fluktuatif dari sebesar 76,53 pada tahun 2015 dan 2016 turun menjadi 75,22 di tahun 2017 dan kemudian naik kembali menjadi 75,55 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 capaian IDG Kota Semarang kembali turun menjadi 74,57, sedangkan IDG Nasional justru meningkat tajam menjadi sebesar 75,24 sebagai pencapaian tertinggi selama kurun waktu 2015-2019. Progres IDG dari tahun 2015-2019 terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Nasional, BPS Provinsi 2022

Gambar 2.14

Perkembangan IDG Kota Semarang , Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 -2021

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota; serta 2) Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang dalam hal ini terbatas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kab/Kota.

Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### a. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan, diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan tahun 2021:

##### a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA dari tahun 2014 sampai tahun 2017 cenderung meningkat, meski kembali menurun pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia masuk SD/MI tidak kurang dari 7 tahun. Sehingga orang tua cenderung menunda pendidikan PAUD, dan ketika melanjutkan ke jenjang SD dapat memenuhi kriteria batas usia memasuki Pendidikan dasar pada usia 7 tahun. Namun demikian APK PAUD usia 3-6 tahun pada tahun 2020 sebesar 83,01 % relative tetap jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan menurun drastis pada tahun 2021 karena pandemi covid, dimana balita termasuk dalam kelompok rentan, sehingga orang tua siswa enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara langsung menjadikan APK PAUD 2021 menjadi sebesar 71,33%

Kondisi pandemi tidak menghalangi kinerja capaian indikator SDG's yang sama pada tujuan ke-4 yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Dengan kebiasaan baru proses belajar mengajar ini dilakukan melalui metode daring untuk mengenalkan IT sejak dini maupun dengan kunjungan guru (bagi yang tidak memungkinkan mengikuti pelajaran secara daring). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak

usia dini mengalami peningkatan. Disisi lain persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 sebesar 61,88% pada tahun 2021, menurun jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2020 yang sebesar 72,87% yang diantaranya telah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu kiranya peningkatan kesejahteraan dan kapasitas pendidik PAUD, sehingga meningkatkan minat dan kualitas pendidikan di jenjang PAUD yang terdapat 208 lembaga PAUD di Kota Semarang telah berakreditasi B.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar Sembilan tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan.

APK dan APM SD/MI menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 109,88% dari tahun 2020 yang sebesar 111,67% dengan angka putus sekolah sebesar 0,01% dan angka kelulusan sebesar 99,98%. Persentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 96,43% pada tahun 2020, menurun menjadi sebesar 90,24% karena telah memasuki purna tugas.

Demikian pula APK SMP/MTs pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 113,67% dari tahun 2020 yang sebesar 115,59%. Hal yang sama juga terjadi pada APM SMP/MTs yang juga sedikit menurun menjadi sebesar 84,51%. Sedangkan kinerja terbaiknya mampu menekan Angka Putus Sekolah sehingga menjadi 0,02% dari tahun sebelumnya sebesar 0,04%, sedangkan angka kelulusan masih relative sama yaitu sebesar 99,95% dengan angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sebesar 103,14%.

Pelayanan urusan Pendidikan di bidang sarana Gedung sekolah juga menjadi perhatian bersama. Untuk tahun 2021, baik kondisi bangunan sekolah SD/MI maupun SMP/MTS yang kondisinya baik semuanya menurun dimana untuk persentase jenjang SD dan SMP masing-masing adalah 84,80% dan 91,62%. Hal ini disebabkan anggaran untuk perbaikan bangunan dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19, sehingga untuk selanjutnya perlu untuk menjadi prioritas agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

c. Pendidikan Non Formal Pendidikan,

Pendidikan Non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Semarang sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang sekolah dasar sebanyak 21 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 21 sekolah, jumlah kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B (18 lembaga), jumlah LKP rujukan (5 lembaga) dan jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi (20 orang) telah memenuhi target yang ditetapkan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16.  
Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Pendidikan dasar:					
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	42,10*	37,89	34,19	34,19	34,19
b.	Rasio guru/ murid	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18
c.	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32
1.2	Pendidikan Menengah					
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
b.	Rasio guru terhadap murid	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30
d.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) (Tujuan 4.6)	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96
1.3	PAUD					
a.	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA	47.039*	46.492	47.595	NA	NA
1.4	Angka Putus Sekolah					
a.	SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b.	SMP/MTs	0,04	0,03	0,02	0,04	0,02
1.5	Angka Kelulusan					
a.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,98	99,95	99,94	99,95	99,95
b.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	102,38	106,1	103,14	103,47	103,14
c.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)					
	- Jenjang PAUD	67	71,63	80,44	72,87	61,88
	- Jenjang SD / MI	90,26	88,21	90,6	96,43	90,24
	- Jenjang SMP/MTs	86,54	85,15	86,98	96,95	86,37
Indikator SDGs						
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	91,8	92,08	96,1	97,66	95,50
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4 Target1)	83,76	83,57	84,88	84,88	84,51

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	SD/MI terkreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	37,14	36,52	34,46	34,46	34,46*
4	SD/MI terkreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	54,86	56,31	61,39	61,39	60,00
5	SMP/MTs terakreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	30,41	32,72	27,87	27,87	27,97*
6	SMP/MTs terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	53	57,14	61,75	61,75	61,54
7	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	113,23	112,76	110,59	111,67	109,88
8	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	116,35	116,21	114,41	115,59	113,67
9	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,49	10,51	10,52	10,53	10,78
10	APK PAUD 3 – 6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	84,72	84,72	83,01	83,01	71,33
11	Rasio APM P/L SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 5)	92,98	92,96	93,4	93	93,42
12	Rasio APM P/L SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 5)	93,11	93,17	93,22	93	93,50
13	Persentase Guru TK Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	97	97	97	97	97*
14	Persentase Guru SD Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	98	98	98	98	98*
15	Persentase Guru SMP Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	97	97	97	97	97*

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2022

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Urusan Pendidikan pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17.  
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan  
Tahun 2018-2021

No	Indikator SPM	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD : Jml Peserta Didik Usia 5-6 Tahun ----- x 100 %	87,82 %	60,79%	86,50%	107,97 %
		<u>46.492</u>	<u>31.429</u>	<u>44.233</u>	<u>54.234</u>
	Jml Penduduk Usia 5-6 Tahun	52.940	51.705	51.135	50.231
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs ) : Jml Peserta Didik Usia 7-15 Th ----- x 100 %	80,88 %	79,48%	77,95%	95,71%
		<u>190.684</u>	<u>187.578</u>	<u>185.604</u>	<u>231.952</u>
	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th	235.771	236.011	238.093	242.351
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan : ----- x 100 %	0,38 %	7,13 %	6 %	26,22%
		<u>1.154</u>	<u>3.225</u>	<u>1.650</u>	<u>1.617</u>
		303.281	45.235	27.501	6.166

	Jml Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 thn ----- X 100% Jml penduduk Usia 7-18 th yang blm menyelesaikan Pend Dasar dan atau Menengah				
--	---	--	--	--	--

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Pendidikan, Bappeda, 2022

Dari data di atas, untuk ketiga indikator SPM Bidang pendidikan kewenangan Kab/Kota, terlihat bahwa masih terdapat anak siswa pendidikan dasar, Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang belum terlayani. Hal tersebut karena sampai dengan saat ini masih dilakukan sinkronisasi dan validasi data siswa sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodik) dan Kementerian Agama (EMIS), data Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) serta Data Kementerian Sosial (BDT, serta pendataan jumlah usia sekolah yang tidak bersekolah di jenjang SMA/MA juga Paket C. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaiannya diantaranya menambah ruang kelas dan pembangunan sekolah baru (SMPN 45) untuk menambah daya tampung peserta didik. Selain itu juga pemberian beasiswa miskin dan miskin berprestasi, pendampingan BOS SD/MI dan SPM/MTS Swasta, BOP Kesetaraan serta kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan minat peserta didik kesetaraan.

b. Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada, Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya:

Sebagai Kota Sehat Swasti Saba Wistara 2 sebagai penghargaan tertinggi pada level Penilaian Kota Sehat. Kota dengan *Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan*. Selain itu sebagai Kota dengan aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak Terbaik dengan tajuk “SANGPISAN” SAYANG dan DAMPINGI Kesehatan Ibu dan Anak Kota Semarang (SANGPISAN), *Universal Health Coverage (UHC)*. Terkait percepatan penanggulangan stunting di Kota Semarang telah banyak inovasi program yang dilakukan diantaranya: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan Pembuatan menu Balita dan Ibu Hamil. Selain itu juga dilakukan penyusunan Aplikasi TRENGGINAS untuk perekaman dan kampanye penanggulangan stunting menggunakan smartphone, pelacakan dan pendampingan 1000 HPK secara Door To Door oleh NUTRIMAS, Pemberian Makanan Tambahan dan lainnya.

Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2017-2021, diantaranya:

Tabel 2.18.

Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,23	0,2	0,21	0,22	0,229
2	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,53	1,6	1,6	2	2
3	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	1,6	1,65	2,03	2,16	2,21
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	2,34	2,59	2,78	2,96	2,94

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	99,98	99,98	100	100	100
Indikator SDGs						
7	Cakupan kelurahan UCI (%) (1.4.1.(b))	100	100	100	98,7	100
8	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
9	Angka keberhasilan pengobatan TB + (3. 3.1(b))	90,05	83,5	83,31	69	78,07
10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,43	100	100	85,93	100
12	Cakupan puskesmas (%)	231,25	231,25	231,25	231,25	231,25
13	Cakupan pembantu puskesmas	20,33	20,9	21,46	21,46	21,46
14	Prevalensi balita gizi buruk (1.3.1.(a))	0,28	0,38	0,33	0,35	0,34
15	Cakupan pertolongan persalinan di faskes (1.4.1.(a))	99,98	100	100	100	100
16	rasio akseptor KB per 1000 PUS (1. 4.1.(c))	78,61	78,1	77,47	76,94	73,88
17	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (2.1.1.(a))	2,47	2,81	2,66	2,51*	3,25
18	% kasus stunting anak dibawah lima tahun (Balita) (2. 2.1*)	2,63	2,5	2,57	3,13	3,10
19	% kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) (2. 2.1.(a))	2,51	2,73	2,48	2,48	2,81
20	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gizi krang dan obesitas)(2.2.1.(a))	2,1	2,1	3,3	3,3	5,35
21	Pavelensi Ibu hamil anemia (2.2.2.(a))	18,34	17,24	15,05	15,51	12,84
22	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif (2 2 .2.(b))	67,33	68,22	69,39	71,31	71,91
23	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (3. 1.1*)	100	100	95,8	100	94,24
24	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (3. 1.2*)	88,28	75,77	75,8	71,35	95,32
	Jumlah kasus kematian ibu	23	19	18	17	21
25	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (3. 1.2.(a))	99,98	99,98*	100	100	100
26	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)( 3.2.1*)	99,98	99,98*	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
27	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.( 3. 2.1*)	8,56	7,46	7,29	7,01	6,95
28	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir(3.2.2*)	100	95,99	100	100	100
29	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.( 3.2.2(a))	7,5	6,38	6,15	6,09	6,04
30	Kelurahan UCI (3. 2.2.(b))	100	100	100	98,7	100
31	Prevalensi HIV (3. 3.1(a))	0,064	0,081	0,098	0,111	0,123
32	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (3. 3.1(b))	104,5	104,5	106	79,18	100
33	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk(3.3.1(b))	338	338	415	293	260
34	Prevalensi penduduk malarian per 1000 penduduk (3.3.3*)	0,02	0,03	0,03	0,018	0,035
35	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100
36	Jumlah Kasus Hepatitis B (3. 3.4.(a))	177	177	424	441	406
37	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	33	33	13	8	10
38	Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (3. 4.1.(b))	24,75	95,41	97,51	88,6	100
39	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (3..4.2(a))	100	100	119,7	100	100
40	cakupan peserta KB aktif (3.7.1*)	76,34	78,1	77,47	76,94	76,94

Sumber: BPS & LKPJ Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19.  
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2018 -2021

No	Indikator SPM	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: = $\frac{\text{Jml bumil yg dilayani SS}}{\text{Jml sasaran ibu hamil}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%
		$\frac{26.131}{26.131}$	$\frac{25.655}{25.655}$	$\frac{23.885}{23.885}$	$\frac{22.040}{22.040}$
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin = $\frac{\text{Jml ibu bersalin yg dilyani SS}}{\text{Jml sasaran ibu hamil}} \times 100 \%$	100%	100%	100 %	100%
		$\frac{25.035}{26.131}$	$\frac{23.796}{23.796}$	$\frac{23.885}{23.885}$	$\frac{22.040}{22.040}$
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir = $\frac{\text{Jml BBL yg dilayani SS (KN1)}}{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup)}} \times 100\%$	99.99%	100 %	100,02%	100%
		$\frac{25.073}{25.074}$	$\frac{25.073}{25.073}$	$\frac{23.829}{23.825}$	$\frac{22.030}{22.030}$

No	Indikator SPM	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
4	Pelayanan Kesehatan Balita = $\frac{\text{jml balita yg dilayani SS}}{\text{Jml balita di wilayah kerja}} \times 100\%$	100,03% $\frac{132.634}{132.600}$	100 % $\frac{100.292}{100.292}$	88,78 % $\frac{65.137}{73.369}$	100% $\frac{100.403}{100.403}$
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar $\frac{\text{jml anak usia Dikdas yg dilayani SS}}{\text{jml semua anak usia dikdas}} \times 100$	$\frac{100\%}{\text{(kelas VII)}}$ $\frac{49.873}{49.873}$	100% $\frac{218.841}{218.841}$	97,81% $\frac{215.016}{219.821}$	100% $\frac{227.547}{227.547}$
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif = $\frac{\text{usia pengunjung 15-59 tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun}} \times 100 \%$	100,95% $\frac{584.705}{578.607}$	103,25% $\frac{1.157.214}{1.194.808}$	100% $\frac{1.014.944}{1.014.944}$	100% $\frac{1.112.588}{1.112.588}$
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut = $\frac{\text{usia pengunjung > 60 tahun}}{\text{Jumlah WN usia > 60}} \times 100 \%$	99,83%	100,49% $\frac{179.859}{178.972}$	85,98% $\frac{154.847}{180.096}$	100% $\frac{184.027}{184.027}$
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = $\frac{\text{jml pendrt hipert > 15 th}}{\text{Jml est penderita hipert >15th}} \times 100 \%$	95,41%	97,51% $\frac{232.180}{238.120}$	88,60% $\frac{255.727}{288.619}$	100% $\frac{289.903}{289.914}$
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = $\frac{\text{jml penderita DM > 15 th}}{\text{jml est penderita DM usia > 15th}} \times 100 \%$	164,23%	97,49% $\frac{38.899}{39.902}$	100% $\frac{40.303}{40.303}$	100% $\frac{40.483}{40.483}$
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGI) = $\frac{\text{jml ODGJ berat di wil kerja kota}}{\%}$ Jml ODGJ Berat berdsr proyeksi wil kerja kota	100%	119,70% $\frac{2.497}{2.086}$	100 % $\frac{4.172}{4.172}$	100% $\frac{4.215}{4.215}$
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) = $\frac{\text{jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa}}{\%}$ Jml orang yang terduga TBC kurun waktu 1 th	104,52%	106% $\frac{14.7351}{13.901}$	34,55 % $\frac{7.770}{22.487}$	100% $\frac{15.853}{15.853}$
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV = $\frac{\text{jml org dgn resiko terinfeksi HIV yg mendpt pelynan sesuai stndar}}{\%}$ Jml orang dgn resiko terinfeksi HIV di Kab/Kota	102,97%	103,77% $\frac{42.253}{40.716}$	98,81% ----- 38.136	99,72% ----- 27.790 ----- 27.869

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Kesehatan, Bappeda, 2021

Dari data diatas, penurunan stunting baik pada balita kurang dari 5 tahun maupun kurang dari 2 tahun , juga prevalensi kekurangan gizi balita , kinerjanya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu diharapkan perkuatan di

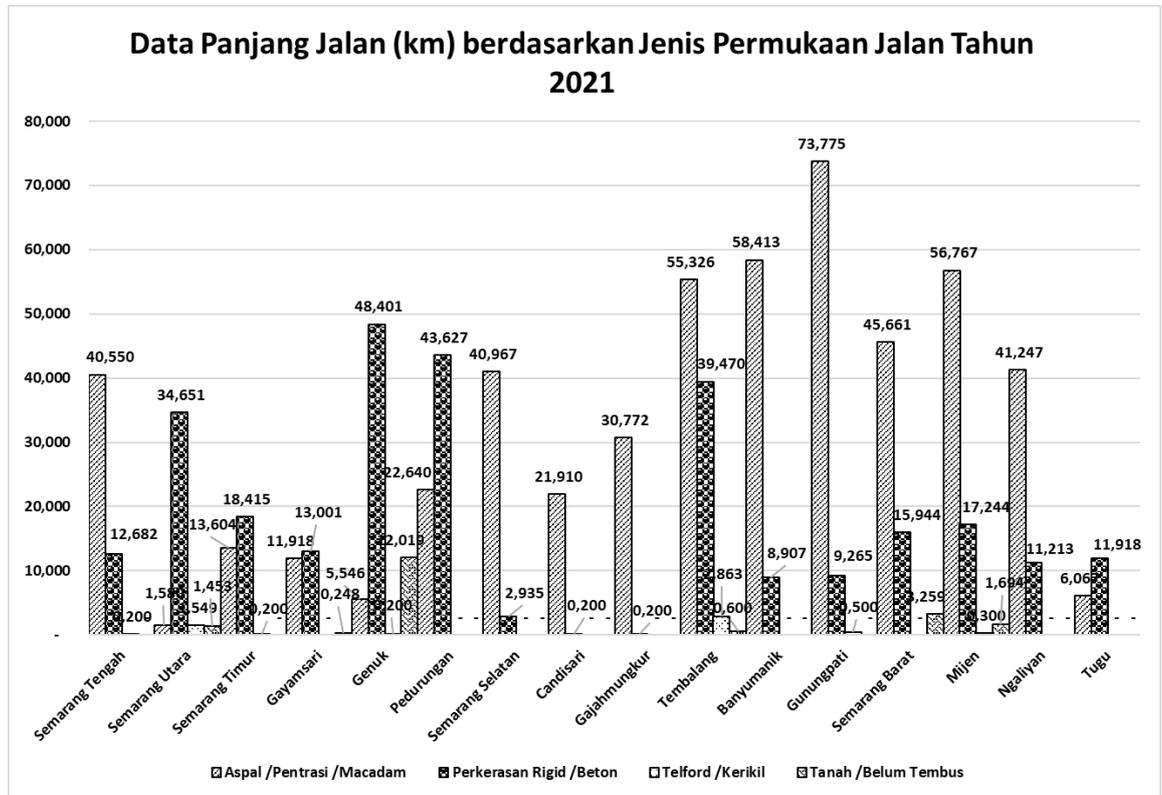
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan untuk mencapai target prevalensi stunting yang ada. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya: meningkatkan cakupan pengukuran dan pelaporan melalui e-PPGBM ; Intervensi dilaksanakan secara konvergen dengan memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk penyediaan akses makanan bergizi seimbang, penyediaan infrastruktur dasar rumah sederhana layak huni, sanitasi, dan air bersih bagi keluarga berisiko stunting dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang kurang optimal dalam pencapaiannya, hal tersebut disebabkan masih kurangnya jadwal kunjungan pasien/sasaran kegiatan di semua faskes yang menurun karena pandemi Covid-19. Perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi standar pemeriksaan kesehatan. Jangan kemudian bila tidak merasakan indikasi adanya gangguan kesehatan, maka jadwal pemeriksaan rutin tertunda oleh kegiatan lainnya. Disamping hal tersebut, secara umum karena terjadi perubahan definisi operasional serta terjadi peningkatan target sasaran berdasarkan riskesdas, dan atau mengikuti angka prevalensi dari provinsi Jawa Tengah.

Capaian terendah SPM berada pada jenis pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, namun demikian capaiannya meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

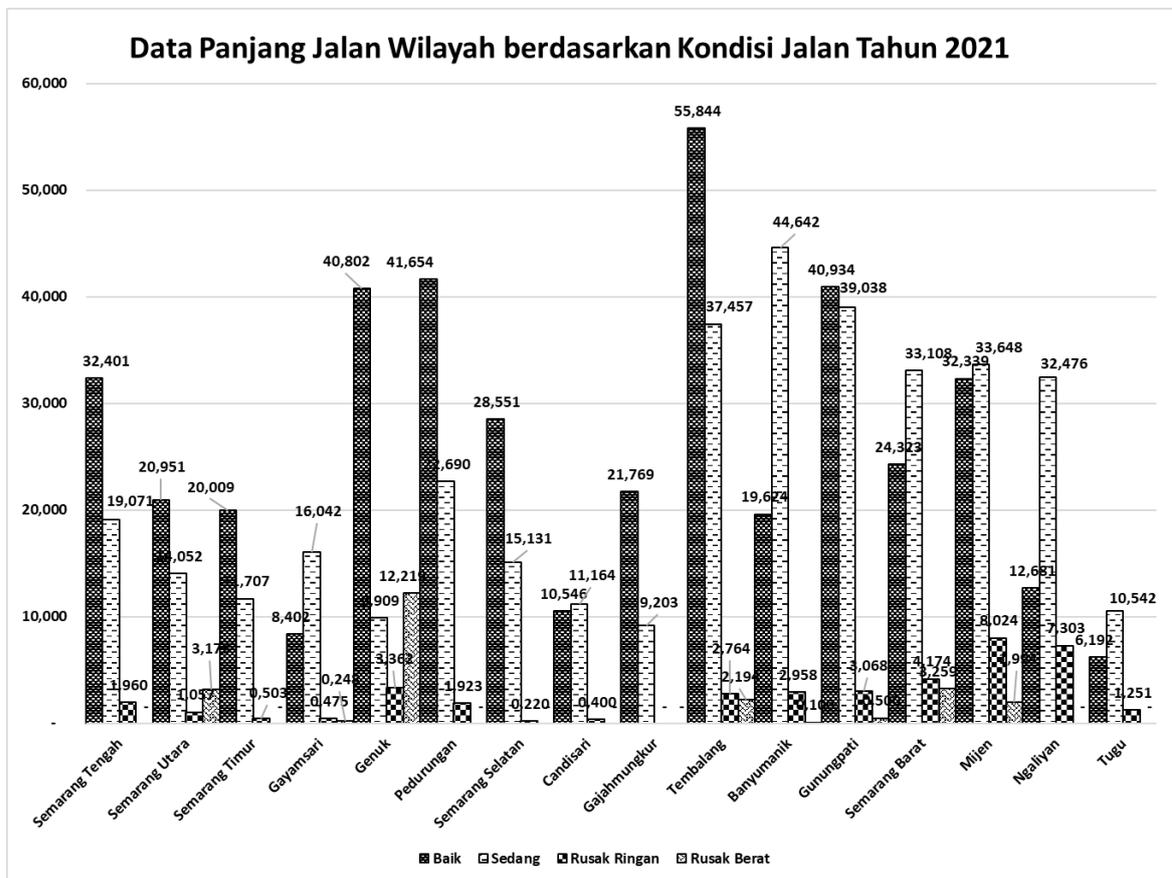
Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2015 ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Terakhir adalah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan Di Wilayah Kota Semarang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspal hot mix dengan proporsi mencapai 62,71% (526,743 km); disusul dengan perkerasan jenis beton blok/rigid sebesar 34,30 % (288,073 km); telford/kerikil sebesar 0,69 % (5,812 km) dan tanah/belum tembus sebesar 2,29% (19,273 km). Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 6 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk sepanjang 12,019 km (Jl. Babon Inspeksi Barat, Utara dan Timur), Semarang Barat sepanjang 3,259 km (Jl. menuju maron), Kecamatan Mijen sepanjang 1,694 km (Jl. Amarta, Jl. Banjarsari, Jl. Kebonroto), Kecamatan Semarang Utara sepanjang 1,453 km (Jl. Tambakrejo Tanggul), Kecamatan Tembalang sepanjang 0,6 km (Jl. Telumpak), dan Kecamatan Gayamsari sepanjang 0,248 km (Jl. Tanggungrejo). Secara lengkap Kondisi tersebut terbagi ke dalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022 -Kep. Wali Kota No. 621\*/Tahun 2021

Gambar 2.15  
Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2021

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Wali Kota tentang status jalan sepanjang 839.901 meter, jalan dalam kondisi baik 416.896 meter (49,64%), kondisi sedang sepanjang 360.080 meter (42,87%), atau jalan kondisi mantap sepanjang 776.976 meter atau sebesar 92,51%, sisanya adalah kondisi rusak ringan sebesar 39.238 meter (4,67%) dan kondisi rusak berat sebesar 23.687 meter (2,82%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Genuk, Tembalang dan Mijen, serta Semarang Barat. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian program dan kegiatan selanjutnya.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang data diolah, 2022

Gambar 2.16  
Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2021 per Wilayah Kecamatan

Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob.

Tabel 2.20.  
Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kawasan banjir dan rob	%	4,00	4,00	4,00	1,30	3,4
2	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	50	40	40	40	40
3	Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan)	Hektar	37.301	37.301	37.301	37.301	37.301
5	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	77.405	77.405	77.405	77.405	77.405

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu usaha yang ditempuh adalah dengan penataan sungai besar. Pemerintah Kota Semarang lebih giat dalam melakukan normalisasi saluran drainase juga optimalisasi dalam pembagian wilayah kerja UPTD Pengelola Pompa Banjir, sehingga lebih fokus dan cepat dalam penanganan

banjir, rob maupun genangan di wilayah kerjanya. Hal ini cukup berdampak pada penurunan kawasan banjir dan rob secara keseluruhan, utamanya di wilayah Timur. Namun demikian, dikarenakan terdapat perubahan variabel dalam perhitungan kawasan banjir dan rob, dimana untuk tahun 2021 selain jalan dan permukiman juga dimasukkan komponen kawasan ladang dan persawahan yang terdampak banjir dan rob, mengakibatkan terjadinya peningkatan persentase kawasan banjir dan rob menjadi 3,4% di tahun 2021 dari semula 1,3% di tahun 2020.

Tabel 2.21.  
Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah titik LPJU baru yang terpasang	Titik	1.681	1.545	1.414	0	869
2	Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan	Titik	73.333	74.878	76.292	76.292	77.161
3	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	%	92,15	94,09	95,87	95,87	96,96
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	Lampu	67.576	70.452	73.141	73.141	74.815
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	Lampu	73.333	74.878	76.292	76.292	77.161

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Salah satu pemenuhan prasarana dasar permukiman perkotaan diantaranya terkait penerangan jalan umum (PJU). Kebutuhan titik lampu yang terpasang di seluruh wilayah Kota Semarang sebesar 79.580 titik, perhitungan ini diperoleh dari panjang jalan Kota dan jalan lingkungan sepanjang 2.785,28 km dibagi 35 m (kebutuhan ideal penerangan jalan). Namun pemenuhannya baru sebanyak 77.161 titik di tahun 2021 yang disebabkan karena terjadi penurunan pemasangan terutama di tahun 2020 sama sekali tidak ada LPJU baru yang terpasang. Hal tersebut dikarenakan adanya refocussing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 2.419 titik yang secara bertahap akan diselesaikan pada tahun 2022 dan pada tahun-tahun selanjutnya.

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti terlihat pada tabel diatas. Yang masih perlu diperhatikan yaitu penerangan wilayah pinggiran karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan kejahatan, utamanya di wilayah pinggiran. Kinerja di bidang Penerangan Jalan Umum diukur dari pemasangan LPJU baru dan pemeliharaan PJU yang ada sehingga berfungsi dengan baik (100%). Untuk itu diperlukan informasi dari masyarakat bila terdapat keluhan terkait dengan pelayanan penerangan jalan pada nomor gangguan layanan (082) 227007512 (Telp, SMS,WA).

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22.  
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2021

No	Indikator SPM	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari <u>Jml yang dilayani SS x 100 %</u> Jml sasaran	95,33%	95,40%	96,28% <u>1.623.225</u> 1.685.909	97,14% <u>1.638.931</u> 1.687.222
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik <u>Jml yang dilayani SS x 100 %</u> jml sasaran	86,26%	86,46%	86,51% <u>382.195 SRT</u> 441.814 SRT	98,93 % <u>556.442</u> 562.444

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, 2022

Masih belum maksimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, hal ini berpengaruh pada kualitas air sungai. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan PDAM Kota Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Candisari, Tugu dan Pedurungan, diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Semarang akan terpenuhi.

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan yang signifikan, berkat sinergitas peran masyarakat dan stakeholder persampahan lainnya. Pada tahun 2021 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.200 ton, dimana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 85% per hari dengan komposisi material organik sebesar  $\pm$  62% dan sisanya material anorganik. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestik, besar kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pilah sampah/bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dengan bekerjasama dengan stakeholder sampah sudah banyak sampah di TPA Jatibarang yang diproses menjadi pupuk organik, biogas dan pembangunan PLT Gas Metana (merupakan Hibah dari Pemerintah Denmark) yang akan dijual kepada PT. PLN dan dapat didistribusikan untuk 8-1.000 warga sekitar pada radius hingga 1,5 km.

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Selama ini penataan ruang di Kota Semarang mengacu kepada dokumen tata ruang yang ada yaitu Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Sedangkan untuk penataan ruang khususnya yang berkaitan dengan penataan bangunan dikendalikan dengan pengeluaran ijin mendirikan bangunan (permukiman sehat).

Dari data sementara yang diperoleh, jumlah bangunan ber-IMB per seluruh jumlah bangunan secara total di tahun 2021 sebesar 55,56% meningkat dari angka tahun 2020 yang mencapai 55,04% dari jumlah bangunan yang ada. Meskipun terdapat peningkatan, namun pemerintah harus lebih serius dalam penataan ruang ini, selain itu yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan/presisi bangunan dengan IMB yang dikeluarkan, terkait perijinan tersebut yang harus dilakukan pemerintah yaitu menjadikan proses perijinan menjadi murah, mudah dan tepat. Perubahan-perubahan fungsi ruang kota yang tidak sesuai dengan

Perda RTRW harus ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan tegas sesuai peraturan berlaku.

Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan berdasarkan beberapa variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.23.  
Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
a.	Pekerjaan Umum :					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	91,11	89,54	89,65	92,64	93,07
2	Rasio Jaringan Irigasi (%)	76	77	78	79	79
3	Penyediaan air baku	87,50%	87,5*%	87,5*%	87,5*%	87,5*%
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%)	2,74	2,78	2,83	2,88	2,94
5	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan sedang	658,18	752,05	752,97	778,12	778,12
6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	44	32	32	32	23
7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	82	80	80	95,85	82,50
8	Luas irigasi dalam kondisi baik	NA	NA	78	79,00	80
9	Persentase penanganan sampah	87,5	88,5	89	89,5	90
10	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pddk (%)	2,74	2,78	2,83	2,88	2,94
11	Rumah tangga pengguna air minum (%)	88,50	95,33	95,40	96,28	97,14
12	Rumah tangga ber- Sanitasi (%)	86,08	86,26	86,46	86,51	98,93
Indikator SDGs						
13	Persentase rumah tangga yg terlayani air minum	88,50	95,33	95,40	96,28	97,14
14	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	88,5	92,15	92,15*	96,28	96,28*
15	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	95	95	95	91	91*
16	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	1	1	1	1	1
17	Indeks kualitas air	45,25	31,01	48,75	50,44	50
b	Penataan Ruang:					
18	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Smg (%)	44,07	44,12	44,17	44,21	37,51
19	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	53,63	53,98	54,49	55,04	55,56
20	Persentase kesesuaian Tata Ruang	79	81,76	95	96,73	97,59

Sumber : BPS, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, 2022

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2021 sebesar 37,51% atau seluas 14.002,67 Ha, menurun sebesar 6,7% dari tahun 2020 dikarenakan adanya penyesuaian dengan Perda Nomor 5 tahun 2022 tentang Revisi RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 98,73%, sehingga masih terdapat sekitar 1,27% wilayah yang belum sesuai dengan peruntukan tata ruang. Selain itu kinerja pembangunan sarpras dasar perkotaan tahun 2021 juga tidak dapat memenuhi target, dimana hanya 21 gedung dari 48 gedung pemerintahan yang bisa diwujudkan, karena anggaran di fokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pengelolaan reklame sepanjang tahun 2010-2019 telah dilaksanakan melalui intensifikasi penagihan tunggakan reklame, penandaan reklame, dan penertiban reklame ilegal yang jumlahnya meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian Jalan, dimana tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota. Dan kondisi reklame berijin pada tahun 2021 sebesar 74,58%, menurun dibandingkan dengan 2020 sebesar 75,83%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman pada tahun 2021 terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.24.

Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100
2	Luas Lingkungan permukiman kumuh (%)	0,58	0,29	0,23	0,21	0,14
3	Rasio permukiman layak huni	97,12	97,44	97,91	98,17	98,63
4	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	44,94	50,08	47,09	45,50	41,01

Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang terdapat sebesar 415,83 ha atau 4,16 km<sup>2</sup> atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Jumlah luasan kawasan kumuh yang berhasil ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2021 seluas 26,75 Ha. Sehingga sampai dengan tahun 2021 luas lingkungan permukiman kumuh yang belum tertangani seluas 52,85 Ha.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, pada tahun 2021 persentase rumah layak huni sebesar 98,63%, meningkat 0,46% dari tahun sebelumnya. Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25.  
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2021

No	Indikator SPM	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100 %	100% <u>2 unit</u> 2 unit	100% <u>17 unit</u> 17 unit
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100% <u>97 KK</u> 97 KK	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, 2022

- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Perkembangan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.  
Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,84	1,04	0,93	0,93	0,93*
2	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	31,71	31,81	31,90	31,90	31,99
3	Rasio Penegakan PERDA	100	100	100	100	100
4	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	0,84	0,84	0,92	0,93	0,81
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	35	34,78	34,78	34,78	34,78
6	Partisipasi Pemilih Pada Pilpres/Pileg/Pilkada (%)	Tidak ada	Tidak ada	82,33	68,62	Tidak ada
7	Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	91,86	98,78	50,26	77,04	78,30
Indikator SDGs						
8	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (indikator 1.5.1*).	13	13	NA	NA	NA
9	Kelurahan Siaga Bencana (renja) (1.5.1.(a))	35	40	50	58	58
10	Persentase pemenuhan bagi korban bencana (1.5.1.(b))	85,71	100	95,14	95,14*	95,14*
11	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (1.5.1.(c))	86,75	90	90	90	90

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
12	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))	6	11	16	16	16
13	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.(1.5.1.(e))	172.96	130.60	130.60	113,83	113,83
14	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.(1.5.2.(a))	1,8 M	1,8 M	NA	NA	NA
15	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Daerah..(1.5.3*)	1	1	1	1	1
16	Jumlah kota ( kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk.(11.5.1.(b))	35	40	40	40	40
17	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (16.1.1.(a)) (angka kriminalitas)	2.053	1.443	1.151	1.330	1.253

Sumber : Satpol PP, D. Kebakaran, 2022

Dari data di atas Tingkat waktu tanggap (*response timerate*/ 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 78,30%. Masih terdapat gap sebesar 21,70% pelayanan yang belum memenuhi SOP. Hal ini disebabkan terjadinya lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau, dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai *respon time* 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Kinerja Indikator Partisipasi Pemilih pada Pilkada serentak tahun 2021 sebesar 68,62%, lebih kecil dari pelaksanaan Pilpres/Pileg tahun 2019 yang sebesar 82,33%. Meskipun demikian angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2015 yang hanya sebesar 65,9%. Hal ini disebabkan animo pemilih yang menurun akibat adanya pandemi Covid-19.

Meningkatnya angka kriminalitas sebesar 15% dari tahun sebelumnya disumbangkan oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena pembelajaran daring menjadikan kebosanan bagi murid, sehingga kemudian kesempatan berkendara tanpa pengawasan orang tua lebih besar yang menjadikan kecelakaan.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018- 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27.  
Pencapaian Indikator SPM pada Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 - 2021

No	Indikator SPM	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100 %	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100% <u>0 orang</u> 0 orang
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100 %	100% <u>60</u> 60	100% <u>1.687.222</u> 1.687.222
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85,36%	86,3% <u>790</u> 890	100% <u>1975</u> 1975
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	95,14%	100% <u>59</u> 59	100% <u>1.255</u> 1.255
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100 % <u>1.680.417</u> 1.680.417	97,32 % <u>837</u> 860

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Bappeda, 2022

Diantara SPM layanan di bidang Trantibum, realisasi yang paling rendah pada jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kendala yang dihadapi terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diantaranya belum terdapat RISP KP dan manajemen pemadaman kebakaran ditingkat Kota, selain itu juga kapasitas SDM personil pemadam yang belum optimal (36,75% belum bersertifikasi) serta sarpras pemadam kebakaran yang kurang representatif (mobil tangga/snorkel rusak, sedangkan kebutuhan pemadaman digedung bertingkat meningkat, alat pelindung diri yang jumlahnya terbatas).

f. Sosial

Pembangunan pada Urusan Sosial ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2021, pandemi covid menyebabkan angka kemiskinan Kota Semarang menurut data BPS meningkat menjadi sebesar 4,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,34%. Ditinjau dari persentase kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi di Kota Semarang selalu lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan bahkan tingkat Nasional. Ini menunjukkan bahwa indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan dari Program/Sub Kegiatan sudah dilaksanakan dan mencapai indikator yang telah ditentukan, terdapat kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait tentang angka DTKS pada tahun 2021, tentang penentuan angka DTKS Tahun 2021 yang meliputi :

- a. 6 metode pemutakhiran data kemiskinan :
  - 1) Usulan daerah
  - 2) Fitur usul sanggah aplikasi cek bansos
  - 3) Data bencana
  - 4) Hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media
  - 5) Hasil verifikasi pejuang muda
  - 6) Hasil geo tagging data spasial dari citra satelit
- b. Bantuan dari Kementerian/ Lembaga lain.

Sehingga penetapan angka kemiskinan yang merujuk dari data penerima manfaat bansos bersumber dari kemensos yang ada di DTKS dimana pada tahun 2020 angka kemiskinan sebanyak 271.396 atau 16,15% Sedangkan untuk angka kemiskinan Tahun 2021 sebanyak 407.363 jiwa atau 24,23% atau terjadi peningkatan , untuk meringankan kondisi social ekonomi akibat pandemi covid-19.

Tabel 2.28.  
Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS	303.715	280.211	229.564	518.358	501.322
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	377.357	290.602	231.148	516.759	501.322
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	54.880	52.137	158.257	513.287	258.154
4	Jumlah sarana sosial /panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi	102	105	105	119	105
Indikator SDGs						
5	Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg (%)( indikator 1.2.1*)	19,95	16,81	13,80	16,15	24,23
6	Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) (indikator 1.3.1.(c))	3,88	100	100	100	100
7	Persentase Rumah Tangga miskin yang memperoleh Program PKH (%) (indikator 1.3.1.(d))	5,68	5,68	4,8	7,99	7,99
8	Angka kemiskinan BPS (%) (indikator 10.1.1.(a))	4,82	4,14	3,98	4,34	4,56
9	Rasio belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap total APBD (1.a.2*)	21,42 (Pilkada dan tahun infrastruktur)	28,96	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Sosial, 2022

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sosial, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29.  
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2018 - 2021

No	Indikator SPM	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (274/274) orang	100 % (176/176) orang	100 %
2	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (11/11) Orang	100% (29/29) orang	100%
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (117/117) Orang	100% (148 / 148) orang	100%
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100% (114/114)o rang	100% (292/292) orang	100%
5	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100% (792/792) orang	100% (510.650/ 510.650) orang	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, 2022

Meskipun capaian pelayanan SPM bidang sosial telah menunjukkan kinerja yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, diantaranya: Belum mencukupinya SDM pekerja sosial profesional yang ada dibanding dengan PMKS terlantar penerima layanan rehabilitasi sosial, Sarana dan Prasarana Rumah Tampong Among Jiwo yang over kapasitas dalam menampung warga terlantar, serta belum memiliki Posko yang tetap sebagai dukungan baik untuk kebencanaan Alam maupun kebencanaan Sosial.

#### 2.1.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

##### a. Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Beberapa indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.30.  
Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Tenaga Kerja  
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Daerah / SDGs		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)	69,87%	65,56%	66,42%	69,89 %	69,41
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (BPS)	6,61%	5,29%	4,54%	9,57%	9,54
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,39%	94,71%	95,46%	90,43%	90,43%*

Indikator Kinerja Daerah / SDGs		2017	2018	2019	2020	2021
4	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.185.436	1.405.604	1.431.894	1.191.265	1.191.265*
5	Angkatan Kerja					
	Jumlah Bekerja	899.796	872.827	907.937	925.963	936.076
	Jumlah Pengangguran Terbuka	63.700	48.724	43.198	98.001	98.718
	Total Angkatan Kerja	963.496	921.551	951.135	1.023.964	1.034.794
6	Bukan Angkatan Kerja	415.442	484.053	480.859	441.157	455.948
	Sekolah	138.537	166.175	174.979	151.538	151.538*
	Mengurus Rumah Tangga	229.010	268.388	245.101	232.208	232.208*
	Lainnya	47.895	49.490	60.779	57.411	57.411*
Indikator SDGs						
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*)	6,61	5,29	4,54	9,57	9,54
8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) 8.6.1*)	18,90	15,73	NA	NA	NA
9	Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (BPJS)(10.4.1.(b))	237.015	250.246	255.991	NA	NA

Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 69,41% sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai angka sebesar 69,89 %.

Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Semarang, investasi dengan pelibatan tenaga kerja lokal menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Terlihat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Semarang yang terus menurun dari tahun 2017 sebesar 6,61% turun menjadi sebesar 4,54 % pada tahun 2019 dan melonjak drastis menjadi sebesar 9,57 % pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 namun mulai mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 yang menunjukkan sedang terjadinya pemulihan ekonomi.

Selaras dengan kondusifitas Kota Semarang, pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2017-2021 berturut-turut sebesar 8,71%, 8,16%, 8,66% dan terakhir kenaikannya sebesar 3,50%.

Tabel 2.31.  
UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2017-2021

UMK DAN KHL	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Upah Minimum Kota Semarang	2.125.000	2.310.087	2.498.588	2.715.000	2.810.025

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2022

Dari tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi, dimana dengan penyelesaian dalam bentuk PB/Persetujuan Bersama sebesar 99 kasus diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungan

industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara PB/Persetujuan Bersama.

Data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.  
Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial  
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kasus yang ditangani :		157	124	150	159	121
Penyelesaian :						
1	Dalam bentuk PB	32	62	83	84	99
2	Tahap anjuran mediator	-	76	53	51	10
3	Secara bipartite usai mediasi	-	4	21	21	9
4	Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor.	125	42	14	3	3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2022

#### b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT pada tahun 2021 sebesar 0,02 sedikit berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,029 yang menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Selain itu pemerintah juga serius dalam memperhatikan kepentingan/kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sudah cukup banyaknya forum- forum anak yang terbentuk di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Semarang, juga mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak dengan kategori yang meningkat dari Kategori Madya menjadi Kategori Nindya.

Tabel 2.33.  
Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,69	95,82	95,55	95,49	95,67
2	Jumlah Forum Anak Kota Semarang yang terbentuk	17	38	102	102	102
3	Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak	74	12	26	26	26
4	Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA	1	1	1	1	1
5	Rasio KDRT	0,053	0,055	0,038	0,029	0,02
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2017	2018	2019	2020	2021
	dan anak dari tindakan kekerasan					
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,04	7	7,6	7,13	8,04
8	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	97,21	97,21	96,4	96,4*	96,4*
9	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,09	56,09	56,34	56,34*	56,34*
10	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anggota DPRD</li> <li>• Jumlah anggota DPRD perempuan</li> </ul>	50 9	50 12	50 10	50 10	50 9
11	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon II di Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon III di Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon IV di Pemerintah Kota Semarang</li> </ul>	8  56  744	7  54  756	7  64  736	6  51  624	6  51  624
Indikator SDGs						
12	Cakupan program pengarusutamaan gender (5.1.1*)	68	96	97	97	97
13	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan (5.2.2*) .	0,02	0,10	0,02	0,029	0,02
14	Pemberdayaan terhadap korban KDRT (5.2.2.(a))	100	100	100	100	100
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (5.5.1*)	75,22	75,55	74,57	74,67	73,64
16	Persentase perempuan di lembaga legislative	24	24	22	20,41	18,75
17	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan (5.5.2*)	55,76	56,44	57,85	51,15	51,30
18	Jumlah Anak Korban Kekerasan	68	83	50	50*	50*
19	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,02	0,27	0,23	0,23*	0,23*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2022

c. Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu.

Dari beberapa indikator tersebut hampir seluruhnya mengalami peningkatan di tahun 2021. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan komitmen dan upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan di lokus daerah rentan rawan pangan yang semakin intens, diantaranya pelatihan olahan pangan dan pelatihan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hidroponik. Sehingga diharapkan seluruh kelurahan di Kota Semarang secara bertahap menuju kategori minimal cukup tahan pangan.

Selain itu juga Peningkatan Pemahaman Pentingnya Konsumsi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA ) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pemenuhan kebutuhan Gizi Keluarga, disamping pemantauan ketersediaan dan keamanan pangan. Beberapa kinerja pada Urusan Pangan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34.  
Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	87,2	87,7	94,00	88,70	89,10
2	Cakupan Daerah Rentan Pangan	Kelurahan	13	0	0	0	0
3	Ketersediaan Pangan Penduduk	Kkl/Kapita/hari	3.051	3.052	3.053	3.054,00	3.055
4	Tingkat Keamanan Pangan	%	80	83,56	76,01	91.26	91,27

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

d. Pertanahan

Kegiatan Survey Data Pertanahan bertujuan untuk memberikan atribut/informasi bidang tanah yang terpetakan dengan data pendukung seperti KTP, NOP, PBB sebagai bahan dasar dalam rangka perijinan dan pendapatan.

Bila dikomparasikan dengan capaian tahun sebelumnya, secara persentase cakupan objek pajak PBB yang terpetakan persil tanahnya di tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2020 yaitu mencapai 99,95%. Sedangkan untuk penyelesaian kasus tanah negara sudah mencapai target sebesar 100% dari 27 kasus yang ada di tahun 2021. Hal itu bisa tercapai antara lain karena Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong terealisasi berupa fasilitasi proposal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar.

Pemerintah Kota Semarang telah bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam Integrasi Pemetaan, sehingga nantinya akan terbentuk basis data pertanahan yang *valid* dan *uptodate* dalam optimalisasi administrasi pertanahan maupun dalam penyusunan kebijakan. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.

## Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan)	34,72	37	57,00	88,27	99,95
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100%/ 15 kasus	100%/ 15 kasus	100% 7 kasus	100% 15 kasus	100% (27 Kasus)

Sumber : BPN dan Dinas Penataan Ruang, 2022

## e. Lingkungan Hidup

Pada tahun 2021, kinerja yang dicapai pada Urusan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah berhasil mencapai target indeks kualitas lingkungan hidup, yang menjadi sasaran strategis Pemerintah Kota Semarang di dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahunnya, guna mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu kota dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan Kota Semarang.

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2017-2021, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.36.

## Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencemaran status mutu air	60	60	60	60	60
2	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	46	51	56	60	65
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (jumlah perusahaan yang diawasi)	44	44	60	180	180
4	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100
5	Indeks kualitas lingkungan hidup (%)	50,93	51,94	62,88	66,05	59,60
6	Indeks Tutupan Vegetasi	50,9	56,51	56,51	55,9	47,58
7	Indeks kualitas air (IKA)	39	31,01	48,75	50,44	50
8	Indeks kualitas udara (IKU)	62,9	74,27	85,50	95,20	75
9	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	44	78	110,52	172,34	173,68
10	Penyediaan informasi status kerusakan dan/atau tanah untuk produksi biomass (%)	100	100	100	100	100
Indikator SDGs						
11	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (11.6.1.(a))	88	88,5	89,00	89,5	90,00
12	Jumlah Bank Sampah yang beroperasi (11.6.1.(b))	12	25	34	47	47
13	Persentase ruang terbuka hijau (11.7.1.(a))	44,06	44,06	44,15	44,21	44,21*
14	Jumlah ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan (perush)	39	39*	38	50	39
16	Volume sampah yang ditangani/ diolah (M3)	4.544	4.645	4.747	4.852	4.959

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
17	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.(15.3.1.(a))	1ha	1ha	1ha	1ha	1ha

Sumber : Bappeda, DLH Kota Semarang, 2022

\*) Data sangat sementara / Data tahun sebelumnya

Beberapa Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup adalah: Kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah dan alat berat khususnya di TPA Jatibarang serta Kapasitas zona buang TPA Jatibarang yang semakin terbatas sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan alat berat khususnya di TPA Jatibarang dan juga diperlukan adanya penyusunan appraisal dan pengadaan lahan TPA yang meliputi pembebasan lahan/ perluasan lahan TPA untuk zona buang baru.

Terkait dengan isu Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Kota Semarang telah melakukan beberapa langkah yang serius. Hal ini ditunjukkan dengan telah disusunnya Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim pada tahun 2018, serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan langkah tersebut yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Semarang yang selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif. Di tahun 2016, Emisi GRK tercatat sebesar 5.937,63 ton CO<sub>2</sub>e, dan menurun menjadi 3.626,26 ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2020.

#### f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2021 adalah 95,07% atau 1.174.012 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.234.920 orang. Sedangkan 4,93% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk yang melakukan mutasi, wajib KTP belum rekam termasuk wajib KTP-el pemula yang belum rekam.

Tabel 2.37.  
Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil  
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Validasi Database Kependudukan	97%	97%	97%	97%	97%
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	91,46 %	94,94%	97,14%	98,07%	98,48%
3	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio bayi berakta kelahiran (1.4.1.(j))	92,78 %	95,46%	97,15%	98,81%	99,26
5	Rasio pasangan berakta nikah	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rasio penduduk ber NIK (Nomor Induk Kependudukan)	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2%	12,94%	37,16%	60,57%	62,05
Indikator SDGs						
8	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun)	95%	96,02%	97,15%	97,15%	99,53%
9	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	77,14 %	78,82%	79,34%	80,11%	80,45 %
10	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: *Dispendukcapil, 2022*

Berdasarkan data diatas kinerja kepemilikan KIA masih memerlukan perhatian. Untuk deviasi sebesar 3% pada validasi database, disebabkan data ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Sedangkan sejumlah 1,89% penduduk yang belum ber-KTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP.

Adapun beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan Urusan Adminduk antara lain adalah :

- a. Menyelenggarakan pelayanan terintegrasi atau Paket 3 in 1 yaitu pelayanan paket terintegrasi dimana pengajuan permohonan Akta Kelahiran sekaligus akan mendapatkan KK dan KIA.
- b. Menyelenggarakan pelayanan akta kelahiran di Dinas dan 16 TPDK Kecamatan.
- c. Membangun dan mengembangkan aplikasi online untuk permohonan cetak dan perekaman KTP-el melalui website <http://eservice.dispendukcapil.semarangkota.go.id> dan aplikasi berbasis android Si'Dnok. Pelayanan online pada tahun 2021 dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pelayanan pada masa pandemi covid-19 dengan mengurangi jumlah kepadatan dalam ruangan pelayanan dan mengurangi pelayanan tatap muka. Masyarakat diberikan kemudahan hanya dengan datang pada saat mengambil hasil cetak KTP saja di tempat pelayanan terdekat dari domisilinya. Pendaftaran perekaman KTP-el online dimaksudkan untuk mengatur jumlah kedatangan agar tidak terjadi kepadatan dalam ruangan pelayanan.
- d. Pelayanan perekaman jemput bola dari rumah ke rumah bagi warga yang tidak mampu datang ke tempat perekaman khususnya bagi warga lansia, difabel dan penduduk yang sedang sakit. Pelayanan jemput bola ini dengan adanya pandemi covid-19 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pelayanan lebih mengutamakan kesehatan dan keamanan bagi warga yang direkam dan petugas perekaman.
- e. Penyediaan sarana pendukung pencetakan KTP-el yang mencukupi, sarana pendukung tersebut yaitu alat cetak/printer KTP-el dan tinta/ribbon. Untuk alat cetak, pada tahun 2021 telah menambahkan 1 (satu) alat cetak yang sesuai dengan aplikasi SIAK versi yang berlaku. Untuk tinta/ribbon telah tercukupi dengan anggaran dari APBD Kota Semarang dan tambahan dari anggaran DAK Non Fisik.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja. Kegotongroyongan dan kepedulian masyarakat kembali diperlukan saat menanamkan kebiasaan baru dalam tatanan hidup kemasyarakatan pasca pandemi Covid-19 varian Omicron, sehingga Kota Semarang tidak Kembali menjadi kota dengan persebaran kasus Corona tertinggi di Jateng seperti yang pernah terjadi di tahun 2020.

Adapun permasalahan-permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , diantaranya: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadikan berkurangnya intensitas kegiatan kemasyarakatan. Penyelenggaraan kegiatan yang telah terseleksi dilakukan secara daring menjadi pilihannya.

Tabel 2.38.  
Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa  
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LPM	18	18	18	18	18*
2	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
3	Jumlah kelompok binaan PKK	32	32	32	32	32
4	Persentase posyandu aktif	100	100	100	100	100
5	Jumlah Posyandu Mandiri	588	588	808	808	808
6	Jumlah Posyantek yang aktif / berfungsi	16	16	16	16	16
7	Jumlah UPPKS dan UED-SP	UPPKS :191 UED-SP :177				

Sumber: D.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 serta Surat Mendagri Nomor 470133761SJ dan 470133751SJ tanggal 5 Juni 2020 , Kota Semarang telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 pilar, yang terdiri dari : Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan. Dan semuanya telah diinternalisasikan dalam program dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Dan pada tahun 2022 masih dalam proses penyusunan Perkada Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Semarang.

Kinerja Pembangunan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat terlihat dari 4 indikator utama dimana realisasi kinerja pada tahun 2021 belum bisa memenuhi target kinerja. Keempat indikator tersebut

adalah : Cakupan PUS umur istri <20 th (0,58%); Cakupan PUS *unmet need* (10,89%); Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi /DO (19,63%) dan Peserta KB Aktif (73,88%).

Namun disisi lain, terdapat pencapaian prestasi pada Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Semarang, diantaranya: Juara 3 Lomba Pengelola KB Teladan PPKBD Tingkat Nasional; Juara 1 Lomba Pengelola KB Teladan PPKBD Tingkat Provinsi; serta Juara 2 Lomba Akseptor Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi.

Tabel 2.39.

Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017- 2021

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengendalian angka kelahiran (TFR)	2,01	2	2	1,99	2
2	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan	36,79	36,79*	44,01	47,1	47,1*
3	Jumlah peserta KB Aktif	218.185	205.201	199.001	194.631	175.603
4	Rasio Akseptor KB per 1000 PUS	78,61	78,1	77,47	76,94	72,71
5	Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan	75	70	70	73	73*
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	73,06	62,62	65,07	47,5	53,03
7	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga ( BKB, BKR, BKL)	BKB: 270 BKR:130 BKL:288	BKB: 270 BKR:129 BKL:235	BKB: 254 BKR:12 1 BKL:23 4	BKB: 274 BKR:124 BKL:212	BKB: 283 BKR:131 BKL:218
Indikator SDGs						
8	Cakupan peserta KB aktif	76,34	78,1	77,47	76,94	73,88
9	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern	28,14	28,14	25,79	25,19	29,03
10	Cakupan PUS <i>unmet need</i> (5.6.1.(a))	10,44	8,94	9,63	10,46	10,89

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2022

Dari data diatas terlihat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Indikator Kinerja Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO), yang disebabkan diantaranya kegagalan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan kurang optimalnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya semasa pandemi.
- b. Indikator Kinerja Cakupan PUS *Unmet need* yang disebabkan diantaranya belum efektifnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, masih rendahnya minat Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta KB Pria, serta kurang optimalnya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi juga edukasi kepada PUS yang menunda kehamilan tetapi tidak ber KB.

- c. Indikator Kinerja Cakupan PUS yang istrinya <20 th, belum dapat memenuhi target. Sehingga perlu dilakukan penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Implementasinya kepada Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal, Sosialisasi Tentang Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

i. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi *issue* yang harus segera dipecahkan. Indikator Jumlah titik/ruas rawan macet yang pada tahun 2020 terdapat 3 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Siliwangi), pada tahun 2021 bertambah 1 lokasi yaitu Jl. Elang. Hal ini dikarenakan adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Namun demikian kondisi lalu lintas di Kota Semarang secara umum masih dalam kondisi normal. Untuk itu diperlukan adanya Peningkatan rekayasa lalu lintas yang dilengkapi dengan prasarana lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas.

Tabel 2.40.  
Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2017-2021

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	
Layanan Transportasi Massal							
1	Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	koridor	6	7	8	8	8*
2	Headway Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	menit	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12
3	Ketersediaan terminal dan sub terminal						
	- Jumlah Terminal	unit	5	4	3	3	3*
	- Jumlah Sub Terminal	unit	-	-	-	-	-
4	Juml penumpang moda transportasi massal / BRT / KA / Pesawat	org	23.281.311	19.296.425	23.180.418	10.935.306	8.425.337
5	Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal (halte BRT)	unit	271	283	376	376	376
6	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	65*	65,79	70	70	70
7	Jumlah penumpang BRT (11.2.1.(a))	Penumpang	9.125.793	10.210.296	10.233.291	6.835.778	6.207.674
8	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar(11.2.1.(b))	NA	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Pada tahun 2021 kinerja yang berhasil direalisasikan atas pelayanan BRT adalah pengoperasian 8 koridor BRT yang rencananya ditargetkan dilaksanakan dengan 4 feeder namun hanya terealisasi 3 feeder dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19.

Untuk trayek angkutan umum yang optimal hanya tercapai 86,04% karena adanya pandemi Covid-19 yang memaksa angkutan umum mengurangi keterisian penumpang dalam rangka menjaga jarak dan mengurangi masyarakat dalam bepergian. Terbukti langkah tersebut cukup berhasil dalam menekan penyebaran virus covid-19 di Kota Semarang.

Dalam hal pelayanan parkir tepi jalan umum, pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan penertiban terhadap keberadaan parkir on street yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan potensi sektor perparkiran yang belum tertangani.

Tabel 2.41.  
Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2017-2021

URAIAN		SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	75,74	78,47	81,32	83,42	90,05

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Indikator Parkir On Street baru mencapai 77,66% atau terealisasi sebanyak 824 titik dan keadaan ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebanyak 981 titik. Disisi lain pengurangan ruas jalan yang digunakan untuk parkir on street berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dilokasi sekitar.

Tabel 2.42.  
Kondisi Lalu Lintas Tahun 2017-2021

URAIAN		SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Lalu Lintas							
1	Ketersediaan sarpras lalu lintas						
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	%	59	60,87	61,73	63,13	65,09
	- Jumlah rambu lalu lintas terpasang	bh	138 dari 3.676 bh	121 dari 3.797bh	400 dari 4197 buah	100 dari 4297 buah	100 dari 4297 buah*
	- Panjang marka jalan	m	2.663 dari 40.222 m2*	2.000 dari 42.222 m2	0 dari 42.222 m2	800 dari 43.022 m2	800 dari 43.022 m2*
	- ATCS	simpang	30	32	38	46	50
2	Rata-rata lama waktu tempuh kendaraan angkutan umum pada saat jam sibuk dan jam tidak sibuk	Menit per 5 Km					
	· Daerah pusat kota		15 mnt/ 10 mnt	20 mnt/ 10 mnt	19 mnt/13 mnt	16 mnt/13 mnt	16 mnt/13 mnt
	- Daerah pinggiran		12 mnt/ 8,5 mnt	15 mnt/ 10 mnt	16 mnt/11 mnt	16 mnt/11 mnt	16 mnt/11 mnt
	Jumlah titik / ruas rawan macet	Titik / ruas	6	5	4	3	4

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Persentase fasilitas perlengkapan jalan meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dimana pada tahun 2021 ditargetkan 65%, menjadi 65,09%, atau berhasil mencapai target sejumlah 100,14%. Dampak dari pencapaian ini adalah cukup tersedianya perlengkapan jalan dalam rangka rekayasa lalu lintas, yang berguna dalam mengatur lalu lintas sehingga lalu lintas di jalan menjadi lebih tertib.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain: Persentase simpang yang dilengkapi ATCS terealisasi 100% (50 simpang) dari target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh kegiatan pengadaan dan pemasangan APILL dalam sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

j. Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang untuk tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Pusat Informasi Publik (PIP) yang memberikan layanan Data dan Informasi, Layanan Pengaduan dan Layanan fasilitas untuk umum dan gratis; Terbangunnya fasilitas publik baru *Co Working Space* di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; Free Wifi pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik; Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi *Smart City* Kota Semarang.

Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.

Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id	141	479	226	156	911
2	Jumlah wifi di area publik	112	259	320	175	120
3	Terwujudnya Aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan e-gov dlm rangka smart city	106	479	479*	479*	479*
4	Jumlah jaringan komunikasi	178 lokasi	426 lokasi	448 lokasi	327 Lokasi	331
5	Jumlah surat kabar nasional / local	10	10	8	10	Lokasi
6	Jumlah penyiaran radio/TV nasional dan local	53	76	78	210	10
7	Presentase Pelayanan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
8	Presentase tertanganinya pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2022

Berkaitan dengan Total laporan yang terkelola dan diproses secara keseluruhan dalam periode Tahun 2021 berjumlah 6.466 laporan, yang seluruhnya merupakan pengaduan. Dan 5 OPD dengan kategori paling sering mendapatkan pengaduan adalah Dinas Kesehatan sebanyak 1.217 aduan, Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 949 aduan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 560 aduan, Dinas Sosial sebanyak 472 aduan, dan Satpol PP sebanyak 406 aduan.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, diantaranya:

- a. Menurunnya Indeks nilai SPBE 2021;
- b. Kurang efisiennya aplikasi di OPD dan maintainancenya, sehingga ada redundansi aplikasi di Pemerintah Kota Semarang;
- c. Jaringan internet di OPD yang sudah berumur lama, sehingga perlu diupgrade;
- d. Selama pandemi, Free WIFI di area publik dikurangi jumlahnya untuk mengurangi kerumunan, namun tetap dalam posisi siap diaktifkan lagi jika dibutuhkan.

Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan indeks SPBE dengan menggunakan aplikasi umum dari pusat dan penggunaan pusat data nasional sebagai data centernya;
- b. Inventarisir dan dokumentasi serta pembuatan flowchart yang lebih terpadu serta penertiban proses pengajuan aplikasi dari OPD ke Diskominfo Kota Semarang;
- c. Upgrade jaringan internet di OPD-OPD yang sudah berumur lama;
- d. Pengaktifan kembali fasilitas Free WIFI di ruang publik, apabila keadaan sudah memungkinkan.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2021, kinerja yang dicapai pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah berhasil mencapai Persentase Koperasi Baik, dari yang ditargetkan 88% tercapai 88,61% atau berhasil mencapai target 100,69%. Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya, dari yang ditargetkan tahun 2021 yaitu sebesar 32% tercapai 54,83% atau berhasil mencapai target 171,34%.

Tabel 2.44.  
Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah  
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	%	53,87	56,07	59,68	30,12	58,82
2	Jumlah UMKM yang dibina	Orang	3.115 Org	2.140Org	2.857 Org (berijin)	2.822	2.822*
3	Jumlah koperasi aktif	unit	707	618	634	637	638
4	Jumlah seluruh koperasi	unit	801	699	715	718	720
5	Persentase koperasi aktif	%	88,26	88,41	86,67	88,70	88,61

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator SDGs							
6	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayakan keuangan.(8.3.1.(c))	%	563/ 11.054 x100% = 5,09 % (Kredit Wibawa)	1075/ 14.893 x100% = 7,22 % (Kredit Wibawa)	1498/ 16.456 x100% =9.10 % (Kredit Wibawa)	1899/ 16.802 x100% =11.30 % (Kredit Wibawa)	2238/ 21.065 x100% =10.62 % (Kredit Wibawa)

Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2022

Pada tahun 2021 peningkatan kualitas Usaha Mikro sebesar 50,82%, meningkat jika dibandingkan tahun 2020. Namun hal tersebut belum sesuai dari yang ditargetkan di tahun 2021 yaitu sebesar 60%. Tidak terealisasinya target pada indikator ini karena dampak adanya Pandemi Covid 19 sehingga banyak pelaku usaha mikro yang tidak berproduksi lagi atau yang omset penjualan juga menurun.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro , diantaranya:

- Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko;
- Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- Optimalisasi kegiatan sosialisasi pengurusan IUMK melalui OSS RBA kepada para pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan;
- Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.

#### 1. Penanaman Modal

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah kinerja dalam urusan penanaman modal. Dimana kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum, menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal di Kota Semarang pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.45.

Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai penanaman modal daerah (juta rupiah)	20.594.936	27.549.279	36.534.709	21.842.472	22.538.063
2	Laju pertumbuhan investasi	96,14%	33,77%	32,61%	-40,21%	3,18 %

NO	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah investor berskala nasional - PMDN	188	264	285	313	415
	- PMA	17	53	27	31	41
4	Jumlah daya serap tenaga kerja	29.223 Orang	41.430 orang	35.345 orang	64.981 orang	35.409 orang
5	Jumlah & nilai persetujuan investasi selama setahun	20.594.936	27.549.279	36.534.709	21.842.472	22.538.063
	- Penanaman Modal Asing (PMA) (dlm juta rupiah)	1.246.416	3.800.234	2.876.099	3.632.700	133.935,37
	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (dlm juta rph)	19.348.520	23.749.045	33.658.609	18.209.772	22.404.128
6	Prosentase ijin terbit sesuai SP	97,00%	97,50%	98,20%	98,70%	99,33 %
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,9 (nilai)	86,37 (nilai)	91,76 (nilai)	92,13 (nilai)	90,1 (nilai)

Sumber: DPM PTSP, 2022

Pandemi covid-19 berdampak pada investasi di daerah. Data di atas menunjukkan, realisasi Penanaman Modal Asing tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 dan hanya mencapai Rp. 133.935,37 juta dari target sebesar Rp.453.441 juta (sebesar 29,53%) pada tahun 2021.

Meski dalam kondisi pandemic, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang meraih beberapa penghargaan diantaranya Meraih juara 1 Layanan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM serta predikat Terbaik 2 Nasional dalam bidang Layanan Investasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu juga mendapatkan Predikat A Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya masih perlunya penyempurnaan dan sosialisasi aplikasi OSS RBA yang perlu diawali dengan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

#### m. Kepemudaan dan Olah Raga

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, karena tempat olahraga di masa pandemi ini banyak yang ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, sehingga pengoperasionalan dengan pengetatan dan penyediaan sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olah raga terbuka tidak bisa dihindari.

Untuk keaktifan organisasi dan kegiatan kepemudaan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan, karena hampir seluruh kegiatan dispora melibatkan banyak orang sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Namun demikian kinerja di bidang kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2021 terlihat dari diraihnya beberapa prestasi di bidang keolahragaan diantaranya sebagai juara umum POPDA tingkat provinsi Jateng, selain itu juga partisipasi Atlet Kota Semarang mewakili PON XX di Papua sebanyak 110 atlet

dan mendapatkan 6 emas, 15 Perak dan 16 Perunggu. Berikut Kinerja Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel 2.46.  
Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi kepemudaan	94	75	90	74	25
2	Jumlah organisasi olahraga	46	45	61	63	45
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	9	9*	6	2	2*
4	Jumlah kegiatan olahraga	16	64	NA	24	24*
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	5	5	6
6	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda	4 keg	4 keg	4 keg	2 keg	2 keg
7	Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda	200 org	200 Org	200 org	100 Org	100 org

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2022

#### n. Statistik

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan tersebut menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2021, penyelenggaraan urusan Statistik dapat mewujudkan ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 86,00%.

Selain itu juga dilakukan Fasilitasi Forum Data Kota Semarang di seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan pengembangan data base per wilayah dengan pilah gender, perwujudan perpustakaan Statistik Digital yang mengkompilasi buku digital serta publikasi-publikasi statistik dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses melalui web digital, serta pengembangan terhadap Sistem Informasi Portal Semarang Satu Data ([semarsatata.semarangkota.go.id](http://semarsatata.semarangkota.go.id)) yang bisa mengakomodir pengiriman data/entry data kinerja OPD, dan juga Pemutakhiran/Updating Data Statistik Spasial pada Sistem Informasi Geospasial Warga Kota Semarang (TEGAL WARENG), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam menunjang penyajian data statistik yang lebih informatif, inovatif dan tidak membosankan.

Tabel 2.47.  
Realisasi Kinerja Urusan Statistik tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku Kota / Kab Dalam Angka	1	1	1	1	1
2	Buku PDRB Kota/Kab	1	1	1	1	1
3	Banyaknya Publikasi Data (jenis)	8	5	4	2	2

Sumber : Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2022

Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Statistik diantaranya belum semua OPD melakukan pengelolaan data sektoral secara sistematis dan mengikuti kaidah statistik, selain itu juga Belum tersusunnya regulasi tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

o. Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Sampai dengan saat ini kinerja diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi, serta software yang terpasang pada server agar melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan external, juga penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada beberapa aplikasi yang digunakan OPD, sehingga data dan informasi yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat terlindungi.

Tabel 2.48.

Realisasi Kinerja Urusan Persandian tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Pelayanan Persandian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Setda Kota Semarang dan Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2022

p. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang menampilkan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya festival dalang yang diselenggarakan di Sobokarti pada tanggal 3 dan 4 November 2021 Festival dalang ini diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada dalang muda dari usia 12-18 tahun.

Tabel 2.49.

Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang	488 group	781 group	792 group	813 Group	859 group*
2	Jumlah organisasi budaya	19	19	19	19	19*
3	Jumlah grup kesenian	488 group	781 group	792 group	813 group	859 group*
4	Jumlah gedung kesenian	14 gedung	14 gedung	14 gedung	14 Gedung	14 Gedung*
5	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	225 kegiatan	194 kegiatan	199 kegiatan	199 kegiatan	199 Gedung*
6	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	12 buah	12 buah	12 buah	12 Buah	12 Buah*
7	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	337 buah	336 buah	336 buah	336 Buah	351 Buah*

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2022

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya, untuk itu pemerintah perlu berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya. Selain itu juga masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang ditunjukkan dengan beberapa kasus pengrusakan, pencurian maupun perilaku terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya outentisitas nilai.

q. Perpustakaan

Selama pandemi jumlah kunjungan offline pada perpustakaan Kota Semarang, berkurang tajam, dan sebaliknya jumlah pengunjung pada perpustakaan digital meningkat sebagai dampak pandemi yang menerapkan social distancing. Pada tahap awal, SiBooky (perpustakaan digital Kota Semarang) berisi koleksi ebook baik ebook komersial dengan sistem DRM (Digital Right Management) dan ebook open source atau non komersial tanpa sistem DRM. Untuk ebook dengan sistem DRM, setiap judul baru tersedia satu buku, sehingga jika ebook ini sedang dibaca pengunjung lain, maka pembaca berikutnya harus menunggu lebih dahulu. Sedangkan untuk buku open source atau non komersial, tidak menggunakan sistem DRM sehingga bisa dibaca oleh siapa saja dalam waktu bersamaan.

Untuk manajemen peminjaman online juga telah dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk lama waktu tertentu untuk dibaca melalui smartphone. Koleksi ebook perpustakaan Kota Semarang juga akan disediakan di beberapa tempat umum yang bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi cukup dengan koneksi bluetooth dengan aplikasi tertentu. Pengembangan teknologi digital di Perpustakaan Kota Semarang akan terus dilakukan untuk meningkatkan program gemar membaca dan budaya baca menjadi sebesar 89% dalam upaya meningkatkan indeks literasi.

Tabel 2.50.

Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perpustakaan milik Pemerintah	1	1	1	1	1
	Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah	190	191	191	191	193
2	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	410.345	418.793	28.960	10.471	1.066 (peminjam)
3	Jumlah Koleksi buku perpustakaan	125.876	132.171	134.000	7.875	8.300

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2022

r. Kearsipan

Secara umum kinerja pada urusan kearsipan berada pada nilai realisasi yang sama dan atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dua indikator yang mengalami peningkatan yaitu : Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik; dan Rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara. Faktor pendorong peningkatan kinerja

tersebut disebabkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pengolahan kearsipan secara digital.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.51.  
Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2017-2021

INDIKATOR KINERJA		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arsip dengan system administrasi yang baik	22.032 arsip	22.582 arsip	25.141 arsip	28.055 arsip	29.000 Arsip
2	Peningkatan klasifikasi arsip	7%	8%	8%	10%	10%*
3	Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	65%	66%	67%	68%	68%*
4	Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	96%	100%	100%	99%	100%
5	Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	60	60	60	60	60*
6	Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara	16000 arsip	26.000 arsip	25.000 arsip	37.000 Arsip	37.000 arsip*
7	Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi	23.650 Dokumen	60000 Dokumen	65.000 dokumen	83.491 dokumen	83.491* dokumen
8	Pameran tentang kearsipan yang diikuti	3 kali	2 kali	2 kali	1 kali	1* kali

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2022

### 2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan

#### a. Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan terlihat dari indikator kinerja peningkatan konsumsi ikan per kapita dimana realisasinya di tahun 2021 mencapai 40,166 Kg/kapita/th dari target sebesar 33,06 Kg/kapita/th.

Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal serta belum memiliki TPI yang representatif, sehingga nelayan hanya sedikit yang melelangkan ikan di TPI.

Tabel 2.52.

## Kinerja Urusan Kelautan &amp; Perikanan Tahun 2017-2021

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok	201	202	202	215	235
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	3.595,61	3.419,24	3.725,78	3.738,1	3.810,67
3	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	2.429,12	3.079,54	3.153,45	2.801,12	2.901,45
4	Produksi ikan olahan	Ton	16.841,05	17.397,86	17.919	17.485	17.506,107
5	Meningkatkan konsumsi ikan	Kg/kapita	33,07	33,14	38,56	40,16	40,166

Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

b. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan kepariwisataan pada tahun 2021 mulai menunjukkan kinerja positif di beberapa indikatornya dibandingkan kinerja pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Faktor utama penyebab hal tersebut tentunya masih karena Pandemi Covid-19 meskipun tidak separah di tahun 2020. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Persentase Kenaikan Kunjungan wisata di tahun 2021 menjadi sebesar -18,46% meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar -55,28%. Kontraksi paling tinggi dirasakan pada jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Semarang, dimana pada tahun 2021 hanya sebanyak 77 wisman, jauh dibawah tahun 2020 yang sebanyak 6.628 wisman. Hal ini disebabkan adanya pembatasan penerbangan dari dan ke luar negeri, juga belum seluruh destinasi wisata dibuka operasionalisasinya karena masih dalam masa PPKM.

Diharapkan pandemi segera berakhir sehingga sektor pariwisata dapat kembali meningkat. Dalam upaya mencapai hal tersebut Kota Semarang melalui Dinas Pariwisata terus menggalakkan upaya peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu instragram, youtube, twitter dan facebook.

Berikut adalah faktor penyebab tidak tercapainya indikator kinerja pada Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun 2021:

1. Masih terdampak dari pandemi covid-19. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi covid-19. Sejak Februari 2020 pandemi covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang.
3. Keterbatasan rute penerbangan dan aturan perjalanan bagi wisatawan.
4. Masih ditutupnya rute penerbangan luar negeri di bandara Ahmad Yani.
5. Beralihnya pasar wisatawan nusantara yang semula dari sekolah/rombongan instansi dengan jumlah yang besar menjadi kelompok kecil atau keluarga.
6. Larangan event dan pertunjukkan seni budaya.
7. Pembatasan convention (rapat dan pertemuan).

Tabel 2.53.

## Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%	7,8	8,6	26,62%	-59,77	-18.46
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	Orang	5.024.476	5.769.387	7.305.559	3.266.931	2.663.761
	- Mancanegara	Orang	59.672	66.105	82.030	528	77
	- Domestik	Orang	4.964.804	5.703.282	7.223.529	3.260.303	2.663.684
3	Pendapatan sektor pariwisata	Rp. juta	177.867,8	256.362,7	312.195,5	10,17% PAD	7,96 % PAD
4	Jumlah Destinasi Wisata	Obyek	64	71	71	71	200
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang	8.003	8.549	8.619	5.109	427.305
6	Lama menginap MICE	hari	1,43	1,47	1,51	1,4	1,32

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata juga ditandai dengan berhasil diraihnya beberapa penghargaan, diantaranya: Tourism and Creative Campaign 2021 sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dan Industri Kreatif yang diadakan oleh Markplus. Inc & Markplus Tourism, Desa Wisata Wonolopo menerima penghargaan Juara Favorit Gelar Desa Wisata yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Desa wisata Kandri menerima penghargaan dan sertifikat desa wisata berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### c. Pertanian

Hal yang menggembirakan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah meningkatnya luas lahan tanaman pangan organik yang pada tahun 2020 seluas 14 Ha, pada tahun 2021 meningkat menjadi seluas 20 Ha. Hal ini mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk konsumsi tanaman organik meningkat, meskipun secara harga jual lebih tinggi. Sedangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih dapat dipertahankan seluas 2.251,41 Ha.

Di bidang peternakan kasus penyakit hewan menular mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dimana di tahun 2021 mencapai 24 kasus. Peningkatan ini terjadi dikarenakan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian penyakit hewan menular di wilayahnya. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 namun kasus yg terjadi di tahun 2021 masih menunjukkan kemajuan yang baik karena masih berada di bawah target tahun 2021 yaitu sebesar 26 kasus.

Tabel 2.54.

## Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang)	9.603	9.679	9.492	10.285	9.902
2	Jumlah tenaga penyuluh pertanian (org)	27	25	29	27	28

NO	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok)	14 (gapoktan)	18 (gapoktan)	19 (gapoktan)	24 (gapoktan)	24 (gapoktan)
4	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	21	37	66	91	104
5	Jumlah Produksi Peternakan(Ton)	33.325,60	33.703	37.347	35.045	33.254,34
6	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	55.494	51.009	51.696	51.379	53.527,47
7	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV)	7	9	14	19	22

Sumber: D. Pertanian, 2022

Disisi lain kinerja produksi pertanian tidak begitu menggembirakan karena hanya berhasil mencapai angka sebesar 53.527,47 ton dari target sebesar 56.657 ton di tahun 2021. Namun nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang hanya mencapai angka sebesar 51.379 ton.

Demikian pula untuk produksi hasil peternakan yang juga tidak mencapai target dan mengalami penurunan sebesar 33.254,34 dari tahun sebesar 35.045. Penurunan produksi hasil peternakan ini disebabkan antara lain oleh Meningkatnya harga pakan ternak yang tidak bisa dijangkau peternak, sehingga kualitas pakan yang diberikan tidak optimal, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ternak, mahalnya harga pakan ternak unggas juga menyebabkan beberapa petenak enggan melakukan restock, sehingga populasi unggas berkurang, Adanya wabah African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi, sehingga jumlah pemotongan babi menurun.

#### d. Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada tahun 2018 terdapat penurunan nilai ekspor dibanding tahun 2017, dan angka ini kembali turun pada tahun 2019 sebesar US\$1.101.478.422, barulah pada tahun 2020 kembali naik menjadi sebesar US\$ 3.084.439.326,82 dan kembali turun di tahun 2021 sebesar 1.117.549.543. Realisasi tersebut hanya mencapai 73% dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid yang masih berlangsung juga adanya pembatasan dari negara tujuan untuk menekan impor dari negara eksportir Indonesia, mengingat barang harus menjalani karantina yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan turunnya permintaan barang dari Indonesia.

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai adalah berhasil memenuhi target persentase alat UTPP bertera, dari yang ditargetkan sebesar 100% dapat terealisasi sepenuhnya, atau berhasil mencapai target sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai, antara lain karena kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui pengawasan kemetrolagian dan pelayanan tera serta tera ulang yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal.

Tabel 2.55.  
Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5%	1.826.17 1.393 US\$	1.163.71 8.499 US\$	1.101.4 78.622 US\$	3.084.43 9.326,82 US\$	1.117.54 9.543 US\$
2	Jumlah Pengawasan Barang yang beredar	238 kali	252 kali	260 kali	260 kali*	260 kali*
3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative	13	15	17	17	17
4	Prosentase alat UTPP bertera	70%	80%	85%	90%	100%

Sumber: Dinas Perdagangan, 2022

e. Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variable yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang.

Tabel 2.56.  
Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	27,65	27,88	27,44	28,64	28,65
2	Kontribusi kategori Industri Pengolahan thd PDRB (ADBK)	25,67	25,27	25,64	26,20	26,21
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	3.523	3.542	3.570	3.587	3.638
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	530	530	530	530	530
5	Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil	2767	2782	2790	2.805	2840
6	Jumlah kluster industri	10	10	10	10	10
7	Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial	20 sentra				
Indikator SDGs						
8	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	27,61	27,22	27,43	28,56	28,65
11	Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur.	7,6	7,3	9,2	NA	NA
12	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	65,5	16,2	28,6	NA	NA

Sumber: Dinas Perindustrian, 2021

#### 2.1.3.4. Fokus Fungsi Penunjang

##### a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dalam fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan.

Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah masih tergolong sangat baik karena kembali memperoleh Penghargaan sebagai Kota Terbaik I Penghargaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dari Gubernur Jawa Tengah, yang diserahkan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tanggal 14 April 2021 sehingga dapat mewakili Kota di Provinsi Jawa Tengah dan juga berhasil meraih Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, yang diserahkan pada tanggal 25 November 2021.

Diperolehnya Penghargaan sebagai Peringkat Pertama Kategori Kota Terbaik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun selama 3 tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa bahwa Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Kinerja pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan juga cukup membanggakan, dimana pada tahun 2021 Kota Semarang meraih prestasi dan penghargaan sebagai Juara I Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kategori Ekosistem Inovasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Tabel 2.57.

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perwal tepat waktu	3	3	2	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	100	98,91	98,90	94,16	100
3	Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan	5	9	9	8	6
4	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	70,42	74,23	75,14	87	87

Sumber : Bappeda, 2022

Kesesuaian program RPJMD dengan RKPD di tahun 2021 mencapai angka 100%, namun terdapat beberapa indikator yang tidak diperhitungkan dalam pengukuran konsistensi tersebut yaitu Persentase kesesuaian muatan Renja terhadap Renstra. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan nomenklatur antara Renstra dan Renja, sehingga tidak dapat diukur kesesuaiannya.

Jumlah kajian yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 6 kajian, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 8 kajian. Penurunan ini disebabkan refocussing anggaran untuk penanganan covid-19. Adapun judul kajian yang dilakukan pada tahun 2021, adalah :

1. Kajian pengembangan investasi di Kota Semarang;
2. Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang;

3. Kajian Kecamatan Dalam Pelayanan E-Government;
4. Kajian Capaian Pembelajaran Praktik di SMK Pada Era Pandemi Covid-19;
5. Kajian Potensi Mata Air dan Kearifan Lokal Masyarakat dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Air di Kota Semarang; dan
6. Kajian Pendekatan Eco-Socio Sistem dalam Pengelolaan Banjir di Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain : terdapat penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD terhadap hasil pemetaan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga indikator kinerja kurang terjaga konsistensinya, serta terdapat perubahan regulasi dari pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan di Kota Semarang.

b. Keuangan

Meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan target karena pandemi Covid-19, namun tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) masih bisa melampaui realisasi tahun 2020 lalu. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 49,4 % dari target 50,97% dan melampaui realisasi tahun 2020 yang sebesar 46,02%.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2021 adalah dampak pandemi yang berimbas di berbagai sektor dan dinamika regulasi yang cepat dan kompleks, menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu juga terkait optimalisasi pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung pembangunan,

Tabel 2.58.

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	45,19%	43,96%	45,29%	46,02%	49,4%

Sumber : BPKAD dan Bapenda, 2022

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian kinerja penyelenggaraan administrasi dalam fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan Diklat ditandai dengan diperolehnya Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021 sebagai Peringkat I atas capaian dalam perencanaan kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu juga Penghargaan BPSDMD Award Tahun 2021 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta Sertifikasi Terakreditasi A sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Tahun 2021. Kinerja lainnya dalam rangka menyederhanakan pelayanan, sampai dengan saat ini telah tersusun pengembangan aplikasi: e-disiplin, e-cuti, e-kenaikan pangkat, e-fungsional, e-kinerja dan e-TPP.

Dari sisi regulasi, untuk memberikan kejelasan dan kepastian karir PNS juga penegakan disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, telah tersusun Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 tahun 2021 Tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pada tahun 2021, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Semarang terhadap penegakan disiplin pegawai, telah diberikan hukuman disiplin kepada 30 PNS, mulai hukuman tingkat ringan kepada 7 PNS, hukuman disiplin tingkat sedang kepada 15 PNS dan hukuman disiplin tingkat berat kepada 8 PNS, dengan bentuk sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pembebasan jabatan bahkan sampai dengan Pemberhentian.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang dalam bidang kepegawaian dan diklat diantaranya adalah dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan pembinaan kepegawaian serta sosialisasi program dan kegiatan penunjang kepegawaian tidak dapat terlaksana.

Tabel 2.59.

Realisasi Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang Jabatannya	127 Orang (Lulus 100%)	127 Orang (Lulus 100%)	67 Orang (Lulus 100%)	74 Orang (Lulus 100%)	60 orang (Lulus 100%)
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	550 Orang	550 Orang	372 Orang	397 orang	397* orang
3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	NA	84,24	78,42	82,28	83,84

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2022

#### d. Pengawasan

Kinerja dalam penyelenggaraan unsur pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kota Semarang mendapatkan 5 (lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Rata-rata penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kota Semarang tahun 2021 sebesar 94,5%. Selain itu juga tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencapai level 3 (terdefinisi) sesuai level yang ditargetkan.

Dinamika Regulasi juga menuntut tugas dan tanggungjawab APIP menjadi lebih berat, yaitu sebagai auditor, reviuer, evaluator, pemantauan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas APIP untuk menunjang penugasan yang ada. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Fungsi Pengawasan adalah belum efektifnya penerapan SPIP pada OPD dan masih banyaknya temuan berulang dari hasil pemeriksaan.

Tabel 2.60.

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat, 2022

e. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung diselenggarakan oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Kinerja dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah pada tahun 2021 selain terlihat dari capaian SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi dan Survey Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat capaiannya, juga terlihat dari beberapa prestasi yang diraih, diantaranya Wali Kota Semarang menerima penghargaan sebagai Best Figure Digital Performance versi Twitter oleh Solopos Digital Awards 2021 tanggal 04/08/2021.

Meskipun demikian dalam evaluasi ini dapat disampaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas unsur pendukung antara lain adalah belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah, terlihat dari 16 Raperda yang ditargetkan untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda terealisasi hanya 12 raperda yang disetujui (75 %). Hal ini disebabkan karena masih dalam masa pandemi, sehingga terjadi pembatasan-pembatasan dalam pembahasan dan adanya kevakuman kegiatan rapat-rapat Dewan, disamping kurangnya kesiapan materi Raperda dari pengusul.

Tabel 2.61.

Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	Raperda	13 (dari target 16 Raperda)	6 (dari target 19 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	5 (dari target 16 Raperda)	13 (dari target 10 Raperda)
2	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.	%	82,6	85	85	85	85*
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)	Predikat	B	B	B	B	B*
4	Jumlah Produk Hukum : ● Peraturan Daerah ● Peraturan Wali Kota ● Keputusan Wali Kota	Perda Perwal SK Wali Kota	13 79 328	11 94 405	8 73 420	5 94 426	13 124 533
5	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	Kasus	15	18	35	28	23
6	Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya	Dokumen	9 Dok	58 Dok	85 Dok	130 Dok	94*
7	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	100	100	100	100	426*
8	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,88	83,25	83,81	86,68	28*

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 2022

f. Kewilayahan

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 16 Kecamatan di Kota Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilannya diantaranya: Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100%; Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (gerbang hebat); Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan; serta Ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN.

Terlihat dari Prestasi dan penghargaan pada tingkat regional Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Internasional yang diperoleh pada pelaksanaan Unsur Penunjang Kewilayahan tahun 202 , diantaranya:

- a) Peringkat I Trisakti Tourism Award 2021 (Kampung Jawi: Desa Wisata Kategori Kuliner) dari Universitas Trisakti Nasional.
- b) Kelurahan Kandri sebagai Desa wisata berkelanjutan (Kemenparenkraf Nasional).
- c) Juara III Petani Teladan tingkat Jawa Tengah (Kelurahan Kandri)
- d) Juara I Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa
- e) Penghargaan Kelurahan Pedalangan sebagai Kampung Iklim Kategori Utama (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Yang semua itu merupakan sinergitas masyarakat, stakeholder terkait, dan pemerintah daerah.

Hal-hal yang dilaksanakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam fungsi kewilayahan diantaranya:

Tabel 2.62.  
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat kemampuan lembaga masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan wilayah	%	76	77	80	83,30	85
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan	Kelurahan	177	177	177	177	177
3	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	85,43	92,66	97,77	97,64	98,55
4	Persentase RT yang usul dalam musrenbang	%	83,56	86,26	95,68	90,91	95,42
5	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang	%	70,23	75,00	53,05	53,28	54,95

Sumber : 16 Kecamatan, 2022 (Data diolah)

#### 2.1.4 Aspek daya Saing Daerah

##### 1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.

###### a. Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Wali Kota sepanjang 839.901 km, kondisi baik sepanjang 416.896 km (49,64%), kondisi sedang sepanjang 360,08 km (42,87%), kondisi rusak ringan sepanjang 39.238 km (4,67%) dan kondisi rusak berat sepanjang 23.687 km (2,82%)
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Untuk tahun 2020 di Bandara Achmad Yani dilakukan sebanyak 17.681 kali penerbangan kedatangan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.948.569 orang dan 17.673 kali penerbangan pemberangkatan. Dengan jumlah penumpang sebanyak 1.919.405 orang, serta penumpang transit sebanyak 21.144 orang.
- 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang, ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional.
- 4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus di dalam kota, antar kota bahkan antar provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Terminal Penumpang Tipe A Mangkang (kewenangan Pusat) berlokasi di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Terminal Penumpang Tipe B Penggaron (kewenangan Provinsi) berlokasi di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan, Terminal Penumpang Tipe C (kewenangan Pemerintah Kota Semarang) ada 3 (tiga) yaitu Terminal Cangkiran yang berlokasi di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen, Terminal Gunungpati yang berlokasi di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati dan Terminal Terboyo berlokasi di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk.
- 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.

b. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata/rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota.

c. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 176.042 pelanggan, meningkat menjadi 177.929 pelanggan pada tahun 2021. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air pada tahun 2021 masing-masing sebesar 51.100.925 m<sup>3</sup> dan Rp.293.638.470.000,-.

Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63.  
Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM  
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pelanggan	169.938	172.334	174.584	176.042	177.929
2.	Pemakaian Air ( Ribu M <sup>3</sup> )	53.391,90	53.301,67	53.739,007	51.155,716	51.100,925
3.	Penjualan Air ( Juta Rp )	199.803,56	206.117,95	257.636,22	276.735,11	293.638,47

Sumber : PDAM Kota Semarang 2022

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2021 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2015 sebanyak 345 buah menjadi 1.568 buah di tahun 2021, Selain itu jumlah hotel juga bertambah dari tahun 2015 sebanyak 124 buah menjadi 182 buah di tahun 2021, dengan rincian hotel berbintang sebanyak 92 buah dan hotel non bintang 90 buah, Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki daya

tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.

## 2. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

### a. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparaturnya Pemerintah, Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2021 angka kriminalitas sebesar 1253 kejadian, menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2020 yang sebesar 1330 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasikan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk terus meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban mulai dari lingkungan terkecil (RT) dilakukan pemasangan CCTV.

### b. Kemudahan Perijinan

Sampai dengan tahun 2021, Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Semarang, Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah: berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Tentunya dalam masa peralihannya, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan perijinan tersebut. Dan sampai dengan saat ini telah dilakukan integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem juga mengajukan ijin kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS,

serta tetap mengoperasionalkan SIIMUT bagi perijinan dan Non perijinan yang tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018.

Kemudahan investasi dapat diukur diantaranya melalui indikator Prosedur ijin terbit perijinan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan, dimana pada tahun 2021 telah mencapai 99,30% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 98,70%. Selain itu juga Survey Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan perijinan, dimana capaian pada tahun 2021 sebesar 90,10% keadaan ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 92,13%. Diharapkan adanya Kondisi iklim usaha Kota Semarang yang kondusif akan berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal selanjutnya.

### 3. Fokus Sumber Daya Manusia

Sejak tahun 2010 hingga 2020, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik ditahun 2010 maupun 2020, komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 70,66% Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 31,90% yang berada di bawah 50%. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD 2021 dan Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2021 ditunjukkan dengan capaian indikator program pembangunan Kota Semarang Tahun 2021 yang terkompilasi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Sebagai informasi, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menerapkan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang SIPD paling lambat tahun 2021. Sehingga Nomenklatur yang termuat dalam RKPD tahun 2021 akan berbeda dengan nomenklatur Program RPJMD, dan untuk menjaga kesinambungannya dilakukan pemetaan indikator kinerja yang ada. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 yang sekaligus sebagai Evaluasi Hasil terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021 terdiri dari beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2017, sebagaimana berikut:

- a. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target RKPD tahun 2021 sampai (\*) memiliki status :
  - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% ( $X > 90\%$ );
  - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75 % sampai dengan 90% ( $90\% \geq X > 75\%$ );
  - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ( $75\% \geq X > 65\%$ );
  - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ( $65\% \geq X > 50\%$ ); dan

- Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ( $X \leq 50\%$ )
- b. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target akhir RPJMD (\*\*) memiliki status :
- Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% ( $X > 90\%$ );
  - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% ( $90\% \geq X > 75\%$ );
  - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ( $75\% \geq X > 65\%$ );
  - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ( $65\% \geq X > 50\%$ ); dan
  - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ( $X \leq 50\%$ )
- c. Untuk Identifikasi Capaian pada periode akhir RPJMD (\*\*\*)
-  Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) lebih besar atau sama dengan 100% ( $100\% \geq X$ );
  -  Tidak tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) kurang dari 100% ( $X < 100\%$ );

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi,  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang,  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Program Terhadap Target Tahun 2021 yang sekaligus sebagai target akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

#### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2021 pada urusan wajib Pendidikan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula untuk capaian terhadap target akhir periode RPJMD. Meskipun demikian terdapat 8 indikator yang tercapai sesuai target () , sedangkan 4 indikator lainnya realisasinya dibawah target meski deviasinya sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pandemi, yaitu: APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK PAUD 3-6 tahun dan Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV. Meskipun demikian APK SD dan SMP diatas 100 yang artinya daya serap Lembaga Pendidikan terhadap penduduk usia sekolah telah melebihi kebutuhannya, hanya saja target yang ditetapkan diawal tidak mengantisipasi kondisi pandemi yang dampaknya secara global dirasakan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64.  
 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPd Tahun 2021 dan  
 Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
 Urusan Pendidikan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPd Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Pendidikan
	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Pendidikan
	Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	100,00	109,88	109,88 %	ST	111,67	109,88	98,40%	ST	▼	Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs	%	100,00	113,67	113,67 %	ST	115,59	113,67	98,34%	ST	▼	Dinas Pendidikan
	APK PAUD 3-6 tahun	%	85,73	83,01	96,83%	ST	85,73	83,01	96,83%	ST	▼	Dinas Pendidikan
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	%	4,00	5,00	125,00 %	ST	4,00	5,00	125,00 %	ST	●	Dinas Pendidikan
Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Pendidikan
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Pendidikan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPDP Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	100,00	80,51	80,51%	T	88,88	80,51	90,58%	T		Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Pendidikan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan pendidikan diantaranya:

1. Pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya teratasi, sehingga Pembelajaran masih menggunakan metode *blended learning* yaitu metode pembelajaran baru yang dilakukan dengan cara menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring (*online*).
2. Banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan purna tugas maupun wafat karena covid, sehingga mengurangi pelayanan yang ada karena terjadi perangkapan tugas.
3. *Refocussing* anggaran yang menyebabkan beberapa output kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. (pembangunan SMPN 45, SMPN 46 dan SMPN 47 maupun peningkatan kondisi bangunan sekolah secara fisik)

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Pencapaian kinerja pada Urusan Kesehatan terlihat dari beberapa prestasi dan Penghargaan yang diterima tahun 2021, diantaranya Inovasi “SAN PIISAN” (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang) yang mendapatkan penghargaan TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KIPP 2021, selain itu juga “Makin STRONG Lawan Covid-19 dengan VICTORI” mendapatkan PLATINUM AWARD dan FAVORITE AWARD kategori IT Kesehatan pada Indonesia healthcare Innovation Award V-2021 dan PUBLIC SERVICE OG THE YEAR SEMARANG 2021 dari MARKPLUS.

Adapun program RKPDP dan RPJMD pada urusan wajib Kesehatan pada tahun 2021 sangat baik, kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi.

Demikian pula pencapaian kinerja dari 9 indikator program terhadap target akhir RPJMD semuanya telah tercapai (●). Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.65.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Kesehatan, RSUD
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Swasti Saba Wistara	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar	%	90,00	90,00	100,00 %	ST	90,00	98,00	108,89 %	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	85,00	100,00	117,65 %	ST	85,00	100,00	117,65 %	ST	●	Dinas Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021				OPD	
			Target Kinerja RKPDP Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang	%	75,00	89,00	118,67 %	ST	75,00	89,00	118,67 %	ST		RSWN
	Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80=A; 80>TS<=95=A+, TS>95=A++)	%	75,00	81,85	109,13 %	ST	75,00	81,85	109,13 %	ST		RSWN

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Permasalahan yang dihadapi masih terjadinya pandemi COVID-19, dan banyak beredarnya miss informasi di masyarakat; perubahan perilaku terutama pada masa pandemi tidak dapat diubah dalam jangka pendek; serta GERMAS belum sepenuhnya dilaksanakan oleh semua lintas sektor terkait

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian kinerja indikator program RKPDP Tahun 2021 urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target RKPDP tahun 2021 maupun target akhir RPJMD dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 15 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan status pencapaian, yaitu tercapai () dan tidak tercapai () , maka kinerja program pada penyelenggaraan urusan PUPR cukup baik, terdapat 12 indikator yang mencapai bahkan melampaui target, sedangkan sisanya atau sebesar 25% nya tidak tercapai meskipun capaiannya diatas 85%, dimana sesuai kriteria dalam permendagri 86 mempunyai tingkat kelulusan tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66.

Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021

Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak	%	97,30	90,00	92,50%	ST	97,30	90,00	92,50%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase kawasan banjir dan rob	%	3,40	3,40	100,00%	ST	3,40	3,40	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	73,95	93,07	125,86%	ST	73,95	93,07	125,86%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang ber-IMB	%	55,00	58,89	107,07%	ST	55,00	58,89	107,07%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	74,00	77,98	105,38%	ST	74,00	77,98	105,38%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Teknis yang sesuai kriteria	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Kondisi Baik	%	75,32	80,04	106,27%	ST	75,32	80,04	106,27%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan untuk hunian	Lokasi	8,00	8,00	100,00%	ST	8,00	8,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	100,00	98,93	98,93%	T	100,00	98,93	98,93%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Persentase capaian pengentasan luas kawasan kumuh	%	100,00	99,86	99,86%	ST	100,00	99,86	99,86%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Kondisi Baik	%	75,32	80,04	106,27%	ST	75,32	80,04	106,27%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan untuk hunian	Lokasi	8,00	8,00	100,00%	ST	8,00	8,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

#### 4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2021 urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap target RKPD tahun 2021 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya dalam kategori capaian sangat tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan status pencapaian, yaitu tercapai (●) dan tidak tercapai (▼), maka kinerja program pada penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cukup baik, terdapat 6 indikator yang mencapai bahkan melampaui target, sedangkan sisanya atau sebesar 25% nya tidak tercapai meskipun capaiannya diatas 95%, dimana sesuai kriteria dalam permendagri 86 mempunyai tingkat kelulusan sangat tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Sat	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Cakupan kinerja penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik	%	100,00	96,32 %	96,32 %	ST	100,00	96,32 %	96,32 %	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	98,00	98,63	100,64 %	ST	98,00	98,63	100,64 %	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penerangan jalan umum	%	100,00	96,96	96,96%	ST	100,00	96,96	96,96 %	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2021 urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap target RKPD tahun 2021 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 7 diantaranya dalam kategori capaian sangat tinggi, sedangkan indikator Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran (15 menit) terealisasi sebesar 78,30% dari target sebesar 88 %, sehingga dalam kategori capaian tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan status pencapaian, yaitu tercapai () dan tidak tercapai () , maka kinerja program pada penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam kategori baik, terdapat 1 indikator yang capaiannya sebesar 88,97% atau kurang dari 100%.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.68.

Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Tingkat disiplin Aparatur	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		SatPol PP
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	jumlah peraturan perundangan daerah yang ditegakkan	Perda	31,00	31,00	100,00 %	ST	31,00	31,00	100,00 %	ST		SatPol PP
Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran	%	88,00	78,30	88,97%	T	88,00	78,30	88,97%	T		DAMKAR
	Persentase Cakupan Pelayanan Kebakaran	%	25,22	26,07	103,37 %	ST	25,22	26,07	103,37 %	ST		DAMKAR
Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPBD

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, antara lain:

1. Jumlah pos pemadam beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di tiap Kecamatan, sehingga response time bisa meningkat jika jarak tempuhnya semakin panjang;

2. Peningkatan jumlah kejadian penyelamatan (non kebakaran) yang ditangani tidak diimbangi peralatan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas yang memadai;
3. 50% personil pemadam kebakaran belum bersertifikasi, partisipasi relawan juga masih minim serta sarpras (mobil pemadam) sudah melebihi 10 tahun dan bahkan mobil tangga dalam kondisi rusak, sehingga berpotensi mengurangi kinerja pelayanan utamanya pada Gedung yang tinggi.
4. Belum ada RISP KP dan manajemen pemadaman kebakaran tingkat Kota Semarang;

#### 6. Urusan Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada Urusan Sosial menunjukkan kinerja yang baik. Terlihat dari 8 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, sebanyak 6 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, 1 indikator termasuk ke dalam kategori sedang, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah yaitu pada indikator Presentase panti sosial yang mendapat bantuan.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan status pencapaian, yaitu tercapai (●) dan tidak tercapai (▼), maka kinerja program pada penyelenggaraan urusan Sosial termasuk dalam kategori baik, terdapat 2 indikator Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Angka Kemiskinan yang tidak dapat memenuhi target kerjanya. Hal ini diantaranya disebabkan masih adanya dampak Pandemi Covid-19, sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana. Terkait dengan meningkatnya angka kemiskinan karena ada kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait tentang angka DTKS pada tahun 2021, tentang penentuan angka DTKS Tahun 2021 yang merupakan angka kesejahteraan sosial yang datanya meliputi: 6 metode pemutakhiran data kemiskinan dan Bantuan Kementerian/Lembaga lain (sehingga jumlahnya meningkat cakupannya). Selain itu juga belum terpenuhinya standar Sarana dan prasarana Rumah Authis, Sarana prasarana Rumah Tampung Among Jiwo yang *overload* (over kapasitas), Belum memiliki Posko tetap dukungan baik untuk kebencanaan Alam maupun Sosial.

Adapun Solusi yang diperlukan untuk penanganan permasalahan yang ada diantaranya: Pemberian Bantuan Sosial terhadap warga terdampak Pandemi Covid-19 yang didalamnya termasuk warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu juga perlu dilaksanakan verifikasi validasi DTKS secara berjenjang dan bertahap sehingga dengan data yang terupdate akan diketahui kondisi riil penyebab permasalahan, sehingga strategi penanganan dapat tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan sosial disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Sosial

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Sosial)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dinas Sosial)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Dinas Sosial)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	92,00	71,42	77,63%	T	92,00	71,42	77,63%	T		Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Jumlah	50,00	0,00	100,00%	ST	50,00	0,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Penanganan PMKS	%	98,00	100,00	102,04%	ST	98,00	100,00	102,04%	ST		Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Angka Kemiskinan	%	16,00	24,23	66,03%	S	16,00	24,23	66,03%	S		Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	4,00	16,15	403,75%	ST	4,00	16,15	403,75%	ST		Dinas Sosial

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 7. Tenaga kerja

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada urusan tenaga kerja menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang dievaluasi, terdapat 6 diantaranya dalam kategori pencapaian sangat tinggi, sedangkan 1 indikator dalam kategori berkinerja tinggi.

Pencapaian kinerja indikator RPJMD pada jika dilihat berdasarkan status pencapaian, yaitu tercapai (●) dan tidak tercapai (▼), maka kinerja program pada penyelenggaraan urusan tenaga kerja termasuk dalam kategori baik, terdapat 2 indikator, yaitu Persentase penempatan tenaga kerja AKAD, AKL, AKAN (capaian 98,44%) dan indikator Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (dengan capaian 75,25%).

Potret tentang kondisi ketenagakerjaan diantaranya dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan kemampuan daya serap tenaga kerja pada angkatan kerja. TPT Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 9,54% menurun bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,57%. Jika tidak diwaspadai, urusan ketenagakerjaan akan sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 secara global. Sehingga perlu perluasan kesempatan kerja, serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya optimalisasi kegiatan pembangunan dengan mekanisme padat karya dan pemanfaatan material berbahan dari lokal, selain itu juga perlu didorong sertifikasi ketrampilan bagi pencari kerja, peningkatan peluang kerja mandiri melalui pelatihan kewirausahaan dan penciptaan kesempatan kerja serta informasi pasar kerja.

Berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimal Kab/Kota tahun 2021 ditetapkan bahwa UMK Kota Semarang sebesar Rp.2.810.025,- meningkat jika dibandingkan dengan UMK tahun 2020 yang sebesar Rp. 2.715.000,- dan masih tetap merupakan UMK tertinggi di Jawa Tengah. Dan kembali meningkat untuk tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 2.835.021,29,-

Tabel 2.70.

Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Tenaga Kerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Tenaga Kerja
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Tenaga Kerja
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Tenaga Kerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terampil	%	60,00	60,60	101,00%	ST	60,00	60,60	101,00%	ST	●	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peluang Kerja Mandiri	%	80,00	100,00	125,00%	ST	80,00	100,00	125,00%	ST	●	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN	%	90,00	88,60	98,44%	ST	90,00	88,60	98,44%	ST	▼	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	80,00	60,80	76,00%	Ti	80,00	60,20	75,25%	Ti	▼	Dinas Tenaga Kerja

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD ● Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ ) ▼ : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 10 indikator program yang di evaluasi, seluruh indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi dan mencapai target akhir RPJMD.

Kinerja pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan anak, terlihat dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2021 sebesar 95,67% meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 95,49%. Juga Rasio KDRT yang menurun dari tahun 2020 sebesar 0,029% menjadi sebesar 0,02% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan efektifnya fasilitasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pemerintah Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP), Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71.

Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan	Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	Organisasi	4,00	4,00	100,00%	ST	4,00	4,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Jumlah petugas perlindungan di Kecamatan	Orang	16,00	16,00	100,00%	ST	16,00	16,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan program pengarusutamaan gender	%	80,00	95,00	118,75%	ST	80,00	95,00	118,75%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	7,00	33,04	472,00%	ST	7,00	33,04	472,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	%	4,00	4,00	100,00%	ST	4,00	4,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penyelesaian pengaudan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyelesaian pengaudan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ ) : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 9. Pangan

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada urusan Pangan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya memiliki capaian sangat tinggi, dan semuanya berhasil mencapai bahkan beberapa melampaui target akhir RPJMD. Meskipun demikian permasalahan klasik yang ada, yaitu Produksi Pangan Kota Semarang yang belum mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga ketersediaan pangan sangat bergantung dari pasokan daerah sekitar masih terjadi. Sehingga Koordinasi yang intensif dan pemantauan secara kontinyu untuk memastikan pasokan pangan lancar dan terdistribusi ke semua wilayah selalu dilakukan. Selain itu juga edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang serta gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan lokal, serta pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi sumber daya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Pangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72.

**Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Pangan**

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Cakupan distribusi pangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan harapan	skor	88,10	89,10	101,14%	ST	88,10	89,10	101,14%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Penanganan Daerah rentan rawan pangan	Kelurahan	133,00	133,00	100,00%	ST	133,00	133,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan	%	80,00	91,27	114,09%	ST	80,00	91,27	114,09%	ST		Dinas Ketahanan Pangan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 10. Pertanian

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada urusan Pertanian menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan dari indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan semuanya memiliki status pencapaian sangat tinggi. Begitu pula jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD semuanya telah mencapai target akhir RPJMD nya.

Terkait dengan tertib administrasi pertanahan, pemerintah Kota Semarang mendukung program kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) untuk menargetkan seluruh tanah sudah bersertifikat di tahun 2025. Dukungan ini berupa pendataan data pertanahan melalui Monitoring dan evaluasi administrasi data pertanahan di kelurahan, Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan tata ruang dan bangunan, juga Survey primer data pertanahan. Beberapa kegiatan ini

sempat terunda dengan adanya pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi pada kerumunan warga untuk memutus ranyai penyebaran Covid-19.

Tabel 2.73.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPd Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Pertanahan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPd Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Negara	Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah	%	100% (23 kss)	117,39 % (27 kss)	117,39%	ST	100% (23 kss)	117,39 % (27 kss)	117,39%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tertib administrasi pertanahan (peningkatan Data Base Pertanahan)	%	66,00	100,00	151,52%	ST	66,00	100,00	151,52%	ST		Dinas Penataan Ruang

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 11. Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi pencapaian RKPd tahun 2021 pada urusan Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 15 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, terdapat 14 indikator dengan capaian sangat tinggi dan sisanya sebanyak 1 indikator termasuk capaian sedang, yaitu ketersediaan lubang pemakaman.

Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, masih terdapat 4 indikator yang belum tercapai, yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau (44,23 %), Persentase ketersediaan lubang pemakaman (37,54%), Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3 (46,06%) serta Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (63,88 %).

Salah satu bagian dari Urusan Lingkungan Hidup adalah Kinerja di bidang persampahan diantaranya meningkatnya cakupan pelayanan sampah, Pemanfaatan sampah organik menjadi eco-enzyme, budidaya maggot/BSF pemakan sampah organik. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga telah mempunyai Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan juga Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang memuat program/rencana pengurangan dan penanganan sampah, dimana dalam hal penanganan sampah dibutuhkan biaya pengelolaan baik pengurangan maupun penanganannya. Dalam kaitan ini Pemerintah Kota Semarang sedang dan akan merencanakan Pembangunan Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik

Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Skema KPBU memiliki peluang untuk dapat diterapkan pada kegiatan penanganan sampah lainnya seperti integrasi pengelolaan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah. Saat ini telah dilakukan pengembangan atau optimalisasi TPST/TPS 3R Gemah yang berlokasi di Jl. Gemah Barat, Kel. Gemah, kec. Pedurungan. Setiap harinya TPST Gemah mampu mengelola sampah sebanyak 10 m<sup>3</sup> yang berasal dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis. Sampah yang masuk ke TPST kemudian diolah sesuai dengan jenisnya, untuk sampah pilah kategori plastik kemasan maupun plastik lembaran dipadatkan menggunakan mesin press, sementara sampah bahan organik diolah menjadi kompos. Pada tahun 2021, dilakukan pembangunan TPST/TPS 3R yang berlokasi di Jl. Tirta Agung kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik dan pengadaan sarana prasarana penunjang yang meliputi bangunan/kontainer penyimpanan kompos, mesin pencacah sampah, kendaraan motor roda 3. Harapannya dengan adanya infrastruktur TPST/TPS 3R mampu mengoptimalkan penanganan sampah dengan menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dll) dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal dipermukiman yang padat dan kumuh.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.74.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 Urusan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	46,26	44,23	95,62%	ST	46,26	44,23	95,62%	ST		Disperkim
	Persentase ketersediaan lubang pemakaman	%	55,00	37,54	68,25%	S	55,00	37,54	68,25%	S		Disperkim

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dokumen	5,00	5,00	100,00%	ST	5,00	5,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH)	indeks	55,00	59,60	108,36%	ST	55,00	59,60	108,36%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air	hektar	65,00	65,00	100,00%	ST	65,00	65,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah taman keanekaragaman hayati (kehati) yang terbangun	unit	5,00	5,00	100,00%	ST	5,00	5,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	50,00	46,06	92,12%	ST	50,00	46,06	92,12%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	65,00	63,88	98,28%	ST	65,00	63,88	98,28%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	45,00	47,00	104,44%	ST	45,00	47,00	104,44%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan sekolah Adiwiyata yang peduli dan	%	10,00	10,00	100,00%	ST	10,00	10,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	berbudaya lingkungan											
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	90,00	90,00	100,00%	ST	90,00	90,00	100,00%	ST		Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang dievaluasi semuanya termasuk pada kategori pencapaian sangat tinggi dan memenuhi target akhir RPJMD. Selain itu juga diperolehnya Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, Kategori “Dukcapil Bisa” Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Besar Tahun 2021. Inovasi pelayanan yang diterapkan diantaranya adalah pelayanan *Drive Thru*, yaitu memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, dimana masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mencetak ulang KTP-el, KIA, KK atau pelayanan lainnya yang diadakan setiap hari Sabtu dan dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Semarang Tengah, Pedurungan dan Genuk. Hal lain yang dilakukan adalah dibangunnya aplikasi online untuk permohonan cetak dan perekaman KTP-el serta aplikasi berbasis android Si D’Nok sehingga mempermudah pelayanan tanpa harus bertatap muka.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75.  
 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
 Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang  
 Tahun 2016-2021  
 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan dokumen Kependudukan (405.825 lembar)	%	98,11	105,70	107,74%	ST	98,11	105,70	107,74%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil (48.919 lembar)	%	93,42	104,26	111,60%	ST	93,42	104,26	111,60%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan	lembar	262,00	262,00	100,00%	ST	262,00	262,00	100,00%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi data kependudukan	elemen data	42,00	42,00	100,00%	ST	42,00	42,00	100,00%	ST		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : e.Monev Perencanaan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Meskipun semua indikator program capaiannya telah memenuhi target akhir RPJMD, namun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan masih dijumpai, diantaranya:

1. Kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Selama pandemi memerlukan pelayanan secara daring sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 untuk mengurangi tatap muka yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Kurang optimalnya sarana pendukung server sehingga menyebabkan kurangnya minat masyarakat pada pelayanan online dan kendala penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Online Terpusat. Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat bahwa Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan SIAK Online Terpusat, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapannya antara lain hambatan pada proses konsolidasi, penyusunan laporan data kependudukan dan tidak terdapat web service.
2. Kurang optimalnya informasi mengenai sistem antrian online dan tata cara mengenai pelayanan online administrasi kependudukan (aplikasi SiD'nOK Dukcapil), sehingga banyak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang ditunjukkan melalui media sosial dinas ataupun kanal pengaduan masyarakat Lapor Hendi.
3. Belum berfungsinya fasilitas Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat (lokasi di Kantor Balaikota dan Kantor Dinas Dukcapil Kota Semarang) karena terkendala permasalahan teknis.
4. Masih perlunya peningkatan kerjasama untuk penerbitan akta kelahiran (80,45% dari target 90%) dan KIA (61,79% dari target nasional 30% dan target daerah 75%).

### 13. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun 2021 pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kinerja yang kurang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, Terdapat 5 indikator yang menunjukkan capaian sangat tinggi, dua indikator memiliki capaian tinggi, 1 indikator sedang dan 1 indikator dengan capaian rendah. Namun jika kondisi ini dilihat dari ketercapaian target akhir RPJMD, penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB terdapat 4 indikator yang telah berhasil mencapai target dan 5 indikator lainnya belum mencapai target. Kelima indikator tersebut adalah: Cakupan PUS umur istri < 20 tahun (0,58%); Cakupan PUS unmet need (10,89%); Cakupan tingkat putus pakai (DO) alat kontrasepsi (19,63%) dan Peserta KB Aktif (73,88%) serta Cakupan keaktifan anggota Bina Keluarga (39,39%).

Disisi lain pada tahun 2021 Kota Semarang menerima beberapa penghargaan diantaranya: Juara 3 Lomba Pengelola KB Teladan PPKBD Tingkat Nasional; Juara 1 Lomba Pengelola KB Teladan PPKBD Tingkat Provinsi; serta Juara 2 Lomba Akseptor Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,58	86,21%	T	0,50	0,58	86,21%	T		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS unmet need	%	7,00	10,89	64,28%	S	7,00	10,89	64,28%	S		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	%	11,20	19,63	57,06%	R	11,20	19,63	57,06%	R		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	TFR	Rasio	2,00	2,00	100,00%	ST	2,00	2,00	100,00%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Peserta KB Aktif	%	77,04	73,88	95,90%	ST	77,04	73,88	95,90%	ST		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keaktifan anggota Bina Keluarga	%	60,02	53,03	88,35%	T	60,02	53,03	88,35%	T		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Masih tingginya tingkat putus alat kontrasepsi (DO) antara lain disebabkan terjadinya kendala pada Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan

Kegagalan Penggunaan MKJP; kurang optimalnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jejaringnya; serta masih perlunya pengembangan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Sedangkan tingginya cakupan PUS Unmet need disebabkan terjadinya kendala dalam kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, minimnya minat kepesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, kurang efektifnya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan karena kebijakan PPKM; belum optimalnya kepesertaan KB Pria serta kurang optimalnya edukasi kepada PUS yang menunda kehamilan tetapi tidak ber KB.

Kurangnya cakupan Peserta KB Aktif diantaranya disumbangkan kurang optimalnya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja. Selain itu juga karena PPKM sehingga Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) serta Pembinaan Terpadu Kampung KB mengalami pembatasan.

Dalam menurunkan cakupan PUS yang istrinya <20 tahun telah dilakukan beberapa upaya, antara lain: Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal; Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal, serta Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

#### 14. Perhubungan

Hasil evaluasi pencapaian RKPd tahun 2021 pada urusan Perhubungan menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 12 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Namun jika dilihat dari ketercapaian target akhir RPJMD, penyelenggaraan urusan perhubungan terdapat 9 indikator yang telah berhasil mencapai target dan 3 indikator lainnya belum berhasil mencapai target meskipun capaiannya diatas 90%. Ketiga indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD yaitu: Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (92,85%); Persentase kendaraan lulus uji laik jalan (49,77%); Persentase trayek angkutan umum yang optimal (54,28%).

Persentase kendaraan lulus uji laik jalan ditargetkan 55,04% baru mencapai 49,77% atau mencapai target 90,43%, menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 54,96%. Hal ini disebabkan karena banyak kendaraan angkutan yang tidak aktif melaksanakan uji laik jalan. Dari jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 65.495 kendaraan yang aktif melakukan uji laik jalan hanya sebanyak 32.596 kendaraan. Sedangkan Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik ditargetkan 100% menjadi 92,85%. Capaian ini sama dengan realisasi tahun 2020. Tidak bertambahnya prasarana perhubungan dikarenakan belum dibangunnya Terminal Type C Cangkiran tahap II karena adanya efisiensi anggaran untuk mendukung penanganan pandemi covid-19.

Persentase trayek angkutan umum yang optimal ditargetkan 69% terealisasi 54,28% atau mencapai target sejumlah 78,67%. Hal ini menurun dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 57,65%. Hal ini disebabkan banyak pemegang ijin trayek yang armadanya sudah melebihi masa pakai/armada tua tidak bisa melakukan peremajaan armada sehingga trayek yang mestinya terlayani angkutan umum menjadi kosong.

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.77.  
 Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
 Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
 Urusan Perhubungan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat disiplin Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail)	%	65,00	65,09	100,14%	ST	65,00	65,09	100,14%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase simpang yang dilengkapi ATCS	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	100,00	92,85	92,85%	ST	100,00	92,85	92,85%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	90,00	90,11	100,12%	ST	90,00	90,11	100,12%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan lulus uji laik jalan	%	55,00	49,77	90,43%	ST	55,00	49,77	90,43%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis	%	90,00	90,05	100,06%	ST	90,00	90,05	100,06%	ST		Dinas Perhubungan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Persentase trayek angkutan umum yang optimal	%	59,00	57,65	97,71%	ST	59,00	57,65	97,71%	ST		Dinas Perhubungan
	Jumlah koridor BRT	koridor	8,00	8,00	100,00%	ST	8,00	8,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 15. Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2021 termasuk dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang dimiliki, hanya 1 indikator yang menunjukkan capaian tinggi yaitu pada indikator pemasangan wifi di area publik (realisasi 120 lokasi dari target 150 lokasi), sedangkan 8 indikator lainnya dalam capaian sangat tinggi. Namun jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 7 indikator telah tercapai dan 2 indikator lainnya belum mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang belum mencapai target adalah: Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city) dan jumlah wi-fi di area publik.

Selain itu kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2021 terlihat dari diperolehnya penghargaan di tingkat Nasional maupun Jawa Tengah, diantaranya: Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2021 kategori Layanan Public (MNC Portal), Penghargaan atas kinerja dalam membangun Smart City dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat (Jaringan Media Siber Indonesia), Predikat Outstanding Achievement Sistem Pengelolaan Pengaduan tahun 2020 juara 3 (Kementerian PAN & RB), Penghargaan KPID Kota Informatif Adikarya Tinarbuka (KPID Provinsi Jawa Tengah) dan Penghargaan Kategori Kepala Daerah Responsif terhadap Pengaduan Masyarakat (Jawa Pos Radar Semarang).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78.

Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Urusan Komunikasi dan Informasi

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPDP Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bandwidth domestik dan internasional	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
	CCTV di ruang publik	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
	Domain dan sub domain semarangkota.go.id	domain	190,00	911,00	479,47%	ST	190,00	911,00	479,47%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
	Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city)	%	100,00	97,00	97%	ST	100,00	97,00	97,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
	wi-fi di area publik	lokasi	150,00	120,00	80,00%	T	150,00	120,00	80,00%	T		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja RKPDP pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang

menjadi alat ukur keberhasilan, 10 diantaranya mempunyai capaian sangat tinggi, 1 indikator dengan capaian Tinggi dan 1 indikator dengan capaian Sangat Rendah. Sedangkan jika capaian kinerja dibandingkan terhadap target akhir periode RPJMD, terdapat 9 indikator program yang telah mencapai target, sedangkan 3 indikator lainnya tidak berhasil mencapai target akhir RPJMD.

Ketiga indikator yang tidak berhasil mencapai target adalah: Persentase pengendalian dan manajemen pengawasan koperasi (52,23 %); Prosentase Peningkatan Omset Koperasi (-10,91 %), dan Prosentase meningkatnya kualitas Usaha Mikro yang dibina (45,23%). Pandemi covid-19 berdampak pada pencapaian kinerja pada urusan Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk diantaranya peningkatan kualitas dan Omset Koperasi.

Hal ini disebabkan: Rendahnya daya beli anggota ke koperasi, karena terdampak Pandemi Covid-19. Banyaknya anggota koperasi terdampak Covid 19 yang mengambil simpanannya, sehingga mengganggu Perputaran modal Koperasi. Selain itu juga kebijakan Internal masing-masing koperasi untuk membatasi pemberian pinjaman kepada anggotanya, sebagai langkah menekan angka kemacetan pinjaman.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi aktif	%	88,60	88,61	100,01%	ST	88,60	88,61	100,01%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengendalian dan manajemen pengawasan koperasi (400 + 50 koperasi dari 718 Koperasi)	%	62,67	52,23	83,34%	T	62,67	52,23	83,34%	T		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	30,00	32,54	108,47%	ST	30,00	32,54	108,47%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	%	88,60	88,61	100,01%	ST	88,60	88,61	100,01%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Prosentase Peningkatan Omset Koperasi	%	0,80	-10,91	0,00%	SR	0,80	-10,91	0,00%	SR		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	%	60,00	45,23	75,38%	T	60,00	45,23	75,38%	T		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	%	15,00	16,45	109,67%	ST	15,00	16,45	109,67%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Akses Pembiayaan	%	40,00	79,26	198,15%	ST	40,00	79,26	198,15%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	%	50,00	87,91	175,82%	ST	50,00	87,91	175,82%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan UMKM	Prosentase Akses Pemasaran (1)	%	23,00	71,00	308,70%	ST	23,00	71,00	308,70%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

1. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional.
2. Sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi.
3. Minimnya pengetahuan pelaku usaha Mikro tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strateginya.
4. Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko.
5. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro.
6. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi perlindungan produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI

## 17. Penanaman Modal

Terdapat 9 indikator dalam urusan Penanaman Modal yang menjadi ukuran keberhasilan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dan pelaksanaan RKPD tahun 2021, dari 9 indikator tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik karena seluruhnya berada pada kategori capaian sangat tinggi, dan telah mencapai target akhir RPJMD.

Dalam bentuk lain, kinerja penyelenggaraan dalam Urusan Penanaman Modal di tahun 2021 terlihat dengan diterimanya penghargaan Juara 1 Layanan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Nasional, Predikat "A" Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dan lolos sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015, serta Terbaik 2 Nasional (Layanan Investasi) dan lolos sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9000:2015. Beberapa upaya peningkatan minat investasi di Kota Semarang pada tahun 2021 diantaranya melalui pameran dan temu usaha, diantaranya: Pameran Bali Investment Trade and Tourism Expo (ITT) 2021, Pameran Torism, Trade & Investment, Pameran Jakarta ITT Expo 2021 dan Pameran Jogja TITAF Expo 2021. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal saat ini adalah belum optimalnya insentif fasilitas investasi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.80.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang  
Tahun 2016-2021  
Urusan Penanaman Modal

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPMPTSP)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Tingkat disiplin aparatur (DPMPTSP)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DPMPTSP)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPMPTSP)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Pranata	Buah	2,00	2,00	100,00%	ST	2,00	2,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Investor	408,00	416	101,96%	ST	408,00	416	101,96%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP (%)	%	99,00	99,33	100,33%	ST	99,00	99,33	100,33%	ST		Dinas PM dan PTSP

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai PMA dan Nilai PMDN (dalam juta)	Juta	2192400,00	22.538.063,41	102,80%	ST	2192400,00	22.538.063,41	102,80%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Jumlah	87,00	90,13	103,60%	ST	87,00	90,13	103,60%	ST		Dinas PM dan PTSP

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 18. Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan pemuda dan olahraga tahun 2021 baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran, semua indikatornya termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 8 indikator telah tercapai sesuai target, sedangkan 1 indikator lainnya belum mencapai target yang diharapkan karena dampak pandemi covid 19 yang masih dirasakan. Indikator tersebut adalah Persentase wirausaha muda mendapat bantuan yang hanya terealisasi 78% (6 kegiatan) dari target 85% (7 kegiatan) yang ditetapkan.

Pembangunan kepemudaan meliputi upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disisi lain Pembangunan di bidang keolahragaan akan memberikan kenyamanan bagi pelaku olahraga untuk mendapatkan pembinaan keolahragaan, termasuk pengaturan standar sarpras keolahragaan.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga telah mengalami peningkatan yang signifikan dan dimanfaatkan oleh publik. Hal ini tidak lepas dari minat dan kesadaran berolahraga masyarakat Kota Semarang yang meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keolahragaan perlu dilakukan upaya pemenuhan terhadap standarisasi sarpras olahraga sebagaimana ketentuan yang mengatur. Keberadaan 6 Gelanggang OR yang representative dan berfungsi merupakan wujud dukungan pemerintah dalam layanan kepemudaan dan olahraga, meliputi : Gelanggang Olahraga Manunggal Jati, Gelanggang Olahraga Tri Lomba Juang, Stadion Citarum, Stadion Sidodadi, Lapangan Tenis Tambora dan Sirkuit Mijen.

Keberhasilan yang diperoleh dalam penyelenggaraan Urusan kepemudaan dan OR pada tahun 2021, diantaranya: partisipasi pengiriman Atlet kota Semarang mewakili PON XX di Papua sebanyak 110 atlet dan mendapatkan 6 emas, 15 Perak dan 16 Perunggu. Selain itu juga sebagai Juara Umum POPDA, Juara 1 lomba Festival Keterampilan Golongan Siaga Putra dan Penggalang Putra, Juara 1 lomba Pramuka Peduli Award Kategori Event, Juara 1 Lomba Gugus Depan SD Berprestasi dan Juara 1 lomba Duta Humas yang semuanya pada tingkat Provinsi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021  
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	62,00	62,00	100,00%	ST	62,00	62,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase wirausaha muda mendapat bantuan	%	85,00	78,00	90,00%	ST	85,00	78,00	90,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Prosentase organisasi pemuda aktif	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPDP Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Jumlah event olahraga tingkat kecamatan dan kota	%	100	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar	jumlah	39,00	39,00	100,00%	ST	39,00	39,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 19. Statistik

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan statistik tahun 2021 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari indikator tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah yang menjadi ukuran keberhasilan, mempunyai kategori capaian sangat tinggi, dan dapat mencapai target akhir RPJMD.

Isu penting yang sudah menjadi kebutuhan saat ini adalah data statistik dan sektoral yang valid, terpadu, yang sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kemudahan akses data ini menjadi ukuran pelayanan pemerintahan di Bidang statistik. Untuk itu perlunya koordinasi lintas institusi dalam hal ini Pemerintah Daerah dengan BPS serta Perguruan Tinggi lainnya untuk membentuk forum data yang akuntabel.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan urusan statistik tahun 2021 diantaranya:

- Meningkatkan ketersediaan data statistik pembangunan daerah dan terwujudnya Semarang Satu Data, serta Pemutakhiran Data Statistik Spasial pada Sistem Informasi Geospasial Warga Kota Semarang (TEGAL WARENG) untuk kemudahan pengguna data dalam pencarian data statistik yang lebih informatif dan inovatif. Selain itu juga pemutakhiran terhadap Sistem Informasi Portal Semarang Satu Data (dari [semarsatata.semarangkota.go.id](http://semarsatata.semarangkota.go.id) menjadi [data.semarangkota.go.id](http://data.semarangkota.go.id)), serta perubahan database menjadi per wilayah dan per gender.
- Menyusun buku publikasi Statistik Sektoral Daerah Kota Semarang, serta perpustakaan Statistik Digital yang merupakan kompilasi buku digital dan bisa diakses melalui web digital.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan statistik disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Statistik

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah	%	86,00	86,00	100,00%	ST	86,00	86,00	100,00%	ST		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Dalam penyelenggaraan Urusan Statistik, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Belum terpenuhinya kapasitas SDM dalam menangani pengelolaan data statistik sektoral di tiap perangkat daerah, sehingga berdampak pada belum optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektor secara tepat dan benar ditataran Pemerintah Kota Semarang;
2. Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya dalam Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang; dan
3. Belum tersusunnya regulasi tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

## 20. Persandian

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan persandian tahun 2021 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi dan telah mencapai target akhir RPJMD.

Untuk menghadapi tantangan terkait Teknologi Informasi dan keamanan server Informasi Pemerintahan, diperlukan sumber daya aparatur yang memadai, Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan nirsangkal suatu informasi atau dokumentasi Pemerintah. Disamping itu juga updating software pada server untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan cloud linux, immunify 360, kernelcare, litespeed web server dan Secure Socket Layer (SSL).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan persandian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Persandian

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Persandian Daerah	Terpasangnya Lisensi untuk Keamanan Informasi	paket	1,00	1,00	100,00 %	ST	1	1	100%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
	Terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Semarang	%	100,00	100,00	100,00 %	ST	100	100,00	100,00%	ST		Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 21. Kebudayaan

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan kebudayaan tahun 2021 sampai dengan cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 5 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator kategori rendah, dan 1 indikator sisanya termasuk kategori sangat rendah.

Lebih dalam lagi, ketika disandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 5 indikator yang telah mencapai target, sedangkan 3 indikator lainnya tidak dapat memenuhi target akhir RPJMD. Ketiga indikator dimaksud adalah: Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya, Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal dan Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya. Hal ini bisa dipahami bahwa selama kondisi pandemi Covid-19 dimana terdapat pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga event-event/kegiatan pada sanggar-sanggar seni yang telah direncanakan dengan menampilkan kegiatan seni dan budaya dari lokal tidak bisa dilaksanakan, karena kendala anggaran yang teralokasi untuk penanganan Covid-19 juga mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Disisi lain keberhasilan penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2021 ditandai dengan anugerah Gold Winner REI Award atas penghargaan tertinggi Kota Lama Semarang, perihal proses peremajaan atau revitalisasi Kota Lama Semarang kategori heritage, yang diselenggarakan oleh Federasi Realestate Dunia (FIABCI). Selain itu juga sebagai Penyaji Terbaik II pada Event Bersama KEDUNGSEPUR yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Urusan Kebudayaan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021				OPD	
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya	%	80,00	93,25	116,56%	ST	80,00	93,25	116,56%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	%	80,00	42,37	52,96%	R	80,00	42,37	52,96%	R		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	%	90,00	41,03	45,59%	SR	90,00	41,03	45,59%	SR		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	%	80,00	42,37	52,96%	R	80,00	42,37	52,96%	R		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	111,42	111,42%	ST	100,00	111,42	111,42%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan kebudayaan diantaranya: belum optimalnya tempat pertunjukan seni budaya yang representatif; belum terpeliharanya artefak dan cagar budaya dengan baik; semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya; dan belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.

## 22. Perpustakaan

Pencapaian kinerja RKPD urusan perpustakaan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya dalam capaian sangat tinggi, dan jika disandingkan dengan capaian target akhir RPJMD, ke lima indikator program dimaksud juga telah mencapai target.

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 adalah penyelenggaraan Pameran Buku secara Virtual, yang merupakan Pameran Literasi Virtual pertama kali di Indonesia, selain itu juga dilakukan Kegiatan Promosi Gemar Membaca sebanyak 4 kegiatan dengan tetap menerapkan prokes selama pandemi. Diharapkan keberhasilan kinerja tersebut diatas akan berdampak pada peningkatan literasi pada masyarakat, sehingga dapat menambah tingkat pemahaman informasi-informasi yang terdapat pada artikel-artikel, maupun pada buku bacaan yang beredar di masyarakat, peningkatan literasi atau minat baca tersebut akan berkesinambungan dengan pemahaman terkait berita-berita hoax yang belakangan ini marak beredar di masyarakat umum, sehingga diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.85.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Perpustakaan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021				OPD	
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara	judul	8.300	8.300	100,00%	ST	8.300	8.300	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Jumlah Rumah Pintar	unit	193,00	193,00	100,00%	ST	193,00	193,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2021 telah dapat berjalan secara optimal, namun demikian masih terdapat kendala, yakni:

1. Belum adanya Peraturan Daerah urusan (PERDA) Perpustakaan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang memiliki sinergi dengan urusan perpustakaan masih belum dapat diterapkan sesuai peraturan.
2. Kurangnya Sarana Prasarana yang memadai dalam pelaksanaan Pelayanan, sehingga berdampak pada kurang efisien serta kurang efektifnya pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat.
3. Belum adanya Tenaga Pustakawan sebagai Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan tahun 2021 yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas-tugas, atau permohonan informasi terkait perpustakaan.

### 23. Kearsipan

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Kearsipan pada tahun 2021 dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD, semuanya telah mencapai target yang ditetapkan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang pada tahun 2021 urusan Kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86.

Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Kearsipan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi hasil RKPD tahun 2021				Evaluasi hasil RPJMD tahun 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	status ***)	
Program Pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip dengan sistem administrasi yang baik	dokumen	29.000	29.000	100%	ST	29.000	29.000	100 %	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Aksesibilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan	%	69	69	100,00%	ST	69	69	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Dalam pelaksanaan Urusan Kearsipan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Belum optimalnya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, karena masih dilakukan penataan ruang di Gedung arsip. Selain itu, kegiatan penyusutan arsip hanya dapat dilakukan kepada beberapa arsip saja, mengingat dalam penyusutan harus memperhatikan retensi arsip yang tertuang dalam Perwal JRA No. 34 Tahun 2013, sehingga tidak semua arsip dapat diakuisisi.
2. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis ditunda pelaksanaannya selama pandemi, hal ini dimungkinkan mengingat kegiatan akuisisi dilaksanakan dengan terjun langsung ke OPD-OPD untuk pendataan terlebih dahulu sebelum ke tahap akuisisi. Meskipun demikian kegiatan preservasi preventif tetap berjalan dengan kegiatan fumigasi. Sedangkan akses arsip statis berjalan sebagaimana mestinya, meskipun arsip yang dipublikasikan di SIKN dan JIKN terbatas, dikarenakan belum adanya kebijakan yang mengatur autentisitas arsip statis yang akan diunggah ke sistem.
3. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun belum berjaan di semua OPD.

## 24. Kelautan dan Perikanan

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 sangat baik, kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Demikian pula jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, ke sembilan indikator program dimaksud juga telah mencapai target akhir RPJMD.

Beberapa upaya yang dilakukan selama tahun 2021, diantaranya Pembangunan kolam minapolitan di Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunungpati, melalui penyediaan bibit dan ikan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga pembangunan kolam budidaya ikan air payau di Kecamatan Tugu, yang diharapkan kedepannya sebagai penyedia bibit ikan air payau bagi masyarakat. Juga pelatihan budidaya ikan dalam ember, dan budidaya ikan menggunakan kolam terpal sebagai solusi atas keterbatasan lahan di perkotaan dalam upaya budidaya ikan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan kelautan dan perikanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status*)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status**)	Status***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perikanan
	Peningkatan sumber daya aparatur yang lebih profesional	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perikanan
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perikanan
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	2862,81	2.901,45	101,35%	ST	2862,81	2.901,45	101,35%	ST		Dinas Perikanan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	3625,17	3.810,67	105,12%%	ST	3625,17	3.810,67	105,12%%	ST		Dinas Perikanan
	Sentra perikanan terpadu	kawasan	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan konsumsi ikan perkapita	kg/kapita/	33,06	40,17	121,49%	ST	33,06	40,17	121,49%	ST		Dinas Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produk olahan hasil perikanan	ton	17113,32	17.506,11	102,30%	ST	17113,32	17.506,11	102,30%	ST		Dinas Perikanan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Meskipun semua indikator program telah dapat memenuhi target akhir RPJMD, namun masih terdapat permasalahan di dalam penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. Masih kurangnya Tempat Pelelangan Ikan di Kota Semarang untuk mengakomodir hasil tangkapan nelayan yang berada di wilayah Barat.
2. Masih dirasa kesulitan bagi pembudidaya ikan air payau untuk memperoleh bibit ikan air payau di Semarang.
3. Masih terdapat pengolah hasil perikanan yang menggunakan bahan pengawet dan pewarna yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Belum terampilnya masyarakat pelaku usaha perikanan dan masyarakat umum dalam mengolah ikan menjadi produk yang layak jual dan berdaya saing

## 25. Pariwisata

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan pariwisata pada tahun 2021 termasuk cukup baik meskipun dalam masa pandemi. Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang pariwisata, 3 diantaranya termasuk kategori sangat baik, 1 indikator dalam kategori tinggi. Demikian pula jika disandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD, 3 indikator program telah mencapai target, dan 1 indikator karena PPKM dan pembatasan rute penerbangan serta aturan perjalanan bagi wisatawan (convention) serta larangan event dan pertunjukan seni budaya menyebabkan Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) hanya terealisasi 1,32 malam dari target 1,6 malam.

Kinerja di bidang kepariwisataan juga terlihat dari perolehan penghargaan yang diterima, diantaranya: Desa wisata Kandri menerima penghargaan dan sertifikat desa wisata berkelanjutan (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan juga sebagai Juara Harapan 3 Tri Sakti Award Kategori Alam Desa Wisata (Trisakti Awards). Selain itu juga apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dan Industri Kreatif Tourism and Creative Campaign 2021 (Markplus. Inc & Markplus Tourism). Dan dikesempatan lain Desa wisata Wonolopo juga menerima penghargaan Juara Favorit Gelar Desa Wisata (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Pariwisata

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)	Hari	1,60	1,32	82,5%	T	1,60	1,32	81,5%	T		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)	Orang	8633	452.029	5236,06%	ST	8633	452.029	5236,06%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kualitas Promosi Wisata	%	1,35	2,05	151,85%	ST	1,35	2,05	151,85%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata antara lain sebagai berikut:

1. Belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan Kota Semarang.
2. Belum optimalnya kerjasama antara komunitas seni budaya, pelaku pariwisata dan antar asosiasi pariwisata.

## 26. Pertanian

Pencapaian kinerja RKPD urusan pertanian pada tahun 2021 termasuk menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya dalam kategori capaiannya sangat tinggi, namun jika disandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 7 indikator yang telah mencapai target, sedangkan 2 indikator lainnya belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Indikator dimaksud yaitu: jumlah produksi pertanian (38.377,03 ton) dan jumlah produksi hasil peternakan (33.254,34 ton).

Beberapa faktor yang menyebabkan target produksi pertanian tidak tercapai yaitu: adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, di mana dari tahun 2016-2021 luas lahan baku sawah berkurang sebesar 1.482,48 ha yaitu dari 3.701,27 ha pada tahun 2016, menjadi 2.218,79 ha pada tahun 2021. Selain itu juga berkurangnya produktivitas tanaman perkebunan karena bertambahnya populasi tanaman yang mulai tidak produktif dan faktor iklim di mana curah hujan yang cukup tinggi pada tahun 2021 menyebabkan rendemen hasil tanaman perkebunan rendah.

Sedangkan Penurunan produksi hasil peternakan disebabkan antara lain: peningkatan harga pakan ternak yang tidak bisa dijangkau peternak, sehingga kualitas pakan yang diberikan tidak optimal, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ternak. Selain itu juga adanya wabah African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi, sehingga jumlah pemotongan babi menurun.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan pertanian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Pertanian

Program	Indikator	Sa- tu an	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Stat us ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan	Jumlah produksi pertanian	Ton	56657,00	38.377,03	67,74%	S	56657,00	38.377,03	67,74%	S		Dinas Pertanian

Program	Indikator	Sa tu an	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Stat us ***)	
Sarana Pertanian	Jumlah produksi hasil peternakan	Ton	34874,00	33254,34	95,36%	ST	34874,00	33254,34	95,36%	ST		Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sentra produk unggulan pertanian	Kawasan	4,00	4,00	100,00%	ST	4,00	4,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular	Kasus	26,00	24,00	108,33%	ST	26,00	24,00	108,33%	ST		Dinas Pertanian
	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)	Sertifikat	9,00	22,00	244,44%	ST	9,00	22,00	244,44%	ST		Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi	Kelompok	24,00	24,00	100,00%	ST	24,00	24,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 27. Perdagangan

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan perdagangan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator keberhasilan pembangunan bidang perdagangan, 7 diantaranya termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan 1 indikator masing-masing mempunyai predikat Tinggi dan Sedang. Namun jika disandingkan terhadap pencapaian terhadap target akhir RPJMD, masih terdapat 2 indikator program yang tidak dapat memenuhi target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Yaitu: Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representative (terrealisasi 18 pasar dari 21 pasar yang ditargetkan) dan Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas (realisasi 1,12 Milyar Dolar dari target 1,5 Miliar Dolar). Penyebab belum tercapainya target kinerja yang ada karena dampak pandemi yang secara global dirasakan. Sehingga terjadi penurunan permintaan barang dari Negara Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu Ekspor permintaan terhadap alat pelindung seperti masker dan baju APD sangat menurun secara signifikan karena Negara tujuan ekspor memproduksi sendiri dan mempunyai stok barang yang cukup.

Kinerja penyelenggaraan di bidang Perdagangan pada tahun 2021 juga ditandai dengan diperolehnya status sebagai Unit Metrologi Legal Kelas/Level A dalam surveillance berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal, dimana hanya terdapat 11 Unit Metrologi Legal berlevel A dari 430 Unit Metrologi Legal di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Urusan Perdagangan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	21,00	18,00	85,71%	T	21,00	18,00	85,71%	T		Dinas Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi Harga	keg	111,00	111,00	100,00%	ST	111,00	111,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas	milyar dollar	1,50	1,12	74,47%	S	1,50	1,12	74,47%	S		Dinas Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase barang produksi lokal yang diperdagangkan di toko swalayan	%	15,00	15,00	100,00%	ST	15,00	15,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kota Semarang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kemampuan produksi dan pemasaran UTTP perusahaan/produsen timbangan mengalami penurunan, sehingga berpengaruh terhadap jumlah potensi UTTP yang diterakan. Ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat menera-ulangkan UTTP yang dimiliki. Sementara birokrasi perusahaan juga tidak mudah untuk mengadakan sidak/pengawasan kemetrolgian.
2. Pengaplikasian Mesin EDC dalam rangka menjalankan Program E-Retribusi Pasar Tradisional, mengalami beberapa kendala teknis seperti jaringan internet pendukung, perubahan data di lapangan, dan kendala operasional mesin EDC
3. Pelaksanaan updating data toko modern di wilayah Kota Semarang, mengalami kendala kurang kooperatifnya para pelaku usaha dalam memberikan data yang diperlukan, sebagai sarana pendataan toko modern yang ada di wilayah Kota Semarang
4. Terkait dengan pasar tradisional, Kegiatan Revitalisasi Pasar Jangli terkendala dengan minimnya lahan yang representative untuk relokasi pedagang. Juga kurang memenuhinya standar baku output IPAL di RPU Penggaron.
5. Terkendalanya pengoperasian Pasar Johar pada akhir tahun 2021, dimana perilaku pedagang dan pengunjung yang kurang mempunyai kesadran dalam penggunaan fasilitas yang ada terutama toilet dan kurangnya pemahaman peraturan dalam pengembangan status Pasar sebagai Cagar Budaya.

## 28. Perindustrian

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2021 termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi. Demikian pula jika di sandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD, semuanya juga telah mencapai .

Kinerja pada urusan perindustrian tahun 2021 juga ditandai dengan terbangunnya Gedung Sentra IKM Logam, meliputi gedung produksi, gudang, gedung kantor dan pemasaran. Kedepan diharapkan menjadi tempat produksi yang representatif, memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM secara online, sehingga bisa dikenal dan bersaing baik di tingkat lokal maupun nasional. Gedung sentra IKM Loga mini merupakan relokasi tempat usaha IKM Logam Bugangan yang dulunya menmpati bantaran Sungai Banjir Kanal Timur yang terdampak Proyek Pelebaran Sungai Banjir Kanal Timur

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan perindustrian disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.91.**  
**Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan**  
**Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021**  
**Urusan Perindustrian**

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Perindustrian
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran .	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Perindustrian
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Perindustrian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri kecil	IK	2.805,00	2.840,00	101,25%	ST	2.805,00	2.840,00	101,25 %	ST		Dinas Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah industri kecil dan menengah	IKM	3.635,00	3.638,00	100,08%	ST	3.635,00	3.638,00	100,08 %	ST		Dinas Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penguatan Sentra Industri	%	100	100	100%	ST	100	100	100%	ST		Dinas Perindustrian
	Bertambahnya Industri Kreatif	Industri Kreatif	658	660	100,30%	ST	658	660	100,30 %	ST		Dinas Perindustrian

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 29. Perencanaan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Perencanaan pada tahun 2021 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan unsur penunjang Perencanaan, dimana sebagian besar indikatornya pada kategori sangat tinggi. Demikian pula capaian terhadap target akhir RPJMD, dimana hampir semuanya juga telah dapat mencapai target, bahkan beberapa diantaranya dapat melampaui target yang ada.

Keberhasilan pada unsur penunjang ini juga ditandai dengan prestasi dan penghargaan yang telah diraih, diantaranya:

1. Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas).

2. Anugerah Parahita Ekapraya (Utama) terkait Pengarustamaan Gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
3. Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara (Kementerian Kesehatan)
4. Penghargaan Kota Layak Anak (Nindya) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
5. Penetapan Kota dan Kabupaten Kreatif Subsektor Fesyen (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
6. Kota Terbaik I Penghargaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Tingkat Provinsi Jawa Tengah)

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Unsur Penunjang Perencanaan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	80,00	98,11	122,64%	ST	80,00	98,11	122,64%	ST		Bappeda
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	89,42	89,42%	T	100,00	97,88	97,88%	ST		Bappeda
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	89,54	89,54%	T	100,00	97,52	97,52%	ST		Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pengkomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	%	75,00	87,00	116,00%	ST	75,00	87,00	116,00%	ST		Bappeda
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	Capaian indikator sasaran misi 1	%	92,00	102,18	111,07%	ST	92,00	102,18	111,07%	ST		Bappeda

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPd Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Perencanaan Pembangunan Daerah	& 2 RPJMD terhadap target tahunan											
	Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	%	92,00	93,95	102,12%	ST	92,00	93,95	102,12%	ST		Bappeda
	Capaian indikator sasaran Misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	%	92,00	97,33	105,79%	ST	92,00	97,33	105,79%	ST		Bappeda
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)	%	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	100,00	ST		Bappeda
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya)	%	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	100,00	ST		Bappeda
	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian)	%	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	100,00	ST		Bappeda

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penunjang Perencanaan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya yaitu :

- a. Pengaruh pandemi terhadap seluruh aspek kehidupan berpengaruh pada pencapaian indikator makro di Kota Semarang;
- b. Untuk menyesuaikan kapasitas fiskal akibat pandemic dilakukan refokussing anggaran pada sub kegiatan atau output yang tidak dapat terlaksana.
- c. Belum optimalnya ketersediaan serta updating data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah.
- d. Terdapat penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD terhadap hasil pemetaan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga indikator kinerja kurang terjaga konsistensinya.
- e. Belum optimalnya potensi sumber pendanaan di luar APBD Kota Semarang dalam pelaksanaan berbagai program / kegiatan, diantaranya dalam penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kota Semarang.

### 30. Keuangan

Pencapaian kinerja RKPD urusan keuangan pada tahun 2021 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 10 indikator keberhasilan pembangunan unsur penunjang keuangan, seluruhnya termasuk dengan capaian kategori sangat tinggi, namun jika disandingkan capaiannya terhadap target akhir RPJMD terdapat 8 indikator yang telah mencapai target, dan 2 indikator lainnya belum dapat memenuhi target. Indikator tersebut adalah Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan (97,42%) dan Tingkat kemandirian keuangan daerah ( 50,14%).

Untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah diperlukan optimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah utamanya retribusi dan dana perimbangan, hal ini sebagai langkah antisipasi menurunnya dana bagi hasil akibat tidak tercapainya penerimaan pajak di tingkat Pusat. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, dimana semua sector pendapatan mengalami kontraksi, disisi lain dana perimbangan pusat ke daerah juga mengalami pengurangan. Untuk validasi data pertanahan yang juga akan berdampak terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2021 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/3766/2019, Nomor 4946/UP.01.01/3374/SPKS/XII/2019 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Semarang. Selain itu juga Perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 019.619/2020, Nomor B-01/M.3.10/Gs/01/2010 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai dukungan apabila terjadi permasalahan hukum di bidang keuangan daerah.

Prestasi dan penghargaan dalam pelaksanaan unsur penunjang keuangan selama 2021, antara lain:

1. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020 ( BPK RI).
2. TOP DIGITAL AWARD 2021 untuk kategori *Top Digital Implementation 2021 on Institution City Government Sector # Level Stars 3* (Majalah IT Works berkerjasama Asosiasi /Perusahaan Konsultan TI TELCO/Digital).

3. TOP DIGITAL AWARD 2021 untuk kategori *Top Digital on Solutions of Local Government Revenue 2021* (Majalah IT Works berkerjasama Asosiasi /Perusahaan Konsultan TI TELCO/Digital).
4. Peringkat ke 2 dalam pencapaian *Monitoring Centre of Prevention (MCP)* Tingkat Jawa Tengah, dengan kategori Optimalisasi Pendapatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Unsur Penunjang Keuangan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021				OPD	
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD
	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD
	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BAPENDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata persentase capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Prosentase kualitas pengelolaan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD, BAPENDA

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021				OPD	
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	%	100,00	97,42	97,42%	ST	100,00	97,42	97,42%	ST	▼	BPKAD, BAPENDA
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel	%	100,00	95,00	95,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	BPKAD, BAPENDA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	%	50,97	50,14	98,37%	ST	50,97	50,14	98,37%	ST	▼	BAPENDA

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD ● Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ ) ▼ : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam urusan penunjang keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan daerah serta pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung pembangunan.
2. Dengan adanya Wabah Covid 19 ini hampir semua sektor penerimaan pendapatan daerah termasuk dana transfer mengalami kontraksi, sehingga diperlukan refocusing untuk menyesuaikan pendapatan daerah.
3. Tidak tercapainya target BPHTB dikarenakan terbitnya Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor B.0254/Seskab/Ekon/07/2021 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dalam Masa Pandemi Covid-19, yang memuat proyek-poryek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional dikarenakan tariff 0%, termasuk Rencana Pembayaran BPHTB dari Program Merger PT. Pelindo, sehingga tidak bisa menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah.

### 31. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan semua indikatornya mempunyai capaian sangat tinggi, namun jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (83,84% dari target 84%).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Kota Semarang

melaksanakan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan/*inpassing* dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor P/2437/821.2/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan/*Inpassing* sebanyak 388 Pegawai. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi, untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Selain itu dalam rangka

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada unsur penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPd Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Unsur Penunjang Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021				OPD	
			Target Kinerja RKPd Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPd 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (BKPP)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian	%	79,00	91,79	116,19%	ST	79,00	91,79	116,19%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	84,00	83,84	99,81%	ST	84,00	83,84	99,81%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Prosentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	100,00	101,01%	ST	99,00	100,00	101,01%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021				OPD	
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
	Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	%	0,75	0,31	158,67%	ST	0,75	0,31	158,67%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Tingkat ketepatan waktu layanan dan keakuratan produk layanan	%	99,00	100,00	101,01%	ST	99,00	100,00	101,01%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian	%	79,00	91,79	116,19%	ST	79,00	91,79	116,19%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peserta Diklat kepemimpinan yang lulus	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase peserta Diklat prajabatan yang lulus	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang (1=sertifikasi mutu (ISO); 2 = sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

## 32. Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian kinerja RKPD urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan pada tahun 2021 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan dalam kategori sangat tinggi, meskipun belum memenuhi target akhir RPJMD. Hal ini terjadi karena harus menyesuaikan dengan pendapatan daerah, menyebabkan jumlah hasil kelitbangan yang tersosialisasi hanya terealisasi sebanyak 31 kajian, dari target sebanyak 35 kajian.

Adapun rincian pemanfaatan hasil kajian penelitian Tahun 2017-2021 ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Nilai
1.	Jumlah hasil kelitbangan terpublikasi	35	35	100,00%	0,40	40,00%
2.	Jumlah hasil kelitbangan tersosialisasi	35	31	88,57%	0,35	31,00%
3.	Jumlah hasil kelitbangan lembaga lain yang tersosialisasi oleh Bappeda	6	6	100,00%	0,05	5,00%
4.	Jumlah hasil kelitbangan yang dijadikan referensi atau acuan penelitian atau kebijakan	35	35	100,00%	0,10	10,00%
5.	Jumlah hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan	35	35	100,00%	0,10	10,00%
Persentase Hasil Kajian Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah						96,00%

Untuk kajian yang disusun pada Tahun 2021 antara lain :

1. Kajian pengembangan investasi di Kota Semarang;
2. Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang;
3. Kajian Kecamatan Pelayanan E-Government;
4. Kajian Capaian Pembelajaran Praktik di SMK Pada Era Pandemi Covid-19;
5. Kajian Potensi Mata Air dan Kearifan Lokal Masyarakat dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Air di Kota Semarang;
6. Kajian Pendekatan Eco-Socio Sistem dalam Pengelolaan Banjir di Kota Semarang.

Prestasi yang diperoleh dalam unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2021 adalah Juara I Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kategori Ekosistem Inovasi (Provinsi Jawa Tengah). Ke depan perlu optimalisasi alternatif pembiayaan pembangunan daerah, serta inovasi untuk lebih meningkatkan daya saing daerah.

Adapun terkait Indeks Inovasi Daerah yang terdiri dari 36 indikator penilaian, pada tahun 2021 Kota Semarang memperoleh skor sebesar 57,49 yang mendudukkan peringkat 20 dari 93 Kota yang ada. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini mendorong kompetisi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.95.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan

Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	96,00	96,00%	ST	100,00	96,00	96,00%	ST		Bappeda

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Kinerja Indikator Program pada Urusan Kelitbangan sebesar 96%, meskipun capaian tersebut belum mencapai target. Hal ini disebabkan tidak semua hasil kajian penelitian serta merta dimanfaatkan di tahun berkenaan, baik sebagai dasar penyusunan kebijakan atau berupa kutipan yang dipakai dalam dokumen perencanaan, melainkan ada yang dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan ataupun kutipan dokumen perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

### 33. Pengawasan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang pengawasan pada tahun 2021 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 7 indikator semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, semuanya telah mencapai target.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.96.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan  
Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Unsur Penunjang Pengawasan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Inspektorat

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPDP Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPDP 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Inspektorat
	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	90,00	100,00	111,11%	ST	90,00	100,00	111,11%	ST		Inspektorat
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	leveling	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Maturitas SPIP	leveling	3,00	3	100%	ST	3,00	3	100%	ST		Inspektorat
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	2,00	2,025	101,25%	ST	2,00	2,025	101,25%	ST		Inspektorat

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Masih terdapat permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Unsur Pengawasan, yaitu terdapat kebijakan terkait Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah dimana penilaian *baseline* indeks penerapan manajemen risiko tersebut langsung diberlakukan pada Tahun 2021. Sehingga Kota Semarang harus segera mempersiapkan instrument dan infrastruktur untuk penerapannya.

#### 34. Pemerintahan Umum

Pencapaian kinerja RKPDP terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada tahun 2021 mempunyai kinerja yang sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi, demikian halnya dengan pencapaian target pada akhir periode RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.97.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 Pemerintahan Umum

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun	Kejadian	4,00	1,00	100,00%	ST	4,00	1,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila	%	3,00	3,46	115,33%	ST	3,00	3,46	115,33%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara	Organisasi	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Kejadian Konflik Sosial Yang Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan	Kejadian	1,00	0,00	100,00%	ST	1,00	0,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbud hankam	%	80,00	80,00	100,00%	ST	80,00	80,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

### 35. Unsur Pendukung

Pencapaian kinerja RKPD pada unsur pendukung pada tahun 2021 mempunyai capaian kinerja yang baik. Kondisi ini terlihat dari 21 indikator kinerja yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan, 19 diantaranya mempunyai capaian sangat tinggi, sedangkan 2 indikator mempunyai capaian kinerja tinggi. Jika disandingkan dengan capaian terhadap akhir periode RPJMD, dari 21 indikator yang ada sebanyak 19 indikator telah mencapai target, dan 2 lainnya belum berhasil mencapai target akhir RPJMD. Kedua indikator tersebut adalah Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dan Jumlah raperda yang disetujui DPRD (terrealisasi 13 raperda dari 16 raperda yang ditargetkan). Hal ini disebabkan karena masih pemberlakuan PPKM, sehingga jadwal pelayanan dan metode layanan juga menyesuaikan dengan kebiasaan baru (online) . Dan beberapa pemohon (utamanya lansia dan atau kurang dalam penguasaan IT ) merasa enggan mengajukan layanan karena harus menyesuaikan diri dan menerapkan proses meskipun sudah diberikan bantuan layanan. Terkait dengan persetujuan raperda, disebabkan masih dalam masa pandemi, sehingga terjadi pembatasan-pembatasan dalam pembahasan dan adanya kevakuman kegiatan rapat-rapat Dewan, disamping kurangnya kesiapan materi Raperda dari pengusul.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan unsur Pendukung pada tahun 2021 , diantaranya dengan diterimanya beberapa penghargaan sebagai berikut:

1. BPR Bank Pasar mendapatkan TOP BUMD AWARD Tingkat Nasional untuk kategori : Pembina BUMD terbaik (Wali Kota Semarang), CEO BUMD Terbaik (Direktur Utama Perumda BPR Bank Pasar) dan BUMD Terbaik (Bintang Empat)
2. Juara I Stand Terbaik Pameran Offline dan Virtual Hybrid Expo Th.2021 di Pekalongan
3. Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 (PWI Pusat)
4. Wali Kota Semarang sebagai Best Figure Digital Performance versi Twitter ( Solopos Digital Awards 2021)
5. Best Digital Performance kategori Divisi Humas Pemda di Jawa Tengah (Solopos Digital Awards 2021)
6. Hendrar Prihadi sebagai Leader in Pandemic Data Management (MNC Group dalam Indonesia Visionary Leaders (IVL) 2021)
7. Wali Kota Semarang sebagai Kepala Daerah Inovatif 2021 kategori layanan public (MNC Portal)
8. Best Public Health Care - Promoting Community Engagement In Pandemic Prevention ( Indonesia Awards 2021 INews.id)
9. Penghargaan Kategori Kepala Daerah Responsif terhadap Pengaduan Masyarakat (Radar Semarang Award 2021 Jawa Pos Radar Semarang)
10. Penghargaan atas kinerja dalam membangun Smart City dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat (Jaringan Media Siber Indonesia)
11. TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik (Dinas Kesehatan (SAN PIISAN)
12. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (Puskesmas Gunungpati dan Gayamsari)

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada unsur pendukung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Unsur Pendukung

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016- 2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bag Adpemb, Humprot, TU, Bag RT
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD / Bag Perlengkapan
	Tertib pelaporan capaian	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Keuangan,

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016- 2021					OPD	
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	kinerja dan keuangan												Sekretariat DPRD
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST			Bagian Organisasi, Bag Perlengkapan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang	SPM	6,00	6,00	100,00%	ST	6,00	6,00	100,00%	ST			Bagian otonomi daerah
	Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJIP / LAKIP benar dan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST			Bagian otonomi daerah
	Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST			Bagian otonomi daerah
	Fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar kota antar negara	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST			Bagian otonomi daerah
	Persentase koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka otonomi daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST			Bagian otonomi daerah
	Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan	perda	427,00	447,00	104,68%	ST	427,00	447,00	104,68%	ST			Bagian Hukum

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016- 2021					OPD	
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	perundangan yang lebih tinggi												
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial masyarakat	kegiatan	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Bagian Kesra	
	Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Tapem	
	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Tapem	
	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	layanan	477.561,00	382.548,00	80,10%	T	477561,00	382.548,00	80,10%	T		Bagian Tapem	
	Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Tapem	
	Persentase kelurahan berbasis PATEN (se Kota Semarang)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Tapem	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Perlengkapan	
	Pengendalian pelaksanaan pembangun	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BLPBJ	

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016- 2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	an dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa											
	Peningkatan Kinerja BUMD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Perekonomian
	Koordinasi peningkatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Perekonomian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	raperda	16	13,00	81,25%	T	16	13	81,25%	S		Sekretariat DPRD

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung, diantaranya:

1. Rapat Kerja Nasional ADEKSI tahun 2021 sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan konsolidasi Pimpinan dan Anggota DPRD seluruh Indonesia tidak dapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, karena kondisi pandemi 19
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan daring (pertimbangan masa pandemi) termasuk jaringan internet yang memadai
3. Kurang maksimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta SDM pengelola JDIIH dan penanganan perkara
4. Adanya Pandemi COVID 19 menyebabkan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya, antara lain: Audiensi / Jalan Sehat Wali Kota Semarang dengan Masyarakat dan kegiatan yang bersifat lomba
5. Sangat dinamisnya perubahan kebijakan yang mengatur penataan organisasi menyebabkan seringnya terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsinya
6. Dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian penyebaran virus Covid-19, beberapa potensi bisnis BUMD menjadi berkurang

7. Pengembangan kompetensi dan pembinaan karier untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan belum terakomodir karena terbatasnya jumlah peserta diklat fungsional dan diklat teknis yang diadakan oleh LKPP sebagai instansi pembina
8. Pemberitaan tentang Kota Semarang masih dirasa kurang masif. Potensi-potensi unggulan misalnya potensi pariwisata kurang terpublikasikan dengan baik

### 36. Kewilayahan

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2021 pada unsur kewilayahan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula untuk capaian terhadap target akhir periode RPJMD. Meskipun demikian terdapat 15 indikator yang tercapai sesuai target (●), sedangkan 1 indikator lainnya realisasinya dibawah target (▼), yaitu indikator Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi sebesar 89,58% dari terget 95%.

Prestasi dan penghargaan pada tingkat regional Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Internasional yang diperoleh pada pelaksanaan Unsur Penunjang Kewilayahan tahun 2021 adalah :

- a) Peringkat I Trisakti Tourism Award 2021 (Kampung Jawi: Desa Wisata Kategori Kuliner) dari Universitas Trisakti Nasional
- b) Kelurahan Kandri sebagai Desa wisata berkelanjutan (Kemenparenkraf Nasional)
- c) Juara III Petani Teladan tingkat Jawa Tengah (Kelurahan Kandri)
- d) Juara I Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa
- e) Penghargaan Kelurahan Pedalangan sebagai Kampung Iklim Kategori Utama (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99.  
Capaian Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021 dan Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021  
Unsur Kewilayahan

Program	Indikator	Sa- tu- an	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Statu- s*)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Stat- us**)	Stat- us***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	16 Kecamatan
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	16 Kecamatan
	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	16 Kecamatan

Program	Indikator	Sa tu an	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	pelayanan	477.561,00	477.561,00	100,00%	ST	477561,00	477.561,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	%	95,00	89,58	94,29%	ST	95,00	89,58	94,29%	ST		16 Kecamatan
	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	kelurahan	177,00	177,00	100,00%	ST	177,00	177,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	kelurahan	177,00	177,00	100,00%	ST	177,00	177,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan KDH di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		16 Kecamatan

Program	Indikator	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021				EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021					OPD
			Target Kinerja RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target RKPD 2021	Status *)	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	%	55,00	56,12	102,04%	ST	55,00	56,12	102,04 %	ST		16 Kecamatan
	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	kegiatan	19.954,00	144.457,00	723,95%	ST	19954,00	144.457,00	723,95 %	ST		16 Kecamatan
	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)	kelurahan	177	177,00	100,00%	ST	177,00	177,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	95,00	95,42	100,44%	ST	95,00	95,42	100,44 %	ST		16 Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase jumlah Siskamling di lingkungan RT	%	90,00	94,60	105,11%	ST	90,00	94,60	105,11 %	ST		16 Kecamatan

Sumber : e.Monev Perencanaan

\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*) ST :  $X > 90\%$ ; T :  $90\% \geq X > 75\%$ ; S :  $75\% \geq X > 65\%$ ; R :  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR :  $X \leq 50\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Tidak Tercapai ( $X < 100\%$ )

Pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penunjang kewilayahan tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Masing-masing kecamatan memiliki permasalahan masing-masing. Adapun secara umum, permasalahan pada urusan penunjang kewilayahan antara lain:

- Masih minimnya Aparatur Sipil Negara dalam menguasai Teknologi Informasi yang menyangkut sistem aplikasi
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengalami penurunan akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
- Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan dan penularan COVID-19
- Masih terdapat Wilayah yang rawan banjir dan longsor (Semarang Selatan, Gajahmungkur)

- f. PHBS sebagian masyarakat masih kurang (membuang sampah sembarangan), dan masih terdapat wilayah yang tergenang air (Kelurahan Tanjungmas, Bandarharjo dan Kuningan, Kec Semarang Utara)
- g. Kondisi Jalan yang naik turun dan banyaknya truk muatan berat yang melintas dan sering macet di jalan tanjakan sehingga mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Pohon Tumbang di jalan raya & tidak ada alternatif jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas (Gunungpati)
- h. Sebagian besar wilayah masih rawan banjir, menyebabkan aktivitas masyarakat terdampak (Kecamatan Tugu dan Genuk)
- i. Seiring bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan mobilitas masyarakat semakin padat, banyak angkutan berat yang melintas sehingga menimbulkan kemacetan di jam-jam tertentu (Kecamatan Mijen, Pedurungan)
- j. Pembangunan sarana dan prasarana jalan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala status jalan yang belum tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Semarang (Kec Tembalang)
- k. Sarana Gedung dan inovasi layanan yang belum memadai (Kec Ngaliyan)
- l. Terdapat satu Aset tanah yang belum memiliki sertifikat (Kecamatan Gayamsari)

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap indikator keberhasilan program baik terhadap target RKPD Tahun 2021, maupun target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dalam kategori sangat baik. Terlihat dari sejumlah 313 indikator meliputi urusan konkuren baik wajib maupun pilihan, berikut Fungsi penunjang yang dilaksanakan terdapat sebanyak 291 indikator atau sebesar 92,97% termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 13 indikator atau sebesar 4,15% dalam kategori capaian Tinggi, 4 indikator atau sebesar 1,28% termasuk dalam kategori Sedang, 3 indikator atau sebesar 0,96% termasuk kategori Rendah, dan 2 indikator atau sebesar 0,64% termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Demikian pula evaluasi hasil terhadap target akhir RPJMD jika dikelompokkan sejauh mana ketercapaiannya, terdapat 266 indikator atau sebesar 84,98% telah tercapai, sedangkan sisanya sebanyak 4/7 indikator atau 15,02% tidak mencapai target akhir.

Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukan pembatasan kegiatan dalam masyarakat, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan siswa, aparatur sipil negara dan masyarakat secara umum sebagai sasaran kegiatannya, harus dilakukan penundaan dan penjadwalan ulang. Disamping itu juga terbitnya regulasi terkait refocusing anggaran yang berimplikasi pada dilakukannya rasionalisasi kegiatan melalui perubahan penjabaran APBD Tahun 2021 diantaranya juga untuk menyesuaikan pendapatan daerah yang berpotensi terjadi penurunan di beberapa sektor. Diantaranya Kunjungan wisata MICE, nilai investasi baik PMA maupun PMDN, Omset koperasi dan Usaha mikro, prosentase event yang mengapresiasi budaya lokal, jumlah penumpang transportasi massal (BRT) karena penerapan PKM selama pandemi, juga angka tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, cakupan PUS unmet need, tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) .

Secara makro, progress capaian 9 indikator tujuan dan 28 indikator sasaran pembangunan Kota Semarang sampai dengan tahun 2021 (akhir periode RPJMD), masih terdapat beberapa indikator yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang, diantaranya Nilai Investasi, Titik/ruas jalan rawan macet, peningkatan kunjungan wisata, dan pelaksanaan program pengembangan

kawasan, disamping angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Berikut capaian dari 9 indikator Tujuan dan 28 indikator Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021.

Tabel 2.100.  
Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target th berkenaan	Realisasi th berkenaan	Capaian thd target th 2020	Target akhir RPJMD	Capaian thd target akhir	
					2021	2021	%	2021	%	
MISI 1: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS (SEMARANG SEHAT DAN CERDAS)										
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	83,23	83,55	100,38 %	83,23	100,38 %
	1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,07	15,53	103,05 %	15,07	102,99 %	
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,96	10,78	98,36 %	10,96	96,08%	
			Angka Harapan Hidup	Tahun	77,26	77,51	100,32 %	77,26	100,10 %	
			Tingkat Kearifan Budaya Lokal		Persen	69,22	102,42	147,96 %	69,22	147,96 %
	2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	69,92	102,42	147,96 %	69,92	147,96 %	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	4,57	9,54	-8,75 %	4,57	-8,75 %
	3	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,3	69,41	98,73 %	70,3	98,73 %	
			Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	90	90,80	100,89 %	90	100,89 %	
			Angka Kemiskinan		Persen	4,53	4,56	99,76 %	4,53	99,76 %
	4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator	%	16,45	24,23	52,71 %	16,45	52,71 %	

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target th berkenaan	Realisasi th berkenaan	Capaian thd target th 2020	Target akhir RPJMD	Capaian thd target akhir	
					2021	2021	%	2021	%	
			Pemerintah Kota Semarang, realisasi kinerja : (BDT)							
			Persentase Penanganan PMKS	Persen	98	100	102,04 %	98	102,04 %	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat			%	83,17	82,97	99,76 %	83,17	99,76 %	
	5	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	83,17	82,97	99,76 %	83,17	99,76 %	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	97,56	95,67	98,06 %	97,56	98,06 %	
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (SEMARANG MELAYANI)										
3		Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai	> 70	69,78	96,92 %	>72	96,92 %	
		6	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	87,00	87,35	100,40 %	87	100,40 %
				Opini BPK	Opini / Predikat	WTP	WTP	100,00 %	WTP	100,00 %
				Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	>80/ A	68,52 / B	85,65 %	>80/ A	85,65 %
				Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah ( Nilai EKPPD )	Nilai	>3 / ST	3,4395	114,65 %	>3/ST	114,65 %

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target thd berkenaan	Realisasi thd berkenaan	Capaian thd target thd 2020	Target akhir RPJMD	Capaian thd target akhir	
					2021	2021	%	2021	%	
4	Terwujudnya kondusivitas wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban		Persen	48,8	41,92	85,90 %	48,8	85,90 %	
		7	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	kejadian	1.793	1.253	130,12 %	1.793	130,12 %
MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (SEMARANG TANGGUH)										
5	Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan		Persen	91,77	90,81	98,95 %	91,77	98,95 %	
		8	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna	Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	Persen	96	73	76,04 %	96	76,04 %
				Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	85	97,59	141,81 %	85	141,81 %
		9	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota	Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,4	3,4	100,00 %	3,4	100,00 %
				Jumlah titik/ruas rawan macet	titik / ruas rawan macet	2	3	83,33 %	2	83,33 %
		10	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai indeks	55	59,60	108,36 %	55	108,36 %
		11	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan sehat	Persen	100	98,77	98,77 %	100	98,77 %
		12	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai indeks	128,8	108,63	115,66 %	128,8	115,66 %

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target th berkenaan	Realisasi th berkenaan	Capaian thd target th 2020	Target akhir RPJMD	Capaian thd target akhir		
				2021	2021	%	2021	%		
MISI 4: MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN										
MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF (SEMARANG BERDAYA SAING)										
6	Meningkatnya Produktivitas ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	6,5	5,16	79,38 %	6,5	79,38 %	
		13	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Nilai investasi	Juta Rupiah	21.924.000	22.538.063,406	102,80%	21.924.000	102,80%
				Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,41	28,12	89,53%	31,41	89,53%
				Nilai Ekspor	US\$	1.522.987.000	1.117.549.543	73,38%	1.522.987.000	73,38%
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	9	-18,46	0,00%	9	0,00%
		14	Meningkatnya Produk Unggulan Daerah	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,54	28,65	104,03%	27,54	104,03%
				Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra/Kecamatan)	Jumlah	7	7	100,00%	7	100%

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Semarang secara umum dapat terpilah dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; pembangunan yang masih diprioritaskan di wilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah; daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat; masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan; pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

yang belum optimal, disamping diperlukan juga strategi penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 diberbagai sektor.

### 2.3.1. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2023

Permasalahan pembangunan di Kota Semarang diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Semarang. Yang menjadi catatan, gambaran umum di Kota Semarang tidak semua mencerminkan penurunan capaian namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Semarang dengan dasar bahwa Kota Semarang adalah kota metropolitan yang tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti halnya angka kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi minor lainnya, apalagi pasca pandemi menunjukkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meskipun posisi Kota Semarang saat ini untuk beberapa indikator makro ekonomi masih diatas rata-rata Jawa Tengah bahkan tingkat nasional.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:  
Belum optimalnya penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin; masih perlunya optimalisasi lembaga sosial untuk perlindungan masalah sosial; masih perlunya penguatan jaring pengaman sosial; serta kualitas lingkungan permukiman yang masih perlu ditingkatkan.
- b. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:  
Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan pendidikan karakter, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal; masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan, masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum mencapai sasaran (Hipertensi dan Diabetes Militus), masih terdapat balita stunting; masih tingginya angka pengangguran; serta masih perlu ditingkatkannya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Pembangunan yang masih diprioritaskan diwilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah, dengan akar permasalahan yaitu : akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan.
- d. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.

- e. Masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan, dengan akar permasalahan yaitu: ketersediaan akses pangan yang belum optimal dan perlunya mengurangi ketergantungan pada sumber bahan pangan tertentu, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan tidak produktif untuk meningkatkan pemenuhan gizi keluarga. Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran tentang pentingnya lumbung pangan di tiap wilayah.
- f. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan, dengan akar masalah: masih adanya genangan banjir dan rob serta tanah longsor; minimnya sistem peringatan dini kebencanaan, serta upaya pengurangan resiko bencana yang masih rendah.
- g. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu lebih ditingkatkan lagi kualitasnya terkait dengan terbitnya regulasi yang sangat berpengaruh pada struktur keuangan, perencanaan pembangunan dan pengawasan internal daerah, dan masih cukup tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat apalagi menjelang Pilkada.

Selain memperhatikan permasalahan yang dirumuskan dari data dan informasi yang sudah ada, perumusan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu sebagai berikut:

1. Penanganan dampak pandemi Covid-19

Tahun 2021 merupakan tahun kedua meluasnya pandemi Covid-19 yang dialami oleh Kota Semarang maupun daerah-daerah lain. Selain mengakibatkan kerugian yang besar di bidang sosial maupun ekonomi, adanya pandemi ini juga merupakan ujian bagi ketahanan daerah dalam menghadapi krisis. Melihat angka kasus penularan yang cukup tinggi terutama pada pertengahan tahun 2021, dapat dikatakan bahwa penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Semarang maupun daerah-daerah lain belum maksimal. Hal ini diperparah dengan adanya varian virus *delta* yang dapat menyebar dengan lebih cepat. Di sisi lain, keterbatasan sarana prasarana kesehatan dalam menampung lonjakan pasien yang harus menerima perawatan khusus juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi perlu dilakukan secara lebih cepat dan tepat agar Kota Semarang mampu bertahan pada kondisi pandemi dan segera keluar dari kondisi krisis tersebut.

Berbicara mengenai ketahanan kota/daerah dalam penanganan pandemi, dimensi kepemimpinan dan kelembagaan merupakan dua hal yang cukup esensial. Setiap langkah dan segala bentuk penanganan pandemi membutuhkan keterlibatan kepemimpinan dan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, menyiapkan struktur kelembagaan dan kepemimpinan yang baik sangat penting bagi daerah khususnya dalam penanganan pandemi. Dalam hal ini, Wali Kota Semarang sejak awal kemunculan pandemi secara tanggap membentuk lembaga yang ditugaskan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Semarang yang kemudian disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Semarang. Gugus tugas tersebut melibatkan seluruh instansi pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal termasuk dengan

melibatkan masyarakat hingga pada level rumah tangga (*household*). Pelibatan masyarakat dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Semarang ini juga sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran atau penularan Covid-19 di masyarakat Kota Semarang.

Mengingat bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat maupun daerah, terutama dengan tingginya lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi di pertengahan tahun 2021, pemilihan kebijakan yang tepat akan membantu daerah meningkatkan ketahanannya dalam menghadapi pandemi. Saat ini, terdapat dua langkah utama yang diharapkan dapat mencapai hal tersebut yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membatasi mobilitas masyarakat agar penyebaran virus dapat ditekan, serta vaksinasi secara bertahap kepada seluruh masyarakat untuk membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) terhadap Covid-19.

Kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah tentu tidak serta merta hanya memikirkan aspek kesehatan masyarakat, namun penetapan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat terutama selama masa pandemi dari sisi ekonomi masyarakat dengan harapan daerah akan menjadi lebih berketahanan atau tangguh baik aspek kesehatan, ekonomi maupun kesejahteraannya. Karena itu, dimensi kelembagaan dan kepemimpinan ini menjadi *lead sector* yang kemudian akan mempengaruhi ketahanan dalam dimensi/aspek lainnya seperti kesehatan, kesejahteraan dan ekonomi dalam membangun ketahanan Kota Semarang selama masa pandemi.

Dampak utama yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 adalah dampak terkait kesehatan. Penanganan Covid-19 di Kota Semarang menerapkan setidaknya dua skema dengan memperhatikan pedoman dari Kemenkes dan BNPB. Skema pertama diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan, maka penanganannya adalah melakukan isolasi mandiri di rumah selama memungkinkan dan akan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui media *telemedicine*. Skema kedua diperuntukkan bagi pasien dengan gejala sedang hingga berat (kritis) maka diwajibkan menjalani isolasi dan akan dirawat di rumah sakit rujukan. Upaya penanganan Covid-19 di Kota Semarang juga dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat atau komunitas dalam memperkuat pertahanan pencegahan penyebaran virus penyebab Covid-19. Strategi tersebut dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas di tingkat RW yang beranggotakan sejumlah anggota masyarakat dari daerah yang bersangkutan. Strategi tersebut juga merupakan bagian sekaligus bentuk dukungan terhadap program penanganan Covid-19 berbasis masyarakat yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disebut dengan "*Jogo Tonggo*". Dengan kekuatan bergerak bersama dalam menangani penyebaran virus corona, ketahanan komunitas selama masa pandemi dapat diperkuat.

Di sisi lain, akibat pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, telah menimbulkan guncangan hebat dalam perekonomian nasional dan global. Dengan terganggunya perekonomian global dan nasional, maka perekonomian daerah juga tidak dapat terlepas

dari imbasnya. Di tahun 2020, perekonomian Kota Semarang mengalami pelambatan dikarenakan pandemi Covid-19. Pelambatan ini hampir terjadi pada seluruh sektor, dan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, perkembangan dan kontribusi sektor perdagangan dan jasa juga berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi daerah karena gangguan yang ditimbulkan akibat pandemi. Untuk mempertahankan kondisi perekonomian agar dapat tetap berlangsung namun tetap aman dari penularan Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah membatasi aktivitas pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain itu, pemberian insentif seperti relaksasi pajak serta pemberian bantuan sosial disiapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*). Ini merupakan upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan ketahanan daerah khususnya dalam aspek ekonomi.

## 2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Semarang serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
  - menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan dengan lingkup cara menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; memperkuat jaring Pengaman Sosial terutama untuk warga terdampak Covid-19; meningkatkan perlindungan sosial melalui kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin dengan cara penguatan kelembagaan dan penguatan kampung tematik.
- 2) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
  - meningkatkan kualitas pendidikan dan angka partisipasi sekolah dengan lingkup pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusi dan pendidikan non formal (kesetaraan);
  - meningkatkan layanan kesehatan dengan lingkup pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan masyarakat, pencegahan serta penanganan stunting, dan penurunan unmet need
  - menurunkan angka pengangguran dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan jaringan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja, terutama untuk lanjutan penerima manfaat Kartu Pra Kerja warga terdampak Covid-19.
  - meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan daerah dengan lingkup cara penguatan pemberdayaan gender serta penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kesenjangan wilayah, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
  - membangun konektivitas pusat-pusat ekonomi dengan lingkup cara peningkatan akses wilayah di pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi titik dan simpul kemacetan, serta meningkatkan kawasan strategis dan infrastruktur wilayah.

- 4) Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha di prioritaskan pada upaya-upaya untuk:  
Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro terutama yang terdampak oleh Covid-19, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.
- 5) Kedaulatan pangan dan energi, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: melakukan penguatan ketahanan pangan dengan lingkup cara Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan yang difokuskan pada peningkatan produksi, penguatan ketersediaan dan distribusi pangan di wilayah melalui lumbung pangan sampai ke RW, serta penanganan daerah rawan pangan.
- 6) Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:  
Menanggulangi kejadian bencana dengan lingkup cara mengatasi rob, banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi Kota Semarang, serta peningkatan upaya dalam mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana, selain itu juga pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi energi maupun barang yang bernilai ekonomi lebih.
- 7) Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
  - Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan birokrasi yang profesional dengan cara meningkatkan efektifitas kelembagaan perangkat daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan sadar hukum; serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan penerapan *smart city* serta penguatan akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan.
  - Memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan kemudahan investasi di Kota Semarang.

#### 2.4 Inovasi Daerah

Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah dilingkupi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101.  
Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
<b>INOVASI PERENCANAAN</b>		
1	e-POKIR	e-POKIR merupakan sistem dimana anggota DPRD memasukkan usulan dan dapat memantau perkembangan usulannya. Masyarakat yang mengusulkan Pokir ke DPRD juga dapat memantau. E-POKIR dapat menjamin keterbukaan dan akuntabilitas terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran.
2	Live streaming Musrenbang Tingkat Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Pemerintah Kota Semarang. Siaran langsung Musrenbang juga bisa disaksikan melalui videotron Pemerintah Kota Semarang.
3	Perencanaan berbasis spasial	Perencanaan berbasis spasial mengintegrasikan SIMPERDA dengan data spasial yang divisualisasikan dalam bentuk webgis untuk menyediakan data dan informasi yang berguna dalam proses perencanaan.
4	Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Pemerintah Kota Semarang mengembangkan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan (SIMPERDA), penganggaran (SIMANGGARAN) serta evaluasi (SIMMONEV). Sistem-sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan sistem penatausahaan APBD.
5	Alokasi anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (dedicated) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga proses partisipatif dari hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.
6	Keterbukaan informasi pada tempat publik	Untuk meningkatkan transparansi, APBD dapat diakses secara terbuka secara online dan offline. Informasi dapat diakses di Pusat Informasi Publik (PIP).
7	Gerbang Hebat	Gerbang Hebat adalah kependekan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat. Gerbang Hebat merupakan gerakan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada.
8	Situation room	Situation room digunakan untuk memantau situasi Kota Semarang. Di ruangan tersebut terdapat smart table, ruang diskusi, Call Center, dan ruang monitoring CCTV.
9	Kampung Tematik	Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; dan mengangkat kearifan

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
		lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
10	Smart City	Untuk pengembangan menuju Kota Cerdas, telah disusun Rencana Induk Semarang Kota Cerdas yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan. Semarang Smart City dapat diakses pada portal smartcity.semarangkota.go.id.
11	SiPU (SIM Jalan)	Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan di Kota Semarang, dikembangkan SIM Jalan yang memuat data jalan dan historis pembangunan/rehabilitasi jalan yang ada. Data disajikan dalam bentuk visual, tabular dan berbasis spasial (peta).
12	SiPU (SIM Pedestrian Jalan)	Untuk melihat kondisi eksisting serta rencana pengembangan pedestrian jalan, dikembangkan SIM Pedestrian yang memuat data visual, peta (spasial) dan data teknis.
13	Lapor Hendi	Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dikembangkan <i>complaint handling system</i> melalui Lapor Hendi, dimana masyarakat dapat melaporkan dan memantau permasalahan pembangunan yang ada.
14	One Map Semarang	Website yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang dapat diakses dan diunduh publik sebagai data spasial dasar yang wajib digunakan oleh seluruh stakeholder terkait di Kota Semarang.
15	Aplikasi Satu Data	Aplikasi yang akan menjadi sumber rujukan data-data penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang.
16	Pangripta	Inovasi Sistem informasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang
17	Jurnal Riptek	Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
18	Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat  - Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)	Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor pelayanan PDAM, non PDAM, pengolahan limbah, dan persampahan dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
19	Semarang SIAP	Merupakan inovasi yang berupa Sistem Informasi dukungan dari Bank Dunia yang adaptif, responsif, dan cepat untuk memetakan dampak Covid-19 di Kota Semarang. Berupa isian kuesioner online berbasis web dan android pada skala RT oleh Ketua RT setempat di seluruh Kota Semarang.
20	Website Siaga Corona	Website yang berisi mengenai berbagai informasi terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Mulai dari perkembangan kasus harian, informasi bantuan sosial, jadwal penyemprotan disinfektan, monitoring bahan pokok, ketersediaan alat kesehatan, dan informasi terkait lainnya.
<b>INOVASI PEMBANGUNAN</b>		
21	Ijus Melon	Ijus Melon merupakan Ijin Usaha Mikro Melalui Online, yang dapat diurus dalam waktu 4 menit, sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan mengajukan ijin usaha mikro.
22	Kredit Wibawa	Kredit Wibawa adalah kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara. Kredit Wibawa merupakan kredit tanpa agunan untuk usaha mikro dengan bunga 3% per tahun.
23	Call Center 112	Untuk kedaruratan, warga Kota Semarang dapat menghubungi 112 untuk mendapatkan layanan kedaruratan.
24	Kebijakan cashless pada layanan publik	Untuk mendukung terwujudnya <i>cashless society</i> , maka dikembangkan Kartu Semarang Hebat yang bisa digunakan untuk transaksi non tunai dengan diskon di berbagai merchant dan layanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Pembayaran non tunai juga dikembangkan untuk bis Trans Semarang dengan berbagai vendor penyedia (OVO, GoPay, TCash, Yap!)
25	Universal Health Coverage	Pemerintah Kota Semarang memberikan jaminan kesehatan gratis rawat inap di Rumah Sakit kelas 3 bagi seluruh warga Kota Semarang.
26	Konsultasi Dokter Gratis	Konter adalah sistem pemberian informasi kesehatan secara gratis kepada masyarakat melalui telepon dan WhatsApp.
27	Ambulans dan Motor Hebat	Untuk kegawatdaruratan, warga Kota Semarang dapat mengakses layanan Ambulans Hebat dan Motor Hebat secara Gratis.
28	Co-Working Space gratis	Untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Semarang mengembangkan Semarang Digital Kreatif (SDK) yang merupakan co-working space yang dapat dimanfaatkan secara gratis untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif.
29	Integrasi CCTV sampai ke RT	Pengadaan dan pemasangan 1 CCTV untuk 1 RT di seluruh wilayah Kota Semarang yang terintegrasi dengan situation room secara realtime.

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
30	1 (one) klik investasi	Sistem simulasi perizinan berbasis spasial mandiri tanpa harus hadir ke OPD terkait.
31	Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Jaringan Online)	Aplikasi cetak mandiri Salinan PBB, BPHTB serta tanda lunas PBB.
32	LAYANAN SIAGA (SIAP KAWAL KELUARGA)	Layanan SIAGA merupakan layanan Gratis yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan belum ada sebelumnya. Layanan ini terintegrasi dengan Puskesmas dan Call Center 1500-132 dengan Aplikasi PERIKSA-IN (Pelayanan Resiko Kesehatan Intervensi). Adapun jenis layanan yang diberikan antara lain Home Care, Penjemputan Pasien, Intervensi Lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Merujuk, P3K dan Pengobatan Gratis.
33	PUSTAKA (Puskesmas Tanpa Antrian)	Fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk berobat ke Puskesmas tanpa harus menunggu antrian. Masyarakat hanya cukup melakukan pendaftaran melalui SMS/WA ke Nomor Puskesmas yang dituju, Pasien selanjutnya akan mendapatkan nomer antrian dan jam kedatangan. Pada hari yang di tentukan, pasien menuju <i>Customer Services</i> untuk melakukan konfirmasi kedatangan dan langsung menuju poliklinik pemeriksaan.
34	GIAT (GERAKAN IBU ANAK SEHAT)	dengan pendekatan "5 SEKAWAN" merupakan upaya bergerak bersama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, untuk mencegah kematian ibu anak di Kota Semarang, dengan melibatkan: 1. Masyarakat; 2. Organisasi Profesi; 3. Puskesmas; 4. Rumah Sakit; 5. Lintas Sektor/Swasta.
35	KOMUKKU (Komunikasi Kesehatan Ibu)	Merupakan upaya promotif dan preventif penurunan Kematian Ibu di Kota Semarang melalui pendekatan <i>Service Oriented</i> dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Media Dalring (Dalam Jaringan), yang terdiri dari: 1) Aplikasi Sayang BUnda; 2) Jawil Bumil/Bufas dengan WhatsApp; 3) Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/Nifas melalui media sosial Instagram dan Youtube.
36	Si Lampah	Aplikasi pelaporan masyarakat khususnya mengenai sampah yang terjadi di lokasi sekitar masyarakat yang melapor. Secara khusus aplikasi ini memanfaatkan geo tagging yang melekat dalam smartphone.
37	LEGO Digital	Legalisasi Online Digital Dokumen Kependudukan.
38	Lumpia (Layanan Urus Mandiri	Penyelenggaraan layanan pengurusan, penerbitan dan digitalisasi dokumen kependudukan dengan sistem paket

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
	Paket Integrasi Administrasi Kependudukan) Dukcapil	(satu kali pengurusan, dokumen mendapatkan 2, 3, atau 4 dokumen terkait).
39	Klinik “APEL” (Anak, Perempuan dan Lansia)	merupakan bentuk implementasi pendekatan Whole of Government (WoG) dimana fungsi-fungsi pelayanan diintegrasikan satu atap secara koordinatif dan heterarkis.
40	“Si Kingkong”	Solusi Kesenambungan Asuhan Pasien Pasca Rawat Inap Dan Percepatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan.
41	JEMPOL TIGER JAPRI (Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif)	Penyelenggaraan layanan adminduk berbasis JEMPUT BOLA yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) dan Tim Gerak Cepat (TIGER CEPAT) Disdukcapil kepada penduduk berkebutuhan khusus (difabel, panti jompo, panti sosial dan orang sakit) atas pelaporan dan permohonan dari pihak keluarga dan instansi terkait yang berwenang.
42	Sistem Informasi Geografis Lampu Jalan (PJU)	Peralatan inventarisasi dan pemantauan aset titik lampu dan KWH meter PJU di Kota Semarang.
43	Lapor PJU	Pengaduan lampu jalan di lingkungan masyarakat dan jalan protokol dan ditindaklanjuti dengan SOP 2 hari kalender.
44	KB Perusahaan	Meningkatkan pelayanan KB kepada buruh pabrik agar mendapatkan pelayanan KB tanpa meninggalkan tempat kerja.
45	KB Online	Memberikan informasi pelayanan KB melalui media Online.
46	Puskesmas 5G	Layanan puskesmas yang Gak Ribet (buka sampai sore, Gak Antri (dengan layanan PUSTAKA), Gesit (paperless), Gratis (bagi masyarakat dengan KTP Kota Semarang), dan Go Cashless (bayar menggunakan Go Pay).
47	Si Imut (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu)	Merupakan sebuah sistem informasi berupa aplikasi berbasis web yang mengelola proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada pada Pemerintah Kota Semarang, dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan dengan mudah dan praktis, dilayani oleh sistem dimanapun dan kapanpun. Beberapa persyaratan perizinan yang sama juga dapat disatukan dengan prinsip berbagi data dan dokumen juga memfasilitasi berbagi data instansi yang terkait dengan perizinan di Pemerintah Kota Semarang.
48	Paket Perizinan Investasi Reklame dan IMB	Merupakan sebuah layanan percepatan paket perizinan, dalam hal ini perizinan reklame dan IMB pertandaan, layanan percepatan paket ini dituangkan dalam sistem informasi/aplikasi berbasis web yang terintegrasi pada

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
	Pertandaan (PARI MESEM)	aplikasi SI IMUT. Layanan ini menyederhanakan beberapa persyaratan yang terdapat pada perizinan reklame dan IMB pertandaan, sehingga persyaratan tersebut lebih sedikit dan sederhana, dengan cara berbagi pakai data dan dokumen digital diantara 2 (dua) izin yang berbeda. Layanan penyederhanaan ini difasilitasi dalam aplikasi SI IMUT.
49	Buka Invest Semarang Bisniz (SEMBIZ)	Merupakan sistem informasi berupa aplikasi berbasis web yang membantu investor maupun pelaku usaha untuk dapat saling menemukan peluang berusaha atau berinvestasi. Para pelaku usaha dapat menampilkan produk yang dijual maupun yang disewakan, sehingga investor dapat mencari dan memilih pelaku usaha untuk berinvestasi.
50	Pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin)	Inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 4 kWp yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
51	Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Land Fill Gass	Proses pemanfaatan gas metan yang dihasilkan oleh sampah di TPA Jatibarang menjadi energi listrik dengan kapasitas produksi 0,8 MW yang dibeli oleh PT. PLN.
52	Converter Kit CNG untuk Bus Trans Semarang	Pemasangan converter kit yang bisa menjadikan bahan bakar bus menjadi hybrid yang mengatur komposisi bahan bakar 70% CNG dan 30% solar yang lebih rendah emisi.
53	SANG PISANG (SAyaNGi dan damPingi Ibu dan Anak Kota SemaRANG)	Upaya promotif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Stunting di Kota Semarang melalui keterlibatan masyarakat, pengusaha dan Rumah Sakit, yang terintegrasi dengan inovasi kesehatan lainnya (Ambulans HEBAT, UHC, Jampersal), serta Aplikasi Sayang Bunda, Jawil Bumil/ Bufas dengan WhatsApp, Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/ Nifas melalui media Sosial Instagram dan Youtube.
54	Smart Lighting	Inovasi untuk mengatur penggunaan lampu PJU melalui sistem informasi.
55	Pemasangan panel surya di instansi Pemerintah Kota	Inisiatif untuk menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga listrik di kantor instansi pemerintah.
56	Kawasan kuliner Jalan Depok	Pengembangan Kawasan di Jalan Depok sebagai lokasi kuliner di malam hari
57	e-retribusi PKL dan Pedagang Pasar	Pembayaran retribusi jasa pada pedagang di pasar dan PKL yang terdaftar melalui non tunai.
58	Ijus Melon jilid 2 (Integrasi	Pengembangan dari Ijus Melon (Ijin Usaha Mikro Melalui Online) yang sudah ada menjadi Ijus Melon 2 (Integrasi

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
	Jaringan Usaha Mikro Melalui Online)	Jaringan Usaha Mikro Melalui Online) yang merupakan sistem untuk mengintegrasikan data UMKM untuk kepentingan pemberdayaan UMKM.
59	Si Pariem	Inovasi ini dilakukan untuk merubah pembayaran tunai menjadi non tunai dan terintegrasi dengan data perizinan pedagang yang ada di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Bentuknya adalah penggunaan e-money untuk pembayaran retribusi pedagang setiap harinya. Pedagang membayar menggunakan kartu yang kemudian dibayarkan menggunakan EDC yang disediakan oleh petugas di lapangan.
60	SEMARisk	Sistem informasi kebencanaan berbasis web dan android yang merupakan bagian dari manajemen bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat agar siap siaga terhadap situasi dan waktu yang tepat berdasarkan informasi dari EWS secara online.
61	GEBER SEPTI (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying)	Memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan mental anak dan remaja berbasis teknologi dengan menyediakan layanan konseling online dan edukasi mengenai bullying kepada peserta didik, orang tua dan stakeholder sekolah.
62	SAMPOKONG (Sedia Memberikan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kota Semarang)	Memberikan layanan pendidikan kesehatan untuk keluarga (preventif, promotif) dan Home Care. Kemudahan akses pelayanan kesehatan yang diberikan pada inovasi Sampokong ini dapat meningkatkan pencegahan penyakit, memulihkan kesehatan, memaksimalkan kemandirian serta meminimalkan dampak penyakit.
63	SECCON (Semarang Creative Content)	Inovasi dalam rangka pengembangan ekosistem industri kreatif, yang memperkuat jejaring kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku industri kreatif, khususnya pada sektor konten, animasi, dan game di Kota Semarang. SECCON memiliki rencana pengembangan yang terstruktur setiap tahun untuk menuju tujuan inovasi yaitu membangun ekosistem industri kreatif.
64	TUNGGAL DARA	Inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD di Kota Semarang sehingga dapat menekan angka kejadian DBD di Kota Semarang. Bentuk inovasi ini dimulai pada pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan DBD, misalnya siswa sekolah (Sicentik), PKK, dan kader kesehatan lingkungan. Serta diperkuat dengan sistem informasi DBD yang terintegrasi untuk mempercepat respon dan pengambilan keputusan.

NO	Inovasi	Gambaran Inovasi
65	ASIKK PAK (Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)	Pemkot Semarang melalui DP3A melihat peluang melalui perkembangan teknologi informasi untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perlindungan perempuan dan anak mulai dari pelaporan, pengaduan, pendampingan dan pencatatan serta evaluasi bahkan sebagai bahan sosialisasi/pencegahan dalam satu aplikasi kasus tindak kekerasan di Kota Semarang.
66	Pengembangan Rooftop Solar Panel Gedung Kantor Pemerintah Kota Semarang	Merupakan inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan, sebagai upaya penghematan energi sekaligus kampanye penggunaan energi yang ramah lingkungan di Kota Semarang. Tahap pertama dilaksanakan untuk mensupport penggunaan listrik di Gedung Balaikota (Kantor Wali Kota) yang memiliki kapasitas listrik sebesar 105 kVA, dengan didukung oleh panel tenaga surya berkapasitas 75 kWp.
67	ATM Beras	Terobosan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
68	Urban Farming Corner (UFC)	UFC bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh masyarakat Kota Semarang sebagai pusat edukasi dan informasi, juga tempat konsultasi mengenai pertanian perkotaan Kota Semarang. Pelatihan di UFC ini tidak hanya berisi penyampaian materi saja namun juga diikuti kegiatan lomba praktek penanaman sayur organik oleh para peserta.
69	YANKESTRAD (Pelayanan Kesehatan Tradisional)	RSUD KRMT Wongsonegoro menjadi Rumah Sakit pertama di Jawa Tengah yang memiliki program pengobatan tradisional. Konsep ini diangkat karena pengobatan tradisional Indonesia dengan berbagai ramuan herbalnya diyakini memiliki khasiat yang tidak kalah dengan obat-obatan lainnya. Pelayanannya meliputi akupuntur, akupressure, pijat anak, konsultasi obat herbal, pijat refleksi, dan pijat relaksasi.
70	GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro Lokal online Asli Semarang)	Inovasi layanan pemasaran online dalam bentuk aplikasi katalog produk yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Katalog Produk ini meliputi: produk kuliner, craft, fashion, dan ekonomi kreatif.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBD tahun 2023. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

#### 3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

Bank Indonesia memprediksi pemulihan ekonomi global tetap berlanjut di tengah merebaknya kasus Covid-19 varian *Omicron*, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral di dunia. Pemulihan tersebut diperkirakan tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun berlangsung lebih seimbang disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*) sebagai respon tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian *Omicron*. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara itu, tren investasi ke depan akan lebih mengarah pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur yang *high return* dan proyek investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon. Sektor pariwisata juga akan mulai pulih dengan dicabutnya *travel restrictions* di beberapa negara dan dicabutnya kebijakan wajib karantina bagi wisatawan dan pekerja migran dari luar negeri.

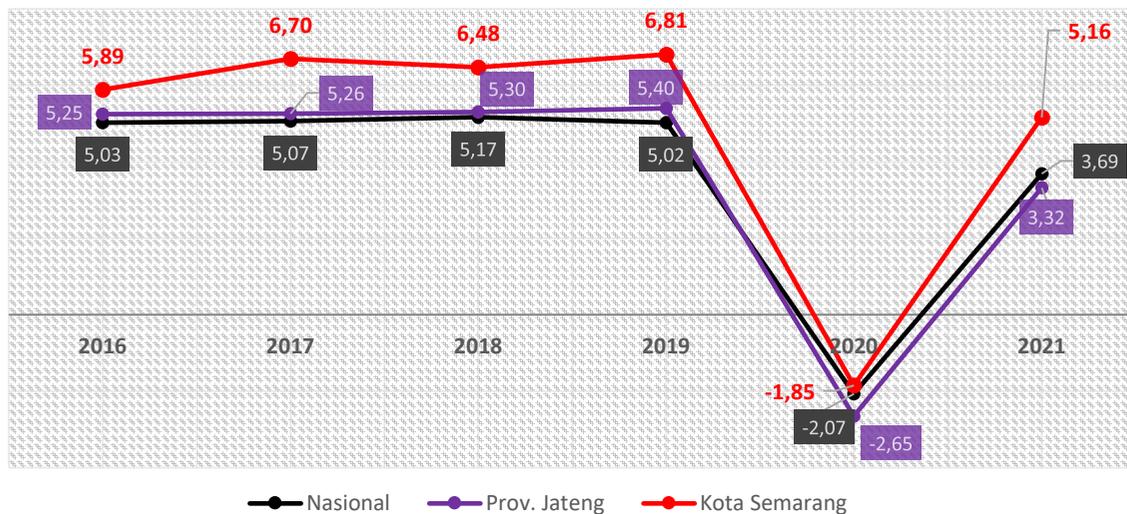
Tahun 2023 diproyeksikan menjadi tahun kunci untuk peningkatan ekonomi, sejalan dengan perkiraan kekebalan komunal atau *herd immunity* yang akan tercapai di tahun 2022 seiring dengan penyelesaian proses vaksinasi ke seluruh

masyarakat. Dampaknya, aktivitas ekonomi bisa berjalan maksimal dan mendorong pertumbuhan secara nasional. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Nasional ditargetkan pada kisaran 5,30 – 5,90%, sehingga tahun 2023 menjadi titik kunci ekonomi Indonesia melakukan akselerasi Pasca Covid-19. Investasi, ekspor, industri pengolahan, sektor pariwisata serta industri kreatif diyakini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi seiring dengan pemulihan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan tema RKP tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022-2023

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,32% dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 7,37%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 15,97%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di tingkat nasional, dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) nasional mengalami *rebound* sebesar 3,16% dibandingkan pencapaian tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -2,07%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 3,93 – 5,20%, dan terus meningkat hingga tahun 2023 setelah pandemi berakhir dengan digencarkannya vaksinasi kepada masyarakat, sehingga faktor-faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran 5,00 - 5,60%. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 3,0±1%, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Di level Kota Semarang, pertumbuhan ekonomi juga mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan capaian sebesar 5,16% setelah sebelumnya terkontraksi -1,85% di tahun 2020. Kondisi perekonomian diperkirakan akan terus membaik di tahun 2022 hingga mencapai 5,50 – 6,00%. Untuk tahun 2023, dengan mengusung tema pembangunan “Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Daya Saing Daerah yang didukung Potensi Unggulan Daerah”, Pemerintah Kota Semarang menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 – 6,10% dengan fokus pada perbaikan ekonomi lokal terutama pada UMKM/IKM. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah tumbuh tinggi di tahun 2021 (5,16%) dari basis yang rendah di tahun 2020 (-1,85%), di tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk tetap bisa menjaga momentum dan mempertahankan pertumbuhan positif tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengentasan kemiskinan terutama pada masyarakat yang terdampak langsung pandemi juga dilakukan, dengan target angka kemiskinan menurun hingga 4,04 – 4,24%. Hal ini diiringi dengan penyelesaian vaksinasi Covid-19 hingga dosis ketiga (*booster*) kepada seluruh masyarakat Kota Semarang dan penguatan sistem maupun fasilitas kesehatan daerah.



Sumber : BPS & Bappeda Prov.Jateng, 2022

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021

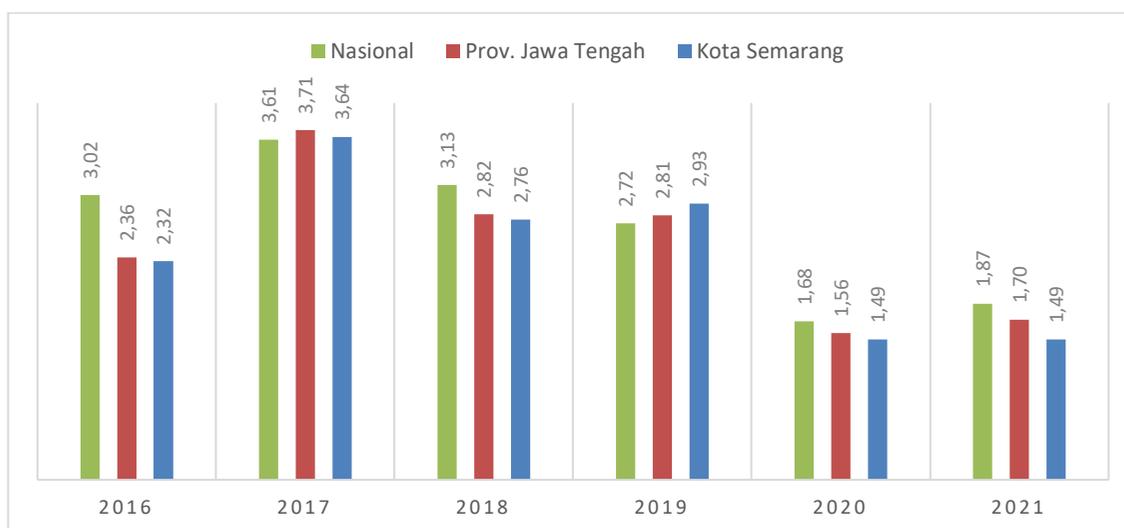
Dengan rata-rata 4,87%, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada periode 2016 sampai dengan 2021 selalu berada di atas level pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini cukup relevan karena Kota Semarang selama ini selalu menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK Jawa Tengah bahkan pada tahun 2021 kontribusi Kota Semarang mencapai 14,51%. Struktur perekonomian Semarang tersebar pada empat sektor ekonomi utama, sehingga terhindar dari ketergantungan pada satu sektor spesifik. Berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha, sektor terbesar di Kota Semarang, masih didominasi oleh industri pengolahan (26,23%), konstruksi (25,21%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14,54%), dan Informasi dan komunikasi (13,31%).

Prospek perekonomian Kota Semarang pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan mengalami percepatan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2022 dan 2023 ditargetkan optimistis di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Kota Semarang diperkirakan juga akan memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah pusat (Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019) untuk mengembangkan kawasan ekonomi regional “Kedungsepur”, yang dapat mendatangkan investasi hingga Rp107,58 triliun selama tahun 2019-2024 dan juga beberapa *major project* 2023 di Provinsi Jawa Tengah, terutama dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Batang.

Selain perbaikan infrastruktur, upaya lain yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yakni kemudahan perizinan sebagai daya tarik para investor untuk berinvestasi di Kota Semarang. Iklim investasi di Kota Semarang khususnya di sektor perdagangan dan jasa terbukti mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat dengan banyaknya pembangunan berbagai pusat-pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE yang akan meningkatkan perekonomian di Kota Semarang. Berbagai inovasi juga terus dilakukan, salah satunya dengan cara bersinergi dengan para pelaku UMKM agar produk unggulannya bisa menjadi produk ekspor yang diminati pasar internasional, serta melakukan kerjasama dengan toko retail modern untuk pemasaran produk UMKM. Proyeksi 2022 dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi masih disokong oleh konsumsi pemerintah yang masih tinggi seiring dengan program

vaksinasi dan stimulus PEN yang masih besar. Sedangkan ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan makin tingginya permintaan ekspor.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Inflasi nasional mengalami peningkatan dari 1,68% di tahun 2020 menjadi 1,87% di tahun 2021, sejalan dengan kenaikan inflasi di tingkat Jawa Tengah dari 1,56% di tahun 2020 menjadi 1,70% di tahun 2021. Di sisi lain, inflasi Kota Semarang tahun 2021 tercatat sebesar 1,49% atau sama dengan nilai inflasi tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menahan laju inflasi pada saat pandemi berdampak positif.

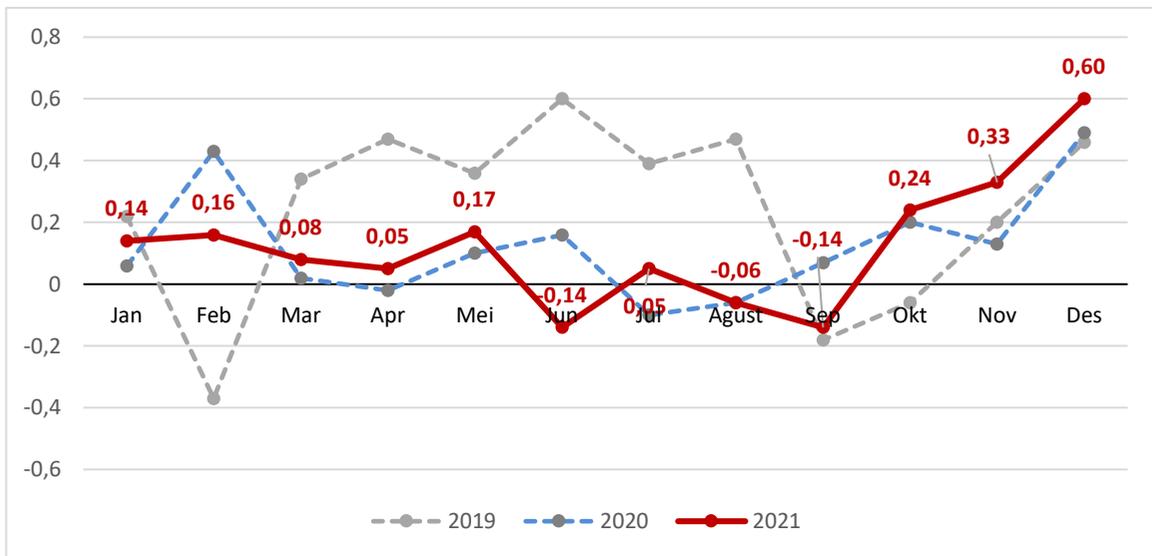


Sumber : BPS Provinsi Kota Semarang, 2022

Gambar 3.2

### Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2021

Nilai inflasi bulanan Kota Semarang di tahun 2021 tercatat cukup fluktuatif dan cenderung meningkat memasuki akhir tahun. Inflasi tertinggi berturut-turut terjadi pada bulan Desember (0,60%), November (0,33%), dan Oktober (0,24%), dengan pendorong utama inflasi adalah komoditas umum seperti makanan, minuman dan tembakau, dan komoditas Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Juni (-0,14%), Agustus (-0,06%) dan September (-0,14%). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pandemi Covid-19 telah mengganggu pola inflasi di Indonesia selama dua tahun terakhir. Pergerakan inflasi sudah meninggalkan trennya seperti yang terjadi di tahun 2019. Gangguan Covid-19 pada inflasi Indonesia sebelumnya juga sudah terlihat pada rendahnya inflasi di bulan Ramadan selama periode April-Mei 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan permintaan barang oleh masyarakat yang tidak begitu tinggi mengingat tidak banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini merupakan imbas dari penurunan perputaran uang yang bersumber dari penurunan aktivitas ekonomi karena Covid-19. Perkembangan inflasi bulanan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2022

Gambar 3.3  
Inflasi Bulanan Kota Semarang Tahun 2021

Proyeksi pengendalian inflasi Kota Semarang pada tahun 2023 diharapkan pada kisaran  $2,5 \pm 1$  persen. Proyeksi ini masih dibawah proyeksi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran  $3,0 \pm 1$  persen. Hal ini dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan komoditas umum masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok. Yang perlu menjadi perhatian lebih adalah isu nasional ketersediaan minyak goreng yang sempat langka dan membuat harga melambung tinggi. Selain itu, ketersediaan dan kecukupan komoditas kesehatan, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya juga harus dapat dipertahankan sehingga ekspektasi positif masyarakat akan terjaga.

### 3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Kondisi perekonomian daerah tahun 2023 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Isu perubahan iklim

Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut transformasi *green economy* oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Hal ini berdampak pada perlunya kebijakan dan strategi mendukung *green economy investment* yang masih perlu ditingkatkan implementasinya di Kota Semarang, khususnya pada sektor IKM dan UMKM.

b) Isu *Tapering* Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*)

Pengurangan suntikan keuangan di pasar modal oleh Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*) atau *tapering* yang dimulai akhir tahun 2021 dimungkinkan turut memberi pengaruh dalam perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendeknya adalah terjadinya pelemahan nilai rupiah yang apabila berlanjut akan mendorong kenaikan harga-harga (inflasi), baik di level nasional maupun daerah.

c) Isu terkait iklim investasi

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga perlu menjadi perhatian. Meskipun Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden tetap memberikan jaminan kepada para

pelaku usaha dan para investor bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman, Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan upaya nyata di daerah untuk dapat mengawal dengan baik proses investasi. Sehingga diharapkan investasi yang terealisasi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja yang akhirnya bisa mendukung perekonomian daerah.

Selain isu-isu tersebut, pertumbuhan perekonomian tahun 2022-2023 juga masih dibayangi oleh beberapa risiko dan tantangan lainnya, antara lain:

- 1) Pengendalian pandemi Covid-19  
Walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun masih terdapat resiko dengan munculnya mutasi virus baru dengan bermacam varian seperti *Omicron*.
- 2) Perubahan harga komoditas global  
Peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia (Batubara dan CPO) akan relatif terbatas. Permintaan akan kedua komoditas berpotensi menurun seiring dengan semangat *Green Recovery* paska Covid-19. Selain itu, berbagai harga komoditas dunia termasuk minyak mentah mengalami ketidakpastian dengan adanya kondisi *extraordinary* perang antara Rusia dan Ukraina.
- 3) Pemulihan dunia usaha  
Dengan tutupnya beberapa dunia usaha memberikan hantaman bagi perekonomian. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan, karena investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi pengangguran pasca pandemi, sedangkan ekspor akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.
- 4) Pemulihan mobilitas masyarakat  
Pandemi Covid-19 yang mengalami puncaknya di tahun 2020 dan 2021 menyebabkan rendahnya mobilitas masyarakat yang mengakibatkan melambatnya siklus perekonomian. Oleh karena itu, kedepan pemerintah diharapkan dapat menjaga mobilitas masyarakat pada level produktif namun di saat yang sama tetap menerapkan protokol kesehatan dan batasan-batasan yang diperlukan.
- 5) Kebijakan defisit APBN Tahun 2023  
Dari sisi kebijakan fiskal, tahun 2023 merupakan tahun yang kritis karena Indonesia harus kembali ke disiplin fiskal dengan defisit maksimal 3% dari PDB. Dengan berkurangnya peran APBN, maka daerah dituntut untuk kembali lebih mandiri secara kapasitas fiskal dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif.
- 6) Inovasi disruptif  
*Disruptive innovation* merupakan suatu inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan dapat secara drastis mengubah pasar, seperti fenomena meredupnya era ojek konvensional dengan adanya aplikasi ojek *online*, serta toko konvensional yang terancam oleh keberadaan *e-commerce*. Hal ini dapat disikapi sebagai tantangan, namun juga bisa menjadi potensi usaha baru bagi generasi muda yang lebih kreatif. Inovasi disruptif yang didominasi oleh perkembangan teknologi informasi ini tidak dapat dihindari karena masyarakat akan lebih memilih kemudahan dalam setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan mendukung seluruh pengusaha baik yang berplatform *online* maupun *offline* agar tetap dapat berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Di sisi lain, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Semarang di tahun 2023 antara lain:

- 1) Semarang memiliki potensi dari sisi lokasinya yang berada di tengah jalur nasional dan regional. Jalur masuknya pun lengkap, mulai dari Pelabuhan Tanjung Emas, Tol Trans Jawa, Stasiun Kereta Api, serta Bandara Ahmad Yani, termasuk adanya akses penerbangan langsung dari Kota Semarang ke IKN melalui Balikpapan;
- 2) Adanya PP No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Peraturan ini mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan pembangunan diluar APBD;
- 3) Adanya Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang. Peraturan ini dapat meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pertumbuhan investasi;
- 4) Adanya *Major Project* di Provinsi Jawa Tengah seperti Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan KSPN Borobudur yang diharapkan akan ikut memberikan dampak pada perekonomian Kota Semarang sebagai *hub* kawasan-kawasan tersebut.
- 5) Pengembangan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas terus dilakukan di Kota Semarang, sehingga dukungan terhadap pertumbuhan investasi dapat terjaga untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri;
- 6) Pemerintah Daerah Kota Semarang berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang keterampilan sehingga menopang berbagai kegiatan bisnis dalam skala kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini termasuk pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan kinerja bisnis dan mengakses sumber pendanaan dan *market place*;
- 7) Kota Semarang mulai gencar melakukan reformasi ekonomi dengan memperbanyak investasi serta pendirian *start-up* dipermudah aksesnya. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan akses finansial bagi masyarakat yang ingin jadi pengusaha;
- 8) Komitmen Pemerintah Daerah kota Semarang dalam pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan ekonomi kreatif.

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Semarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 maka prospek perekonomian daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang Tahun 2023 ditargetkan antara 5,60 – 6,10%.
- Sedangkan tingkat inflasi tahun 2023 ditargetkan akan berada di kisaran 2,5±1% dengan asumsi Pemerintah Kota Semarang mampu menjaga harga komoditas dasar di tingkat domestik.
- Nilai Investasi akan naik dari sisi PMTB dan perubahan inventori seiring dengan membaiknya kondisi pasca Pandemi Covid-19.
- Dengan optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, maka Angka Kemiskinan 2023 ditargetkan turun menjadi 4,04 – 4,24%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2023 ditargetkan 8,30-8,60%. Angka ini berdasarkan capaian TPT 2020 9,57% dan di tahun 2021 turun menjadi 9,54%.

Tabel 3.1  
Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Semarang  
Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	Realisasi			Rerata	2022	2023
		2019	2020	2021		Target RKPD	Target RKPD
1	LPE (%)	6,81	(1,85)	5,16	3,37	5,50-6,00	5,60-6,10
2	Inflasi (%)	2,93	1,49	1,49	1,97	2,6 ±1	2,5 ±1
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN (juta rupiah)	36.534.709	21.842.472	22.538.063	26.971.748	24.086.799	25.684.059
4	Kemiskinan (%)	3,98	4,34	4,56	4,29	4,24-4,34	4,04-4,24
5	TPT (%)	4,54	9,57	9,54	7,88	8,7 - 9,0	8,3 - 8,6

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan dan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal dapat lebih dioptimalkan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari segi penerimaan dan pengeluaran daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD. antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dana kemitraan dunia usaha dan program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kota Semarang. Potensi sumber pendanaan tersebut digunakan sebagai penunjang beban belanja daerah agar percepatan pembangunan dapat tercapai.

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suatu daerah yang kemampuan keuangannya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Gambaran realisasi dan proyeksi keuangan daerah serta kerangka pendanaan kemampuan keuangan Daerah Kota Semarang tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kota Semarang  
Tahun 2020 s/d 2023

URAIAN	TA 2020			TA 2021			TA 2022	TA 2023
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	TARGET RKPD
PENDAPATAN DAERAH								
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.516.646.593.000	1.889.598.813.000	2.024.537.808.307	2.542.288.219.000	2.607.693.085.682	2.385.944.758.477	2.853.408.000.000	2.865.712.538.632
Pajak Daerah	1.826.948.813.000	1.415.187.888.000	1.425.695.913.644	1.974.540.653.000	2.016.634.447.354	1.445.171.299.551	2.227.149.000.000	2.190.083.500.000
Retribusi Daerah	277.142.244.000	80.585.199.000	88.681.866.360	129.360.552.000	87.617.710.256	96.448.844.019	140.698.000.000	149.306.250.120
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	38.119.335.000	53.323.886.000	53.339.018.950	39.345.709.000	66.895.891.301	66.895.891.301	49.725.000.000	73.297.199.962
Lain - lain PAD yang Sah	374.436.201.000	340.501.840.000	456.821.009.353	399.041.305.000	436.545.036.771	777.428.723.606	435.836.000.000	453.025.588.550
Pendapatan Transfer	2.466.726.428.000	2.298.718.444.667	2.230.424.054.663	2.086.516.317.000	2.385.062.664.824	2.320.535.370.128	2.484.519.420.000	2.112.909.930.280
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.906.366.428.000	1.781.724.267.667	1.784.073.320.826	1.418.958.317.000	1.710.552.675.577	1.764.434.028.103	1.858.391.420.000	1.498.896.930.280
Dana Perimbangan	1.815.306.258.000	1.666.752.878.667	1.669.101.931.826	1.354.343.975.000	1.645.938.333.577	1.699.819.686.103	1.813.043.834.000	1.453.549.344.280
Dana Insentif Daerah (DID)	91.060.170.000	114.971.389.000	114.971.389.000	64.614.342.000	64.614.342.000	64.614.342.000	45.347.586.000	45.347.586.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	560.360.000.000	516.994.177.000	446.350.733.837	667.558.000.000	674.509.989.247	556.101.342.025	626.128.000.000	614.013.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	560.360.000.000	482.288.000.000	419.569.268.392	631.370.000.000	639.001.989.247	532.561.552.641	626.128.000.000	614.013.000.000
Bantuan Keuangan	-	34.706.177.000	26.781.465.445	36.188.000.000	35.508.000.000	23.539.789.384	-	-
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	110.068.440.000	172.173.009.040	145.538.975.510	131.312.629.040	123.026.614.057	116.407.153.132	-	-
Hibah	-	-	-	-	-	339.000.000	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.068.440.000	172.173.009.040	145.538.975.510	131.312.629.040	123.026.614.057	116.068.153.132	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	5.093.441.461.000	4.360.490.266.707	4.400.500.838.480	4.760.117.165.040	5.115.782.364.563	4.822.887.281.737	5.337.927.420.000	4.978.622.468.912
BELANJA DAERAH								
Belanja Operasi	4.198.621.981.435	3.598.837.269.327	3.429.805.611.104	3.714.396.640.741	4.104.816.025.439	3.781.987.198.191	4.325.311.416.434	3.875.562.290.331
Belanja Pegawai	1.865.671.266.515	1.603.329.152.371	1.508.689.799.304	1.564.260.064.131	1.790.256.137.357	1.708.462.916.083	1.932.415.819.173	1.632.083.703.167
Belanja Barang dan Jasa	2.140.356.372.920	1.804.079.708.056	1.752.139.551.600	2.076.029.393.210	2.200.019.938.982	1.983.309.901.739	2.200.559.049.261	2.125.831.670.164
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	170.425.342.000	180.082.208.900	159.648.676.200	70.825.183.400	107.491.869.400	85.550.563.669	183.996.692.000	110.017.617.000
Belanja Bantuan Sosial	22.169.000.000	11.346.200.000	9.327.584.000	3.282.000.000	7.048.079.700	4.663.816.700	8.339.856.000	7.629.300.000
Belanja Modal	1.052.470.807.565	547.747.812.045	506.420.330.795	1.089.994.528.299	1.181.452.834.129	953.669.847.701	1.163.915.612.566	925.588.178.581
Belanja Modal Tanah	43.921.661.951	11.375.821.000	11.349.479.274	140.728.528.578	124.927.890.834	52.042.383.689	96.718.275.429	11.040.500.000

URAIAN	TA 2020			TA 2021			TA 2022	TA 2023
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	TARGET RKPD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.620.089.785	172.288.454.720	156.418.552.025	193.465.267.333	255.556.647.050	228.830.535.556	234.984.080.439	133.094.514.151
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533.623.950.125	233.679.250.050	214.518.315.281	316.858.675.443	349.676.591.411	271.292.301.923	340.993.931.843	340.655.420.902
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.139.639.504	120.403.480.603	114.191.564.885	420.640.124.273	438.260.330.730	391.427.601.258	478.433.122.484	435.529.365.072
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	57.165.466.200	10.000.805.672	9.942.419.330	12.365.085.637	12.746.021.212	9.911.290.075	11.926.202.371	5.225.943.906
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	5.936.847.035	285.352.892	165.735.200	860.000.000	42.434.550
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	228.360.131.613	190.153.124.861	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	55.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	228.360.131.613	190.153.124.861	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	55.000.000.000
Belanja Transfer	-	2.540.000.000	2.533.479.000	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	2.540.000.000	2.533.479.000	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	5.256.092.789.000	4.377.485.212.985	4.128.912.545.760	4.854.391.169.040	5.336.565.925.505	4.764.045.946.156	5.544.227.029.000	4.856.150.468.912
Surplus / ( Defisit ) Belanja Daerah	(162.651.328.000)	(16.994.946.278)	271.588.292.720	(94.274.004.000)	(220.783.560.942)	58.841.335.580	(206.299.609.000)	122.472.000.000
PEMBIAYAAN DAERAH								
Penerimaan Pembiayaan	226.391.328.000	80.734.946.278	126.790.395.571	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	-
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	226.391.328.000	80.734.946.278	80.697.268.222	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	46.093.127.349	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	63.740.000.000	63.740.000.000	109.833.127.349	88.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	85.175.000.000	122.472.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	59.740.000.000	59.740.000.000	59.740.000.000	84.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	81.175.000.000	118.472.000.000
PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	18.000.000.000
PDAM Tirta Moedal	39.740.000.000	39.740.000.000	39.740.000.000	52.412.000.000	52.412.000.000	52.412.000.000	30.675.000.000	48.972.000.000
PD BPR Bank Pasar	-	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
PD BPR BKK	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-
PT Taman Satwa	-	-	-	7.850.000.000	7.850.000.000	7.850.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000
Bank Jateng	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	16.000.000.000	-	-	21.000.000.000	24.000.000.000

URAIAN	TA 2020			TA 2021			TA 2022	TA 2023
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI ( <i>Audited</i> )	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI ( <i>Audited</i> )	INDUK	TARGET RKPD
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	46.093.127.349	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
<i>Dana bergulir</i>	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	162.651.328.000	16.994.946.278	16.957.268.222	94.274.004.000	220.783.560.942	220.783.560.942	206.299.609.000	(122.472.000.000)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	-	-	288.545.560.942	-	-	279.624.896.522	-	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2022

### 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan instrumen yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dinilai melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui belanja daerah tidak terlepas dari kapasitas fiskal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
  - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan yang kondisinya mulai membaik pasca Pandemi Covid-19.
  - Pembinaan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembinaan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak berbasis IT (*e-tax*), peningkatan ketaatan wajib pajak, dan peningkatan SDM untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak, termasuk di dalamnya peningkatan basis data pajak dengan menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung;
  - Meningkatkan potensi riil penerimaan pajak dan retribusi melalui penyesuaian tarif, kenaikan NJOP pada PBB/BPHTB, penerimaan pajak dan retribusi berbasis realtime, keringanan pajak untuk wajib pajak dengan persyaratan tertentu, reward bagi wajib pajak taat pajak, dsb;
  - Membuat kajian potensi riil penerimaan pajak dan retribusi secara berkala sebagai dasar menentukan target/proyeksi PAD;
  - Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden kepada Pemda atas Penyertaan Modal perusahaan milik daerah, antara lain dari PDAM, PT. BPS, Perusda Bank Pasar, Perusda BPR/BKK, PT. Taman Satwa, dan PT. Bank Jateng;
4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Arah kebijakan pendapatan daerah memperhatikan target yang tertuang dalam RPJMD serta menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah sebagai berikut:

- a) Target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2023 sebesar Rp. 4.978.622.468.912,-;
- b) Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.865.712.538.632,-;
- c) Dari pos Pendapatan Asli daerah (PAD), Pajak Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.190.083.500.000,-, Retribusi Daerah sebesar Rp.

149.306.250.120,-. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 73.297.199.962,-, serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 453.025.588.550,-.

Tabel 3.3  
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023

SUMBER PAD		Target RKPD 2023
<b>PAJAK DAERAH</b>		<b>2.190.083.500.000</b>
1	Pajak Hotel	193.000.000.000
2	Pajak Restoran	265.000.000.000
3	Pajak Hiburan	35.000.000.000
4	Pajak Reklame	53.000.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	265.000.000.000
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.000.000
7	Pajak Parkir	25.000.000.000
8	Pajak Air Tanah	26.893.500.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000
10	Pajak BPHTB	675.000.000.000
11	PBB Pedesaan & Perkotaan	652.000.000.000
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>149.306.250.120</b>
1	Dinas Perdagangan	33.735.000.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	26.048.000.000
3	Dinas Perhubungan	16.300.000.000
4	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.395.700.000
5	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	9.410.000.000
6	Dinas Kesehatan	1.452.000.000
7	Dinas Penataan Ruang	47.887.107.620
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	50.000.000
9	Dinas Tenaga Kerja	4.400.000.000
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.346.000.000
11	Bagian Rumah Tangga Setda	286.012.500
12	Dinas Pemadam Kebakaran	1.000.000.000
13	Dinas Pendidikan	729.630.000
14	Dinas Perikanan	266.800.000
<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>		<b>73.297.199.962</b>
1	PDAM	29.640.000.000
2	HOLDING CO. PT. BPS :	778.817.146
3	PERUSDA BANK PASAR	1.571.014.995
4	PERUSDA BPR/BKK	1.174.370.684
5	PT. TAMAN SATWA	132.997.137
6	PT. BANK JATENG	40.000.000.000
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		<b>453.025.588.550</b>
1	BPKAD	20.000.000.000
2	Badan Pendapatan Daerah	5.000.000.000
3	Dinas Perhubungan (BLUD BRT)	37.734.000.000
4	RSUD Wongsonegoro (BLUD)	314.040.141.470
5	Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas)	73.177.470.080
6	Dinas Perdagangan	2.750.000.000
7	Dinas Pertanian	323.977.000
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>2.865.712.538.632</b>

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

- d) Pendapatan Transfer tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.112.909.930.280,- atau 14,96% lebih rendah dibandingkan APBD Murni 2022 yang tercatat sebesar Rp. 2.484.519.420.000,-. Target ini juga lebih rendah 8,95% dibandingkan realisasi 2021 sebesar Rp. 2.320.535.370.128,- karena sudah memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.4  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Semarang  
Tahun 2020 s/d 2023

URAIAN	TA 2020			TA 2021			TA 2022	TA 2023
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	TARGET RKPD
PENDAPATAN DAERAH								
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.516.646.593.000	1.889.598.813.000	2.024.537.808.307	2.542.288.219.000	2.607.693.085.682	2.385.944.758.477	2.853.408.000.000	2.865.712.538.632
Pajak Daerah	1.826.948.813.000	1.415.187.888.000	1.425.695.913.644	1.974.540.653.000	2.016.634.447.354	1.445.171.299.551	2.227.149.000.000	2.190.083.500.000
Retribusi Daerah	277.142.244.000	80.585.199.000	88.681.866.360	129.360.552.000	87.617.710.256	96.448.844.019	140.698.000.000	149.306.250.120
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	38.119.335.000	53.323.886.000	53.339.018.950	39.345.709.000	66.895.891.301	66.895.891.301	49.725.000.000	73.297.199.962
Lain - lain PAD yang Sah	374.436.201.000	340.501.840.000	456.821.009.353	399.041.305.000	436.545.036.771	777.428.723.606	435.836.000.000	453.025.588.550
Pendapatan Transfer	2.466.726.428.000	2.298.718.444.667	2.230.424.054.663	2.086.516.317.000	2.385.062.664.824	2.320.535.370.128	2.484.519.420.000	2.112.909.930.280
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.906.366.428.000	1.781.724.267.667	1.784.073.320.826	1.418.958.317.000	1.710.552.675.577	1.764.434.028.103	1.858.391.420.000	1.498.896.930.280
Dana Perimbangan	1.815.306.258.000	1.666.752.878.667	1.669.101.931.826	1.354.343.975.000	1.645.938.333.577	1.699.819.686.103	1.813.043.834.000	1.453.549.344.280
Dana Insentif Daerah (DID)	91.060.170.000	114.971.389.000	114.971.389.000	64.614.342.000	64.614.342.000	64.614.342.000	45.347.586.000	45.347.586.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	560.360.000.000	516.994.177.000	446.350.733.837	667.558.000.000	674.509.989.247	556.101.342.025	626.128.000.000	614.013.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	560.360.000.000	482.288.000.000	419.569.268.392	631.370.000.000	639.001.989.247	532.561.552.641	626.128.000.000	614.013.000.000
Bantuan Keuangan	-	34.706.177.000	26.781.465.445	36.188.000.000	35.508.000.000	23.539.789.384	-	-
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	110.068.440.000	172.173.009.040	145.538.975.510	131.312.629.040	123.026.614.057	116.407.153.132	-	-
Hibah	-	-	-	-	-	339.000.000	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.068.440.000	172.173.009.040	145.538.975.510	131.312.629.040	123.026.614.057	116.068.153.132	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	5.093.441.461.000	4.360.490.266.707	4.400.500.838.480	4.760.117.165.040	5.115.782.364.563	4.822.887.281.737	5.337.927.420.000	4.978.622.468.912

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2022

Pendapatan Daerah Kota Semarang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari sisi APBD Murni dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022, berdasarkan struktur keuangan PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menempati porsi terbesar dalam kontribusi rata-rata terhadap pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 52,09%, diikuti Pendapatan Transfer sebesar 46,27% dan disusul sektor Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,64%. Sedangkan untuk proyeksi RKPD Tahun 2023, porsi Pendapatan daerah ditargetkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 57,56%, Pendapatan Transfer mengalami penurunan dengan porsi 42,44%, dan tidak terdapat pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya masuk ke dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpindah ke pos Dana Transfer, khususnya pada pos DAK non fisik. Lebih rinci lagi, Kontribusi terbesar PAD ditargetkan berasal dari Pajak Daerah (76,42%), Lain-lain PAD yang Sah (15,81%), Retribusi Daerah (5,21%), dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (2,56%).

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020 s/d 2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu lebih besar daripada Pendapatan Transfer dengan perbandingan rerata antara PAD : Pendapatan Transfer : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah 52,09 : 46,27 : 1,64. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Semarang memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Dengan demikian, pemerintah kota dapat lebih optimal dalam mengembangkan sendi-sendi perekonomian daerah. Porsi Pendapatan Transfer yang lebih kecil menunjukkan rendahnya celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

Secara lengkap, persentase sumber pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5  
Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Semarang  
Tahun 2020-2022 dan Proyeksi 2023

KEUANGAN DAERAH	2020	2021	2022	Rerata	2023
	APBD Murni	APBD Murni	APBD Murni		Proyeksi RKPD
Pendapatan Asli Daerah / PAD (%)	49,41	53,41	53,46	52,09	57,56
Pendapatan Transfer (%)	48,43	43,83	46,54	46,27	42,44
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (%)	2,16	2,76	0,00	1,64	0,00
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2022

Tabel 3.6  
Rincian Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Semarang  
Tahun 2020-2022 dan Proyeksi 2023

KEUANGAN DAERAH	APBD Murni 2020	APBD Murni 2021	APBD Murni 2022	Rerata	Proyeksi RKPD 2023
	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)		Kontribusi (%)
1) Pajak Daerah	72,59	77,67	78,05	76,10	76,42
2) Retribusi Daerah	11,01	5,09	4,93	7,01	5,21
3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1,51	1,55	1,74	1,60	2,56
4) Lain-lain PAD yang Sah	14,88	15,70	15,27	15,29	15,81
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	77,28	68,01	74,80	73,36	70,94
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,72	31,99	25,20	26,64	29,06
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1) Hibah	-	-	-	-	-
2) Dana Darurat	-	-	-	-	-
3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100	100	-	66,67	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>66,67</b>	<b>-</b>

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2022

#### 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dari sisi APBD Murni, alokasi Belanja Daerah Kota Semarang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) didominasi oleh Belanja Operasi dengan rerata 78,14%, disusul kemudian oleh belanja modal dengan rerata 21,16% dan belanja tidak terduga dengan rerata 0,70% dari belanja daerah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7  
 Persentase Pembentuk Belanja Daerah  
 Tahun 2020 s/d 2022 dan Proyeksi 2023

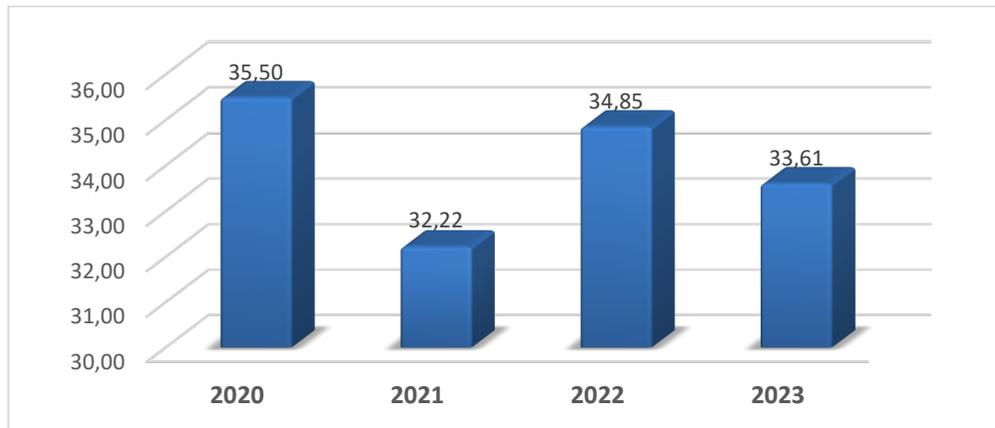
KEUANGAN DAERAH	2020	2021	2022	Rerata	2023
	APBD Murni	APBD Murni	APBD Murni		Proyeksi RKPD
Belanja Operasi (%)	79,88	76,52	78,01	78,14	79,81
Belanja Modal (%)	20,02	22,45	21,00	21,16	19,06
Belanja Tidak terduga (%)	0,10	1,03	0,99	0,70	1,13
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2022

Alokasi Belanja Daerah RKPD tahun 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD tahun 2023 adalah:

- Proyeksi struktur keuangan Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren porsi realisasi 3 tahun terakhir, namun tetap memperhatikan besaran belanja wajib/mengikat dan kebutuhan prioritas di tahun berjalan. Pada proyeksi RKPD 2023, proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 79,81%, proporsi belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 19,06%, dan proporsi belanja tidak terduga terhadap belanja daerah sebesar 1,13%.
- Belanja di tahun 2023 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
  - a. Pemenuhan *mandatory spending* seperti pengalokasian anggaran minimal pada sektor Pendidikan dan Kesehatan.
  - b. Penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - c. Pemenuhan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.
  - d. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah.
  - e. Mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi daerah.
  - f. Pengembangan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antarwilayah.
  - g. Pemenuhan dukungan persiapan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan, saluran dan jembatan baru.

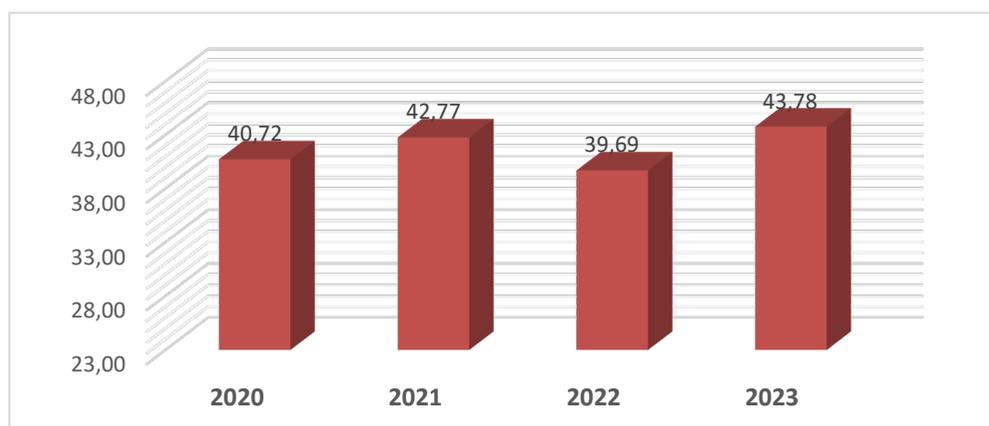
- Proyeksi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 1.632.083.703.167,- dengan memperhatikan asumsi kebutuhan pada tahun 2023.



Gambar 3.4

Porsi APBD Murni Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah (%)

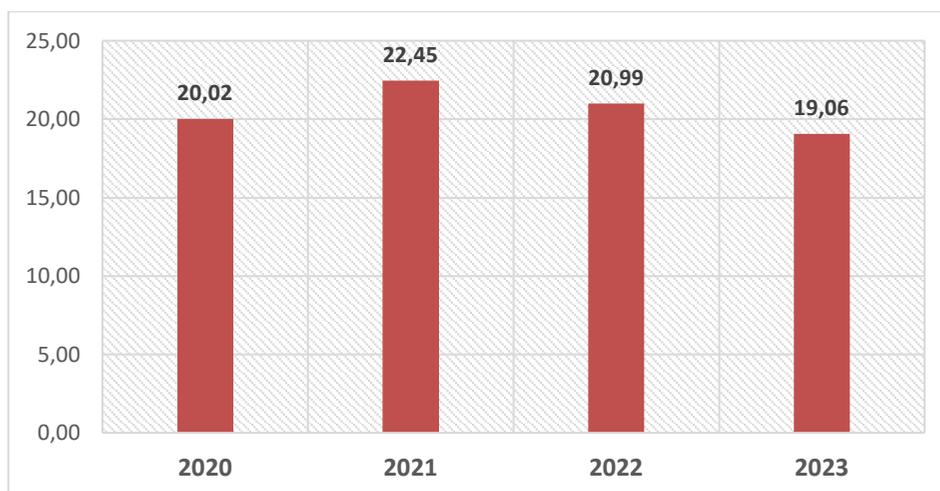
- Rerata porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah pada APBD Murni dari tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah 34,19%, dan dengan memperhitungkan kebutuhan di tahun 2023, diperkirakan porsinya turun menjadi 33,61% dari belanja daerah. Tren penurunan porsi Belanja Pegawai tersebut akan terus dipertahankan untuk menekan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah hingga mencapai kondisi ideal yang diterapkan pemerintah yaitu maksimal 30%.
- Belanja pegawai pada target RKPD 2023 meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja PNS.
- Rasio belanja barang dan jasa digunakan untuk mengukur porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah. Belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, contohnya pembelian barang pakai habis, perjalanan dinas, dan pemeliharaan gedung.



Gambar 3.5

Porsi APBD Murni Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah (%)

- Jika melihat APBD Murni 2020-2022, porsi alokasi belanja barang dan jasa Kota Semarang yang relatif tinggi perlu dikaji ulang efektivitasnya, karena bisa jadi mengindikasikan pemborosan di anggaran. Hal ini mengingatkan belanja barang dan jasa sifatnya mendukung kegiatan dan pemeliharaan.
- Pada RKPD 2023 porsi alokasi belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar 43,78% dari belanja daerah, yaitu sebesar Rp 2.125.831.670.164,-. Alokasi ini lebih rendah dari porsi belanja barang dan jasa APBD 2022 sebesar Rp. 2.200.559.049.261, namun secara proporsi terhadap total belanja lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya sebesar 39,69%.
- Selain itu dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sedikitnya 40% anggaran belanja dengan memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi wilayah setempat untuk mendukung upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- Belanja hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan pada RKPD 2023 masih berasumsi akan mengakomodir hibah KONI, Pramuka, PMI dan Bantuan Keuangan Partai Politik, ditambah dengan hibah dan bansos lainnya.
- Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan.



Gambar 3.6

Porsi APBD Murni Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah (%)

- Proyeksi belanja modal pada RKPD 2023 adalah sebesar Rp. 925.588.178.581,- atau 19,06% dari pagu belanja daerah. Kedepan Pemerintah Kota Semarang akan berupaya untuk memenuhi proporsi belanja modal ideal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

yang menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah.

- Salah satu sumber belanja modal adalah dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH). Guna mempercepat pelayanan publik, mulai tahun 2017 pemerintah daerah harus mengalokasikan penggunaan 25% dari DTU untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal.
- Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. Di Tahun 2023 diperkirakan masih ada belanja yang sifatnya tidak terencana sebagai bagian dari perbaikan ekonomi pasca pandemi, terutama untuk urusan kesehatan dan kebijakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) masyarakat terdampak pandemi. Untuk itu, BTT pada RKPD Tahun 2023 dialokasikan sama dengan APBD Tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 55.000.000.000,- atau 1,13% dari total belanja daerah.

Tabel 3.8  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang  
Tahun 2020 s/d 2023

URAIAN	TA 2020			TA 2021			TA 2022	TA 2023
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	TARGET RKPD
BELANJA DAERAH								
Belanja Operasi	4.198.621.981.435	3.598.837.269.327	3.429.805.611.104	3.714.396.640.741	4.104.816.025.439	3.781.987.198.191	4.325.311.416.434	3.875.562.290.331
Belanja Pegawai	1.865.671.266.515	1.603.329.152.371	1.508.689.799.304	1.564.260.064.131	1.790.256.137.357	1.708.462.916.083	1.932.415.819.173	1.632.083.703.167
Belanja Barang dan Jasa	2.140.356.372.920	1.804.079.708.056	1.752.139.551.600	2.076.029.393.210	2.200.019.938.982	1.983.309.901.739	2.200.559.049.261	2.125.831.670.164
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	170.425.342.000	180.082.208.900	159.648.676.200	70.825.183.400	107.491.869.400	85.550.563.669	183.996.692.000	110.017.617.000
Belanja Bantuan Sosial	22.169.000.000	11.346.200.000	9.327.584.000	3.282.000.000	7.048.079.700	4.663.816.700	8.339.856.000	7.629.300.000
Belanja Modal	1.052.470.807.565	547.747.812.045	506.420.330.795	1.089.994.528.299	1.181.452.834.129	953.669.847.701	1.163.915.612.566	925.588.178.581
Belanja Modal Tanah	43.921.661.951	11.375.821.000	11.349.479.274	140.728.528.578	124.927.890.834	52.042.383.689	96.718.275.429	11.040.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.620.089.785	172.288.454.720	156.418.552.025	193.465.267.333	255.556.647.050	228.830.535.556	234.984.080.439	133.094.514.151
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533.623.950.125	233.679.250.050	214.518.315.281	316.858.675.443	349.676.591.411	271.292.301.923	340.993.931.843	340.655.420.902
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.139.639.504	120.403.480.603	114.191.564.885	420.640.124.273	438.260.330.730	391.427.601.258	478.433.122.484	435.529.365.072
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	57.165.466.200	10.000.805.672	9.942.419.330	12.365.085.637	12.746.021.212	9.911.290.075	11.926.202.371	5.225.943.906
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	5.936.847.035	285.352.892	165.735.200	860.000.000	42.434.550
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	228.360.131.613	190.153.124.861	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	55.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	228.360.131.613	190.153.124.861	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	55.000.000.000
Belanja Transfer	-	2.540.000.000	2.533.479.000	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	2.540.000.000	2.533.479.000	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	5.256.092.789.000	4.377.485.212.985	4.128.912.545.760	4.854.391.169.040	5.336.565.925.505	4.764.045.946.156	5.544.227.029.000	4.856.150.468.912

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2022

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan APBD Murni, alokasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang dari tahun 2020-2022 sebagian besar bersumber dari SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir). Besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah yang terkait. Adapun rencana Penyertaan Modal Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Rencana Penyertaan Modal Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	BUMD	Rencana Penyertaan Modal Tahun 2023 (Rp)
1	PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	18.000.000.000
2	PDAM Tirta Moedal	48.972.000.000
3	PD BPR Bank Pasar	2.500.000.000
4	PT Taman Satwa	25.000.000.000
5	Bank Jateng	24.000.000.000
<i>Jumlah</i>		118.472.000.000

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang, 2022

RKPD Tahun 2023 belum memperhitungkan alokasi penerimaan pembiayaan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dikeluarkan direncanakan sebesar Rp. 122.472.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp. 118.472.000.000,- dan Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) sebesar Rp. 4.000.000.000,-.

Perhitungan pendapatan dan belanja yang diuraikan sebelumnya disusun dengan asumsi kondisi pandemi Covid-19 tetap membaik dan perekonomian masyarakat sudah pulih. Jika asumsi pendapatan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka opsi pembiayaan daerah melalui penerimaan pembiayaan dari Lembaga Bank atau bukan bank menjadi opsi untuk memenuhi belanja prioritas daerah.

Tabel 3.10  
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2020 s/d 2023

URAIAN	TA 2020			TA 2021			TA 2022	TA 2023
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	TARGET RKPD
PEMBIAYAAN DAERAH								
Penerimaan Pembiayaan	226.391.328.000	80.734.946.278	126.790.395.571	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	-
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	226.391.328.000	80.734.946.278	80.697.268.222	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	46.093.127.349	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	63.740.000.000	63.740.000.000	109.833.127.349	88.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	85.175.000.000	122.472.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	59.740.000.000	59.740.000.000	59.740.000.000	84.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	81.175.000.000	118.472.000.000
<i>PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera</i>	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	18.000.000.000
<i>PDAM Tirta Moedal</i>	39.740.000.000	39.740.000.000	39.740.000.000	52.412.000.000	52.412.000.000	52.412.000.000	30.675.000.000	48.972.000.000
<i>PD BPR Bank Pasar</i>	-	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
<i>PD BPR BKK</i>	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-
<i>PT Taman Satwa</i>	-	-	-	7.850.000.000	7.850.000.000	7.850.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000
<i>Bank Jateng</i>	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	16.000.000.000	-	-	21.000.000.000	24.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	46.093.127.349	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
<i>Dana bergulir</i>	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	162.651.328.000	16.994.946.278	16.957.268.222	94.274.004.000	220.783.560.942	220.783.560.942	206.299.609.000	(122.472.000.000)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	-	-	288.545.560.942	-	-	279.624.896.522	-	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2022

Dari uraian tersebut di atas, maka proyeksi struktur Keuangan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11  
Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Tahun 2023

KODE				URAIAN	TA 2023 TARGET RKPD
4				PENDAPATAN DAERAH	
4	1			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.865.712.538.632
4	1	1		Pajak Daerah	2.190.083.500.000
4	1	2		Retribusi Daerah	149.306.250.120
4	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	73.297.199.962
4	1	4		Lain - lain PAD yang Sah	453.025.588.550
4	2			Pendapatan Transfer	2.112.909.930.280
4	2	1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.498.896.930.280
4	2	1	1	Dana Perimbangan	1.453.549.344.280
4	2	1	2	Dana Insentif Daerah (DID)	45.347.586.000
4	2	2		Pendapatan Transfer Antar Daerah	614.013.000.000
4	2	2	1	Pendapatan Bagi Hasil	614.013.000.000
4	2	2	2	Bantuan Keuangan	-
4	3			Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-
4	3	1		Hibah	-
4	3	2		Dana Darurat	-
4	3	3		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
				Jumlah Pendapatan Daerah	4.978.622.468.912
5				BELANJA DAERAH	
5	1			Belanja Operasi	3.875.562.290.331
5	1	1		Belanja Pegawai	1.632.083.703.167
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	2.125.831.670.164
5	1	3		Belanja Bunga	-
5	1	4		Belanja Subsidi	-
5	1	5		Belanja Hibah	110.017.617.000
5	1	6		Belanja Bantuan Sosial	7.629.300.000
5	2			Belanja Modal	925.588.178.581
5	3			Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000
5	3	1		Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000
				Jumlah Belanja Daerah	4.856.150.468.912
				Surplus / ( Defisit ) Belanja Daerah	122.472.000.000
6				PEMBIAYAAN DAERAH	
6	1			Penerimaan Pembiayaan	
6	1	1		Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	-
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan	-
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
6	1	4		Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6	1	5		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6	1	6		Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
6	2			Pengeluaran Pembiayaan	
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	-
6	2	2		Penyertaan Modal Daerah	118.472.000.000
6	2	3		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6	2	4		Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000
6	2	5		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	122.472.000.000
				Pembiayaan Netto	(122.472.000.000)
6	3			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	-

Sumber : Bappeda, Bappenda, dan BPKAD Kota Semarang, 2022

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Target tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 harus selaras dan sinergis dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2021-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, (2) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, dan (3) Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia unggul, produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota

Misi 4. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan

Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia



Gambar 4.1

### Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2021-2026

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, meningkatkan nilai investasi, menuntaskan rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut melalui semangat seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1  
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	
<b>MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL</b>						
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	83,60 - 84,00	
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,58
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,59
				Angka Harapan Hidup	Tahun	77,49
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	55,17
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	55,17		
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	8,30-8,60	
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	92,84
				4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen			77,00
		Angka Kemiskinan			Persen	4,04-4,24
		5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,50 - 15,80
		6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,81
<b>MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA</b>						
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,60-6,10	
		7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.403.172.949,10
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	6,00
		8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
				PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	103,54
				Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,77
Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,70				

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	
<b>MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN</b>						
4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi		Nilai	72,40	
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	73,50
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai Indeks	95,70
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	75,10
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban			Persen	10,52
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.290
<b>MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA</b>						
5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Persen	67,01
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	52,43
				Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	95,60
				Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	155.619,35
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	72
				Persentase ruang terbuka hijau	Persen	45,05
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur			Nilai	78,49
		13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	68
				Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	74
				Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,32
		14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	97,50
				Persentase rumah layak huni	Persen	99,15
		15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	85
16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111		
17	Mewujudkan sistem transportasi yang	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5818		

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	
		terintegrasi dan berkelanjutan	Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	3	
MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA						
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai Indeks	74,00
		18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	>74/BB
				Opini BPK	Opini	WTP
		19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,00
				Indeks SPBE	Skor 0-5	4,2
				Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,46/ST
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88,00

## 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

### 4.2.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

#### 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

#### 2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

#### 3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

#### 4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

#### 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*” sebagaimana RPJMD 2018-2023.

Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

#### 4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2023. Masukan-masukan dari DPRD dan telaahannya dijabarkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

No	Pokok Pikiran DPRD	Telaah
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan nilai ekonomi usaha dan koperasi;</li> <li>b. Peningkatan nilai investasi;</li> <li>c. Peningkatan sektor pariwisata unggulan;</li> <li>d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;</li> <li>e. Pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.</li> </ol>	Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi. Di tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan upaya-upaya untuk mendorong hal tersebut melalui penguatan usaha mikro dan koperasi, peningkatan nilai investasi, peningkatan sektor pariwisata, termasuk pengembangan ekonomi sirkular dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung ekonomi di Kota Semarang.
2	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;</li> <li>b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;</li> <li>c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;</li> <li>d. Pengembangan kampung tematik produktif;</li> <li>e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja;</li> <li>f. Perluasan kesempatan kerja.</li> </ol>	Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, upaya-upaya juga perlu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang sempat meningkat selama pandemi Covid-19. Hal tersebut akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan perlindungan sosial, pengembangan kampung tematik produktif, serta penguatan kualitas calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;</li> </ol>	Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor kunci kemajuan suatu kota. Dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, maka pembangunan daerah secara lebih luas akan semakin mudah dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan

No	Pokok Pikiran DPRD	Telaah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i>;</li> <li>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;</li> <li>d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;</li> <li>e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.</li> </ul>	<p>peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengarusutamaan gender, serta upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang.</p>
4	<p>Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan infrastruktur strategis perkotaan;</li> <li>b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;</li> <li>c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;</li> <li>d. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>e. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;</li> <li>f. Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.</li> </ul>	<p>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh tiap daerah, terutama kota-kota besar. Hal ini karena infrastruktur tidak hanya berperan sebagai penunjang utama kegiatan perekonomian, namun juga sebagai penyedia kebutuhan dasar dimana masyarakat tinggal dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Oleh karenanya, pemenuhan infrastruktur strategis perkotaan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir dan penguatan ketahanan bencana juga merupakan hal fundamental yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang.</p>
5	<p>Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;</li> <li>c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;</li> <li>d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;</li> <li>e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> </ul>	<p>Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari perwujudan <i>good governance</i> atau tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan perkembangan zaman yang kian cepat, maka pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sifat dinamis, efektif, efisien, dan tentunya inovatif dalam menyelenggarakan fungsinya. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kapasitas fiskal daerah, perluasan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, penguatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>

#### 4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2022 serta isu-isu strategis di tahun 2023.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah “Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.



Gambar 4.2

### Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
  - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
    - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.

- 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
- 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
  - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
  - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
  - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
  - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
  - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
  - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
  - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
  - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
  - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
  - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
  - 3) Penguatan ketahanan pangan.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
    - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
    - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
    - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
    - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
    - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
    - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
  - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
    - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
    - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
  - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
    - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
    - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
  - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
    - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
    - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
    - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
    - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
  - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
    - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.

- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
  - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
  - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
  - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
  - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
  - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
  - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
  - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
  - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
  - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
  - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
  - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
  - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
  - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
  - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
  - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
  - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
  - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
  - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
  - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
  - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
  - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
  - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
  - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.

- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
  - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
  - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
  - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
  - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
  - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
  - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
  - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
  - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
  - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
  - 1) Konservasi sumber daya air.
  - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
  - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
  - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
  - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
- 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
  - a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
    - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
    - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
  - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
    - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
    - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
    - 3) Optimalisasi BUMD.
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
    - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
    - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
    - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
    - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
  - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
    - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
    - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
    - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
    - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
  - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2023 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.3  
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,  
Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2023

	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,60 - 6,10 %	83,60 – 84,00	4,04 – 4,24%	8,30 – 8,60 %
Prov. Jateng	5,00 – 5,60%	72,75	9,51 – 9,29 %	5,63 – 4,80%
Pusat	5,30 – 5,90%	73,29 – 73,35	7,50 – 8,50 %	5,30 – 6,00 %

Untuk menjamin konsistensi dan menjamin pelaksanaannya, selanjutnya dilakukan sinkronisasi antara isu strategis dan prioritas daerah dengan prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional seperti disajikan dalam tabel 4.3. Selain itu, keterkaitan antara sasaran RPJMD 2021-2026 dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.4. Sedangkan penjelasan mengenai sinkronisasi prioritas pembangunan tahun 2023 dengan rumusan program unggulan pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026 terlihat pada tabel 4.5, serta keterkaitan antara prioritas pembangunan dan program pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 tersaji dalam tabel 4.6.

Tabel 4.4

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2023

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jateng		Prioritas Daerah Kota Semarang	
Kemiskinan	PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD.2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	PD.2	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PN.3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PD.3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing	PD.3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif
	PN.4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				
Kesenjangan wilayah; Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya; Kedaulatan pangan dan energi	PN.5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	PD.1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	PD.4	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar
	PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha	PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan			PD.1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan
Tata kelola pemerintahan	PN.7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PD.4	Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PD.5	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif

Tabel 4.5  
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				P3	PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023				
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,58 Tahun	P3	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi; b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas; c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.	Prioritas Nasional 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing  Prioritas Nasional 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan  Prioritas Provinsi 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,59 Tahun			
		Angka Harapan Hidup	77,49 Tahun			
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	55,17%			
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	92,84%			
4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,10%			
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	77,00%			
5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	15,50 - 15,80%	P2	1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus: a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin; c. Peningkatan upaya perlindungan sosial; d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif; e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja; dan f. Perluasan kesempatan kerja.	Prioritas Nasional 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan  Prioritas Provinsi 2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan
6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	99,81%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT				
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023							
					kemiskinan ekstrem (PKE)				
7	Meningkatnya produk unggulan daerah	<p>Nilai Ekspor</p> <p>Persentase peningkatan kunjungan wisata</p>	<p>US\$ 3.403.172.949,10</p> <p>6,00%</p>	P1	<p>1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:</p> <p>a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi, dan industri kecil menengah;</p> <p>b. Peningkatan nilai investasi;</p> <p>c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;</p> <p>d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa; dan</p> <p>e. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>).</p>	<p>Prioritas Nasional 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p> <p>Prioritas Provinsi 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana</p>			
8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	<p>Persentase peningkatan nilai investasi</p> <p>PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku</p> <p>Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB</p> <p>Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB</p>	<p>7%</p> <p>(25.684.059 juta rupiah)</p> <p>103,54 juta rupiah</p> <p>28,77%</p> <p>28,70%</p>						
9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	73,50				P3	<p>1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:</p> <p>a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;</p> <p>b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas;</p> <p>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;</p> <p>d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan</p> <p>e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.</p>	<p>Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing</p> <p>Prioritas Provinsi 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing</p>

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023				
10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,10	P3	<p>1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;</li> <li>b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas;</li> <li>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;</li> <li>d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan</li> <li>e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.</li> </ul>	<p>Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing</p> <p>Prioritas Provinsi 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing</p>
11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.290 kejadian	P2	<p>1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;</li> <li>b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;</li> <li>c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;</li> <li>d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;</li> <li>e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja; dan</li> <li>f. Perluasan kesempatan kerja.</li> </ul>	<p>Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p> <p>Prioritas Provinsi 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah</p>
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,43	P4	<p>1. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:</p>	<p>Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar</p>
		Indeks Kualitas Udara	95,60			
		Penurunan Emisi CO2	155.619,35 Ton CO2e			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023			
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	72%		<p>a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;</p> <p>b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;</p> <p>c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;</p> <p>d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;</p> <p>e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu; dan</p> <p>f. Penguatan ketahanan bencana.</p> <p>Prioritas Nasional 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p> <p>Prioritas Provinsi 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana</p>
		Persentase ruang terbuka hijau	45,05%		
13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	68%		
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	74%		
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,32%		
14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	97,50%		
		Persentase rumah layak huni	99,15%		
15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	85%		
16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	111		
17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5818		
		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	3 titik/ruas		
18		Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja	>74/BB	P5	Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023			PRIORITAS RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023		
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		<p>1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;</li> <li>c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;</li> <li>d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan</li> <li>e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> </ul>
		Opini BPK	WTP	
19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	83,00	
		Indeks SPBE	4,2	
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,46/ST	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	
				Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
				Prioritas Provinsi 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Tabel 4.6

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Program Unggulan pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH	
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan	1 Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah	1 Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor	PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu	
				Fasilitasi Industri Rumah Tangga	
				Klinik Hak Kekayaan Intelektual	
				Micro Library UMKM	
				Link and Match UKM dengan Swalayan / Mall	
				Food Street Festival – Kawasan Kuliner	
		2 Pengembangan kewirausahaan baru	2	Pengembangan kewirausahaan baru	Pemberdayaan <i>Startup</i> lokal
					Semarang <i>Creative Makerspace</i>
					Pembangunan <i>Coworking Space</i> UKM
		3 Peningkatan peran dan fungsi koperasi	3	Peningkatan peran dan fungsi koperasi	
		2 Peningkatan nilai investasi	2	Peningkatan nilai investasi	4 Pelaksanaan promosi investasi
					4
5 Pemberian insentif dan kemudahan perijinan					
3 Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal	3	Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal	6 Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing		
			6	Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing	
			Agenda Tahunan <i>Event-Event</i> Budaya Lokal		
			Promosi Pariwisata Bersama (Daerah <i>Hinterland</i> )		
			<i>Open Rooftop Double Decker Bus</i>		
			<i>Amphibi Bus</i>		
Semarang Zoo bertaraf Internasional					
Pengembangan Sportourism					
7 Pengembangan wisata MICE					
7	Pengembangan wisata MICE				
4 Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa	4	Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa	8 Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa		
4	Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa	8	Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA		PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH		
				9	Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi	Sentra PKL		
				10	Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan	Festival Angkringan Arena Nobar Kecamatan batas wilayah		
				11	Peningkatan nilai dan produk ekspor			
		5	Pengembangan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> )	12	Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular			
		13		Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan	Pengembangan <i>Urban Farming</i> Gelar Hidroponik Kawasan Empon-Empon Kawasan Wisata Minapolitan			
		14		Penguatan ketahanan pangan	Lumbung Pangan Kelurahan			
		15		Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)				
		2	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	6	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	16	Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	
						17	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin	Layanan JAGA (Jemput-Antar Pasien Warga Miskin) Jumat Berkah
						18	Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Gerakan Bersama Forum CSR Forum Perguruan Tinggi Abdimas
						19	Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin	Pelatihan spesifik PMKS
				20	Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			
		8	Peningkatan upaya perlindungan sosial	21	Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH		
			22	Peningkatan bantuan untuk PPKS	Tim Reaksi Cepat Layanan PMKS Crisis Center PGOT	
		9	Pengembangan Kampung Tematik produktif	23	Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif	Kampung Tematik Produktif
				24	Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif	
		10	Pengembangan kesatuan sistem <i>demand and supply set</i> tenaga kerja	25	Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Sertifikasi bahasa asing TKI
				26	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	
				27	Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja	Sertifikasi / lisensi ketrampilan khusus pencaker
				28	Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Kabar Loker (kebiasaan baru) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah Magang Tematik
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	11	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	29	Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan	
				30	Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi	Kurikulum pembelajaran berbasis IT Pembelajaran Daring dan Luring (kebiasaan baru) <i>E-Library</i> di seluruh area <i>free wifi</i> Akses Terbitan Ilmiah Online Gratis
				31	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP	Pembangunan TK dan SMP Negeri berbasis zonasi
				32	Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan	Lulusan TK, SD dan SMP Bersertifikat Khusus
						Muatan Lokal Kurikulum Cinta Negara dan Daerah
				33	Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi	Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) Penguatan Pendidikan Non Formal (PNF)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
			34 Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat	
			35 Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah	Beasiswa warga miskin/berprestasi
				Pengembangan Sekolah Swasta Gratis (TK, SD, SMP dan yang sederajat)
				Bapak Angkat Anak Sekolah tidak mampu
		12 Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i>	36 Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara terintegrasi	
			37 Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan	
			38 Peningkatan layanan kesehatan rujukan	Layanan Puskesmas Malam Hari
			39 Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama	Pemerataan akses layanan Kesehatan Bus Layanan Kesehatan / Hospital Bus
			40 Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat	Rating Kelurahan Sehat
		13 Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	41 Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	
			42 Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan	Gerakan Dasawisma Hebat
				Musrenbang perempuan
				Penguatan peran PKK
			43 Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia	<i>Daycare</i> Gratis
				Semarang Kota Inklusif
		14 Peningkatan upaya pengendalian penduduk	44 Peningkatan kualitas layanan KB	
			45 Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas	
		15 Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	46 Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan	Semarang Community Center
				Kompetisi Inovasi Usaha bagi Pemuda
				Nobar (Nongkrong Bareng) Komunitas

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH		
			47	Peningkatan prestasi olahraga	Fasilitasi atlet berprestasi	
			48	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat	Penghargaan Warga Berprestasi Kota Semarang	
					Paguyuban Relawan Kota	
			49	Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM	Kota Ramah HAM	
			50	Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial	<i>Religion center</i>	
4	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar	16	Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan	51	Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur	
			52	Peningkatan sarana prasarana olahraga	Optimalisasi pemanfaatan Stadion Citarum ( <i>home base PSIS</i> )	
			53	Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata	Underground Simpang Lima	
					Semarang <i>Expo and Convention Center</i>	
					Semarang Technopark	
					Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo	
			54	Pengembangan kawasan strategis cagar budaya	Revitalisasi Semarang Lama	
					Masjid Raya Semarang	
			55	Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik		
		17	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan	56	Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota	Rintisan Semarang <i>Outer Ring Road</i> (Mangkang-Mijen) dan <i>Middle Ring Road</i> (Jalan Gajah)
					Pembangunan Akses Perguruan Tinggi (Srandol-Sekaran, UNDIP-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)	
					<i>Tetenger Kota</i>	
			57	Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi	Transportasi Massal Terintegrasi	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
			58 Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel	Pembangunan Trem
			59 Peningkatan sarana prasarana angkutan barang	Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas
			60 Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon	Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan
		18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	61 Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman	Stimulus Pembangunan Wilayah
			62 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bedah Rumah Tuntas
			63 Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh	Kampung vertikal Kawasan Kumuh
			64 Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			65 Pemenuhan lahan perkemahan umum	
		19 Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh	66 Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan	<i>Rooftop solar panel</i> (Bangunan Milik Pemkot Semarang) Pembangkit Listrik Tenaga Air
			67 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik	<i>Vertical and Roof garden/ farming</i> Pembangunan Taman Tematik Penhijauan Sempadan Sungai Semarang
			68 Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Pengelolaan Persampahan Terpadu Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
			69 Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana	
		20 Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu	70 Konservasi sumber daya air	
			71 Pendayagunaan sumber daya air	<i>Smart Water Management</i>
			72 Pengendalian daya rusak air	Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage)
		21 Penguatan ketahanan bencana	73 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	
			74 Peningkatan kapasitas mitigasi bencana	Pengembangan Sistem peringatan dini bencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH		
5	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	22	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	75	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah	
			76	Optimalisasi barang milik daerah	Optimalisasi Aset-Aset Kota	
		23	Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan	77	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Informasi Tata Ruang dan Pajak Bumi Bangunan
						Eksplorasi dan intensifikasi PAD
				78	Pengembangan alternatif pembiayaan	Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD
				79	Optimalisasi BUMD	
		24	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	80	Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik	Online public hearing
						Robot Layanan (Industry 5.0)
						Layanan Terpadu Malam Hari
						Layanan Publik Akhir Pekan
						Semarang Smart Card
						Pemanfaatan internet pasca jam kerja
		81	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Single Sign-On Sistem Informasi Manajemen		
Akselerasi SPBE						
SOLUSI: Semarang On-Line Untuk Sistem Integrasi						
82	Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung <i>decision making system</i>	Dari Semarang untuk Indonesia (Satu Data dan Satu Peta)				
		Pembangunan Data Center II				
		Pembangunan <i>Big Data Analytics</i>				
83	Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan	Agen Informasi dan Pengaduan				
25	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	84	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Omnibus Law Peraturan Kota Semarang		
				Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap		
				Talenta Berjejaring		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
			85 Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pengembangan <i>Smart City (Cyber City)</i>
			86 Penguatan Manajemen Risiko	Pengelolaan Manajemen Risiko
			87 Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024	
		26 Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	88 Pengembangan budaya inovasi di OPD	

Tabel 4.7

Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan		
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus: a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi, dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor. 2) Pengembangan kewirausahaan baru 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya: 1) Pelaksanaan promosi investasi 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya: 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing 2) Pengembangan wisata MICE	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65,00	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77,00	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66,00	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,30	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3.057,00	Kkal / Kapita / Tahun	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Presentase Cakupan Distribusi	100,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81,50	%	DINAS KETAHANAN PANGAN

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya: 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	31,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
e. Pengembangan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ), melalui upaya-upaya: 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan 3) Penguatan ketahanan pangan			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3,00	persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20,00	%	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3.691,00	Penanam Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2023	Satuan	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492,00	Investor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,00	%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2,00	Nilai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96,00	%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77,85	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3.055,90	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.845,95	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4,00	Kasus	DINAS PERIKANAN
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17.557,29	Ton	DINAS PERIKANAN

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	70,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan	35.922,00	ton	DINAS PERTANIAN
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.647,76	ton	DINAS PERTANIAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38	ton/ha	DINAS PERTANIAN
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5,00	%	DINAS PERTANIAN
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75,00	%	DINAS PERTANIAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28,00	kelompok	DINAS PERTANIAN
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100,00	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22,00	pasar	DINAS PERDAGANGAN

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan		
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,99	%	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1.615.736.908	US\$	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76,00	%	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30,00	%	DINAS PERDAGANGAN	
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88,00	%	DINAS PERINDUSTRIAN	
			Persentase Pertambahan IKM	0,50	%	DINAS PERINDUSTRIAN	
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4,00	%	DINAS PERINDUSTRIAN	
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0,50	%	DINAS PERINDUSTRIAN	
2.	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus: a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00	%	DINAS SOSIAL
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100	%	DINAS SOSIAL
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81	%	DINAS SOSIAL

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya: 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69,85	%	DINAS SOSIAL
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,00	Point	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,00	%	SATPOL PP

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH		
		Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan			
e. Pengembangan kesatuan sistem <i>demand and supply set</i> tenaga kerja, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	2,00	Indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil	64,00	angka indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	57,00	indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	indeks kerukunan umat beragama	71,00	indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82,00	prosentase	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115,62	%
APK PAUD 5-6 tahun	85,87			%	DINAS PENDIDIKAN		
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	8,00			lembaga	DINAS PENDIDIKAN		
APK SD/MI	111,71			%	DINAS PENDIDIKAN		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89,50	%	DINAS PENDIDIKAN	

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan		
<p>pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi</p> <p>3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP</p> <p>4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan</p> <p>5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi</p> <p>6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat</p> <p>7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah</p> <p>b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i>, melalui upaya-upaya:</p> <p>1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara terintegrasi</p> <p>2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan</p> <p>3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan</p> <p>4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama</p> <p>5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat</p>	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100,00	%	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
			Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100,00	%	RSUD KRMT WONGSONEGORO	
			Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100,00	persentase	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100,00	persen	DINAS KESEHATAN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96,00	persen	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00	persen	DINAS KESEHATAN
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
<p>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:</p> <p>1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan</p> <p>3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia</p>	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35	Organisasi Kpemudaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1.197	jumlah	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5	Lapangan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47	Kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<p>d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:</p> <p>1) Peningkatan kualitas layanan KB</p> <p>2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas</p>						
<p>e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:</p> <p>1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan</p> <p>2) Peningkatan prestasi olahraga</p> <p>3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat</p>						

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan		
4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial						
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus: a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya: 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,86	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	69,69	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,86	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	48,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan		
transportasi massal terintegrasi 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak 5) Pemenuhan lahan permakaman umum d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya: 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74,50	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,14	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,31	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13,00	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00	Persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
					100,00	%

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya: 1) Konservasi sumber daya air 2) Pendayagunaan sumber daya air 3) Pengendalian daya rusak air f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100,00	Persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00	%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100,00	persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100,00	%	DINAS SOSIAL
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20,00	Ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2023	Satuan	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,40	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64,22	%	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88,00	persen	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml trayek BRT	13,00	trayek	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33,00	persen	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7,00	rasio	DINAS PERHUBUNGAN
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah 2) Optimalisasi barang milik daerah b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah 2) Pengembangan alternatif pembiayaan 3) Optimalisasi BUMD	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99,40	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,20	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya: 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung <i>decision making system</i> 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya: 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 3) Penguatan Manajemen Risiko 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1,00	Rasio	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Pelayanan Publik	118,00	100%	SEKRETARIS DAERAH
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9,00	Kegiatan	SEKRETARIS DAERAH
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	20,00	%	SEKRETARIS DAERAH
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100,00	%	SEKRETARIS DAERAH
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1,00	dokumen	SEKRETARIS DAERAH
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00	%	SEKRETARIS DAERAH
				prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100,00	%

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2023	Satuan	
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16,00	dokumen	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00	%	BAPPEDA
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	%	BAPPEDA
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00	%	BAPPEDA
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	%	BAPPEDA
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22	%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	80,48	%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10,00	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239,43	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2023	Satuan	
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,19	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100,00	%	BAPPEDA
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	Leveling	INSPEKTORAT
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	2,80	Nilai	INSPEKTORAT
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91,00	Persen	16 KECAMATAN

PRIORITAS RKPD 2023	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2023	Satuan	
			Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	2	Angka	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00	Persen	16 KECAMATAN
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00	Persen	16 KECAMATAN
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00	Persen	16 KECAMATAN
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00	Angka	KECAMATAN CANDISARI

#### 4.3 INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan yang dituangkan dalam inovasi kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 yaitu perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah, maka beberapa inovasi yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

##### 1. *Eco-Edu* Wisata Pantai Mangunharjo

Merupakan inovasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kecamatan Tugu. *Eco-Edu* Wisata Pantai Mangunharjo memiliki konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mendasarkan pada prinsip pembangunan ekowisata, yaitu mengkombinasikan kepentingan industri pariwisata dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk pelibatan masyarakat setempat.



Rencana Pengembangan *Eco-Edu* Wisata Pantai Mangunharjo

##### 2. *JARUM SI KENANG* (Jejaring Komunitas Musisi Keroncong Semarang)

*JARUM SI KENANG* merupakan salah satu inovasi sekaligus komunitas yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Komunitas ini merupakan wadah bagi para musisi keroncong di Kota Semarang yang bertujuan untuk melestarikan musik keroncong yang saat ini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, keberadaan komunitas ini juga diharapkan menjadi daya tarik kunjungan pariwisata di Kota Semarang melalui parade dan even musik keroncong yang diselenggarakan.



Flyer Kegiatan *JARUM SI KENANG*

### 3. *Sinau Bareng* Pemasaran Pariwisata

Masih terkait sektor pariwisata, program *Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata* merupakan program kerja Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengembangan potensi-potensi lokal untuk menjadi daya tarik wisata melalui giat pariwisata seperti pelatihan wisata, diskusi, transfer ilmu, *best practices*, dan lain-lain. Pelibatan berbagai sektor kalangan mulai dari akademisi, pelaku wisata, pemerintah, sektor bisnis, dan warga masyarakat menjadi kunci dalam giat pariwisata ini. Diharapkan program kerja tersebut dapat menginisiasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang belum berkembang atau sedang dalam tahap rintisan.



*Kegiatan Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata yang diikuti berbagai kalangan*

### 4. *PAK RAHMAN* (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman)

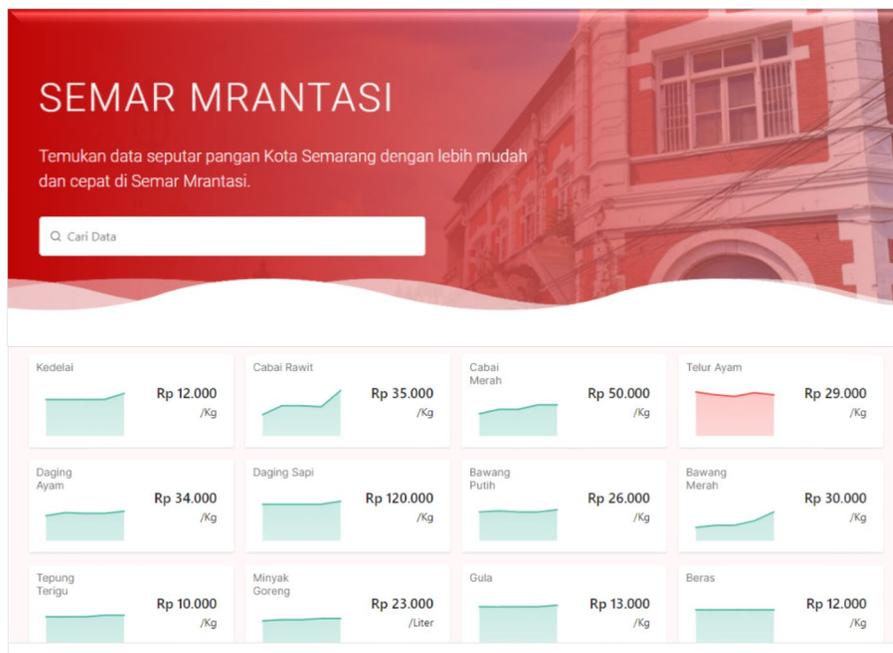
*PAK RAHMAN* merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk berkomitmen bersama untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi, khususnya di situasi pasca pandemi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung *tagline* “50-ewu iso blonjo werno-werno”, *PAK RAHMAN* diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.



*Flyer Program PAK RAHMAN*

5. *SEMAR MRANTASI (Semangat Bergerak Bersama Mewujudkan Kota Semarang Tangguh Pangan dan Gizi)*

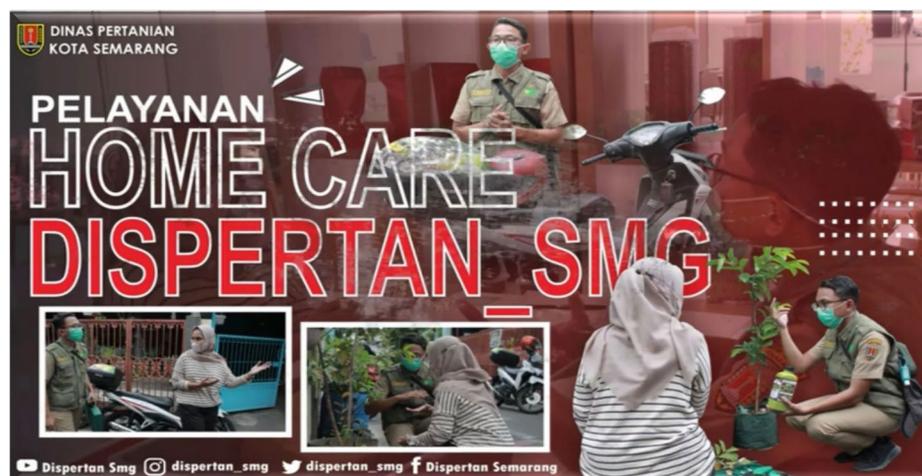
Pandemi Covid-19 telah mengajarkan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Sistem logistik pangan yang sempat terganggu karena aktivitas masyarakat yang terbatas membuat pemerintah harus meningkatkan kualitas ketahanan pangan untuk kondisi-kondisi yang tidak terduga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan mengembangkan *Semar Mrantasi*, suatu sistem informasi berbasis *web* yang menyajikan informasi seputar pangan di Kota Semarang, termasuk perkembangan terkini harga-harga komoditas pokok.



*Dashboard Sistem SEMAR MRANTASI*

6. *Layanan Home Care Pertanian*

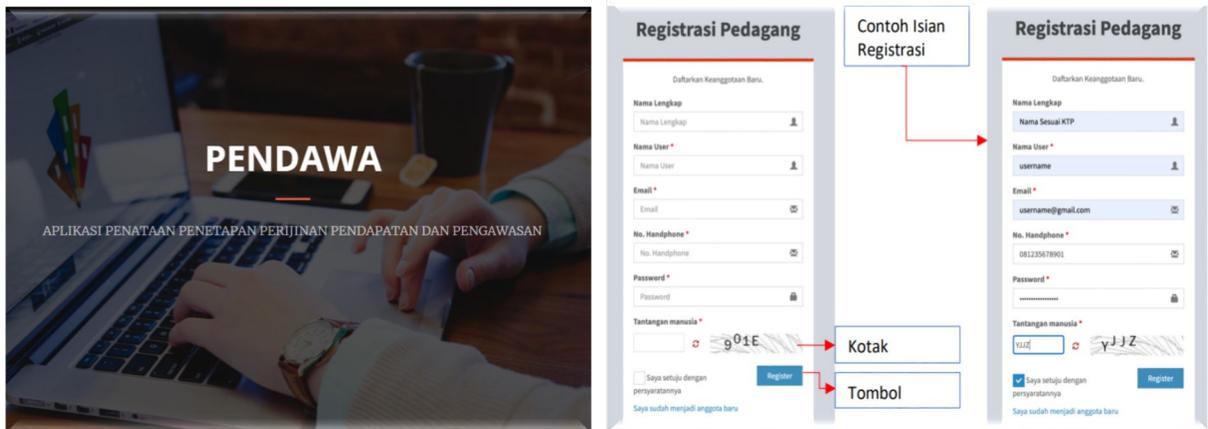
Layanan Home Care Pertanian merupakan program Dinas Pertanian Kota Semarang yang meliputi konsultasi, visitasi, edukasi, dan penanganan secara langsung di sektor pertanian. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat Kota Semarang dengan datang secara langsung di pojok konsultasi *Urban Farming Corner (UFC)*. Jika diperlukan, petugas dari Dinas Pertanian Kota Semarang akan melakukan pengamatan dan penanganan langsung terhadap tanaman yang bermasalah ke lokasi pemohon layanan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.



*Pelayanan Home Care Dinas Pertanian Kota Semarang*

7. *E-Pendawa* (Aplikasi Penataan Penetapan Perijinan Pendapatan Dan Pengawasan)

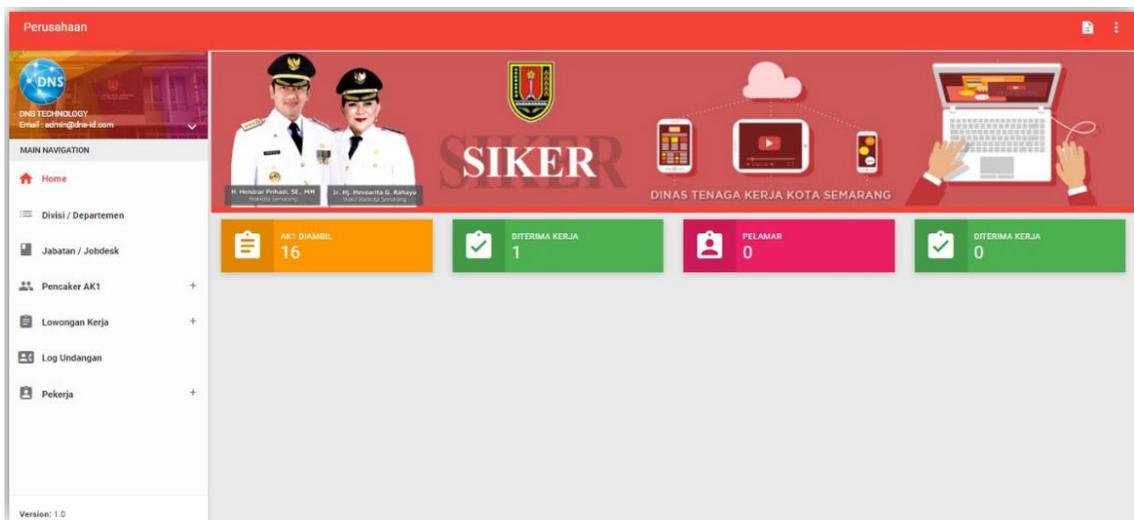
*E-Pendawa* merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk melakukan proses seleksi dalam rangka penataan dan penempatan kembali pedagang pasar sesuai kriteria yang ditentukan. Dengan melakukan registrasi dan penginputan berkas seperti KTP, KK, SIPTD, dan dokumen pendukung lain, para pedagang dimudahkan dalam memperoleh ijin berdagang di pasar-pasar di Kota Semarang. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat dalam penataan kembali para pedagang di Pasar Johar yang sempat direlokasi di tempat lain selama proses pembangunan.



Tampilan Sistem *E-Pendawa* Kota Semarang

8. *APIK KERJAKU* (Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu)

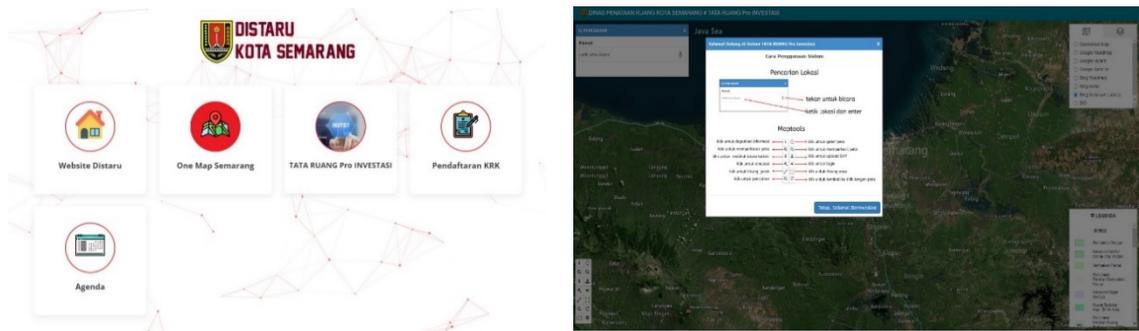
Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu (*APIK KERJAKU*) adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Salah satu jenis layanan adalah mempertemukan antara pemberi kerja (pengusaha/perusahaan) dengan pencari kerja. *APIK KERJAKU* dapat diakses baik oleh perusahaan/pengusaha maupun pencari kerja melalui website [siker.semarangkota.go.id](http://siker.semarangkota.go.id).



Tampilan Aplikasi *APIK KERJAKU*

9. Tata Ruang Pro Investasi

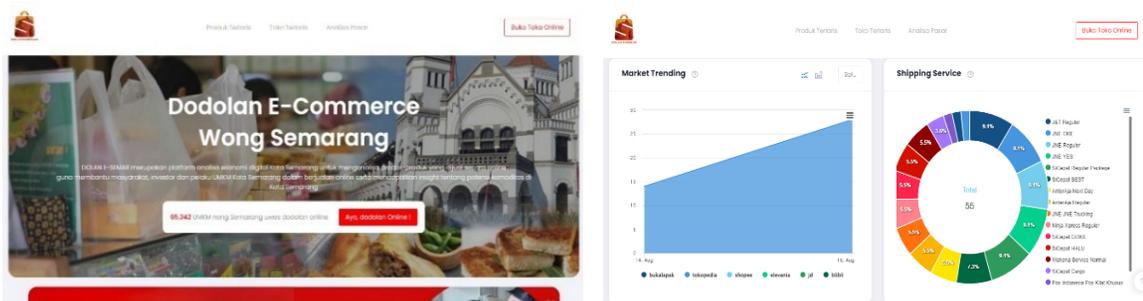
Pemerintah terus mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia melalui perbaikan sistem kemudahan berinvestasi yang dapat menjadi momentum untuk peningkatan *optimism and awareness* terkait reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung kemudahan berusaha. Di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melahirkan inovasi Tata Ruang Pro Investasi yang gawangi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang bertujuan untuk melakukan percepatan, peningkatan pelayanan, dan kemudahan akses kepada masyarakat dan calon investor dalam hal perizinan keruangan dengan pendayagunaan data spasial dan teknologi GIS (*Geographic Information System*). Sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada calon investor tentang diizinkan atau tidaknya suatu jenis investasi tanpa harus datang ke kantor pelayanan sampai dengan menganalisa secara otomatis ketentuan-ketentuan tata ruang terhadap rencana-rencana investasi/pembangunan dari para investor/masyarakat dan instansi-instansi lainnya dalam sekali klik.



Tampilan Aplikasi Tata Ruang Pro Investasi

10. Dolan E-Semar (Dodolan E-Commerce e Wong Semarang)

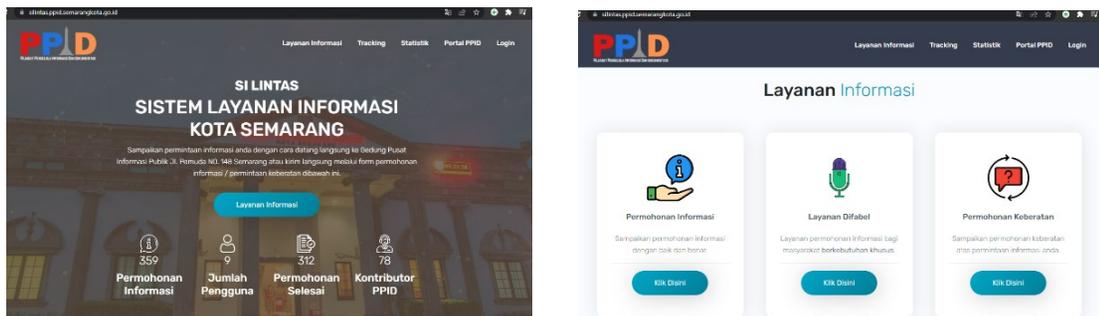
Di era digital saat ini, data berperan penting dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Hasil analisis data yang tepat dapat membantu pemerintah termasuk di Kota Semarang untuk memperoleh informasi mengenai industri, UMKM, pariwisata, potensi daerah, dan informasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merencanakan strategi pembangunan daerah serta mewujudkan visi dan misi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang atau Diskominfo memanfaatkan teknologi *E-commerce analytics* untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha. *E-commerce analytics* merupakan *big data* dari berbagai *marketplace* yang diolah dan dianalisa untuk keperluan tertentu seperti membuat keputusan (*decision making*), prediksi, juga menggugah masyarakat untuk beralih dari bisnis konvensional ke digital. Diskominfo Kota Semarang mengembangkan *platform* analisa ekonomi digital yang berbasiskan analisis transaksi, informasi potensi daerah, serta analisis produk top UMKM yang keseluruhannya terangkum dalam 1 *platform* yang disebut dengan *Dolan E-Semar* (Dodolan E-Commerce e Wong Semarang).



Tampilan Aplikasi dan Contoh Hasil Analisis Pasar Dolan E-Semar

## 11. *SI LINTAS* (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang)

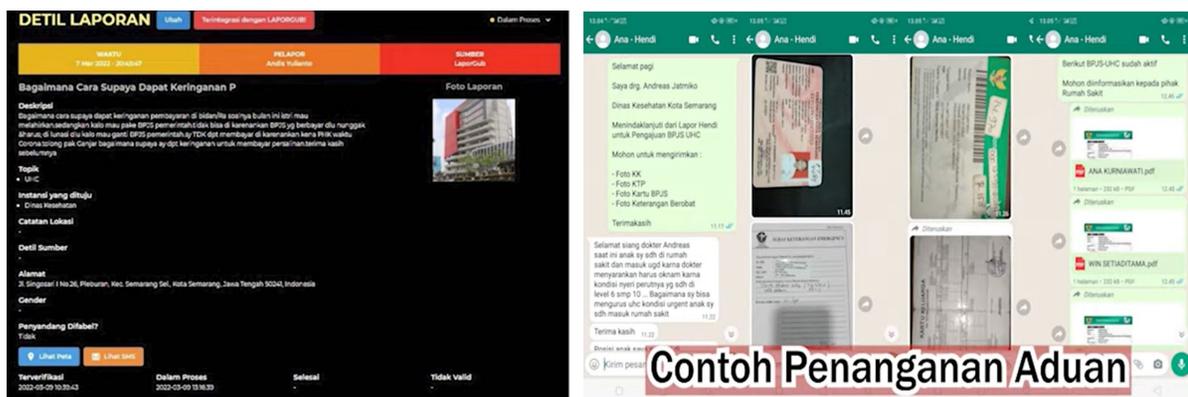
Kebutuhan akan data dan informasi sudah menjadi hajat masyarakat dewasa ini. Namun seringkali masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengelolaan informasi publik termasuk di Kota Semarang mulai dari pelayanan permintaan data dan informasi yang membutuhkan waktu cukup lama serta bersifat ketat dan terbatas sampai dengan kurangnya pengawasan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh perangkat daerah dan BUMD terhadap publik. Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih sering terjadi, Pemerintah Kota Semarang melalui Diskominfo menghadirkan inovasi Si Lintas, Sistem Pelayanan Informasi Publik berbasis *website* di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya menuju keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan informasi publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, pelayanan informasi di Pemerintah Kota Semarang menjadi lebih mudah, cepat, cermat, transparan, akuntabel, proporsional serta dapat mendorong partisipasi masyarakat umum tak terkecuali masyarakat difabel dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.



*Dashboard Si Lintas*

## 12. *PANDANARAN* (Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang)

*PANDANARAN* (Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang) dikembangkan karena banyaknya aduan masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan tetapi membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan, terutama kelompok rentan yaitu ibu hamil, disabilitas, orang sakit dan lansia. Prosedur pengaduan dari inovasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui Laporan Gubernur, Laporan Hendi, *Hotline* UHC, Instagram, Facebook dan Twitter, maupun secara langsung melalui petugas di Loker UHC. Inovasi ini menggunakan aplikasi SIM UHC yang mengintegrasikan segenap pemangku kepentingan seperti Dispendukcapil, BPJS Kesehatan, dan Rumah Sakit di Kota Semarang, sehingga proses penyelesaian aduan masyarakat terkait program UHC menjadi lebih cepat.



*Contoh Aduan melalui Pelayanan PANDANARAN*

13. *WARAK NGENDOG* (Lawan *Corona Virus* Kota Semarang dengan Dukungan Integrasi Program dan Bergerak Bersama)

Penanganan penyakit menular berpotensi wabah di Kota Semarang sebelumnya tidak berjalan maksimal. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat di tahun 2019 terdapat 213.715 kasus ISPA. Pengendalian yang belum didukung oleh pelaporan secara digital menyebabkan penanganan belum berjalan cepat dan tepat. Hal ini ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap berbagai sektor, terutama kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang menginisiasi *WARAK NGENDOG* yang mempunyai dampak signifikan terhadap pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. *Case Fatality Rate* (CFR) Covid-19 di Kota Semarang di tahun 2020 sebesar 8,4% menurun pada tahun 2022 menjadi 2,7%. *WARAK NGENDOG* menunjukkan kemampuan pemerintah untuk melakukan mitigasi pandemi didukung oleh platform digital *STRONG* dan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat, sehingga penanganan Covid-19 terlaksana dengan tepat, cepat, dan akurat sehingga dampak pandemi bisa diantisipasi dengan baik.



*Integrasi Sistem dalam Warak Ngendog*

14. *PALAWA* (Sistem Pelayanan Laboratorium Melalui *Whatsapp*)

Transformasi digital telah mengubah cara berkomunikasi, termasuk antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan aplikasi terpopuler seperti *Whatsapp* pun dilihat sebagai salah satu pilihan terbaik. Menanggapi hal tersebut, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang membentuk inovasi pelayanan publik melalui program “*PALAWA*” atau Pelayanan Laboratorium Melalui *Whatsapp* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar layanan laboratorium lingkungan seperti informasi terkait biaya pengujian, konsultasi mengenai hasil pengujian serta informasi untuk keperluan pendidikan serta penelitian. Dengan adanya inovasi ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat, tepat, mudah, dan fleksibel.



*Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang*

## 15. Program Sosialisasi Promosi dan Publikasi

Program Sosialisasi Promosi dan Publikasi yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui UPTD Laboratorium Lingkungan berisi kegiatan presentasi ke beberapa kawasan industri di Kota Semarang dalam rangka mengenalkan dan mempromosikan pelayanan yang ada di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang. Beberapa manfaat dari program ini diantaranya memudahkan kerjasama antara UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang, lebih jauh diharapkan dapat terbentuk kesepakatan kerjasama antara pihak UPTD dan perusahaan-perusahaan yang dikunjungi. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini yakni mendapatkan respon positif dari para badan usaha di Kota Semarang yang linear dengan penambahan pendapatan daerah.



*Kegiatan Sosialisasi Promosi dan Publikasi Layanan UPTD Laboratorium Lingkungan*

## 16. APROKLIM TAPAK (Aplikasi Pemberdayaan Proklam Tingkat Tapak)

Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan salah satu strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan mendorong kerjasama multipihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Dengan hadirnya inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini diharapkan Proklam dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terarah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam merealisasikan rencana kegiatan di setiap periode waktu sesuai tahapan yang direncanakan. Aplikasi ini juga menjadi instrumen yang akan memandu rencana tahapan pelaksanaan Proklam untuk dapat bersinergi dengan berbagai kegiatan terkait sehingga mampu memberikan gambaran titik awal dan akhir dalam rangka menyukseskan target capaian program secara keseluruhan.



*Pelaksanaan Proklam Kota Semarang*

17. Pemetaan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kota Semarang

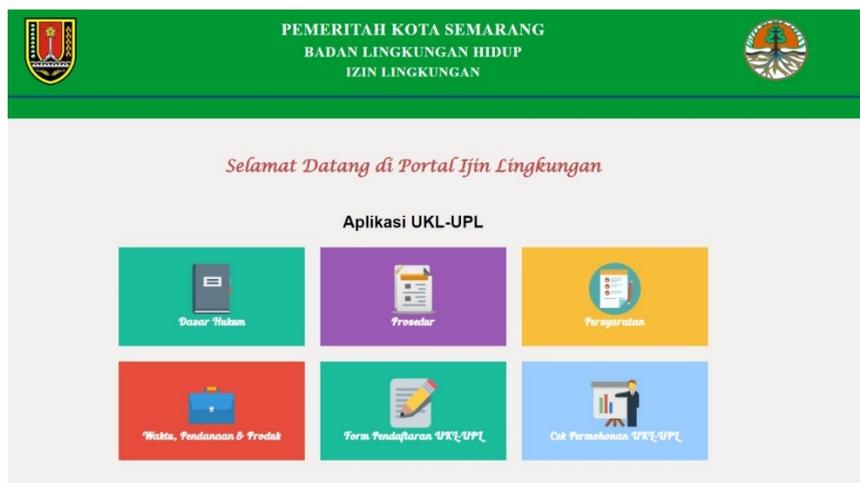
Perkembangan teknologi berbasis spasial dan *smartphone* saat ini sudah hampir menjangkau semua sektor. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai salah satu alternatif pemetaan sebaran maupun pemantauan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pemetaan penghasil limbah B3 berbasis *WebGIS online* di aplikasi *smartphone* yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengawasan dan pemantauan limbah B3 di Kota Semarang.



Rapat Persiapan Pemetaan Penghasil Limbah B3 Kota Semarang

18. Percepatan Pemrosesan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan di Kota Semarang

Inovasi Percepatan Pemrosesan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dimana setiap pelayanannya dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program penyederhanaan SOP ini ditujukan untuk dapat meningkatkan percepatan dan kualitas layanan di bidang perizinan lingkungan atau persetujuan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta untuk mewujudkan *good governance* melalui prosedur kerja yang efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel yang akan mengantarkan Pemerintah Kota Semarang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.



Tampilan Portal Izin Lingkungan

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan di tahun 2023 disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan bidang urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

### 5.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 5.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program diarahkan pada pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

##### b. Program Pengembangan Kurikulum

Program diarahkan pada penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal.

##### c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

##### d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

#### 5.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

##### b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman  
Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Post Market* pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Program ini diarahkan pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 5.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengembangan Permukiman  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Penataan Bangunan Gedung  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penyelenggaraan Jalan  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  
Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan  
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman  
Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  
Program ini diarahkan pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

#### 5.1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum  
Program ini diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
- b. Program Penanggulangan Bencana  
Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran  
Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

#### 5.1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial  
Program ini diarahkan pada Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan  
Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial  
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Penanganan Bencana  
Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

## 5.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 5.2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja  
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja  
Program ini diarahkan pada Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial  
Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

## 5.2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  
Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Perempuan  
Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga  
Program ini diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak  
Program ini diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak  
Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 5.2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan  
Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan  
Program ini diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

### 5.2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan  
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee  
Program ini diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Tanah Kosong  
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
- e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah  
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Membuka Tanah.
- f. Program Penatagunaan Tanah  
Program ini diarahkan pada Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5.2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup  
Program ini diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Secara lebih khusus, program ini juga diarahkan untuk mengatasi isu Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)  
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  
Program ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
- i. Program Pengelolaan Persampahan  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sampah.

#### 5.2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk  
Program ini diarahkan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

- b. Program Pencatatan Sipil  
Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan  
Program ini diarahkan pada Penyusunan Profil Kependudukan.

#### 5.2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa  
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat  
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.

#### 5.2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk  
Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

#### 5.2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)  
Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Aplikasi Informatika  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam  
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi  
Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi  
Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian  
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi  
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)  
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Pengembangan UMKM  
Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

#### 5.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Promosi Penanaman Modal  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota.

#### 5.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

#### 5.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional  
Program ini diarahkan pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Permuseuman  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

#### 5.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno  
Program ini diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip  
Program ini diarahkan pada Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, dan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.
- c. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip  
Program ini diarahkan pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

#### 5.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

##### 5.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan  
Program ini diarahkan pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan  
Program ini diarahkan pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

##### 5.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Pemasaran Pariwisata  
Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

#### 5.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Program ini diarahkan pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian  
Program ini diarahkan pada Pembangunan Prasarana Pertanian, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian  
Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Program Penyuluhan Pertanian  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

#### 5.3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan  
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting  
Program ini diarahkan pada Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

- d. Program Pengembangan Ekspor  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

#### 5.3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  
Program ini diarahkan pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota  
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  
Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### 5.4. UNSUR PENDUKUNG

##### 5.4.1. SEKRETARIAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  
Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

##### 5.4.2. SEKRETARIAT DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD  
Program ini diarahkan pada Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

## 5.5. UNSUR PENUNJANG

### 5.5.1. PERENCANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Program ini diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

### 5.5.2. KEUANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### 5.5.3. KEPEGAWAIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kepegawaian Daerah  
Program ini diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

### 5.5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Program ini diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

### 5.5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah  
Program ini diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian

dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

## 5.6. UNSUR PENGAWAS

### 5.6.1. INSPEKTORAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi  
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dan Pendampingan dan Asistensi.

## 5.7. UNSUR KEWILAYAHAN

### 5.7.1. KECAMATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Program ini diarahkan pada Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Program ini diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

## 5.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

### 5.8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemil.

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya  
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai target indikator program-program pada setiap urusan pemerintahan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum, setiap Perangkat Daerah melaksanakan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat mendukung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator:

- 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan;
- 2) persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN;
- 3) persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD; dan
- 4) persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD.

TABEL V.1  
KOMPILASI PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF TIAP PERANGKAT DAERAH  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				766.297.863.750
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.62 %	92.137.657.887
			APK PAUD 5-6 tahun	85.87 %	
			Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	8.00 lembaga	
			APK SD/MI	111.71 %	
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	1.244.670.000
			Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %	
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.50 %	69.977.129.144
		1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100.00 %	641.600.000
			Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	602.296.806.719
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN				378.133.220.647
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 persentase	87.061.576.884
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 persen	293.921.200
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96.00 persen	250.000.000
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 persen	105.650.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00 persentase	290.422.072.563
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	100.00 %	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO				425.167.163.028
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100.00 %	53.140.945.927
			Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100.00 %	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 %	372.026.217.101
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00 %	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM				345.163.444.958
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97.86 %	28.471.938.141
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65.00 %	68.545.911.137
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.50 %	214.054.433.430
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100.00 %	34.091.162.250
			Persentase kinerja adminstrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100.00 %	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100.00 %	
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG				209.865.760.048
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 %	144.774.095.314
			Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 persen	
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 %	4.900.000.000
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 %	1.257.746.036
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 %	10.945.355.980
		2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 %	781.158.501
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 %	6.637.818.927
		2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 %	778.617.566
		2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100.00 %	
		2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 %	15.497.917.035

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100.00 %	313.621.984
		2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesainya penatagunaan tanah	100.00 %	181.666.997
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM	100.00 %	23.797.761.708
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100.00 %	
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				242.274.030.773
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	69.69 %	290.462.481
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100.00 %	
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90.86 %	976.028.762
		1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	48.00 %	112.749.649.507
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100.00 %	6.867.386.751
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100.00 %	4.260.207.921
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99.15 %	9.624.631.895
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 %	61.057.809.932
			Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.31 %	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00 %	46.447.853.524
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)				35.833.852.469
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 %	14.984.746.537

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100.00 %	20.849.105.932
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol pp	100.00 %	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100.00 %	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100.00 %	
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				35.778.351.681
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persentase	14.224.925.197
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	
			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persentase	
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 %	
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 persentase	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	21.553.426.484
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				14.919.845.058
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13.00 %	5.987.397.139
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100.00 %	8.932.447.919
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100.00 %	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100.00 %	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL				30.437.981.436

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78.00 %	7.197.369.600
		1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 %	54.023.060
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.81 %	6.629.844.930
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69.85 %	4.743.785.480
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 %	1.097.748.400
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial	100.00 %	10.715.209.966
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100.00 %	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA				17.194.306.543
		2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65.00 %	162.400.000
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77.00 %	2.555.760.000
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66.00 %	824.980.000
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.30 %	744.300.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	12.906.866.543
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 %	
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				19.131.456.859
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 %	1.195.240.137
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14.24 Poin	2.372.584.298
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 %	1.952.860.000
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00 %	303.613.140

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		GENDER DAN ANAK			
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100.00 %	575.654.060
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.01 %	553.346.208
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100.00 %	252.226.040
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100.00 %	919.483.225
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100.00 %	11.006.449.751
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100.00 %	
			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.00 %	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN				13.119.150.139
		2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100.00 %	286.932.432
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun	2.704.743.880
			Presentase Cakupan Distribusi	100.00 %	
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 %	
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4.00 %	109.195.275
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81.50 %	675.248.970
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	9.343.029.582
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	
			Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				131.731.704.358
		2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 %	615.559.024
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 %	6.224.340.968

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59.00 %	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87.00 %	
			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20.00 Ha	
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 %	
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 %	866.083.646
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56.00 %	363.971.800
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.40 %	691.927.835
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 %	
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50.00 %	3.274.815.000
		2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11.50 %	291.129.200
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 %	125.108.000
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.00 %	79.836.910.007
			Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27.00 %	
			Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72.00 %	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	39.441.858.878
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				23.443.105.241

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.40 %	1.824.495.957
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71.00 %	
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20 %	560.206.429
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 %	346.827.620
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 %	
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 %	121.157.880
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	20.590.417.355
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100.00 %	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				19.905.166.724
		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	684.178.460
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00 %	7.470.351.779
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12 %	886.041.710
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	10.864.594.775
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN				310.781.289.003
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64.22 %	241.081.881.233
			Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88.00 persen	
			Jml trayek BRT	13.00 trayek	
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33.00 persen	
			Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.81 rasio	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	69.699.407.770
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00 persen	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100.00 %	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 persen	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				53.348.990.388
		2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00 %	5.604.524.500
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 %	31.458.137.917
		2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 %	626.003.608
		2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 %	690.921.720
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100.00 %	14.969.402.643
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100.00 %	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 %	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				24.702.036.168
		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	214.521.290
		2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	554.915.380
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	31.00 Persen	366.205.089
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	335.896.070
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00 Persen	
		2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26.00 Persen	2.762.566.380
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 persen	3.792.070.650
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 %	3.963.898.830
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	12.711.962.479
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana	100.00 Persen	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			Aparatur		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				27.449.125.396
		2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3691.00 Penanam Modal	1.899.328.702
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492.00 Investor	2.547.128.842
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.00 %	3.732.587.965
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.00 nilai	380.076.270
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96.00 %	960.524.998
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	17.929.478.619
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 %	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				53.729.871.113
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35.00 Organisasi Kpemudaan	2.074.999.392
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1197.00 jumlah	33.934.711.459
			Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	
		2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47.00 Kegiatan	2.000.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %	15.720.160.262
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana	100.00 %	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100.00 %	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				55.351.247.450
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20.00 %	10.463.354.290
		2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20.00 %	4.277.064.520
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77.85 %	3.395.000.000
		2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum yang sesuai standar	100.00 %	963.030.000
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 %	13.500.000.000
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 %	3.498.424.331
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	70.00 %	910.920.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	18.343.454.309
			Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.00 %	
			Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100.00 %	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 %	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				14.584.496.882
		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 rasio	1.307.921.937
		2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 %	88.415.933
		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100.00 %	576.490.990
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	311.108.160
		2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60.00 %	28.865.640
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	12.271.694.222
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00 %	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN				14.361.104.449
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3055.90 Ton	1.643.400.000
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3845.95 Ton	2.956.852.885
		3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4.00 Kasus	283.192.355
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17557.29 Ton	1.395.494.760
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	100.00 %	8.082.164.449
			Peningkatan Kapasitas SDM	30.00 Orang	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan	100.00 %	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN				32.198.237.245
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan	35922.00 ton	5.918.669.202
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50647.76 ton	
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	5.181.664.800
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 %	494.652.000
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75.00 %	187.400.000
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28.00 kelompok	749.107.400
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	19.666.743.843
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100.00 %	
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN				68.644.999.286
		3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 %	126.338.000
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	22.00 pasar	28.444.442.000

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		DISTRIBUSI PERDAGANGAN	perdagangan yang representatif		
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.99 %	187.709.000
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1615736908.00 US\$	590.552.000
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76.00 %	804.852.000
		3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30.00 %	707.272.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	37.783.834.286
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100.00 %	
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN				14.917.740.261
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88.00 %	4.652.019.490
			Persentase Pertambahan IKM	0.50 %	
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 %	176.460.000
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	388.840.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100.00 %	9.700.420.771
			Persentase tersedianya Sarana Dam Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 %	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00 %	
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00 %	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIS DAERAH				198.962.303.560
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	118.00 persen	47.104.561.945
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 persen	
			Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 Kegiatan	
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40.00 persen	
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 persen	4.537.339.432
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00 dokumen	
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 persen	147.320.402.183
			Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 persen	
			OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	41.00 OPD	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100.00 persen	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 persen	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 persen	
			peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100.00 persen	
			Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 persen	
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	40.00 persen	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD				129.984.475.359
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16.00 dokumen	63.142.144.720
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100.00 %	66.842.330.639
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100.00 %	
			persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100.00 %	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)				27.003.436.010
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 %	2.317.020.000
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 %	7.794.837.500
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 %	
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang	100.00 %	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			Infrastruktur dan Kewilayahan		
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100.00 %	2.047.450.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100.00 %	14.844.128.510
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100.00 %	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100.00 %	
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100.00 %	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				167.934.451.827
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1.22 %	63.203.258.455
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	80.48 %	4.432.705.506
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100.00 %	100.298.487.866
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100.00 %	
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100.00 %	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100.00 %	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				97.046.778.157
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00 %	
		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	28.334.173.757
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	68.712.604.400
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %	
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %	
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				35.300.055.466
		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	239.43 Persen	9.674.001.291

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			kesehatan)		
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen	
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen	
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen	
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	
		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen	8.605.345.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	17.020.709.175
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	
			Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT				27.889.644.124
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 leveling	2.949.636.853
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.04 nilai	5.025.711.670
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	19.914.295.601
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00 %	
			persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00 %	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				38.419.238.041
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	2.543.940.100
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	23.836.928.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	87.930.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	83.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	11.867.439.941

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA				42.868.026.091
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	3.066.793.880
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	27.873.761.780
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	5.550.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	69.750.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	11.852.170.431
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
			Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT				61.368.563.101
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	4.079.931.398
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 Persen	39.716.555.539
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	14.232.061
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	84.043.922
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	17.473.800.181
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR				41.634.104.531

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	3.080.253.499
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	25.385.200.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	35.000.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	88.300.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	13.045.351.032
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				51.222.538.734
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	3.597.428.550
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92.00 Persen	29.570.558.177
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.00 Persen	22.500.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00 persen	82.455.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	17.949.597.007
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI				54.152.779.933
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	3.753.773.720
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 Persen	32.259.967.518
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan	15.00 persen	48.522.200

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum		
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	75.675.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	18.014.841.495
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU				26.580.288.045
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	2.087.256.917
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	14.641.600.509
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	22.500.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	72.667.550
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	9.756.263.069
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN				53.460.064.934
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	3.542.321.200
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	29.165.235.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	50.830.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	90.692.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	20.610.986.734
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00 %	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK				53.551.718.618

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	3.292.260.490
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	32.883.632.793
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	68.535.710
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	108.581.540
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	17.198.708.085
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				33.350.181.442
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94.00 %	2.741.415.000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 %	18.434.750.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 %	79.800.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85.00 %	77.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	12.017.216.442
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG				59.760.618.417
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	2.931.990.000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	41.619.350.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	50.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70.00 persen	96.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	15.063.278.417
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI				33.204.494.580
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	2.698.777.036
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00 persen	19.614.220.590
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	80.000.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00 angka	75.338.500
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	10.736.158.454
			Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100.00 %	
			Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				50.326.189.483
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	2.782.930.570
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	32.075.320.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	16.200.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	70.579.764
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	15.381.159.149
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan	100.00 %	

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
			Keuangan SKPD		
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN				49.668.402.192
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	2.686.896.000
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	32.754.762.000
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	63.283.000
			Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.469.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	14.070.992.192
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI				32.213.546.228
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	2.028.424.226
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 Persentase	19.026.951.848
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	18.850.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	76.750.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	11.062.570.154
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
			Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN				60.651.145.810
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	2.959.987.338
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	92.00 persen	40.337.923.512

KODE	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
			INDIKATOR	TARGET	
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	64.000.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00 persen	50.980.350
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	17.238.254.610
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				51.131.882.876
		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.10 Indeks	1.091.118.000
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	0.00 %	36.517.196.000
			Indeks Kebebasan Sipil	64.00 angka indeks	
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	57.00 indeks	1.673.762.000
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	70.50 indeks	3.143.816.000
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82.00 prosentase	2.511.924.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	6.194.066.876
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 %	
<b>JUMLAH</b>					<b>4.856.150.468.912</b>



TABEL V.2  
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	766.297.863.750
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	378.133.220.647
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO	425.167.163.028
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM	345.163.444.958
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG	209.865.760.048
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	242.274.030.773
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	35.833.852.469
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	35.778.351.681
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.919.845.058
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	30.437.981.436
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	17.194.306.543
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.131.456.859
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	13.119.150.139
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	131.731.704.358
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.443.105.241
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.905.166.724
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	310.781.289.003
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	53.348.990.388
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	24.702.036.168
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27.449.125.396
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	53.729.871.113
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	55.351.247.450
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	14.584.496.882
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	14.361.104.449
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	32.198.237.245
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	68.644.999.286
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN	14.917.740.261
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIS DAERAH	198.962.303.560
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	129.984.475.359
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	27.003.436.010
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	167.934.451.827
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	97.046.778.157
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	35.300.055.466
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	27.889.644.124
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	38.419.238.041
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	42.868.026.091
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT	61.368.563.101
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	41.634.104.531
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	51.222.538.734
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI	54.152.779.933
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU	26.580.288.045
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN	53.460.064.934
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK	53.551.718.618
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	33.350.181.442
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG	59.760.618.417
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI	33.204.494.580
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK	50.326.189.483
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN	49.668.402.192
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI	32.213.546.228
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN	60.651.145.810
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.131.882.876
<b>JUMLAH</b>		<b>4.856.150.468.912</b>

TABEL V.3  
Matrik Program Kegiatan/Sub Kegiatan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Semarang Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN								766.297.863.750	948.492.547.748	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								766.297.863.750	948.492.547.748	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								92.137.657.887	72.310.685.748	
			APK SMP/MTs	115.62	%						
			APK PAUD 5-6 tahun	85.87	%						
			Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	8.00	lembaga						
			APK SD/MI	111.71	%						
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.00	%	Tercapainya APK SD/MI			30.568.500.000	37.507.760.000	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	19.00	Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	19.00	Ruang	2.184.417.000	4.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.00	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dihanani	15.00	Unit	613.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	32.00	Ruang	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	144.00	Ruang	7.332.144.000	4.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4.00	Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.00	Ruang	200.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.00	Ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3.00	Ruang	200.439.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.00	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	13.00	Unit	1.050.000.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	13.00	Unit	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12.00	Paket	920.000.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perengkapan Sekolah	48.00	Unit	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	16.00	Paket	500.000.000	2.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perengkapan Siswa		Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	5555.00	set	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5555.00	Unit	600.000.000	897.760.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	8688.00	Siswa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13415.00	Peserta Didik	14.051.300.000	16.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4727.00	Siswa						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa		Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	327.00	set	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	16.00	Paket	100.000.000	1.760.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	28665.00	Siswa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	502.00	Satuan Pendidikan	295.300.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PDD	49714.00	Siswa						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Dokumen Evaluasi dan Kajian	24.00	Dokumen	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	24.00	Satuan Pendidikan	430.000.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Lomba	42.00	lomba	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000.00	Peserta Didik	596.800.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3.00	Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600.00	Orang	319.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Monitoring dan Akreditasi sekolah	2.00	Kegiatan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502.00	Satuan Pendidikan	941.500.000	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3.00	Kegiatan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502.00	Orang	234.600.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.00	%	Tercapainya APK SMP/MTs			49.108.040.000	22.186.385.748	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.00	unit	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2.00	Unit	20.000.000.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	32.00	Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34.00	Ruang	11.405.000.000	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.00	Ruang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2.00	Unit	50.000.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah pengadaan sarpras	5.00	Unit						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	2.00	Ruang	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2.00	Unit	150.000.000	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.00	Ruang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4.00	Unit	550.000.000	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1.00	Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4.00	Paket	300.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perengkapan Sekolah	1.00	Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	7.00	Paket	449.640.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perengkapan Siswa		Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1120.00	set	Jumlah Perengkapan Siswa yang Tersedia	46.00	Paket	225.000.000	223.938.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5329.00	Siswa	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5333.00	Peserta Didik	13.209.300.000	9.885.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4670.00	Siswa						DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa		Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	1.00	Sekolah	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	2.00	Paket	250.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12.00	Kegiatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	224.00	Peserta Didik	897.700.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	10.00	Dokumen	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10.00	Satuan Pendidikan	500.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Lomba	14.00	Lomba	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2240.00	Peserta Didik	596.000.000	1.352.447.748	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3.00	Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900.00	Orang	197.600.000	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2.00	Kegiatan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190.00	Satuan Pendidikan	148.200.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.00	Kegiatan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190.00	Orang	179.600.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.00	%	Tercapainya APK PAUD 5-6 tahun			11.150.240.000	10.534.420.000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.00	Unit	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2.00	Unit	6.150.000.000	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4.00	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2.00	Unit	300.000.000	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.00	Unit	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6.00	Unit	295.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.00	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4.00	Unit	280.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	2.00	Unit	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.00	Paket	205.000.000	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	14.00	Sekolah	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2.00	Paket	245.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Pemenuhan SPM PAUD	860.00	Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11.00	Paket	100.000.000	134.420.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1795.00	Siswa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1795.00	Peserta Didik	2.548.040.000	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	14.00	Sekolah	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	2.00	Paket	150.000.000	640.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5.00	Kegiatan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39569.00	Peserta Didik	333.200.000	1.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Dokumen Evaluasi dan Kajian	12.00	Dokumen	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	4.00	Satuan Pendidikan	150.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3.00	Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5.00	Orang	200.000.000	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3.00	Kegiatan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100.00	Satuan Pendidikan	194.000.000	330.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100.00	%				1.310.877.887	2.082.120.000	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.00	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1.00	Unit	700.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	199.00	Siswa	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1.00	Paket	50.000.000	57.120.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3.00	Kegiatan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450.00	Peserta Didik	61.400.000	190.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1.00	Satpen	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.00	Paket	91.877.887	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3.00	Kegiatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3450.00	Peserta Didik	166.600.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3.00	Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50.00	Orang	75.000.000	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2.00	Kegiatan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40.00	Satuan Pendidikan	166.000.000	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00	%				1.244.670.000	3.975.000.000	
			Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00	%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00	%				841.000.000	3.600.000.000	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.00	Kegiatan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4.00	Dokumen	197.600.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.00	Kegiatan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4.00	Dokumen	147.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.00	Kegiatan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	63606.00	Buku	200.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.00	Kegiatan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50.00	Orang	296.400.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00	%				403.670.000	375.000.000	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.00	Kegiatan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	6.00	Dokumen	183.200.000	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.00	Kegiatan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	4.00	Dokumen	70.470.000	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.00	Kegiatan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	10550.00	Buku	150.000.000	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.50	%				69.977.129.144	152.356.400.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.00	%				69.977.129.144	152.356.400.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5387.00	Orang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	18.00	Dokumen	66.629.129.144	152.006.400.000	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah non ASN	2395.00	Orang						DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	7.00	Laporan	3.348.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100.00	%				641.600.000	1.200.000.000	
			Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00	%						
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00	%				278.600.000	400.000.000	
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4.00	Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4.00	Dokumen	133.200.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1.00	Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.00	Dokumen	145.400.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00	%				363.000.000	800.000.000	
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		PAUD yang mendapatkan Ijin Pendirian	290.00	Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00	Dokumen	142.000.000	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200.00	Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00	Dokumen	93.600.000	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Workshop yang terlaksana	4.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00	Dokumen	127.400.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				602.296.806.719	718.650.462.000	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Dokumen Pelaporan	100.00	%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD			78.000.000	1.479.000.000	
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17.00	dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00	Dokumen	10.000.000	1.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		RKA SKPD	1.00	dok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	15.000.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Perubahan RKA SKPD	1.00	dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	15.000.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		DPA SKPD	1.00	dok	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	10.000.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Perubahan DPA-SKPD	1.00	dok	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	10.000.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Pelaporan Capaian	12.00	dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Laporan	8.000.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Laporan	3.00	dok	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.00	Laporan	10.000.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			580.695.284.805	687.856.416.880	
			Administrasi Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6429.00	Orang/bulan	575.428.004.405	681.313.416.880	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100.00	%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.00	Dokumen	5.239.880.400	6.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dok	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	10.000.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semester	2.00	dok	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	17.400.000	21.500.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Pelaporan Barang Milik Daerah	100.00	%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			44.000.000	34.000.000	
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan Barang Milik Daerah	2.00	dok	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00	Laporan	44.000.000	34.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100.00	%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			2.343.560.000	5.973.045.120	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100.00	%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	200.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga	100.00	%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00	Paket	250.000.000	328.474.886	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Logistik Kantor	100.00	%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	250.000.000	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	100.00	%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00	Paket	300.000.000	539.570.234	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Fasilitas Kunjungan Tamu	13000.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	125.568.000	805.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat koordinasi dan konsultasi	500.00	Orang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	892.992.000	1.150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00	%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen	325.000.000	2.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			300.000.000	800.000.000	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Peralatan Gedung Kantor	100.00	%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10.00	Unit	300.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00	%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			16.957.115.427	19.350.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00	Laporan	16.099.825.427	18.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00	%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.00	Laporan	857.290.000	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			1.878.846.487	3.158.000.000		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6.00	Unit	194.863.630	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125.00	Unit	903.982.857	960.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Gedung	3.00	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00	Unit	400.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100.00	%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	300.000.000	1.178.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100.00	%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.00	Unit	80.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>									<b>378.133.220.647</b>	<b>597.601.186.000</b>	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									<b>378.133.220.647</b>	<b>597.601.186.000</b>	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00	persentase				87.061.576.884	275.253.673.000		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	persentase				16.426.489.770	30.272.860.450		
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.00	Unit	359.750.000	9.683.720.450	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas		jumlah pustu menjadi puskesmas induk	1.00	unit	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.00	Unit	4.300.000.000	6.500.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		jumlah puskesmas yang direhabilitasi	1.00	unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.00	Unit	640.250.000	1.400.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		jumlah sarana prasarana puskesmas	15.00	paket	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15.00	Unit	3.239.849.020	5.242.663.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		jumlah ketersediaan alkes dan alat penunjang medis di fasyankes	1.00	paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20.00	Unit	4.686.640.750	4.795.553.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin		persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	32.00	persentase	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	32.00	Paket	3.200.000.000	2.650.924.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100.00	persentase				62.049.744.094	215.824.035.650		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100.00	persentase	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24388.00	Orang	105.130.000	24.448.340.000	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	647.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180.00	Orang			PUSKESMAS PONCOL	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148.00	Orang			PUSKESMAS MIROTO	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1412.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517.00	Orang			PUSKESMAS BULU LOR	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	689.00	Orang			PUSKESMAS HALMAHERA	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	278.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255.00	Orang			PUSKESMAS LAMPER TENGAH	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515.00	Orang			PUSKESMAS MANYARAN	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	449.00	Orang		PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1079.00	Orang		PUSKESMAS GAYAMSARI	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	679.00	Orang		PUSKESMAS CANDILAMA	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352.00	Orang		PUSKESMAS KAGOK	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	941.00	Orang		PUSKESMAS PEGANDAN	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	776.00	Orang		PUSKESMAS GENUK	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1616.00	Orang		PUSKESMAS BANGETAYU	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1477.00	Orang		PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1253.00	Orang		PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1726.00	Orang		PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497.00	Orang		PUSKESMAS NGESREP	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329.00	Orang		PUSKESMAS PADANGSARI	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	535.00	Orang		PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	878.00	Orang		PUSKESMAS GUNUNGPATI	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	206.00	Orang		PUSKESMAS KARANGMALANG	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1138.00	Orang		PUSKESMAS MIJEN	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579.00	Orang		PUSKESMAS TAMBAKAJI	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	602.00	Orang		PUSKESMAS PURWOYOSO	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100.00	persentase		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23023.00	Orang	162.495.000	4.096.099.000	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	177.00	Orang			PUSKESMAS PONCOL
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155.00	Orang			PUSKESMAS MIROTO
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1398.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521.00	Orang			PUSKESMAS BULU LOR
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667.00	Orang			PUSKESMAS HALMAHERA
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	276.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216.00	Orang			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	499.00	Orang			PUSKESMAS MANYARAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420.00	Orang			PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	892.00	Orang			PUSKESMAS GAYAMSARI
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578.00	Orang			PUSKESMAS CANDILAMA
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324.00	Orang			PUSKESMAS KAGOK
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	938.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	751.00	Orang			PUSKESMAS GENUK
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1466.00	Orang			PUSKESMAS BANGETAYU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1298.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1243.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1711.00	Orang			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491.00	Orang			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289.00	Orang			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	512.00	Orang			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	872.00	Orang			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203.00	Orang			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1134.00	Orang			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599.00	Orang			PUSKESMAS PURWOYOSO
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00	persentase	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22453.00	Orang	96.945.000	11.711.189.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	614.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171.00	Orang			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1387.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	516.00	Orang			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201.00	Orang			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	389.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485.00	Orang			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	269.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562.00	Orang			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	954.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	730.00	Orang			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1424.00	Orang			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1295.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1713.00	Orang			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470.00	Orang			PUSKESMAS NGESREP

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268.00	Orang			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754.00	Orang			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191.00	Orang			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1146.00	Orang			PUSKESMAS MIJEN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100828.00	Orang	120.430.000	2.565.028.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3656.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2742.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1251.00	Orang			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4658.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2309.00	Orang			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	990.00	Orang			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	906.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1462.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1531.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1025.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1805.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2357.00	Orang			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1138.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1606.00	Orang			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4078.00	Orang			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2539.00	Orang			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1902.00	Orang			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2642.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2864.00	Orang			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6606.00	Orang			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4803.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2580.00	Orang			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1222.00	Orang			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3882.00	Orang			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1007.00	Orang			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4584.00	Orang			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3095.00	Orang			PUSKESMAS TAMBAKAJI
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2521.00	Orang			PUSKESMAS PURWOYOSO
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227547.00	Orang	40.000.000	211.755.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4625.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7006.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.91	Orang			PUSKESMAS PONCOL

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5930.00	Orang			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3505.00	Orang			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5376.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3898.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2631.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5543.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6820.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3723.00	Orang			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1291.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8262.00	Orang			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6454.00	Orang			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8816.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5704.00	Orang			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7444.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3492.00	Orang			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3374.00	Orang			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8010.00	Orang			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10099.00	Orang			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16921.00	Orang			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6899.00	Orang			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16100.00	Orang			PUSKESMAS MIJEN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1125431.00	Orang	100.000.000	649.660.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9874.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8702.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11237.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10271.00	Orang			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10836.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9539.00	Orang			PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21324.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23495.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8785.00	Orang			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9786.00	Orang			PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151.66	Orang	35.000.000	187.516.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290912.00	Orang	100.000.000	608.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40623.00	Orang	100.000.000	608.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4203.00	Orang	100.000.000	353.367.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113.00	Orang			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120.00	Orang			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	135.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	146.00	Orang			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128.00	Orang			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	133.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	110.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	124.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	136.00	Orang			PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127.00	Orang			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31.00	Orang			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112.00	Orang			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	124.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118.00	Orang			PUSKESMAS GENUK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128.00	Orang		PUSKESMAS BANGETAYU	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	111.00	Orang		PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142.00	Orang		PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112.00	Orang		PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126.00	Orang		PUSKESMAS NGESREP	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142.00	Orang		PUSKESMAS PADANGSARI	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	119.00	Orang		PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128.00	Orang		PUSKESMAS GUNUNGPATI	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	132.00	Orang		PUSKESMAS KARANGMALANG	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	151.00	Orang		PUSKESMAS MIJEN	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	138.00	Orang		PUSKESMAS TAMBAKAJI	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100.00	persentase		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29003.00	Orang	191.817.609	244.853.000	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	684.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	783.00	Orang			PUSKESMAS PONCOL
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1231.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	891.00	Orang			PUSKESMAS HALMAHERA
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	790.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	871.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	698.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	692.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	639.00	Orang			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	751.00	Orang			PUSKESMAS GAYAMSARI
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	591.00	Orang			PUSKESMAS KAGOK
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	472.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	793.00	Orang			PUSKESMAS GENUK
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	789.00	Orang			PUSKESMAS BANGETAYU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1172.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1386.00	Orang			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538.00	Orang			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	681.00	Orang			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	761.00	Orang			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482.00	Orang			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	772.00	Orang			PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35699.00	Orang	265.687.700	38.066.600	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	886.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	972.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	845.00	Orang			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1230.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	897.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	987.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	953.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	564.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	749.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1210.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	967.00	Orang			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1008.00	Orang			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	765.00	Orang			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843.00	Orang			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	897.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1013.00	Orang			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1004.00	Orang			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	769.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	873.00	Orang			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	793.00	Orang		PUSKESMAS NGESREP	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	793.00	Orang		PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	74.00	Orang		PUSKESMAS GUNUNGPATI	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	990.00	Orang		PUSKESMAS MIJEN	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	1.00	persentase		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen	20.000.000	186.340.000	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS SRONDOL
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PONCOL
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BANDARHARJO
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGDORO
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS MANYARAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KROBOKAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS NGENEMPLAK SIMONGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.00	Dokumen			PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	150.00	Dokumen	2.000.000.000	18.338.151.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Prosentase penanganan stunting	100.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148.00	Dokumen	342.900.000	1.397.893.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS BANDARHARJO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.00	Dokumen			PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37.00	Dokumen	50.000.000	134.374.100	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS NGENPLAK SIMONGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.00	Dokumen			PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	68.00	fasyankes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.00	Dokumen	100.000.000	365.129.000	DINAS KESEHATAN
			persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas airnya sesuai standar	45.00	persentase						DINAS KESEHATAN
			persentase tempat fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	65.00	persentase						DINAS KESEHATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			persentase tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	50.00	persentase					DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.00	dokumen					DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS SRONDOL	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS PONCOL	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS BANDARHARJO	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGDORO	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS MANYARAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS KROBOKAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGMUNDU	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGMALANG	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.00	Dokumen			PUSKESMAS TAMBAKAJI	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	1.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37.00	Dokumen	50.000.000	334.116.000	DINAS KESEHATAN
			jumlah keluhan yang mengimplementasikan kebijakan PHBS	90.00	persentase						DINAS KESEHATAN
			jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	8.00	tema						DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			5.00	Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			4.00	Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2.00	Dokumen				PUSKESMAS MIROTO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.00	Dokumen			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3.00	Dokumen	24.750.000	85.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen	130.000.000	1.801.209.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.00	Dokumen			PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235.00	Orang	75.000.000	47.957.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen	412.382.623	1.654.705.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	dokumen			DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.00	Dokumen			PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	12.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.00	Dokumen	48.028.314.489	137.287.158.750	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	177.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10.00	Dokumen	1.420.136.021	1.886.453.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		operasional pelayanan instalasi farmasi	100.00	persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	127.00	Dokumen	5.959.514.252	2.854.753.200	UPTD Instalasi Farmasi
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.00	Dokumen			DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	208.00	Dokumen			UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	123.00	puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	123.00	Unit	1.227.771.000	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.00	Laporan	10.000.000	6.575.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.00	Laporan			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.00	Laporan			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.00	Laporan			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.00	Laporan			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.00	Laporan			PUSKESMAS KARANGMALANG
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	52.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52.00	Dokumen	365.000.000	21.748.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52.00	Dokumen			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
											PUSKESMAS BUGANGAN
											PUSKESMAS LAMPER TENGAH
											PUSKESMAS LEBDOSARI
											PUSKESMAS KROBOKAN
											PUSKESMAS KAGOK
											PUSKESMAS GENUK
											PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
											PUSKESMAS NGESREP
											PUSKESMAS PADANGSARI
											PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
											PUSKESMAS MIJEN
											PUSKESMAS TAMBAKAJI
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		cakupan pelayanan PSC	1.00	persentase	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.00	Unit	289.865.400	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27520.00	orang	43.900.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35699.00	orang	40.875.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	58.00	orang	41.830.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100.00	persentase				1.928.045.410	1.496.801.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	3.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10.00	Dokumen	238.554.420	145.927.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehatan	4.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.00	Dokumen	943.982.110	1.175.433.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	15.00	persentase	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	21.00	Unit	745.508.880	175.441.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		cakupan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100.00	persentase				6.657.297.610	27.659.975.900	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		rasio sarana kesehatan yang mengajukan izin operasional	32.00	persentase	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan	5.00	Unit	9.900.000	25.155.900	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	55.00	persentase	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	37.00	Unit	4.469.167.410	18.869.000.000	DINAS KESEHATAN
			persentase pelayanan ambulan siaga	100.00	persentase						DINAS KESEHATAN
			persentase pelayanan P3K	100.00	persentase						DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	83.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12.00	Dokumen	2.178.230.200	8.765.820.000	DINAS KESEHATAN
			jumlah kelurahan tanggap darurat medis	46.00	jumlah						DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00	persen				293.921.200	1.001.461.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100.00	persen				167.698.100	553.908.100	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		rasio dokter umum	1.90	per 1000 penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.00	Dokumen	21.300.000	187.494.600	DINAS KESEHATAN
			rasio perawat	6.02	per 1000 penduduk						DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	persentase	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	333.00	Orang	59.671.200	100.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS PEGANDAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4.00	Orang			PUSKESMAS TAMBKAJI
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		persentase pembinaan dan pengawasan SDM untuk puskesmas dan RS	1.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.00	Dokumen	86.726.900	266.413.500	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100.00	persentase				126.223.100	447.552.900	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	100.00	kegiatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100.00	Orang	126.223.100	447.552.900	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96.00	persen				250.000.000	253.668.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		cakupan pemberian izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100.00	persentase				74.141.530	94.788.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	4.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	118.00	Dokumen	74.141.530	94.788.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100.00	Persentase				109.139.230	68.027.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	1.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	360.00	Dokumen	109.139.230	68.027.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100.00	persentase				66.719.240	90.853.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	100.00	persentase	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100.00	Unit	66.719.240	90.853.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00	persen				105.650.000	265.242.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100.00	persen				70.650.000	94.932.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan sudah diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	156000.00	Keluarga	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen	70.650.000	94.932.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	Dokumen			PUSKESMAS TAMBKAJI
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100.00	persen				35.000.000	170.310.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		proporsi strata posyandu	100.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	148.00	Dokumen	35.000.000	170.310.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PEGANDAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS BANGETAYU
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.00	Dokumen			PUSKESMAS GUNUNGPATI
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00	persentase				290.422.072.563	320.827.142.000	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10.00	dokumen				39.396.080	457.028.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah Dokumen Renja rensta, masterplan kesehatan	4.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00	Dokumen	6.108.800	185.276.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		jumlah dokumen RKA	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	0.00	Dokumen	8.188.500	43.729.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		jumlah dokumen RKA Perubahan	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	8.734.400	42.681.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		jumlah dokumen DPA	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.940.820	39.098.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		jumlah dokumen DPA Perubahan	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3.486.720	39.098.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen LKPI, LKJIP, SPM	5.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	9.936.840	107.146.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	jumlah dokumen laporan keuangan	4.00	dokumen				206.051.054.169	248.391.989.500	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1614.00	Orang/bulan	205.284.078.169	247.577.462.124	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	12.00	persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	756.860.000	803.398.876	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	3.372.000	3.709.500	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		jumlah laporan Keuangan Semesteran	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	3.372.000	3.709.500	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	3.372.000	3.709.500	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	persentase				2.539.207.581	3.147.834.200	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		persentase tersedianya komponen instalasi listrik	2.00	persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	23.091.000	25.400.800	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	1.00	persentase	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00	Paket	67.954.800	74.750.400	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		persentase tersedianya barang cetak dan pengandaan	1.00	persentase	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1.00	Paket	250.000.000	331.372.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	1.00	persentase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.00	Dokumen	3.630.000	3.993.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100.00	persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.00	Laporan	1.196.000.000	2.064.667.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	2.00	unit	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dokumen	998.531.781	647.651.000	DINAS KESEHATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persentase				918.661.869	737.906.000	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9.00	Unit	918.661.869	737.906.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persentase				3.821.871.484	2.575.712.100	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	1.00	persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	Laporan	12.100.000	13.310.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.00	persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	1.066.674.384	1.175.367.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12.00	persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	2.743.097.100	1.387.035.100	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100.00	persentase				3.874.411.300	4.722.565.700	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6.00	Unit	226.572.720	285.299.850	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	150.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150.00	Unit	2.038.703.580	3.111.651.700	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		persentase perbaikan peralatan kantor	10.00	persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00	Unit	1.000.000.000	252.728.400	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	10.00	persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	500.000.000	972.195.600	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		persentase terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	5.00	persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	109.135.000	100.690.150	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	37.00	unit kerja				73.177.470.080	60.794.106.500	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja	73.177.470.080	60.794.106.500	PUSKESMAS SEKARAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS SRONDOL
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS PONCOL
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS MIROTO
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS BANDARHARJO
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS BULU LOR
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS HALMAHERA
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS BUGANGAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS KARANGDORO
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS PANDANARAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS LAMPER TENGAH
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS KARANGAYU
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS LEBDOSARI
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS MANYARAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS KROBOKAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS GAYAMSARI
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS CANDILAMA
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS KAGOK
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS PEGANDAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS GENUK
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS BANGETAYU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS ROWOSARI
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS NGESREP
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS PADANGSARI
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS GUNUNGPATI
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS KARANGMALANG
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS MIJEN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS TAMBAKAJI
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS PURWOYOSO
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS NGALIYAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS MANGKANG
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja			PUSKESMAS KARANGANYAR
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RSUD KRMT WONGSONEGORO</b>								<b>425.167.163.028</b>	<b>400.186.886.000</b>	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>								<b>425.167.163.028</b>	<b>400.186.886.000</b>	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100.00	%				53.140.945.927	1.000.000.000	
			Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100.00	%						
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100.00	%	Meningkatnya Ketersediaan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit			53.140.945.927	1.000.000.000	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100.00	%						
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Pembangunan Gedung IGD Terpadu Tahap 2	1.00	Unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio/Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.00	Unit	50.000.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit		Pembangunan Gudang Aset	1.00	unit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.00	Unit	1.634.449.220	500.000.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	100.00	persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	43.00	Unit	1.506.496.707	500.000.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00	%				372.026.217.101	399.186.886.000	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00	%						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100.00	%	Meningkatnya administrasi perkantoran			57.986.075.631	66.502.207.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500.00	Orang/bulan	57.938.675.631	66.432.241.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Honor TPHL	1.00	tahun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.00	Dokumen	47.400.000	69.966.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible	Pelayanan BLUD	100.00	%	Meningkatnya pelayanan BLUD Baik			314.040.141.470	332.684.679.000	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.00	persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja	314.040.141.470	332.684.679.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>								<b>345.163.444.958</b>	<b>336.608.295.000</b>	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								<b>345.163.444.958</b>	<b>336.608.295.000</b>	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97.86	%				28.471.938.141	39.500.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96.17	%	kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir			26.071.938.141	37.900.000.000	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00	dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.00	Dokumen	545.000.000	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	10.00	lokasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	10.00	Unit	2.000.000.000	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	1.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1.00	lokasi	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1.00	Unit	3.000.000.000	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.00	KM	1.500.000.000	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.00	kegiatan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.00	Unit	1.084.766.388	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah I	1.00	kegiatan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	4.00	Unit	17.000.000.000	29.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah II	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat	1.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II	1.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah timur	1.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah I	1.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.00	kegiatan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.00	Unit	942.171.753	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	83.00	%	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.			2.400.000.000	1.600.000.000	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Dokumen Database Irigasi	1.00	dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1.00	Dokumen	100.000.000	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	80.00	persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.30	KM	2.300.000.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65.00	%				68.545.911.137	82.101.888.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.17	%	luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai			68.545.911.137	82.101.888.000	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.00	dokumen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	5.00	Dokumen	1.405.000.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Penyusunan DED (Rechannelling the city)	1.00	dokumen						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Peningkatan saluran drainase perkotaan	5.00	lokasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3829.00	M	20.500.000.000	13.751.888.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Penhijauan Sempadan Sungai Semarang (Pelaksanaan Fisik)	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15.00	jenis	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	15.00	Unit	26.328.252.045	31.850.000.000	Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan
						Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	15.00	Unit			DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1.00	kegiatan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2727.00	M	20.312.659.092	35.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2727.00	M			UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.50	%				214.054.433.430	175.994.677.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87.48	%	panjang jalan dalam kondisi baik			214.054.433.430	175.994.677.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2.00	Dokumen	2.550.000.000	1.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli Mrican (Penyusunan AMDAL/UKL-UPL dan LARAP)	1.00	dokumen						DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	1.00	kegiatan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	3000.00	My	2.000.000.000	32.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan)	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Sronol Sekaran (Pengadaan Lahan)	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah dokumen leger jalan	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2.00	Dokumen	450.000.000	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		jumlah data survey dan kondisi jalan	2.00	dokumen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2.00	Dokumen	575.000.000	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan		Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1.00	kegiatan	Panjang Jalan yang Dibangun	7.00	KM	20.000.000.000	65.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pekerjaan Konstruksi)	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 2)	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan					Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.50	KM	1.500.000.000	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan		Peningkatan jalan wilayah kota dan pedestrian	10.00	ruas jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.40	KM	49.386.000.000	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100.00	jenis	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5.30	KM	50.948.978.468	26.394.677.000	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4.00	KM			DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah IV	250.00	ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4.00	KM	71.250.000.000	43.500.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4.00	KM			DINAS PEKERJAAN UMUM
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4.00	KM			UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4.00	KM			UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4.00	KM			UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan					Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	15.00	M	12.500.000.000	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Operasi Pemeliharaan Jembatan	1.00	unit	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5000.00	M	1.000.000.000	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.00	Dokumen	1.894.454.962	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Alat Pengujian yang terawat	1.00	jenis						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi	14.00	jenis						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah dokumen sertifikasi dan akreditasi serta dokumen pendukungnya	1.00	dokumen						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100.00	%				34.091.162.250	39.011.730.000	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100.00	%						
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	%	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.000.000	46.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	15.000.000	17.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan OPD	2.00	dokumen						DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	2.000.000	2.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	2.500.000	2.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.000.000	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	4.500.000	4.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	5.000.000	7.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	10.000.000	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%	Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD			18.287.313.298	25.754.730.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113.00	Orang/bulan	18.055.553.298	25.341.730.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	218.760.000	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	3.000.000	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00	%	dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000	16.000.000	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00	Dokumen	5.000.000	8.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00	Laporan	5.000.000	8.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	%	dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000	10.000.000	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.00	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1.00	Kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00	Skor 1-100	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%	kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD dalam kondisi baik			2.374.892.492	1.985.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50.00	Paket	150.000.000	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.00	Paket	995.461.545	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	5.00	Jenis						DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28.00	Paket	75.000.000	80.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah bahan dan cairan pembersih virus dan kuman	3.00	jenis						DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00	Paket	150.000.000	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10.00	Jenis						DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.00	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	125.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.00	Laporan	127.000.000	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.00	Laporan	372.430.947	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik baru yang tersedia	1.00	aplikasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	Dokumen	500.000.000	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik yang diupgrade dan terpelihara	5.00	aplikasi						DINAS PEKERJAAN UMUM
			Akselerasi pelaksanaan SPBE	1.00	kegiatan						DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			100.000.000	150.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.00	Unit	100.000.000	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			9.941.956.460	7.050.000.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	Laporan	10.000.000	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00	Laporan	4.431.956.460	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase jasa pelayanan umum kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00	Laporan	5.500.000.000	4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	%	Aset SKPD yang terpelihara			3.325.000.000	4.000.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.00	Unit	2.000.000.000	1.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5.00	jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300.00	Unit	50.000.000	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.00	Unit	150.000.000	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1.00	jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00	Unit	1.125.000.000	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>1.03.2.10.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENATAAN RUANG</b>								<b>209.865.760.048</b>	<b>247.904.133.000</b>	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								<b>185.674.959.038</b>	<b>238.754.068.000</b>	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>								<b>144.774.095.314</b>	<b>163.995.314.000</b>	
			Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00	%						
			Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00	persen						
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100.00	%				144.774.095.314	163.995.314.000	
			Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100.00	persen						
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Meningkatnya jumlah peserta Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	125.00	orang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5.00	Dokumen	4.100.000.000	3.560.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TABG	10.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait SIMBG	100.00	orang						DINAS PENATAAN RUANG
			Rasio SK IMB/Rekomendasi Teknis IMB	86.36	%						DINAS PENATAAN RUANG
			Rasio SK IMB Pertandaan/Rektek Pertandaan	41.18	%						DINAS PENATAAN RUANG
			Tersedianya Sistem Implementasi SIMBG	1.00	aplikasi						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Labelisasi SLF	20.00	bangunan						DINAS PENATAAN RUANG
			Rasio SK Reklame/Rektek Reklame	58.54	%						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah rekomendasi teknis IMB/PBG yang diberikan oleh Pemkot dalam tahun eksisting	2200.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TACB	5.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah bangunan yang mendapatkan SLF	23.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	28.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	118.00	Dokumen	99.561.058.979	118.894.434.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Terbangunnya Gedung Pemerintah di tahun berjalan	20.00	Gedung						DINAS PENATAAN RUANG
			Terbangunnya Fasilitas Publik ditahun berjalan	15.00	bangunan						DINAS PENATAAN RUANG
			Terbangunnya Sport Center di tahun berjalan	10.00	Lokasi						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah dokumen supervisi pengawasan pembangunan	45.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Persentase bangunan gedung yang terbangun Distaru terhadap seluruh aset bangunan gedung milik Pemkot	3.00	%						DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Penetapan Perda Retribusi Perijinan tertentu	1.00	Dokumen	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5.00	Dokumen	550.000.000	550.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Kota Semarang	1.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Penetapan Perwal tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Penetapan regulasi terkait Tim Ahli bangunan gedung	1.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota		Penetapan regulasi terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00	Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	135.00	Unit	746.000.000	700.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	135.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Kawasan yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	1.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Label yang terpasang pada bangunan cagar budaya	14.00	buah						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen pendukung Bantuan Teknis masyarakat pemilik bangunan Gedung Cagar Budaya	10.00	Dokumen	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	10.00	Pengelola	325.000.000	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10.00	Dokumen	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10.00	Pengelola	300.000.000	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.09	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan		Jumlah Penerbitan Peringatan Pelanggaran Bangunan	482.00	Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2310.00	Unit	496.955.000	500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah pelanggaran yang telah terselesaikan	409.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan BG oleh Penilik Bangunan	2310.00	bangunan						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi		Jumlah Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	53.00	bangunan	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	53.00	Unit	399.814.000	400.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui Bangunan Gedung	11.00	Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	36.00	Unit	24.802.431.972	23.790.880.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah rehab, renovasi dan ubahsui Bangunan Gedung Pemerintah	20.00	bangunan						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah rehab, renovasi dan ubahsui Fasilitas Publik	2.00	bangunan						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah rehab, renovasi dan ubahsui Sport Center	3.00	Lokasi						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung	25.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung Pemerintah	25.00	bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80.00	Unit	13.492.835.363	15.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Terpelihara dan terawatnya Sport Center	20.00	lokasi						DINAS PENATAAN RUANG
			terpelihara dan terawatnya bangunan gedung dan fasilitas Kelurahan dan kecamatan	20.00	bangunan						DINAS PENATAAN RUANG
			Terpelihara dan terawatnya Fasilitas Publik	15.00	bangunan						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase reklame yang berizin	100.00	%				4.900.000.000	6.214.756.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100.00	%				4.900.000.000	6.214.756.000	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Tersedianya regulasi terkait Titik Reklame yang ditetapkan	6.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	12.00	Dokumen	600.000.000	700.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Tersedianya regulasi terkait penilikan gedung yang ditetapkan	6.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Videotron terbangun	1.00	buah	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.00	Kawasan	3.300.000.000	3.090.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Titik Reklame di Tanah Pemkot Semarang	810.00	buah						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah reklame non permanen yang berizin	3087.00	buah						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah reklame permanen yang berizin	688.00	buah						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Titik Reklame Non Komersial	5.00	buah						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah pembongkaran reklame non permanen tidak berizin	2655.00	buah	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.00	Kawasan	850.000.000	1.224.756.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Persentase pembongkaran reklame tidak berizin	100.00	%						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Penerbitan SP1 Pengawasan Reklame	176.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2.00	Dokumen	150.000.000	1.200.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Penerbitan SP2 Pengawasan Reklame	144.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah penerbitan SP pembongkaran Reklame	482.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Permasalahan Reklame	802.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Menurunnya Persentase permasalahan reklame yang terselesaikan	39.90	%						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00	%				1.257.746.036	768.116.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2.00	kegiatan				1.257.746.036	768.116.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kota Semarang	2.00	pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150.00	Orang	276.049.765	215.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.06	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat ahli di wilayah Kota Semarang	440.00	orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440.00	Orang	208.675.981	295.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Jumlah penerbitan sertifikat IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan gedung) di Kota Semarang	370.00	dokumen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	370.00	Orang	547.007.198	258.116.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan Konstruksi	100.00	orang						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memahami Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100.00	orang						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Semarang untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2.00	Dokumen	226.013.092	0	DINAS PENATAAN RUANG
			Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	2.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan	2.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Semarang	2.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah pelaku jasa konstruksi	1700.00	orang						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00	%				10.945.355.980	43.887.352.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100.00	%				5.532.211.011	25.873.352.000	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen Regulasi (Perda/Perwal) Tata Ruang	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	1.235.792.837	4.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	770.914.595	4.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1.00	Dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		% Luas RTH Perkotaan	10.56	%	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	3.234.833.174	14.473.352.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Meningkatnya Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	400.00	orang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1.00	Dokumen	290.670.405	2.900.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100.00	%				386.053.986	2.250.000.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	152.00	Ha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	209.236.884	1.300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	6.56	%	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1.00	Dokumen	176.817.102	950.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100.00	%				2.681.921.143	6.515.200.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Forum Penataan Ruang	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2.00	Dokumen	821.243.044	2.450.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	9.19	%						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	5.00	Aplikasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5.00	Dokumen	1.860.678.099	4.065.200.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	64.81	%						DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100.00	%				2.345.169.840	9.248.800.000	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Jumlah rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.00	Dokumen	297.382.873	2.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah rekomendasi penertiban dan penegakan hukum bidang Penataan Ruang	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.00	Dokumen	285.605.592	1.200.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah rekomendasi tata ruang OUV (Outstanding Universal Value)	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2.00	Dokumen	1.762.181.375	5.548.800.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah rekomendasi Badan Pengelola Kawasan	1.00	dokumen						DINAS PENATAAN RUANG
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan kualitas SDM	100.00	%				23.797.761.708	23.888.530.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100.00	%						
			Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	%				180.178.660	60.420.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	3.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	97.458.360	18.494.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	12.492.700	3.510.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	11.167.300	3.503.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	7.608.000	3.503.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	11.167.300	3.503.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Laporan	16.704.000	9.247.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	4.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	Laporan	23.581.000	18.660.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%				15.274.195.503	16.571.627.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88.00	Orang/bulan	13.647.539.103	15.425.696.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Optimal	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.00	Dokumen	1.596.266.400	1.127.964.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.00	Laporan	10.230.000	5.989.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.00	Laporan	10.080.000	5.989.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00	persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.00	Dokumen	10.080.000	5.989.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100.00	%				620.711.950	290.000.000	
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24.00	Dokumen	125.045.050	120.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.00	Orang	495.666.900	170.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	%				5.644.031.675	5.037.295.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.00	Paket	180.267.581	29.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Paket	474.605.883	2.954.395.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80.00	Paket	161.162.700	71.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00	Paket	229.899.624	312.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengegandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Pengegandaan	100.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengegandaan yang Disediakan	100.00	Paket	507.900.535	283.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.00	Buah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30.00	Dokumen	23.839.338	7.900.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.00	Laporan	930.429.620	1.380.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penataan Ruang	50.00	indeks SPBE	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.00	Dokumen	3.135.926.394	0	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%				952.307.940	729.188.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya surat menyurat kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200.00	Laporan	9.500.000	11.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75.00	Laporan	315.000.000	76.688.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhi pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	Laporan	627.807.940	641.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%				1.126.335.980	1.200.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	54.00	buah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	450.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.00	buah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54.00	Unit	666.559.250	750.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	2.00	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00	Unit	423.458.550	0	DINAS PENATAAN RUANG
<b>1.04.1.03.2.11.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>242.274.030.773</b>	<b>316.160.483.900</b>	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								<b>120.883.527.501</b>	<b>128.300.563.900</b>	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	69.69	%				290.462.481	2.148.893.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100.00	%	Terwujudnya pembangunan dan perawatan sumber daya air bawah tanah yang baik			290.462.481	2.148.893.000	
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Pembangunan & Perawatan Sumur	4.00	Unit	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4.00	Titik	290.462.481	2.148.893.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90.86	%				976.028.762	3.973.207.400	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/ kota	100.00	%	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sarpras & sistem air limbah domestik yang menunjang lingkungan sehat, aman, dan bersih			976.028.762	3.973.207.400	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.00	Unit	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100.00	Rumah Tangga	676.447.485	3.536.574.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		Tersedianya sarana dan prasarana IPLT	100.00	persen	Kapasitas IPLT Terbangun	75.00	M <sup>2</sup> /Hari	299.581.277	436.632.900	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	48.00	%				112.749.649.507	116.577.500.000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100.00	%	Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman dengan kondisi baik			112.749.649.507	116.577.500.000	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran dilingkungan permukiman	16.00	Kecamatan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177.00	Sistem Jaringan	82.006.181.134	81.675.751.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12.00	Bulan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177.00	Sistem Jaringan	30.743.468.373	34.901.748.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100.00	%				6.867.386.751	5.600.963.500	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100.00	%	Terwujudnya bangunan dan sarpras Rusun, Rusunawa, Pondok Boro/ Sosial yang tertata & terpelihara dengan baik			6.867.386.751	5.600.963.500	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarpras Rusun Kota Semarang	9.00	Rumah Susun Sewa	Jumlah Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.00	Kawasan	35.400.000	298.798.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Terpeliharanya bangunan dan Sarpras Rusun	100.00	persen	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9.00	Kawasan	6.831.986.751	5.302.165.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>121.390.503.272</b>	<b>187.859.920.000</b>	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100.00	%				4.260.207.921	3.879.404.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100.00	%	Tertanganinya rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah dengan baik			400.000.000	522.898.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	16.00	Kecamatan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15.00	Unit Rumah	400.000.000	522.898.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbin dan dikelola dengan baik	100.00	%	Terwujudnya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni rusun dengan baik			3.337.950.075	3.286.786.000	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	4.00	Laporan	3.337.950.075	3.286.786.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100.00	%	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pendukung kegiatan perumahan umum/ rumah susun umum			522.257.846	69.720.000	
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1.00	Laporan	522.257.846	69.720.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terlaksananya rekomendasi penerbitan izin pengembangan perumahan bersubsidi bagi MBR	100.00	%						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Rumah Lavak Huni	99.15	%				9.624.631.895	25.424.302.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100.00	%	Meningkatnya kualitas kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha			9.624.631.895	25.424.302.000	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/ Pemugaran Permukiman Kumuh		Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	1.00	Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	10.00	Dokumen	610.000.000	1.815.016.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Rehabilitasi RTLH	16.00	Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730.00	Unit Rumah	9.014.631.895	23.609.286.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00	%				61.057.809.932	116.876.591.000	
			Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.31	%						
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100.00	%	Terselenggaranya penyediaan Prasarana Sarana & Utilitas Umum Perumahan yang menunjang fungsi hunian dengan baik			61.057.809.932	116.876.591.000	
			Persentase Luasan taman yang berfungsi optimal	100.00	%						
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Persentase Lampu PJU Terpasang	97.50	persen	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16.00	Lokasi	25.393.683.194	24.995.176.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 1	8.00	Kecamatan						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	8.00	Kecamatan						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	18.49	persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16.00	Laporan	34.026.013.762	89.889.313.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100.00	persen						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16.00	Kecamatan						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terkelolanya ruang terbuka hijau	16.00	Kecamatan						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	100.00	persen						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10.00	Laporan	1.638.112.976	1.992.102.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			<b>NON URUSAN</b>								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00	%				46.447.853.524	41.679.623.000	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00	%						
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	%	Terwujudnya perencanaan, penganggaran, yang akuntabel			66.188.260	64.137.500	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	7.870.650	17.682.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	11.378.440	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	13.133.440	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	17.260.425	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	8.294.925	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	4.125.190	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LAKIP	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	4.125.190	8.011.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100.00	%	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja keuangan yang tertib dan optimal			20.462.427.689	24.654.643.500	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164.00	Orang/bulan	20.009.707.989	22.990.272.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	418.440.000	1.630.103.900	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	1000.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.00	Dokumen	7.525.050	11.201.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	1.00	Buku	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00	Laporan	8.701.860	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan semesteran realisasi anggaran	18.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.00	Laporan	8.831.674	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.00	Dokumen	9.221.116	7.688.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100.00	%	Terwujudnya pelaporan capaian kinerja keuangan yang tertib dan optimal			574.874.001	264.899.000	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	400.00	Set	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.00	Paket	355.795.230	179.574.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.00	Dokumen	2.994.688	13.647.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Kegiatan sosialisasi	1.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00	Orang	201.329.992	17.851.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya bimbingan teknis	4.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.00	Orang	14.754.091	53.826.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100.00	%	Terwujudnya pelayanan administrasi umum perkantoran yang optimal			4.037.416.003	3.530.103.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	50.000.000	26.049.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	25.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	2.725.655.147	621.715.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jenis Peralatan Rumah Tangga	25.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.00	Paket	201.123.586	75.781.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis Alat Tulis Kantor	25.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	61.519.431	116.847.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Paket	79.768.057	59.305.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman untuk fasilitas tamu	100.00	persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	51.000.000	40.963.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	155.286.041	701.682.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Penataan dan penertiban arsip dinas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	164.00	Dokumen	13.063.741	7.688.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100.00	persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	Dokumen	700.000.000	1.880.070.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100.00	%	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan baik			5.500.835.974	1.496.455.000	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.00	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.00	Unit	1.629.068.751	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	1.00	unit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.00	Unit	2.506.310.280	1.496.455.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel	10.00	buah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.00	Unit	1.365.456.943	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan optimal			2.803.276.606	2.565.451.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00	Laporan	11.000.000	13.468.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	699.255.504	728.156.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	221.653.902	728.156.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	1.871.367.200	1.095.670.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan optimal			13.002.834.991	9.103.934.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100.00	persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270.00	Unit	1.644.161.282	1.996.812.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100.00	persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110.00	Unit	6.858.229.694	5.132.462.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100.00	persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	20.00	Unit	112.342.079	576.582.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100.00	persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300.00	Unit	121.078.800	146.515.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.00	persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	3.930.529.733	1.010.769.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.00	Unit	336.493.403	240.791.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)</b>								<b>35.833.852.469</b>	<b>32.116.211.352</b>	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								<b>35.833.852.469</b>	<b>32.116.211.352</b>	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00	%				14.984.746.537	8.600.999.352	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	12.00	%	Tercapainya partisipasi linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum			14.326.725.925	8.053.730.520	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100.00	persen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	249.00	Kasus	80.274.100	62.625.416	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		persentase gangguan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	100.00	persen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	193.00	Kasus	365.825.166	387.799.526	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	177.00	Dokumen	5.817.974.360	90.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	177.00	orang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177.00	Dokumen	7.396.668.340	7.298.767.913	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3.00	kali	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310.00	Orang	271.651.170	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2.00	kali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.00	Dokumen	308.934.930	60.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100.00	persen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1.00	Dokumen	77.264.032	54.537.665	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.00	Laporan	8.133.827	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	66.00	%	Perda dan Perkada yang ditegakkan			544.560.712	427.268.832	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12.00	kali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12.00	Laporan	47.854.755	27.268.832	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		persentase pengendalian trantibum	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100.00	Laporan	241.368.190	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100.00	persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	28.00	Laporan	255.337.767	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	10.00	Kasus	Jumlah kasus yang diselesaikan oleh PPNS			113.459.900	120.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	12.00	orang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	11.00	Laporan	113.459.900	120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
			Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2.00	kali						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SATpol pp	100.00	%				20.849.105.932	23.515.212.000	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SATpol pp	100.00	%						
			Persentase peningkatan kemampuan ASN SATpol PP	100.00	%						
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SATpol pp	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD			99.897.340	258.596.596	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	7.662.600	71.176.643	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Satpol PP	1.00	Dokumen						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	10.224.510	25.286.394	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	8.620.420	18.576.008	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	5.424.510	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	7.120.420	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00	persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.00	Laporan	60.844.880	103.557.551	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	%	Terselesaikannya administrasi Keuangan SKPD dengan baik dan tepat waktu			17.653.277.949	20.960.493.216	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130.00	Orang/bulan	17.406.051.789	20.658.062.996	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.00	Dokumen	234.330.000	270.507.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	2.198.720	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	9.548.720	8.461.310	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.148.720	8.461.310	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100.00	%	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD berjalan dengan baik dan lancar			206.533.755	57.424.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600.00	Orang	200.000.000	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bimtek	100.00	persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.00	Orang	6.533.755	17.424.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD yang dibutuhkan			785.841.615	596.849.065	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.00	Paket	19.428.480	32.587.124	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	28.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28.00	Paket	34.557.540	29.034.933	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.00	Paket	21.894.640	43.197.834	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	105881.00	Lembar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17.00	Paket	31.682.820	32.029.174	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		jumlah tamu yang berkunjung	600.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	74.230.440	60.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah		jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.00	Laporan	322.013.000	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.00	Dokumen	282.034.695	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	%	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan			236.800.964	40.000.000	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan	6.00	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6.00	Unit	236.800.964	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00	%	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor yang dibutuhkan			589.141.080	773.747.523	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	235.141.080	349.690.670	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24.00	Laporan	354.000.000	424.056.853	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	%	Aset SKPD terpelihara dengan baik dan bisa difungsikan kembali			1.277.613.229	828.101.600	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	45.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45.00	Unit	981.045.210	600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaannya	100.00	persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38.00	Unit	95.909.108	80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	151.251.131	80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60.00	Unit	13.089.600	18.101.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>								<b>35.778.351.681</b>	<b>28.334.987.000</b>	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								<b>35.778.351.681</b>	<b>28.334.987.000</b>	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00	Persentase				14.224.925.197	13.560.779.000	
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%						
			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00	Persentase						
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00	%						
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00	persentase						
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.00	%	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.046.176.414	11.173.138.993	
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00	%						
			Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00	%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemeriksaan gambar rencana alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	200.00	dokumen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	50.00	Dokumen	50.000.000	185.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Jumlah Dokumen RISPK (Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, Rencana Sistem Keselamatan Publik)	1.00	dokumen						DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Pemadaman Kebakaran	300.00	Kejadian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.00	Laporan	9.284.659.616	10.478.138.993	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.00	Kejadian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20.00	Dokumen	8.284.403	90.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di Kota Semarang	10.00	kejadian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.00	Dokumen	4.383.416	75.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3.00	Dokumen	2.038.938	30.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	15.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15.00	Unit	2.689.766.397	285.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang Efisien dan Akurat	12.00	kegiatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2.00	Desa/Keluraha n	1.243.644	20.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non KebakaranTerselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar	5.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5.00	Dokumen	5.800.000	10.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase layk operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100.00	%	Layak Operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung			718.000.000	1.082.640.007	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	350.00	gedung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12.00	Dokumen	14.464.800	55.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	260.00	gedung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaiakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.00	Dokumen	703.535.200	1.027.640.007	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100.00	%	Data Kejadian Kebakaran yang Akurat			23.884.403	80.000.000	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	300.00	Kejadian	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	300.00	Dokumen	23.884.403	80.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100.00	%	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Relawan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			489.868.917	810.000.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	180.00	orang/kelurahan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	40.00	Orang	64.548.950	160.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	360.00	orang/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36.00	Desa/Keluraha n	194.673.775	280.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi relawan pemadam kebakaran	6.00	jenis	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	12.00	Dokumen	230.646.192	370.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaerian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100.00	%	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			946.995.463	415.000.000	
			Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100.00	%						
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	500.00	kejadian	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500.00	Laporan	58.184.403	55.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Tersedianya standar sarana dan prasarana pencaerian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	3.00	dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3.00	Dokumen	15.245.060	30.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Tersedianya sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	10.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	146.00	Unit	833.666.000	275.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24.00	orang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	2.00	Laporan	39.900.000	55.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%				21.553.426.484	14.774.208.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%						
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%	Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran			22.685.540	9.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	4.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	3.446.040	1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.568.720	1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4.232.630	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.513.680	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.995.590	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	896.480	1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00	Laporan	5.032.400	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%	Laporan Administrasi dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran			18.224.372.021	11.921.872.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202.00	Orang/bulan	17.940.212.871	11.665.322.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	277.979.000	250.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penatausahaan keuangan terverifikasi	12.00	Bulan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00	Dokumen	746.540	1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	12.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00	Dokumen	632.550	1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	1.319.790	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan tanggapan pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	persen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12.00	Dokumen	1.393.830	550.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran	12.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	1.234.560	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	852.880	1.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persentase	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran			1.375.660	1.786.000	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.00	dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00	Dokumen	402.880	750.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah rekonsiliasi dan laporan Barang Milik Daerah	12.00	dokumen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00	Laporan	402.880	536.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12.00	dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.00	Laporan	569.900	500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Jumlah Dokumen Manajemen Aset	1.00	dokumen						DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persentase	Dokumen Perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran			1.400.850	1.500.000	
X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan dan Target Retribusi Daerah	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1.00	Dokumen	442.890	500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	350.00	surat	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12.00	Dokumen	555.080	500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	12.00	dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12.00	Dokumen	402.880	500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persentase	Administrasi Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran			519.460.171	400.750.000	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.00	persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	329.00	Paket	518.056.126	400.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00	Dokumen	1.404.045	750.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persentase	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Pemadam Kebakaran			334.762.050	262.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	100.00	persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	30.692.777	41.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	35.783.824	2.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan logistik kantor selama 1 tahun	100.00	persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	81.349.739	51.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	100.00	persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	47.534.030	42.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Tersedianya Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu selama 1 tahun	100.00	persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	42.00	Laporan	45.450.000	60.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan dalam daerah	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	93.951.680	65.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			483.352.506	38.200.000	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	persentase						
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0.00	Unit	27.285.820	20.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		tersedianya mebel	5.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.00	Unit	5.103.700	5.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan mesin dan lainnya	15.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.00	Unit	363.550.902	3.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.00	Jenis	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	3.230.200	3.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Pengadaan Aset Tak Berwujud	1.00	jenis	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1.00	Unit	844.260	4.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	11.00	jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10.00	Unit	83.337.624	3.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persentase	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Dinas Pemadam Kebakaran			491.269.099	510.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	334.426.099	330.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	156.843.000	180.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	%	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan, Peralatan dan mesin, serta Aset pada Dinas Pemadam Kebakaran			1.474.748.587	1.629.100.000	
			Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persentase						
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	100.00	persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	252.722.130	50.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00	persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46.00	Unit	921.449.388	1.060.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100.00	persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69.00	Unit	29.802.211	104.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100.00	persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7.00	Unit	160.617.000	290.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	115.00	Unit	110.157.858	125.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>								<b>14.919.845.058</b>	<b>15.718.437.000</b>	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								<b>14.919.845.058</b>	<b>15.718.437.000</b>	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana</b>	<b>13.00</b>	<b>%</b>				<b>5.987.397.139</b>	<b>5.489.696.000</b>	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500.00	orang	Tersedianya Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			703.948.400	589.696.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen KRB	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1.00	Dokumen	418.000.000	204.696.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Pusat Data Informasi Kebencanaan ( PUSDATIN )	12.00	Dokumen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500.00	Orang	285.948.400	385.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana ( RPB ) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3.00	Dokumen	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2.866.892.656	2.175.000.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Gladi lapang kebencanaan	300.00	orang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	900.00	Orang	1.073.694.556	675.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	400.00	orang						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	200.00	orang						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5.00	Dokumen	75.000.000	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Early Warning Sistem	2.00	titik	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10.00	Unit	993.000.000	350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ( KATANA )	2.00	Kelurahan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4.00	Kawasan	228.447.560	375.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana ( SMAB )	2.00	sekolah						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Pendampingan Bantuan Sosial	12.00	Dokumen	Pendampingan Bantuan Sosial	12.00	dokumen	421.750.540	550.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100.00	persen						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	100.00	orang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100.00	Orang	75.000.000	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12.00	Dokumen	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.875.000.000	2.350.000.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi ( PUSDALOPS )	12.00	Dokumen	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1255.00	Orang	1.575.000.000	1.850.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100.00	persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1255.00	Orang	300.000.000	500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Moveu kebencanaan	100.00	orang	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			541.556.083	375.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	100.00	orang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5.00	Dokumen	376.233.242	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	12.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12.00	Laporan	165.322.841	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100.00	%				8.932.447.919	10.228.741.000	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100.00	%						
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%	Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.520.000	6.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja dan Renstra	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	880.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.00	Dokumen	880.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	880.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	880.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen	Terselesaikannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.901.312.658	8.077.431.625	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40.00	Orang/bulan	6.677.792.658	7.824.431.625	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	207.240.000	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	880.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	15.400.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100.00	persen	Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			36.588.000	10.000.000	
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Tersedianya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00	Dokumen	27.588.000	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	1.00	kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10.00	Orang	9.000.000	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	persen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD			334.322.917	589.825.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	19.927.150	5.325.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	32.900.000	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.00	Paket	38.141.000	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	26.637.767	27.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1000.00	lembar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1000.00	Paket	24.000.000	37.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang berkunjung	1000.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000.00	Laporan	15.000.000	65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	Laporan	157.637.000	195.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dokumen	20.080.000	175.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			713.402.000	730.484.375	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000.00	Laporan	3.927.000	3.484.375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	237.575.000	282.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	471.900.000	445.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	persen	Terlaksanakannya Pemeliharaan Aset SKPD			943.302.344	815.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10.00	Unit	312.420.000	330.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.00	Unit	316.920.000	325.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	1.00	unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.00	Unit	2.908.800	4.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.00	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00	Unit	46.705.000	78.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1.00	gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	264.348.544	78.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>								<b>30.437.981.436</b>	<b>48.598.497.000</b>	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								<b>30.437.981.436</b>	<b>48.598.497.000</b>	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi</b>	<b>78.00</b>	<b>%</b>				<b>7.197.369.600</b>	<b>8.925.000.000</b>	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100.00	%	Meningkatnya sumbangan sosial masyarakat			117.666.700	325.000.000	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.00	Dokumen	117.666.700	325.000.000	DINAS SOSIAL
			Fasilitasi dan pengelolaan CSR	2.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	78.00	%	DINAS SOSIAL			7.079.702.900	8.600.000.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1.00	Kegiatan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260.00	Orang	5.121.772.620	5.156.000.000	DINAS SOSIAL
			Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100.00	Persentase						DINAS SOSIAL
			Terperuhnya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177.00	Orang						DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1.00	Kegiatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16.00	Orang	341.711.228	353.000.000	DINAS SOSIAL
			Terperuhnya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16.00	Orang						DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1.00	Kegiatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00	Keluarga	303.462.910	400.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	6.00	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5.00	Lembaga	452.534.800	1.100.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.00	Kegiatan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9.00	Sertifikat	860.221.342	1.591.000.000	DINAS SOSIAL
			Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
<b>1.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>				<b>54.023.060</b>	<b>40.000.000</b>	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100.00	%	DINAS SOSIAL			54.023.060	40.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarisasi untuk dipulangkan ke daerah asal	13.00	Orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13.00	Orang	54.023.060	40.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.81	%				6.629.844.930	18.735.158.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00	%	DINAS SOSIAL			2.546.166.460	3.715.483.000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	85.00	Orang hari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85.00	Orang	960.700.000	1.149.753.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150.00	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150.00	Orang	10.705.000	75.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu		Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	20.00	Buah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Orang	804.100	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Orang	77.540.000	85.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	265.00	Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250.00	Orang	752.408.140	450.350.000	DINAS SOSIAL
			Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100.00	Persentase						DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	7.00	Kegiatan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7.00	Orang	140.547.500	55.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50.00	Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00	Orang	13.295.000	15.900.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	130.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00	Orang	1.702.720	101.500.000	DINAS SOSIAL
			Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter	1.00	Orang						DINAS SOSIAL
			Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1.00	Paket						DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	100.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00	Orang	391.424.000	50.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00	Orang	44.000.000	1.548.880.000	DINAS SOSIAL
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	400.00	Orang						DINAS SOSIAL
			Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100.00	Persentase						DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00	Orang	76.040.000	92.400.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100.00	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.00	Orang	77.000.000	91.200.000	DINAS SOSIAL

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100.00	%	DINAS SOSIAL			4.083.678.470	15.019.675.000	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100.00	Persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00	Orang	494.340.800	206.050.000	DINAS SOSIAL
			Verifikasi dan Validasi data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Identifikasi data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau	100.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00	Orang	50.850.000	55.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanaan		Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanaan	5000.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5000.00	Orang	2.552.309.450	10.605.875.000	DINAS SOSIAL
			Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanaan bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Jumlah penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanaan	265.00	Orang						DINAS SOSIAL
			Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan bantuan permakanaan panti sosial	2.00	kegiatan						DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang		Jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	48.00	Orang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40.00	Orang	20.315.000	25.897.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1.00	Paket	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00	Orang	133.284.400	13.662.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2.00	Kegiatan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135.00	Orang	155.220.100	100.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1.00	Kegiatan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	Orang	129.851.000	65.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Orang	52.899.920	60.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00	Orang	55.517.000	74.604.000	DINAS SOSIAL
			Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2.00	Orang						DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40.00	Orang	16.500.000	14.000.000	DINAS SOSIAL

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40.00	Orang	16.500.000	14.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan		Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12.00	Kegiatan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00	Orang	31.900.000	30.250.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Fasilitasi dan pemberdayaan Lansia	4.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	374.190.800	3.754.837.000	DINAS SOSIAL
			Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30.00	Orang						DINAS SOSIAL
			Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100.00	Persentase						DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69.85	%				4.743.785.480	6.794.290.000	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100.00	%	DINAS SOSIAL			220.809.710	108.786.000	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	10.00	Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00	Orang	151.912.400	35.786.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	10.00	Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00	Orang	35.209.210	35.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	2.00	Kegiatan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00	Orang	33.688.100	38.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Menurunnya angka DTKS	15.15	%	DINAS SOSIAL			4.522.975.770	6.685.504.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	1.00	Kegiatan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180000.00	Orang	499.115.790	1.275.000.000	DINAS SOSIAL
			Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	2.00	Kegiatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500.00	Keluarga	600.053.180	1.783.504.000	DINAS SOSIAL
			Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/kota	1.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga?		Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12.00	Kegiatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000.00	Keluarga	3.188.446.800	3.577.000.000	DINAS SOSIAL
			Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12.00	Kegiatan						DINAS SOSIAL
			Jumlah Bantuan Santunan Kematian	1413.00	Orang						DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube	12.00	Kegiatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00	Orang	235.360.000	50.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00	%				1.097.748.400	935.000.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100.00	%	DINAS SOSIAL			612.885.400	665.000.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan		Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373.00	Orang	224.700.000	330.000.000	DINAS SOSIAL

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang		Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373.00	Orang	70.860.000	150.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5.00	Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5.00	Unit	44.220.000	25.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	75.00	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.00	Orang	66.050.000	30.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	11.00	Kegiatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11.00	Orang	207.055.400	130.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100.00	%	DINAS SOSIAL			484.863.000	270.000.000	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	1.00	Kegiatan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Kampung	247.965.000	50.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51.00	Orang	236.898.000	220.000.000	DINAS SOSIAL
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial	100.00	%				10.715.209.966	13.169.049.000	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	%	DINAS SOSIAL			4.257.260	57.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	487.800	50.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	253.600	1.500.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	355.890	1.500.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	253.600	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	355.890	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Laporan	1.933.200	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	617.280	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan SKPD	100.00	%	DINAS SOSIAL			8.154.360.956	9.977.887.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49.00	Orang/bulan	7.825.768.436	9.028.156.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	324.643.200	945.731.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.00	Dokumen	253.600	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	263.980	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	3.167.760	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	263.980	1.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	%				628.572.522	1.345.434.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	2.000.000	5.900.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	6.600.000	500.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00	Paket	13.000.000	30.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	40.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	19.727.000	60.500.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Pengandaan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1.00	Paket	15.369.712	25.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.00	eksemplar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50.00	Dokumen	5.760.000	6.534.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1500.00	dos	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.00	Laporan	99.000.000	147.500.000	DINAS SOSIAL
			Jumlah penyediaan minuman dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	2000.00	dos						DINAS SOSIAL
			Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500.00	pack						DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.00	orang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.00	Laporan	252.075.000	350.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	215.040.810	220.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persentase				226.286.513	330.520.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	4.00	Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.00	Unit	197.073.443	200.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis	30.00	Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	29.213.070	130.520.000	DINAS SOSIAL
			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Among Jiwo	4.00	Jenis						DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persentase	DINAS SOSIAL			129.782.784	200.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3.00	Rekening	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	129.782.784	200.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persentase	DINAS SOSIAL			1.421.131.531	1.204.208.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.313.180	39.950.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	46.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46.00	Unit	610.978.814	804.250.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	10.00	Buah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10.00	Unit	3.636.000	5.808.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi	1.00	Jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.00	Unit	491.336.000	300.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	1.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	173.450.000	30.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	101.417.537	24.200.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	-	Dokumen Kelembagaan SKPD	100.00	%	DINAS SOSIAL			150.818.400	54.000.000	
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.00	Dokumen	150.818.400	54.000.000	DINAS SOSIAL
<b>2.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>								<b>17.194.306.543</b>	<b>18.572.239.000</b>	
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>								<b>17.194.306.543</b>	<b>18.572.239.000</b>	
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>								<b>162.400.000</b>	<b>60.000.000</b>	
			persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65.00	%						
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1.00	dokumen	Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja			162.400.000	60.000.000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1.00	Dokumen	125.000.000	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	30.00	orang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5.00	Perusahaan	37.400.000	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								<b>2.555.760.000</b>	<b>1.629.562.000</b>	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50.00	%	Meningkatnya peserta pelatihan berbasis kompetensi			2.171.400.000	1.110.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	100.00	orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	660.00	Orang	2.141.400.000	1.060.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah peserta uji kompetensi	60.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT)	250.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
			Pendataan tenaga kerja kompetensi	1.00	Kegiatan						DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Pemeliharaan peralatan pelatihan	5.00	jenis	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4.00	Unit	30.000.000	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	20.00	%	Meningkatnya LPK Swasta yang terakreditasi			152.600.000	350.000.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah pembinaan LPK swasta	8.00	LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20.00	Lembaga	152.600.000	350.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelatihan pemagangan	20.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
			Peningkatan kapasitas instruktur LPK swasta	25.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan modul pelatihan	1.00	jenis						DINAS TENAGA KERJA
			Peningkatan Kapasitas Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	20.00	perusahaan						DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100.00	%	Meningkatnya LPK Swasta yang berizin			15.800.000	15.000.000	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta	10.00	LPK	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15.00	Perizinan	15.800.000	15.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10.00	perusahaan	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			48.960.000	75.000.000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Sosialisasi dan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan	10.00	perusahaan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10.00	Perusahaan	48.960.000	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	151227000.00	Rp	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja			167.000.000	79.562.000	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	3.00	perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10.00	Dokumen	167.000.000	79.562.000	DINAS TENAGA KERJA
			pengukuran produktivitas tenaga kerja	5000.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66.00	%				824.980.000	1.040.000.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000.00	orang	Meningkatnya penempatan pencari kerja melalui pelayanan antar kerja			396.400.000	395.000.000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja		penempatan calon transmigran	3.00	Kartu Keluarga	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000.00	Orang	181.020.000	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			sosialisasi identifikasi peminat transmigrasi	2.00	kali						DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	2000.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah Lowongan	2500.00	lowongan						DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan antar kerja	12.00	kegiatan						DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	1.00	kali	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50.00	Orang	35.680.000	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakeriaan		pelayanan disabilitas	30.00	orang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULDD	15.00	Orang	15.300.000	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja		Pelatihan Wirausaha Baru	30.00	orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60.00	Orang	164.400.000	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Persentase Izin LPTKS yang diterbitkan	100.00	%	Meningkatnya LPTKS yang berizin			6.220.000	20.000.000	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Monitoring LPTKS, LPPRT, P3MI, Perusahaan	100.00	kali	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5.00	Lembaga	6.220.000	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	1000.00	orang	Meningkatnya informasi lowongan kerja dan penempatan pencari kerja melalui bursa kerja			247.860.000	375.000.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		pelayanan IPK online	12.00	bulan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500.00	Orang	120.960.000	275.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			penempatan tenaga kerja melalui IPK	220.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah lowongan pekerjaan melalui IPK	425.00	lowongan						DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah pencari kerja terdaftar (AK 1)	2400.00	orang						DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja		Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja	750.00	orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	750.00	Orang	126.900.000	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			pelaksanaan bursa kerja	1.00	kali						DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah Lowongan melalui bursa kerja	3000.00	lowongan						DINAS TENAGA KERJA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Jumlah pelindungan PMI (pra dan purna penempatan)	40.00	orang	Meningkatnya keterampilan kompetensi CPMI dan purna PMI			143.900.000	200.000.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Pelatihan CPMI/PMI	20.00	orang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30.00	Orang	111.000.000	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		pelatihan wirasaha purna PMI	10.00	orang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15.00	Orang	32.900.000	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Penerbitan perpanjangan IMTA	100.00	%	Meningkatnya TKA yang berizin			30.600.000	50.000.000	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	200.00	TKA		200.00		30.600.000	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.30	%				744.300.000	805.000.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	758.00	Perusahaan	Meningkatnya Sarana Hubungan Industrial			392.500.000	380.000.000	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	50.00	orang / Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45.00	Perusahaan	48.000.000	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	50.00	orang / Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3.00	Perusahaan	48.000.000	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Koordinasi dewan pengupahan	12.00	Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4.00	Laporan	296.500.000	280.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Bimtek peraturaran perundang-undangan dan jamsos	20.00	orang / perusahaan						DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan indtrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	56.00	%	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial			351.800.000	425.000.000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Bimtek Pencegahan Perseisihan Hubungan Industrial	30.00	orang / perusahaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160.00	Perkara	98.676.000	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK	160.00	kasus	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100.00	Perkara	26.324.000	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	12.00	PUK	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10.00	Asosiasi dan Serikat Pekerja	43.200.000	40.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	12.00	kegiatan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1.00	Lembaga	183.600.000	225.000.000	DINAS TENAGA KERJA
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan perangkat daerah	100.00	%				12.906.866.543	15.037.677.000	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00	%						
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	%	Meningkatnya perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD			9.902.000	3.500.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen Renja OPD	3.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	704.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersusunnya dokumen RKA OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	2.659.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	2.488.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersusunnya dokumen DPA OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.633.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersusunnya dokumen perubahan DPA OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.244.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00	Laporan	443.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	731.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	%	Meningkatnya kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD			10.575.834.543	12.648.606.792	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72.00	Orang/bulan	10.350.167.543	12.498.106.792	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya honorarium pengelola keuangan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	225.000.000	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersusunnya laporan keuangan OPD	4.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	667.000	500.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			537.306.000	446.570.208	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	20.000.000	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	80.000.000	15.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	30.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.00	Paket	30.000.000	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	40.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.00	Paket	35.000.000	24.570.208	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.00	Paket	27.000.000	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan	730.00	eksemplar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36.00	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	300.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200.00	Laporan	15.000.000	7.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya biaya perjalanan dinas	100.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	Laporan	148.456.000	125.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Tatakelola arsip OPD	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.00	Dokumen	5.000.000	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya sarpras TIK	5.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.00	Dokumen	171.850.000	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			175.500.000	50.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Tersedianya meubeler	1.00	Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48.00	Unit	175.500.000	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya jasa urusan penunjang kedinassan	100.00	%	Meningkatnya pelayanan jasa urusan penunjang kedinassan			823.054.400	1.234.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	350.000.000	350.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya honorarium non ASN	23.00	orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	473.054.400	884.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100.00	%	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			785.269.600	655.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.350.000	45.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25.00	Unit	318.150.000	310.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	15.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103.00	Unit	126.699.600	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	300.070.000	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>2.08.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								<b>19.131.456.859</b>	<b>18.432.015.000</b>	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								<b>17.959.747.594</b>	<b>17.151.015.000</b>	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00	%				1.195.240.137	1.392.000.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93.00	Program/Kegiatan	Meningkatnya jumlah program PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang			201.000.000	260.000.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	98.700.000	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	17.500.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	68.400.000	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	16.400.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100.00	%	Organisasi yang mendapat pendampingan partisipasi perempuan			94.200.000	160.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	9.200.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00	Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00	Organisasi	85.000.000	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30.00	Lembaga	Meningkatnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			900.040.137	972.000.000	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25.00	Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25.00	Lembaga	460.140.838	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50.00	Orang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50.00	Orang	376.829.099	340.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.00	Dokumen	63.070.200	132.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14.00	Poin				2.372.584.298	1.562.414.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6.00	Dokumen	Rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan			412.997.229	20.000.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	208.292.719	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	204.704.510	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100.00	%	Lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan			1.382.384.190	1.502.414.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100.00	Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100.00	Orang	1.382.384.190	1.502.414.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandarisasi	100.00	%	Lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan			577.202.879	40.000.000	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.00	Laporan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.00	Laporan	101.493.199	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1630.00	Orang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1630.00	Orang	170.183.350	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3.00	Orang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3.00	Orang	25.199.500	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	280.326.830	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00	%	Kegiatan peningkatan kualitas keluarga			1.952.860.000	2.180.000.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100.00	%	Kegiatan peningkatan kualitas keluarga			30.000.000	30.000.000	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.00	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.00	Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.00	Dokumen	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.00	Dokumen	10.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	10.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100.00	%	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			1.827.060.000	2.000.000.000	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1.00	Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1.00	Lembaga	1.102.060.000	1.050.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.00	Orang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.00	Orang	525.000.000	700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	200.000.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100.00	%	Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan berbasis gender			95.800.000	150.000.000	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.00	Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.00	Layanan	95.800.000	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00	%				303.613.140	270.000.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2.00	Kegiatan	Terfasilitasinya kegiatan KIE Gender dan Anak			303.613.140	270.000.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.00	Dokumen	90.868.300	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	212.744.840	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100.00	%				575.654.060	550.000.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	8.00	Jejaring	Meningkatnya jumlah jejaring kemitraan lembaga pemenuhan hak anak			343.134.240	250.000.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7.00	Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7.00	Organisasi	196.779.290	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	146.354.950	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7.00	Lembaga	Terfasilitasinya lembaga layanan anak untuk memiliki standar pelayanan minimal			232.519.820	300.000.000	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400.00	Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400.00	Orang	87.779.740	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	67.225.230	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	34.936.970	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6.00	Dokumen	42.577.880	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.01	%				553.346.208	320.000.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	100.00	%	Kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak			55.254.760	40.000.000	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.00	Perangkat Daerah	55.254.760	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100.00	%	Lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus			208.635.778	150.000.000	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	72.00	Orang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	72.00	Orang	117.608.210	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	68.600.938	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	22.426.630	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100.00	%	Terfasilitasinya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus			289.455.670	130.000.000	
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Laporan	156.873.030	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	132.582.640	80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>NON URUSAN</b>											

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100.00	%				11.006.449.751	10.876.601.000	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100.00	%						
			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	25.00	Dokumen	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja			6.149.378	7.800.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00	Dokumen	1.007.200	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.090.080	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.287.520	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.00	Dokumen	695.200	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	695.200	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.00	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.00	Laporan	700.080	1.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.00	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.00	Laporan	674.098	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00	%	Terpenuhinya kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			7.887.297.459	8.986.895.588	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41.00	orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41.00	Orang/bulan	7.642.078.859	8.738.945.588	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	242.189.080	246.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00	Laporan	793.920	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00	Dokumen	560.000	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.00	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.00	Laporan	1.177.840	700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	497.760	250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100.00	%	Terpenuhinya peningkatan pelayanan sumber daya aparatur			326.691.640	60.000.000	
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00	Dokumen	151.691.640	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400.00	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400.00	Orang	175.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	%	Terpenuhinya pelaksanaan administrasi umum			1.183.812.686	718.105.412	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	4.996.050	3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	14.781.300	8.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00	Paket	30.000.000	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	61.767.328	70.105.412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00	Paket	30.327.458	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	39.500.000	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.00	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.00	Laporan	661.065.540	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dokumen	341.375.010	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			721.895.510	300.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.00	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.00	Unit	180.989.490	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	424.512.260	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	116.393.760	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Penyediaan kebutuhan jasa kantor			314.478.000	365.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.00	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.00	Laporan	109.272.000	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	205.206.000	240.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase pemeliharaan aset dinas	100.00	%	Terpenuhinya pemeliharaan aset dinas			566.125.078	438.800.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.313.180	238.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27.00	Unit	361.294.699	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00	Unit	43.059.666	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	94.252.665	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00	Unit	27.204.868	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>								<b>13.119.150.139</b>	<b>15.271.507.000</b>	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>								<b>13.119.150.139</b>	<b>15.271.507.000</b>	
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>		<b>Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>				<b>286.932.432</b>	<b>993.128.000</b>	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penunjang cadangan pangan	1.00	Unit	Terpenuhinya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan di Kota Semarang			286.932.432	993.128.000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		jumlah rapat koordinasi kawasan daerah rentan pangan	2.00	rakor	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1.00	Unit	214.591.908	993.128.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Rapat Koordinasi untuk Penyediaan infrastruktur logistik	6.00	Rapat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	6.00	Laporan	17.244.164	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Studi kelayakan / DED	2.00	dokumen	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2.00	Dokumen	55.096.360	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		<b>Ketersediaan Energi / Kapita</b>	<b>3057.00</b>	<b>Kkal / Kapita / Tahun</b>				<b>2.704.743.880</b>	<b>2.216.649.000</b>	
			Presentase Cakupan Distribusi	100.00	%						
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00	%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100.00	%	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Sesuai Kebutuhan di Kota Semarang			679.041.520	433.400.000	
			Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100.00	%						
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	1.00	Dokumen	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24.00	Laporan	57.888.255	80.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun	1.00	Dokumen						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun	1.00	Dokumen						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Rakor HBKN	1.00	Kali						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Rakor Satgas Pangan	6.00	Kali						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pelatihan Teknis pengembangan empon - empon	10.00	Pelatihan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	15.00	Laporan	94.462.968	48.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	5.00	Pelatihan						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	6.00	Kegiatan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	13.00	Laporan	9.591.808	15.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16.00	Lokasi	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	72.00	Dokumen	218.062.995	165.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	6.00	Lokasi						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	10.00	Lokasi						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Petugas Enumerator	16.00	Orang						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16.00	Laporan						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Laporan perkembangan Harga Pangan	24.00	Laporan						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM) yang Disusun	5.00	Kegiatan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	21.00	Unit	255.889.372	95.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	5.00	Pelatihan						DINAS KETAHANAN PANGAN
			jumlah lumbung pangan	16.00	kecamatan						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indonesia	21.00	Lokasi	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	25.00	Unit	43.146.122	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	23.00	Lokasi						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	Penguatan Cadangan Pangan	100.00	%	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan di Kota Semarang			1.063.602.360	1.070.749.000	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	4.00	Kegiatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4.00	Laporan	11.584.180	20.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Beras Cadangan Pangan dan Beras ATM	11000000.00	kilogram	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11.00	Ton	929.500.000	862.349.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10.00	Lokasi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15.00	Ton	122.518.180	188.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			jumlah beras cadangan pangan yang terpelihara	15.00	ton						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Angka Kecukupan Energi	88.00	%	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			962.100.000	712.500.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	2.00	Kegiatan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	33.00	Dokumen	146.400.000	75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini	2.00	Event						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	1.00	buku						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Kampung Tematik Produktif	8.00	Kegiatan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53.00	Laporan	543.100.000	525.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Promosi Pangan Lokal	21.00	Kegiatan						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Pekarangan Pangan Lestari	16.00	Lokasi						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	1263.00	Anak	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1.00	Laporan	272.600.000	112.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Rapat Teknis Pengembangan Pangan Lokal	1.00	Kegiatan						DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah Temu Usaha Pangan Lokal	1.00	Kegiatan					DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4.00	%			109.195.275	293.750.000		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2.00	Buku	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan			90.490.866	266.500.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1.00	Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0.00	Dokumen	90.490.866	266.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1.00	Dokumen					DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1.00	Dokumen					DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2.00	Kelurahan	Tertanganinya Kerawanan Pangan di Kota Semarang			18.704.409	27.250.000	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		jumlah pelatihan di titik kawasan daerah rentan pangan	10.00	kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12.00	Laporan	18.704.409	27.250.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			jumlah rakor kawasan daerah rentan pangan	2.00	rakor						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81.50	%			675.248.970	935.806.000		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100.00	%	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan di Kota Semarang			675.248.970	935.806.000	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	12.00	Kegiatan	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4.00	Dokumen	101.950.000	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pembinaan Pelaku Usaha PSAT PDUK	3.00	Kegiatan						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Monitoring dan Evaluasi OKKPD	2.00	Kegiatan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.00	Sertifikat	63.300.000	85.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Audit dan Inspeksi Perijinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	30.00	Kegiatan						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Sertifikat PSAT bagi pelaku usaha PSAT PDUK	100.00	Sertifikat						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Pendataan Pelaku Usaha PSAT	1.00	dokumen	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	23.710.000	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rakor Tim Jaejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang	3.00	Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.00	Dokumen	85.250.000	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengawasan Keamanan Pangan Pre Market dan Post Market	24.00	Dokumen						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Sosialisasi Keamanan Pangan	4.00	Kegiatan						DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1.00	Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	401.038.970	640.806.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1.00	Paket						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Survei Keamanan Pangan	72.00	Survei						DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Media Informasi Keamanan Pangan	5.00	Dokumen						DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%			9.343.029.582	10.832.174.000		
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	%						
			Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang			12.042.170	17.943.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	2.234.770	7.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah dokumen RTP	1.00	dokumen						DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	1.470.410	2.015.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.470.410	2.015.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.470.410	1.936.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.470.410	1.815.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	3.925.760	2.662.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah dokumen LPPD	1.00	dokumen						DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	Dokumen	Terpenuhinya Administrasi Keuangan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang			6.997.096.569	9.511.531.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44.00	Orang/bulan	6.768.820.139	9.236.778.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.00	Dokumen	223.500.000	267.856.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	924.510	2.299.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.00	Laporan	2.773.530	2.299.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0.00	Dokumen	1.078.390	2.299.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100.00	%	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang			1.127.511.699	398.900.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	6.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30.00	Paket	6.868.565	3.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	238.331.655	8.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	22.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.00	Paket	57.338.240	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	45.227.891	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Paket	44.764.981	8.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	3.00	Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00	Dokumen	5.700.000	5.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	350.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	95.422.370	33.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah dan Dalam Daerah	100.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	303.814.000	80.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dokumen	330.043.997	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100.00	%	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang			708.677.154	384.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	120.171.154	148.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	13.00	Orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	588.506.000	236.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00	%	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang			497.701.990	519.800.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan SKPD	22.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24.00	Unit	303.945.320	427.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	4.00	Jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.00	Unit	59.558.690	25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100.00	persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	97.879.800	27.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>1.03.2.10.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENATAAN RUANG</b>								<b>209.865.760.048</b>	<b>247.904.133.000</b>	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>								<b>24.190.801.010</b>	<b>9.150.065.000</b>	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00	%				781.158.501	1.326.746.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00	%				781.158.501	1.326.746.000	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	55.00	dokumen aduan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.00	Dokumen	322.802.107	476.746.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aduan sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti melalui mediasi	35.00	dokumen aduan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.00	Berita Acara	458.356.394	850.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		terseleenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00	%				6.637.818.927	806.060.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00	%				6.637.818.927	806.060.000	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	6.637.818.927	806.060.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		terseleenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00	%				778.617.566	5.500.000.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00	%				778.617.566	5.500.000.000	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah		jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terinventarisasi	3.00	lokasi	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.00	Dokumen	587.935.298	3.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah		Jumlah Surat Walikota objek redistribusi tanah yang terinventarisir	3.00	dokumen	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.00	Dokumen	190.682.268	2.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00	%				15.497.917.035	268.972.000	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100.00	%				205.479.035	168.972.000	
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5.00	kasus	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2.00	Laporan	205.479.035	168.972.000	DINAS PENATAAN RUANG
			Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah yang terkoordinir	2.00	lokasi						DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		terinventarisasinya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100.00	%				15.292.438.000	100.000.000	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	35000.00	bidang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	1.00	Laporan	15.292.438.000	100.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		terkelolanya izin membuka tanah	100.00	%				313.621.984	698.287.000	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah		tertibnya izin membuka tanah	100.00	%				313.621.984	698.287.000	
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5.00	dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5.00	Dokumen	198.575.714	250.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Jumlah pemanfaatan tanah negara yang terkendali	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2.00	Dokumen	115.046.270	448.287.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00	%				181.666.997	550.000.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100.00	%				181.666.997	550.000.000	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	181.666.997	550.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.11.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>								<b>131.731.704.358</b>	<b>143.603.690.000</b>	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>								<b>131.731.704.358</b>	<b>143.603.690.000</b>	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00	%				615.559.024	419.170.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100.00	%				366.159.024	419.170.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPPLH	1.00	dokumen	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1.00	Dokumen	155.282.024	200.446.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualiatas Lingkungan Hidup	1.00	Dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah Perwal D3TLH	1.00	Dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen KLHS	1.00	dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen DIKPLHD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	210.877.000	218.724.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen Biomassa	1.00	Dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.00	Dokumen	249.400.000	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00	%				6.224.340.968	8.138.526.000	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59.00	%						
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87.00	%						
			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20.00	Ha						
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00	%						
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100.00	%	Terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup			5.478.028.620	7.037.406.000	
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150.00	perusahaan						
			Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65.00	%						
			Emisi CO2	7625348.23	Kt CO2e						
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bersih Sehat (LBS)	16.00	kecamatan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	15.00	Dokumen	1.723.493.493	4.098.809.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Toilet Bersih	16.00	kecamatan						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan Adipura	100.00	buah						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	350.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	350.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah IPAL usaha skala kecil yang terbangun	1.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah inventarisasi kegiatan /usaha penghasil limbah cair	1.00	dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen IKLH	1.00	dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Bersih Sehat (LBS)	50.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Toilet Bersih	50.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta sosialisasi koordinasi penilaian kota sehat /adipura	350.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah penyelenggaraan event pendukung car free day di Jl. Pemuda	1.00	kegiatan						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah titik pantau kualitas udara ambient di lokasi car free day	8.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60.00	titik						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bintek pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100.00	industri						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen penyusunan neraca air	1.00	dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	40.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sosialisasi Pengelolaan Limbah Cair	1.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15.00	Dokumen	2.700.483.441	1.937.862.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK)	1.00	dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah kampung iklim yang terbangun	5.00	lokasi					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen kajian sponge city	1.00	dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah peserta sosialisasi mitigasi adaptasi perubahan iklim	50.00	orang					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan proklamasi	1000.00	batang					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu air	1000.00	meter persegi					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen DED Rainwater harvesting (RWH)	1.00	dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengadaan Rain Water Harvesting	12.00	unit					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah peserta sosialisasi Rain Water Harvesting	75.00	orang					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen DED sumur resapan	1.00	dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pembangunan sumur resapan	18.00	unit					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pelubangan biopori dan pengadaan penutup biopori	2600.00	lubang					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah alat bor biopori yang terbeli	100.00	buah					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Alat Bor Mesin yang terbeli	5.00	Unit					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	27.00	jenis	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	12.00	Dokumen	1.054.051.686	1.000.735.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM laboratorium	14.00	orang					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah titik pemantauan udara ambien (roadside monitoring)	3.00	titik					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah monitoring kualitas air sungai	120.00	titik					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1500.00	kendaraan					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2.00	jenis	Tersedianya informasi publik bidang LH			278.092.497	506.624.000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah kegiatan iklan layanan masyarakat bidang lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik	6.00	kegiatan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4.00	Laporan	278.092.497	506.624.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah pembuatan kalender sebagai sarana informasi dan publikasi DLH	500.00	buah					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah edisi buletin green yang tersusun	6.00	edisi					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah pengelolaan data informasi berbasis web	2.00	jenis					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Luasan Lahan yang terkonservasi	60.00	Ha	Terlaksananya konservasi lahan			468.219.851	594.496.000	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah sarana prasarana yang tersedia	1.00	unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasidan Pelaksanaan Rehabilitasi	4.00	Dokumen	468.219.851	594.496.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemeliharaan daerah rehabilitasi	5.00	lokasi					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air	1000.00	batang					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	12.00	kegiatan					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Cakupan pengelolaan taman keanekaragamahayati (kehati) di Kota Semarang	100.00	%				866.083.646	1.090.195.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3.00	jenis	Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan sarana prasarana keanekaragaman hayati			866.083.646	1.090.195.000	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	3.00	Dokumen	390.880.077	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen penyusunan DED pembangunan instalasi air	1.00	dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pendampingan BRIN	1.00	Dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Jumlah tanaman keanekaragaman hayati yang tersedia	1000.00	batang	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.90	Ha	287.476.843	292.550.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah frekuensi pemeliharaan taman kehati	5.00	lokasi						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah pembangunan instalasi air	1.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	4.00	Unit	187.726.726	297.645.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah pembangunan sarana prasarana taman kehati	1.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati (Kehati)	1.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo	1.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56.00	%				363.971.800	335.297.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50.00	perusahaan	Terlaksananya penerbitan ijin penyimpanan sementara limbah B3			274.750.784	305.297.000	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	300.00	orang	Jumlah Fasilitasi Perseujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.00	Dokumen	225.726.384	269.835.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pembinaan Penyusunan Rincian Teknis B3	55.00	Dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota Semarang	1.00	Dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	55.00	perusahaan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Perseujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50.00	Laporan	49.024.400	35.462.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1.00	jenis	Tersedianya sarana prasarana pengumpulan limbah B3			89.221.016	30.000.000	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah sarana prasarana yang dikelola	1.00	unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1.00	Dokumen	89.221.016	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.40	%				691.927.835	775.400.000	
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00	%						
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2.00	kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan dan jumlah ijin yang diterbitkan			691.927.835	775.400.000	
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100.00	%						
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	80.00	buah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Perseujuan Teknis, Perseujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	60.00	Dokumen	398.060.000	440.100.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis	100.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan konsultan penyusun dokumen lingkungan	40.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta yang mengikuti rapat perwal perseujuan lingkungan	40.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kajian evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kota Semarang	1.00	dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kajian percepatan penerbitan perseujuan lingkungan	1.00	Dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi	180.00	industri	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Perseujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.00	Laporan	293.867.835	335.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL tahu dan S. Bajak	32.00	titik						DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50.00	%				3.274.815.000	3.610.800.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2.00	kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			3.274.815.000	3.610.800.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah peserta sosialisasi dan bintek pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100.00	orang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	160.00	Lembaga	2.830.752.000	2.818.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta peringatan HPSN	500.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta sosialisasi green transportation	100.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	200.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta sosialisasi pendampingan TTG	200.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemberdayaan bank sampah wilayah	120.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Kendaraan Operasional BSI	1.00	Unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Alat peraga pilah sampah dari rumah yang terbeli	450.00	buah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3.00	Dokumen	444.063.000	792.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah penyelenggaraan Perti Saka Kalpataru	4.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Pembinaan Pengelolaan Pilah Sampah	6.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Partisipasi dalam Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.00	sekolah						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyelenggaraan Lomba Bank Sampah	1.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Penyelenggaraan Lomba Video HLH	1.00	kali						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Penerimaan Anggota Saka Kalpataru	40.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11.50	%				291.129.200	295.179.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2.00	jenis	Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan			291.129.200	295.179.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	50.00	sekolah	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60.00	Entitas	291.129.200	295.179.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	150.00	orang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah tempat pilah sampah yang tersedia	55.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah bibit tanaman yang terbeli	100.00	batang						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah pencacah sampah organik yang terbeli	2.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Studi orientasi pelaksanaan Adiwiyata	1.00	kegiatan						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00	%				125.108.000	213.495.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60.00	kasus	Terlaksananya penanganan kasus lingkungan			125.108.000	213.495.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	60.00	kasus	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1.00	Dokumen	95.908.000	163.970.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah titik lokasi uji kualitas lingkungan pulbaket (air limbah, air sungai, air sumur, udara)	20.00	sampel						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250.00	orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1.00	Dokumen	29.200.000	49.525.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.00	%				79.836.910.007	94.043.294.000	
			Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27.00	%						
			Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72.00	%						
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100.00	%	Terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan			79.836.910.007	94.043.294.000	
			Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100.00	%						
			Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100.00	%						
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Sosialisasi pengisian data Jakstrada	200.00	orang	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2.00	Dokumen	98.800.000	117.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen laporan Jakstrada	2.00	dokumen						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Gerobak pilah yang tersedia	2.00	unit	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4.00	Laporan	762.360.546	1.400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah motor sampah roda 3 yang tersedia	6.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah alat pencacah plastik yang tersedia	4.00	Unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah mesin pencacah organik yang tersedia	2.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah mesin press yang tersedia	2.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah timbangan yang tersedia	2.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Peningkatan kebersihan di wilayah Kota Semarang	16.00	kecamatan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	363.00	Ton	55.088.356.212	58.098.769.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Tingkat pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	16.00	kecamatan						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah peserta sosialisasi Perda dan Perwal Penanganan Pengelolaan Sampah	1900.00	orang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	27.00	Kelompok	202.466.400	102.525.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah tong sampah yang tersedia	150.00	unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	20.00	Dokumen	8.985.248.874	3.165.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah container sampah tertutup yang tersedia	100.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kendaraan angkut sampah yang terbeli	4.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah alat berat tersedia	1.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah gerobak sampah yang tersedia	10.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	5.00	unit						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Persentase terlaksananya penarikan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	50.00	Dokumen	1.537.350.000	1.020.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah kajian lingkungan pengelolaan sampah	2.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	40.00	Unit	13.162.327.975	30.140.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah TPS yang dipelihara	30.00	lokasi						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemeliharaan TPA	1.00	kegiatan						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah sarpras pengelolaan persampahan di TPA, TPST dan TPA yang tersedia	7.00	jenis						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah TPS yang dibangun	10.00	lokasi						DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Peningkatan bangunan TPA Jatibarang	1.00	unit					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah TPST yang terbangun	4.00	unit					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%			39.441.858.878	34.682.334.000		
			Persentase tersedianya sarana dan masarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.00	dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.321.694	32.600.000		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) DLH	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	2.754.178	14.000.000	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan DLH	1.00	Dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen RTP DLH	1.00	Dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD DLH	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	2.376.206	900.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD DLH	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	2.593.666	900.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD DLH	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.376.206	900.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD DLH	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.593.666	900.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi pelaporan kinerja DLH	4.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00	Laporan	4.627.772	15.000.000	
			Jumlah dokumen SPIP DLH	1.00	Dokumen					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100.00	%	Terselenggaranya administrasi Keuangan SKPD		16.912.180.020	21.779.694.000		
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN DLH	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115.00	Orang/bulan	15.122.896.494	19.800.170.141	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas DLH	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	441.500.224	510.000.000	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00	Dokumen	1.341.390.301	1.463.519.859	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun DLH	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	2.727.514	1.610.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semesteran DLH	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	1.982.132	1.842.000	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran DLH	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.683.355	2.552.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	%	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi umum		1.300.506.303	1.227.000.000		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (DLH)	35.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	45.650.000	50.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (DLH)	6.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	109.526.000	96.000.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (DLH)	9.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	90.471.000	128.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (DLH)	2.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00	Paket	42.457.000	45.000.000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan (DLH)	9.00	buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00	Dokumen	2.284.000	3.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung (DLH)	4400.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	134.865.000	80.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (DLH)	1000.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	403.035.880	625.000.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (DLH)	3.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	472.217.423	200.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
						URAIAN	TARGET	SATUAN				
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			916.240.265	930.000.000		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DLH)	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	713.200.000	735.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor (DLH)	44.00	orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	203.040.265	195.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	%	Terlaksananya pemeliharaan aset SKPD			20.295.610.596	10.713.040.000		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DLH)	3.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.00	Unit	160.471.000	194.169.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (DLH)	200.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200.00	Unit	19.577.046.596	9.837.115.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan mebel (DLH)	19.00	buah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19.00	Unit	1.293.000	1.756.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (DLH)	214.00	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214.00	Unit	250.000.000	280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (DLH)	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	306.800.000	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									<b>23.443.105.241</b>	<b>24.828.877.000</b>	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									<b>23.443.105.241</b>	<b>24.828.877.000</b>	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>									<b>1.824.495.957</b>	<b>1.647.980.000</b>	
			Persentase Perekaman KTP-el	99.40	%							
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71.00	%							
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428000.00	Dokumen				1.505.754.857	1.310.980.000		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	6.00	penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6.00	Dokumen	9.707.280	26.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	107500.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	107500.00	Dokumen	11.074.560	26.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.00	Laporan	790.498.560	1.036.755.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	320500.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	320500.00	Dokumen	694.474.457	221.625.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100.00	%				261.307.800	212.000.000		
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1.00	Dokumen	11.839.160	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan		Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	10.00	Jenis dokumen/ formulir/ buku	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10.00	Dokumen	249.468.640	197.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100.00	%				50.181.780	99.000.000		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pendaftaran penduduk	12.00	Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12.00	Dokumen	17.846.520	24.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	4.00	fasilitasi pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4.00	Laporan	11.001.520	26.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Cakupan sosialisasi pendaftaran penduduk	4.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4.00	Laporan	12.957.220	28.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk		Persentase Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	200.00	Dokumen	8.376.520	21.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100.00	%				7.251.520	26.000.000		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	12.00	persen	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	12.00	Laporan	7.251.520	26.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase kepemilikan akta kelahiran</b>	<b>97,20</b>	<b>%</b>				<b>560.206.429</b>	<b>610.800.000</b>	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45425.00	Dokumen				421.065.804	497.500.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45425.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45425.00	Dokumen	46.176.620	54.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	3.00	persen	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3.00	Layanan	277.405.680	311.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1.00	Dokumen	6.261.984	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	2.00	Jenis dokumen/ formulir/ buku	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2.00	Paket	91.221.520	110.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	%				132.639.105	87.000.000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12.00	Pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12.00	Laporan	9.746.520	24.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	4.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4.00	Laporan	103.664.545	21.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Cakupan sosialisasi terkait pencatatan sipil	4.00	persen	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4.00	Laporan	10.851.520	21.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil		Persentase kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan PerguruanTinggi Terkait Pencatatan Sipil	100.00	Dokumen	8.376.520	21.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	%				6.501.520	26.300.000	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12.00	Laporan	6.501.520	26.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>				<b>346.827.620</b>	<b>346.700.000</b>	
			<b>Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>						
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.00	%				51.300.310	52.500.000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12.00	Dokumen	6.876.520	26.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		Persentase Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.00	Laporan	44.423.790	26.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100.00	%				6.971.520	21.000.000	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2.00	Dokumen	6.971.520	21.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	%				255.756.990	186.200.000	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.00	Laporan	8.017.280	29.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	4.00	Fasilitasi / inovasi pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.00	Laporan	98.140.150	49.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	10.00	persen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10.00	Dokumen	11.376.520	52.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	6.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.00	Laporan	131.251.520	33.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10.00	persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10.00	Dokumen	6.971.520	21.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	%				32.798.800	87.000.000	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.00	Laporan	12.707.280	36.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Cakupan SDM yang mendapatkan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	4.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4.00	Laporan	20.091.520	51.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00	%				121.157.880	37.000.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100.00	%				121.157.880	37.000.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2.00	Jenis buku	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2.00	Dokumen	121.157.880	37.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%				20.590.417.355	22.186.397.000	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%						
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	%				12.971.340	13.650.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	3.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	819.520	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	1.308.640	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.608.550	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.720.160	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.315.430	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	1.287.520	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	1.911.520	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Administrasi Keuangan SKPD	100.00	%				12.268.557.641	17.727.692.000	
			Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	89.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89.00	Orang/bulan	12.038.492.241	17.459.092.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	1.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	226.202.840	260.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan keuangan akhir tahun	1.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	695.200	4.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	12.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	1.879.840	2.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.287.520	2.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100.00	%				24.418.640	166.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Cakupan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00	Orang	24.418.640	166.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	%				3.258.744.691	1.229.400.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik yang tersedia	1.00	persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	69.046.350	189.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	3.00	persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	159.558.307	48.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan rumah tangga perkantoran	3.00	persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00	Paket	121.234.420	206.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Logistik kantor	5.00	persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	473.262.145	210.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetak dan penggandaan	3.00	persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket	182.882.150	210.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Fasilitas kunjungan tamu	100.00	persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	14.850.000	27.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat koordinasi, konsultasi dan koordinasi	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	558.129.200	127.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Pengelolaan arsip dinamis	2.00	persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.00	Dokumen	61.960.000	52.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.00	Dokumen	1.617.822.119	160.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%				774.709.484	402.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Mebel perkantoran	50.00	persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.00	Unit	102.789.500	122.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin	36.00	persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36.00	Unit	671.919.984	280.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%				3.024.910.859	1.725.855.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	983.898.800	716.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa pelayanan umum kantor	12.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	2.041.012.059	1.009.855.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	%				1.226.104.700	921.800.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.00	persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35.00	Unit	389.990.660	526.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	100.00	persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125.00	Unit	18.907.200	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan mesin	100.00	persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450.00	Unit	383.702.000	114.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	18.00	persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18.00	Unit	352.566.000	147.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	2.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	80.938.840	118.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>2.08.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								<b>19.131.456.859</b>	<b>18.432.015.000</b>	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								<b>1.171.709.265</b>	<b>1.281.000.000</b>	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>252.226.040</b>	<b>330.000.000</b>	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100.00	Kelurahan	Kelurahan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	252.226.040		252.226.040	330.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Desa	1.00	Dokumen	46.935.990	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.00	Dokumen	205.290.050	230.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>								<b>919.483.225</b>	<b>951.000.000</b>	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum A	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177.00	Kelurahan	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan			919.483.225	951.000.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.00	Dokumen	160.145.200	270.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4.00	Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4.00	Lembaga	96.895.300	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.00	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.00	Laporan	102.720.620	161.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.00	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.00	Laporan	559.722.105	395.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								<b>19.905.166.724</b>	<b>14.091.614.000</b>	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								<b>19.905.166.724</b>	<b>14.091.614.000</b>	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>								<b>684.178.460</b>	<b>213.534.000</b>	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	%	Terfasilitasinya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			337.550.670	67.530.000	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1.00	Dokumen	39.270.200	6.410.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal		Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	2.00	Dokumen	12.735.100	12.930.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	36.310.100	20.800.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	12.00	Laporan	198.810.880	14.400.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangsa Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	2.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12.00	Laporan	50.424.390	12.990.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	%	Terfasilitasinya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			346.627.790	146.004.000	
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan		Workshop penetapan parameter kependudukan	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1.00	Laporan	6.758.760	5.940.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan		Dokumen dampak kependudukan	1.00	dokumen	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1.00	Dokumen	45.468.980	21.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	3.00	Cetak	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	16.00	Dokumen	171.606.300	22.524.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Transport Kegiatan dalam kota	16.00	Kecamatan						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Pelatihan Updeting Pelaporan Dallap dan Pelkon	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12.00	Laporan	18.900.000	13.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pelatihan Updeting data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021	2.00	Kegiatan						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	420.00	Buku	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12.00	Dokumen	86.289.500	73.620.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Honor Non ASN	12.00	Bulan						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2.00	Laporan	17.604.250	9.920.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00	%				7.470.351.779	2.943.572.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan peserta KB Aktif	77.14	%	Terfasilitasinya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			404.836.560	381.410.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		laporan dan Dokumentasi	9.00	Kegiatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.00	Organisasi	157.816.750	190.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		Laporan dan Dokumentasi	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.00	Dokumen	13.850.800	20.190.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Laporan dan Dokumentasi	8.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4.00	Dokumen	233.169.010	171.220.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan peserta KB Aktif	77.14	%	Terfasilitasinya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB			1.264.825.000	771.759.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Laporan dan Dokumentasi	16.00	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3.00	Laporan	90.175.000	76.759.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Laporan dan Dokumentasi	16.00	Kecamatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1680.00	Orang	1.174.650.000	695.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan PUS Unmeet need	8.56	%	Terfasilitasinya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2.922.426.344	1.607.208.000	
			Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.10	%						
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100.00	persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	830.00	Orang	138.350.000	283.348.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16.00	Kecamatan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4.00	Laporan	34.700.000	78.900.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.00	persen	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16.00	Unit	2.013.379.494	230.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.00	Laporan	54.800.000	184.401.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	48.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	36.00	Orang	103.000.000	356.840.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KBer	48.00	Kegiatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30.00	Orang	56.451.690	222.700.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6.00	Laporan	386.445.160	173.319.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria		Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	6.00	Kegiatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	75.00	Orang	135.300.000	77.700.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan Peserta KB Aktif	77.14	%	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			2.878.263.875	183.195.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB		Laporan dan Dokumentasi	16.00	Kecamatan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	34.00	Kampung	2.878.263.875	183.195.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12	%				886.041.710	438.809.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12	%	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			592.451.360	317.814.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		keaktifan anggota kelompok binaan	162.00	Kelompok	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32.00	Unit	65.297.040	62.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		keaktifan anggota kelompok binaan	162.00	Kelompok	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.00	Laporan	40.050.000	84.135.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kelompok	162.00	Kelompok	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.00	Orang	311.099.970	98.181.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		keaktifan anggota kelompok binaan	162.00	Kelompok	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.00	Laporan	176.004.350	72.898.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12	%	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			293.590.350	120.995.000	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		keaktifan anggota kelompok binaan	162.00	Kelompok	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.00	Laporan	293.590.350	120.995.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pealporan kinerja SKPD	100.00	%				10.864.594.775	10.495.699.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	%	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja			19.935.720	22.254.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	3.476.400	4.651.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	1.775.200	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	2.229.060	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2.00	Dokumen	1.775.200	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.229.060	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	Laporan	8.450.800	3.875.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Administrasi keuangan SKPD	100.00	%	Terpenuhinya kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			6.743.228.184	8.113.270.440	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14.00	Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45.00	Orang/bulan	6.420.740.724	7.859.296.440	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00	Dokumen	2.323.400	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	1.411.200	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	100.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.00	Laporan	316.680.000	243.678.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	2.072.860	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	%	Terpenuhinya pelaksanaan administrasi umum			1.125.847.828	755.624.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	17.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	21.580.477	21.507.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	56.404.444	62.313.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga dan Jasa Kebersihan Kantor	20.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	90.841.369	31.261.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat Tulis Kantor	17.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	227.456.276	51.261.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	12.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.00	Paket	63.425.262	26.884.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Makanan dan Minuman untuk Tamu	500.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	78.750.000	30.110.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dokumen Perencanaan dan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi serta Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah yang Dilakukan	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	387.390.000	332.288.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	10.00	Unit	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.00	Dokumen	200.000.000	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Pengadaan dan perlengkapan kantor			629.406.303	77.637.000	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan Gedung Kantor	8.00	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	629.406.303	77.637.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Penyediaan kebutuhan jasa kantor			658.359.300	562.421.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	145.551.000	145.551.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Administrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96.00	Orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	140.00	Laporan	512.808.300	416.870.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	%	Terpenuhinya pemeliharaan aset SKPD			1.687.817.440	964.492.560	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas atau Operasional	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	44.950.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan SKPD	85.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	92.00	Unit	611.544.700	654.039.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82.00	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	202.00	Unit	110.744.400	64.522.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor	1822.00	meter persegi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00	Unit	929.210.160	200.981.560	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>								<b>310.781.289.003</b>	<b>321.296.753.000</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								<b>310.781.289.003</b>	<b>321.296.753.000</b>	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64.22	%				241.081.881.233	241.784.882.000	
			Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88.00	persen						
			Jml trayek BRT	13.00	trayek						
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33.00	persen						
			Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7.00	rasio						
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pelaksanaan MRLL	100.00	%	Terwujudnya manajemen rekayasa lalu lintas			1.688.376.270	601.657.180	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Studi V/C Ratio Kota Semarang	1.00	paket	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12.00	Dokumen	1.688.376.270	601.657.180	DINAS PERHUBUNGAN
			Jml dokumen rekayasa lalu lintas	11.00	paket						DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan	Tersedianya perlengkapan jalan	100.00	%	Terwujudnya penyediaan perlengkapan jalan			8.838.477.743	673.311.766	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jml prasarana jalan	5.00	Jenis	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26.00	Unit	3.744.235.888	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
			Depo dan shelter trem	5.00	unit						DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jml perlengkapan jalan	3.00	jenis	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	575.00	Unit	1.751.962.883	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jml pemeliharaan prasarana jalan	1.00	Jenis	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	118.00	Unit	2.507.861.890	117.361.766	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	250.00	unit	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250.00	Unit	834.417.082	155.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Jml terminal	3.00	unit	Terwujudnya pelayanan Terminal			1.862.136.784	400.000.000	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Perawatan terminal	3.00	unit	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0.00	Unit	1.422.046.691	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		Jml kegiatan sosialisasi di terminal	4.00	kegiatan	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23.00	Orang	440.090.093	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penyelenggaraan parkir	12.00	bulan	Terwujudnya penyelenggaraan perijinan parkir			2.587.490.630	450.000.000	
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah kegiatan pemungutan parkir	12.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800.00	Dokumen	732.674.230	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Kegiatan perijinan parkir	12.00	kegiatan						DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengawasan	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12.00	Laporan	1.854.816.400	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12.00	bulan	Terwujudnya pengujian kendaraan bermotor			3.007.514.321	598.000.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jml alat uji	2.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1.00	Unit	1.622.901.474	321.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Blue Card	40000.00	set	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90000.00	Dokumen	60.321.063	180.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35.00	Unit	1.324.291.784	97.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100.00	%	Terwujudnyapengendalian lalu lintas			4.833.660.338	1.698.087.054	
			Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12.00	bulan						
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jml Shelter BRT	1.00	unit	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	64.00	Unit	46.176.000	1.355.037.054	DINAS PERHUBUNGAN
			Bike rack	4.00	unit						DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan sosialisasi	3.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.00	Dokumen	712.800.000	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengendalian	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12.00	Laporan	3.963.769.684	118.050.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan forum LLAJ	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	110.914.654	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pengawasan Andalalin	1.00	tahun	Terwujudnya penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas			79.500.000	225.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Sosialisasi perijinan andalalin	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.00	Laporan	66.000.000	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Pengawasan andalalin	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12.00	Laporan	13.500.000	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pemantauan angkutan	12.00	bulan	Terwujudnya pelaksanaan pemantauan angkutan			516.106.340	100.000.000	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12.00	Laporan	516.106.340	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	pendukung pelayanan BRT	100.00	persen	Terwujudnya Pelayanan BRT dan angkutan barang			216.853.581.537	236.268.826.000	
			Pelayanan angkutan	100.00	%						
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kertas Thermal E-Tiket	150000.00	roll	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	259.00	Unit	216.715.988.822	235.718.826.000	DINAS PERHUBUNGAN
			Operasional BRT	12.00	Bulan						DINAS PERHUBUNGAN
			Jml Pemeliharaan Mesin E-Tiket	317.00	unit						DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Mudik Gratis	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	137.592.715	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
			DED Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1.00	paket						DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Jml kegiatan	3.00	kegiatan	Terwujudnya pelayanan angkutan umum			235.064.810	170.000.000	
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan sosialisasi	3.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.00	Dokumen	235.064.810	170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Jumlah kegiatan	2.00	kegiatan	Terwujudnya pelayanan jaringan trayek			214.716.640	200.000.000	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	68.346.600	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen angkutan / trayek	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	Dokumen	146.370.040	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Jml kegiatan	2.00	kegiatan	Terwujudnya pelayanan operasi taksi			146.089.780	200.000.000	
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jml Studi	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	62.805.370	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan	1.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	83.284.410	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Jml kegiatan	2.00	kegiatan	Terwujudnya penyelenggaraan ijin taksi			219.166.040	200.000.000	
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jml keg	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	113.144.840	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan koordinasi	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	106.021.200	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	persen				69.699.407.770	79.511.871.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00	persen						
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100.00	%						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00	persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	persen	Terwujudnya kegiatan perencanaan dan evaluasi			45.537.020	175.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jml dokumen perencanaan	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	13.987.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jml dokumen RKA	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	5.424.510	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jml dokumen RKA Perubahan	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	5.620.420	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jml dokumen DPA	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	5.424.510	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jml dokumen DPA Perubahan	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	5.620.420	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jml dokumen lap realisasi kinerja	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	4.705.760	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jml dokumen evaluasi	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	4.753.600	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen	Terwujudnya adm keu dishub			14.760.838.259	19.476.587.156	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan gaji pegawai	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111.00	Orang/bulan	14.137.949.459	18.901.587.156	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	551.760.000	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jml dokumen lap keu akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	23.709.600	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jml dokumen lap keu semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.00	Laporan	23.709.600	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jml dokumen lap prognosis	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	23.709.600	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100.00	persen	Terwujudnya Administrasi kepegawaian Dishub			634.434.105	1.050.000.000	
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Peningkatan Mutu SDM	4.00	kegiatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.00	Unit	263.400.000	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian	300.00	set	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300.00	Paket	226.670.170	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jml Dokumen	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.00	Dokumen	1.800.000	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jml Dokumen	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00	Dokumen	15.971.400	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Ujian Kompetensi	100.00	persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12.00	Orang	25.600.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jml kegiatan	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Orang	24.642.200	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Diklat	100.00	persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.00	Orang	76.350.335	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	%	Terwujudnya penyediaan kebutuhan rumah tangga dishub			3.234.661.512	2.850.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jml Alat Listrik	25.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.00	Paket	133.736.963	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2.00	set	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	21.242.326	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jml Alat/bahan Kebersihan	15.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.00	Paket	119.120.273	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	20.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.00	Paket	169.832.198	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jml barang cetakan	25.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25.00	Paket	299.272.040	350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan dan Minuman	17500.00	dos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	197.700.000	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jml kegiatan perjalanan dinas	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	1.022.015.100	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jml keg penatausahaan arsip	1.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00	Dokumen	24.987.365	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jml jenis peralatan elektronika	11.00	paket	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.00	Dokumen	1.246.755.247	750.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Terwujudnya pemenuhan BMD dishub			3.378.969.080	646.934.822	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		KBM Oprasional/Patroli	10.00	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10.00	Unit	2.682.380.319	226.934.822	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jml mebel	7.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.00	Unit	606.168.571	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jml sarpras kantor	7.00	jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.00	Unit	90.420.190	220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang kantor			3.962.208.960	5.505.590.172	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jml Materai	6000.00	lembar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00	Laporan	39.000.000	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Listrik Dan Telepon	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	1.277.669.760	1.600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	2.645.539.200	3.845.590.172	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	%	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			5.948.758.834	4.150.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jml kendaraan dinas	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1.00	Unit	40.313.180	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jml kendaraan operasional	75.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75.00	Unit	3.744.384.582	2.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jml KBM Golf dll	4.00	unit	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4.00	Unit	126.836.360	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jml bangunan	3.00	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	1.343.099.799	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jml peralatan	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	197.802.000	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jml jenis pemeliharaan	9.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.00	Unit	496.322.913	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pelayanan BLUD	100.00	%	Terwujudnya pendukung pelayanan BRT			37.734.000.000	45.657.758.850	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelaksanaan pelayanan pendukung BRT	12.00	bulan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00	Unit Kerja	37.734.000.000	45.657.758.850	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>								<b>53.348.990.388</b>	<b>93.495.065.000</b>	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								<b>52.032.065.060</b>	<b>87.721.655.000</b>	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00	%				<b>5.604.524.500</b>	<b>8.660.117.000</b>	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100.00	%	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah			5.604.524.500	8.660.117.000	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	20.00	rekomendasi	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1.00	Dokumen	150.000.000	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Dokumen kajian menara telekomunikasi	1.00	Dokumen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5.00	kegiatan						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Cakupan layanan telekomunikasi	100.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		jumlah penanganan pengaduan	4200.00	pengaduan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8.00	Dokumen	1.513.218.100	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			kajian kebijakan pengaduan	1.00	dokumen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			monitoring dan evaluasi	8.00	kegiatan						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		konten informasi publik yang disebarkan	875.00	konten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8.00	Dokumen	2.541.910.000	4.405.117.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	8.00	Dokumen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik		jenis informasi publik yang disediakan	4.00	jenis informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4.00	Dokumen	677.796.400	1.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			permintaan informasi publik	2184.00	informasi						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1.00	Dokumen	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	810.00	Orang	471.600.000	490.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Kegiatan workshop dan Pelatihan TIK	10.00	Kegiatan						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah kegiatan Fasilitas FK Metra	12.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12.00	Dokumen	250.000.000	715.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah Dokumen kajian Co working space	1.00	dokumen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00	%				31.458.137.917	59.209.995.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100.00	%	Meningkatnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah			26.265.780.558	34.845.042.000	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas kominfo	50.00	OPD	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577.00	Domain	1.924.419.645	1.264.863.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Tingkat Kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	95.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Tingkat Kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	97.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50.00	OPD	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.00	Dokumen	688.097.282	6.580.179.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	85.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan intra	40.00	OPD	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10.00	Unit	23.653.263.631	27.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	150.00	unit						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	190.00	titik/lokasi						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00	%	Meningkatnya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah			5.192.357.359	24.364.953.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah OPD yang terintegrasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50.00	OPD	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40.00	Unit	2.416.381.410	7.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50.00	OPD						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		jumlah aplikasi yang terintegrasi layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20.00	aplikasi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4.00	Dokumen	875.649.010	9.764.953.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3.00	aplikasi						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	70.00	persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8.00	Dokumen	1.708.705.099	5.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Terpenuhnya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai smart city	100.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah kegiatan Monitoring Implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4.00	Dokumen	191.621.840	2.600.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	4.00	kegiatan						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100.00	%				14.969.402.643	19.851.543.000	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100.00	%						
			Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			22.029.693	27.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	2.994.159	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo	1.00	Dokumen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	4.296.677	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.750.617	4.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	4.296.677	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.177.809	4.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	4.513.754	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	%	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			11.864.026.211	17.105.209.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105.00	Orang/bulan	11.448.029.388	16.642.209.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	406.340.000	450.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	3.401.573	4.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	14.00	laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.00	Laporan	3.401.573	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	laporan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	2.853.677	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100.00	%	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah			252.852.240	50.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160.00	Orang	252.852.240	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	%	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			876.721.963	894.334.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100.00	persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	19.707.000	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	42.135.106	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00	Paket	37.675.842	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100.00	persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	53.659.769	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	17.440.487	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10.00	buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.00	Dokumen	21.556.300	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100.00	persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	150.00	Laporan	152.673.367	174.334.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	Laporan	152.750.000	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	379.124.092	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			228.536.726	300.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		jumlah mebel yang disediakan	100.00	persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.00	Unit	140.259.301	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100.00	persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00	Unit	88.277.425	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			469.009.140	635.000.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.00	Laporan	19.999.000	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.00	Laporan	449.010.140	600.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	%	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			1.256.226.670	840.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.313.180	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.00	Unit	462.700.491	420.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	2.00	unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2.00	Unit	36.504.000	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan mebel	2.00	jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.00	Unit	7.272.000	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.00	Unit	130.474.000	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah pemeliharaan taman	1.00	paket	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1.00	Unit	5.063.000	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	8.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.00	Unit	573.899.999	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>								<b>24.702.036.168</b>	<b>19.860.101.000</b>	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>								<b>24.702.036.168</b>	<b>19.860.101.000</b>	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00	Persen				214.521.290	50.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15.00	koperasi				91.666.650	25.000.000	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitas Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	80.00	koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.00	Unit Usaha	91.666.650	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2.00	koperasi				122.854.640	25.000.000	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	140.00	koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.00	Unit Usaha	122.854.640	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00	Persen				554.915.380	150.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490.00	koperasi				554.915.380	150.000.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Koperasi yang diawasi	250.00	koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370.00	Unit Usaha	241.871.090	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	240.00	koperasi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	240.00	Unit Usaha	313.044.290	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi sehat	31.00	Persen				366.205.089	50.000.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60.00	Persen				366.205.089	50.000.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300.00	koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300.00	Unit Usaha	366.205.089	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00	Persen				335.896.070	145.000.000	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00	Persen						
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70.00	Persen				335.896.070	145.000.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	300.00	Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360.00	Orang	335.896.070	145.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26.00	Persen				2.762.566.380	290.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50.00	Persen				2.762.566.380	290.000.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	80.00	koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500.00	Orang	2.762.566.380	290.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	60.00	koperasi						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200.00	Koperasi						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	480.00	koperasi						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah laporan updating data Koperasi	12.00	Laporan						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00	persen				3.792.070.650	3.496.052.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1050.00	orang				3.792.070.650	3.496.052.000	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha	100.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	Unit Usaha	522.672.200	390.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	100.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100.00	Unit Usaha	227.454.550	830.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	500.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660.00	Unit Usaha	2.080.993.000	1.995.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	200.00	orang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500.00	Orang	515.022.000	281.052.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150.00	bu	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150.00	Orang	445.928.900	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00	%				3.963.898.830	2.248.021.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150.00	orang				3.963.898.830	2.248.021.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500.00	orang	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500.00	Unit Usaha	3.963.898.830	2.248.021.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Pengembangan Co Working Space	1.00	paket						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	persen				12.711.962.479	13.431.028.000	
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100.00	Persen						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10.00	dokumen				12.195.580	6.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	564.080	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah Dokumen RTP SKPD	1.00	Dokumen						DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.117.280	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.729.190	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.610.080	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.961.990	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	1.212.960	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen				9.215.117.840	12.195.028.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35.00	Orang/bulan	8.960.986.160	11.943.028.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	252.840.000	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	596.480	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	695.200	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen				1.241.092.527	680.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14.00	Paket	231.107.778	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.00	Paket	27.209.000	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	94.077.190	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	46.964.379	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.00	Dokumen	1.920.000	5.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	100.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	54.000.000	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	537.215.860	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00	Dokumen	248.598.320	200.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen				95.362.120	50.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.00	Unit	44.837.384	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	50.524.736	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen				116.640.000	125.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	116.640.000	125.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen				2.031.554.412	375.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	40.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	26.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25.00	Unit	316.345.380	260.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.00	Unit	50.476.070	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	1.628.414.782	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>								<b>27.449.125.396</b>	<b>16.261.847.000</b>	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								<b>27.449.125.396</b>	<b>16.261.847.000</b>	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>								<b>1.899.328.702</b>	<b>1.182.588.000</b>	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Kepada Investor	Peningkatan nilai investasi	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4.00	Buah	Jumlah Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah			1.100.000.048	932.965.380	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1.00	Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.00	Dokumen	599.999.972	462.795.420	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1.00	Dokumen						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3.00	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha/ Daerah	3691.00	Kegiatan Usaha	500.000.076	470.169.960	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1.00	Dokumen						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai investasi	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2.00	dokumen	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang			799.328.654	249.622.620	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen RUPMD Kota Semarang	1.00	dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	100.022.000	139.622.620	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1.00	Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	699.306.654	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492.00	Investor				2.547.128.842	694.251.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai investasi	Jumlah Promosi Investasi	8.00	Kegiatan	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal			2.547.128.842	694.251.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	298.558.968	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Seminar Bisnis Forum	1.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8.00	Dokumen	2.248.569.874	694.251.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.00	%				3.732.587.965	788.503.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan nilai investasi	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100.00	%	Terselenggaranya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			3.732.587.965	788.503.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Kesra dan Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan sesuai SP	100.00	persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400.00	Pelaku Usaha	1.340.912.963	788.503.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1500.00	Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750.00	Kegiatan Usaha	1.286.698.137	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	700.00	Orang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800.00	Orang	170.000.138	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000.00	Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000.00	Kegiatan Usaha	934.976.727	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.00	nilai				380.076.270	200.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai investasi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7.00	%	Tercapainya Kenaikan Nilai Realisasi PMDN			380.076.270	200.000.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.00	Dokumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	21.00	Kegiatan Usaha	380.076.270	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	23.00	Perusahaan						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96.00	%				960.524.998	694.251.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai investasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100.00	%	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan			960.524.998	694.251.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100.00	persen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1.00	Dokumen	960.524.998	694.251.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				17.929.478.619	12.702.254.000	
			Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	%						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai investasi	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11.00	Dokumen	Terselesaikannya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.618.180	5.500.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja(Renja SKPD	3.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	1.204.440	1.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	1.610.080	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.961.990	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.363.680	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.961.990	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	1.090.080	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	3.425.920	2.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan nilai investasi	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100.00	%	Terselesaikannya Administrasi Keuangan SKPD			8.977.389.514	10.692.720.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49.00	Orang/bulan	8.686.371.834	10.490.920.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	287.550.000	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	1.090.080	600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.00	Laporan	1.287.520	600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.090.080	600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan nilai investasi	Administrasi Kepegawaian Daerah	100.00	%	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			126.543.150	35.000.000	
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	110.00	stel	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200.00	Unit	126.543.150	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan nilai investasi	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	%	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.148.570.197	1.522.034.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	1.111.389.874	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	188.857.180	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	174.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00	Paket	129.374.420	120.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	41.617.200	140.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	740.175.060	590.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	2.937.156.463	362.034.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan nilai investasi	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00	%	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.584.046.688	85.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	731.968.000	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Pembayaran Honor TPPH	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	1.852.078.688	45.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan nilai investasi	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	%	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.079.310.890	362.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	19.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.00	Unit	36.318.180	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17.00	Unit	410.454.300	230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		pemeliharaan mebeleur	100.00	persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125.00	Unit	29.362.860	30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100.00	persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	554.00	Unit	603.175.550	47.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>								<b>53.729.871.113</b>	<b>59.335.277.000</b>	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>								<b>53.729.871.113</b>	<b>59.335.277.000</b>	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35.00	Organisasi Kpemudaan				2.074.999.392	2.921.798.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10.00	kegiatan	bertambahnya jumlah pemuda dalam kegiatan kepemudaan			1.299.999.792	1.451.798.000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Pelatihan Kewirausahaan	5.00	Kegiatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300.00	Orang	250.000.000	550.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	3.00	Kegiatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400.00	Orang	175.000.022	350.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	1.00	Kegiatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300.00	Orang	274.999.770	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		PASKIBRAKA	1.00	Kegiatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	0.00	Orang	600.000.000	501.798.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Anggota Aktif OKP	1400.00	Orang	bertambahnya jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaannya			774.999.600	1.470.000.000	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		kordinasi kemitraan Kepemudaan	10.00	Kegiatan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1000.00	Orang	224.649.980	870.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	5.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5.00	Dokumen	550.349.620	600.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>		jumlah Atlet prestasi	1197.00	jumlah				33.934.711.459	39.854.799.000	
			Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00	Lapangan						
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00	jumlah	peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dikelola			4.440.099.338	6.502.852.000	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2.00	Dokumen	126.401.200	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	12.00	Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6.00	Unit	4.313.698.138	6.502.852.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Penyelenggaraan / Event Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional	6.00	kegiatan	bertambahnya medali yang di peroleh atlet kota semarang			1.648.395.661	7.500.000.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Multi Event Tingkat daerah	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	950.000.001	2.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya atlet dalam mengembangkan prestasi	3.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2.00	Dokumen	48.600.000	5.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	10.00	Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250.00	Orang	649.795.660	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	Jumlah Atlet yang dibina	1297.00	Orang	bertambahnya jumlah atlet prestasi kota semarang			27.350.000.000	22.951.947.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Pemusatan Latihan Atlet	64.00	Orang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7.00	Pelatda	1.450.000.000	6.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		KONI	1.00	kegiatan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50.00	Orang	25.900.000.000	16.451.947.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	Jumlah Organisasi Keolahragaan	63.00	Organisasi	penguatan organisasi Keolahragaan			49.600.000	250.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Pengembangan organisasi olahraga	2.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.00	Organisasi	49.600.000	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi	5.00	jumlah	bertambahnya medali kejuaraan olahraga rekreasi			446.616.460	2.650.000.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	3.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3.00	Dokumen	83.126.730	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	2.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.00	Laporan	97.686.650	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.00	jenis	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10.00	Unit	239.280.000	2.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Pengembangan Olahraga Tradisional	2.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0.00	Dokumen	26.523.080	150.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47.00	Kegiatan				2.000.000.000	1.548.053.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Hibah Pramuka	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10.00	Laporan	2.000.000.000	1.548.053.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00	%				15.720.160.262	15.010.627.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00	%						
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00	Dokumen	Dokumen Rencana Kerja dan rencana Anggaran			40.238.172	118.275.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	7.265.332	100.775.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Penyusunan Dokumen RKA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	5.365.330	2.300.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4.651.120	2.300.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Penyusunan Dokumen DPA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	4.371.830	2.300.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	4.314.240	2.300.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	4.198.920	2.300.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	10.071.400	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Tersedianya Dokumen Keuangan	100.00	%	Dokumen Keuangan			10.028.149.812	11.952.352.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62.00	Orang/bulan	9.662.307.712	11.831.252.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan OPD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	348.450.000	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Prosentase Keuangan yang di verifikasi	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00	Dokumen	4.008.640	5.800.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.00	Dokumen	2.418.760	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	2.183.600	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00	Dokumen	4.142.200	5.500.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.00	Laporan	3.313.500	2.500.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Dokumen Prognosis	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.325.400	2.300.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1.00	Dokumen	95.904.240	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80.00	Orang	194.532.673	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	Persen	tercukupinya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD			1.472.029.876	1.265.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	24.994.560	20.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.00	buah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.00	Paket	152.475.290	120.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.00	Paket	58.576.330	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Logistik Kantor	12.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	53.169.820	85.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Paket	45.021.726	40.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan	2.00	Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.00	Dokumen	8.940.000	20.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Penyediaan Makan Minum Rapat	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	59.850.000	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat Kordinasi luar dan dalam Daerah	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	839.002.150	750.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	4.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen	230.000.000	130.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00	Jenis	tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan kantor			1.907.212.698	160.000.000	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.00	Unit	310.732.000	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel	3.00	Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.00	Unit	81.453.190	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Peralatan Olahraga	6.00	Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.00	Unit	1.515.027.508	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	tercukupinya Kebutuhan Jasa Kantor			740.893.731	920.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tagihan Listrik dan Internet	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	279.358.400	360.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	75.067.820	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	386.467.511	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	terpeliharanya aset SKPD			1.241.199.060	595.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	45.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22.00	Unit	366.408.880	400.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	3.00	jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10.00	Unit	7.272.000	30.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor	2.00	Ruang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	831.200.000	120.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>								<b>53.348.990.388</b>	<b>93.495.065.000</b>	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								<b>626.003.608</b>	<b>3.715.561.000</b>	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00	%				626.003.608	3.715.561.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100.00	%	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah			626.003.608	3.715.561.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah elemen data yang terpenuhi	5100.00	Data	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12.00	Dokumen	75.000.173	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah kompilasi statistik sektoral	40.00	Kompilasi						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah survey statistik sektoral	30.00	jumlah survey						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah publikasi Statistik Sektoral	2.00	dokumen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah konversi Data Sektoral ke Dalam Data Spasial	20.00	jenis						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah OPD yang memiliki SDM pengelola data/statistisi	45.00	OPD	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30.00	Orang	75.000.580	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	30.00	kegiatan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30.00	Dokumen	100.000.265	900.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1500.00	variabel						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	45.00	OPD						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah OPD yang menyelenggarakan statistik sektoral	34.00	OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34.00	Orang	70.000.144	295.561.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah OPD yang mengelola data berdasarkan statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	34.00	OPD						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah OPD yang terintegrasi dengan Portal Semarang Satu Data	20.00	OPD	Jumlah Infrastruktur Statistik	5.00	Unit	175.000.023	420.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Tersedianya ketersediaan data seluruh OPD Kota Semarang	92.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100.00	persen						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah data yang terotorisasi	1500.00	Data	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30.00	Dokumen	131.002.423	600.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS ( survey & kompilasi )	70.00	kegiatan						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								<b>690.921.720</b>	<b>2.057.849.000</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00	%				<b>690.921.720</b>	<b>2.057.849.000</b>	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100.00	%	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah			690.921.720	2.057.849.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	74.00	aplikasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12.00	Laporan	690.921.720	2.057.849.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12.00	laporan						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>								<b>55.351.247.450</b>	<b>72.683.916.000</b>	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>								<b>37.441.903.119</b>	<b>39.232.971.000</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20.00	%				<b>10.463.354.290</b>	<b>10.402.710.000</b>	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20.00	%	Terlaksananya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya			2.511.018.230	1.902.710.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Atraksi Budaya	5.00	event	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10.00	Objek	2.511.018.230	1.902.710.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Drama Tari Tradisional	2.00	event						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Drama Tradisional	2.00	event						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1.00	event						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Festival Dalang	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pagelaran Musik Tradisi	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	10.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Wayang Orang	5.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelarsan Gamelan	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20.00	%	Terlaksananya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya			6.453.900.000	6.000.000.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	72.00	event	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7.00	Objek	6.453.900.000	6.000.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Festival Film Semarang	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Festival Goa Kreo	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Festival Keroncong	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Festival Semarang	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Festival Seni dan Budaya	35.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Semarang Jelajah Musik	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Semarang Night Carnival	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Sesaji Rewanda	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Semarang Bienalle	1.00	Kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20.00	%	Terlaksananya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya			1.498.436.060	2.500.000.000	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Dugder	1.00	event	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600.00	Orang	1.498.436.060	2.500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Gebyuran Bustaman	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Wayang 1 Muharam	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Sarasehan Penghayat	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20.00	%				4.277.064.520	5.928.424.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20.00	%	Terlaksananya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya			4.277.064.520	5.928.424.000	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Fasilitasi HAKI	12.00	bulan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629.00	Sertifikat	2.914.880.000	4.178.424.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	50.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Kreativitas Seni Film	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Lomba Seni	3.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Parade Seni	1.00	event					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Seni	12.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Workshop Seni	30.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	36.00	kegiatan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124.00	Lembaga	1.362.184.520	1.750.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	26.00	kegiatan						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1.00	kegiatan						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Fasilitasi Pentas Seni	48.00	kegiatan						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	2.00	kegiatan						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12.00	bulan						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77.85	%				3.395.000.000	2.572.712.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77.85	%	Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			3.395.000.000	2.572.712.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya		Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	1.00	kegiatan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461.00	Objek	3.395.000.000	2.572.712.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya ( Update Data )	1.00	dokumen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia ( JKPI )	1.00	tahun						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kajian Situs Cagar Budaya	1.00	dokumen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1.00	dokumen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kajian Kebudayaan	1.00	dokumen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Pengelolaan Museum yang sesuai standar	100.00	%				963.030.000	0	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Sarana dan Prasarana Museum yang terpenuhi dan terpelihara	100.00	%	Sarana dan Prasarana Museum terpenuhi dan terpelihara			963.030.000	0	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100.00	Unit	963.030.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				18.343.454.309	20.329.125.000	
			Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.00	%						
			Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100.00	%						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	8.00	dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD			1.014.600	2.650.312	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	201.600	729.952	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1.00	dokumen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.00	Dokumen	162.600	298.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.00	Dokumen	162.600	322.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2.00	Dokumen	162.600	295.050	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.00	Dokumen	162.600	322.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	162.600	681.660	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100.00	%	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan			12.326.941.989	14.213.677.180	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936.00	Orang/bulan	11.798.370.989	13.753.165.530	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	528.083.200	459.840.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00	Laporan	162.600	298.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	162.600	200.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.00	Dokumen	162.600	172.550	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100.00	%	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian			332.527.240	6.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3.00	event	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597.00	Orang	175.000.000	3.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.00	Orang	157.527.240	3.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100.00	%	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum			2.113.257.099	2.666.749.879	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.00	Paket	215.204.500	193.223.129	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.00	Paket	90.320.980	75.842.776	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54.00	Paket	136.459.470	156.329.818	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.00	Paket	47.817.577	46.842.686	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51500.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	600.00	Laporan	700.000.000	1.332.215.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.00	Laporan	493.386.792	449.989.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	10.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.00	Dokumen	430.067.780	412.307.470	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100.00	%	Terlaksananya Barang Milik Daerah Pada OPD			462.062.830	76.456.900	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional	3.00	jenis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22.00	Unit	172.072.740	50.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.00	Unit	289.990.090	26.456.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	Terlaksananya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			1.800.544.450	1.623.270.504	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpn, Air dan Surat Kabar/Majalah	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	850.090.000	862.796.880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Bersih	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	950.454.450	760.473.624	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100.00	%	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD			1.307.106.101	1.740.320.225	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20.00	Unit	272.890.800	1.034.150.860	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00	Unit	824.984.598	554.677.365	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	15.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00	Unit	209.230.703	151.492.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>								<b>14.584.496.882</b>	<b>19.636.921.000</b>	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>								<b>13.668.032.092</b>	<b>18.190.659.000</b>	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk</b>	<b>1.00</b>	<b>rasio</b>				<b>1.307.921.937</b>	<b>2.064.909.000</b>	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00	%	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan			920.419.860	1.466.909.000	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah koleksi e-book	11000.00	e book	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )	5.00	Layanan	260.973.780	620.464.472	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
			Jumlah e-library	102.00	lokasi						DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		peningkatan jumlah buku yang dipinjam masyarakat baik melalui manual maupun virtual	11000.00	buku	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5.00	Perpustakaan	64.875.810	132.030.161	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Keluasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah/ unik	100.00	keping/buku	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100.00	Eksemplar	94.584.010	160.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Pembinaan Perpustakaan Sekolah	25.00	lokasi	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5.00	Perpustakaan	29.369.690	60.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		pembinaan perpustakaan khusus	60.00	lokasi	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5.00	Perpustakaan	20.441.100	55.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/ pustakawan	2.00	kali	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.00	Orang	22.516.820	55.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2.00	lokasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5.00	Layanan	12.159.930	29.414.367	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka		Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.00	eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200.00	Eksemplar	306.573.300	115.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	1500.00	eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100.00	Eksemplar	37.243.480	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya data informasi dan statistik perpustakaan kota	2.00	kali/tahun	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.00	Dokumen	71.681.940	40.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00	%	peningkatan literasi pada masyarakat serta kebermanfaatannya			387.502.077	598.000.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4.00	kegiatan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15.00	Lokus	101.554.070	60.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40.00	persen	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	Perpustakaan	85.175.527	315.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	175.00	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5.00	Orang	131.410.220	70.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	35.00	persen	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5.00	Perpustakaan	34.025.680	95.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	3.00	orang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2.00	Orang	35.336.580	58.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Terlindungnya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00	%				88.415.933	379.796.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00	%	Terpeliharanya khsanah naskah kuno daerah kabupaten/kota			42.437.370	205.796.000	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Sosialisasi/Bintek tentang naskah kuno	2.00	kali/tahun	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.00	Orang	38.916.150	102.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	200.00	buah	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5.00	Eksemplar	3.521.220	103.796.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00	%				45.978.563	174.000.000	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	150.00	buah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2.00	Eksemplar	15.254.920	87.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	150.00	buah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5.00	Eksemplar	30.723.643	87.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				12.271.694.222	15.745.954.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00	dokumen				7.892.580	141.990.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	4.878.000	6.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah RKA dan DPA OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.00	Dokumen	1.400.440	3.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00	Laporan	908.380	63.245.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.00	Laporan	705.760	69.745.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
			Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5.00	Dokumen						DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00	%				9.330.323.562	13.447.764.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94.00	Orang/bulan	9.128.481.882	13.350.975.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	199.360.000	93.159.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.00	Laporan	1.170.160	1.815.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	1.311.520	1.815.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	%				901.360.569	780.200.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	25.659.959	40.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00	Paket	18.482.067	60.250.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	22.084.831	94.450.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan	7.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00	Paket	18.981.626	95.200.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Surat Kabar)	15.00	Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.00	Dokumen	14.400.000	60.300.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	70.00	orang bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	24.300.000	60.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi yang terselenggara	25.00	Kali/bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	205.615.240	60.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang/jasa yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD/OPD	10.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.00	Dokumen	571.836.846	310.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%				54.212.044	120.000.000	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5.00	Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20.00	Unit	54.212.044	120.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%				728.782.112	200.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	257.332.112	140.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	471.450.000	60.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	%				1.249.123.355	1.056.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	2.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.00	Unit	36.318.180	70.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.00	Unit	490.608.960	646.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeuhnya pemeliharaan mesin dan alat lainnya	12.00	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00	Unit	116.306.140	260.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeuhnya pemeliharaan gedung arsip/ perpustakaan	1.00	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1.00	Unit	605.890.075	80.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>								<b>916.464.790</b>	<b>1.446.262.000</b>	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisy pemerin tahan berbasis elektronik	100.00	%				576.490.990	793.520.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00	%				216.919.010	278.520.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00	persen	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000.00	Berkas	65.000.000	95.520.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100.00	persen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000.00	Berkas	44.200.000	91.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00	OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31.00	Laporan	107.719.010	92.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00	%				137.994.300	225.000.000	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI		Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	105.00	berkas/roll/keping	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250.00	Arsip	44.074.300	105.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60.00	OPD	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500.00	Arsip	93.920.000	120.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00	%				221.577.680	290.000.000	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	20.00	persen	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100.00	Pengguna	5.891.030	90.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31.00	Laporan	215.686.650	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		persentase jumlah arsip musnah	100.00	%				311.108.160	602.103.000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	-	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100.00	%				55.809.690	157.103.000	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	100.00	persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000.00	Arsip	34.200.000	62.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00	persen	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500.00	Berkas	21.609.690	95.103.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00	%				31.598.740	50.000.000	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevakuasi	200.00	berkas	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500.00	Arsip	16.597.120	25.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	50.00	persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500.00	Arsip	15.001.620	25.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70.00	%				36.076.540	110.000.000	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	70.00	persen	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.00	Daftar	7.778.500	30.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	70.00	persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.00	Arsip	9.500.000	30.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	5.00	kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100.00	Arsip	7.580.720	25.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	5.00	kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100.00	Arsip	11.217.320	25.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70.00	%				129.123.220	150.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00	berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250.00	Arsip	51.545.390	75.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.00	berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376.00	Arsip	77.577.830	75.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70.00	%				58.499.970	135.000.000	
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00	berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500.00	Arsip	19.100.000	55.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang		Jumlah arsip alih media yang hilang	500.00	berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500.00	Arsip	19.999.980	35.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		Jumlah arsip yang diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1000.00	berkas	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500.00	Arsip	19.399.990	45.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60.00	%				28.865.640	50.639.000	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60.00	%				28.865.640	50.639.000	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5.00	SOP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5.00	SOP	17.287.870	30.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berdasarkan NSPK	30.00	SK	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250.00	Arsip	11.577.770	20.639.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>								<b>14.361.104.449</b>	<b>13.438.180.000</b>	
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								<b>14.361.104.449</b>	<b>13.438.180.000</b>	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi perikanan tangkap	3055.90	Ton				1.643.400.000	1.394.668.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	250000.00	ekor	Terselenggaranya penebaran benih ikan di perairan umum			650.000.000	325.000.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BGG	100.00	Orang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.00	Unit	650.000.000	325.000.000	DINAS PERIKANAN
			Jumlah kajian jasa konsultasi	1.00	Dokumen						DINAS PERIKANAN
			Restocking	250000.00	ekor						DINAS PERIKANAN
			Honorarium Non ASN	1.00	Orang						DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	120.00	Orang	Meningkatnya kapasitas nelayan kecil Meningkatkan kapasitas nelayan kecil			445.400.000	225.000.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	60.00	Orang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120.00	Orang	445.400.000	225.000.000	DINAS PERIKANAN
			Forum KUB nelayan	105.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Sosialisasi nelayan	120.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Pelatihan nelayan	120.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Penanaman mangrove	15000.00	Batang						DINAS PERIKANAN
			Lomba perahu davung	1.00	Kegiatan						DINAS PERIKANAN
			Kajian Pengelolaan Mangrove di Kota Semarang	1.00	Kegiatan						DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	100.00	Orang	Terselenggaranya pembinaan bakul dan nelayan dalam peningkatan pelayanan TPI			548.000.000	844.668.000	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Pembinaan bakul dan nelayan TPI	100.00	Orang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6.00	Layanan	548.000.000	844.668.000	DINAS PERIKANAN
			Sarpras pengelolaan TPI	22.00	Jenis						DINAS PERIKANAN
			Sosialisasi optimalisasi TPI	100.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Honorarium Non ASN	4.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Monev TPI	12.00	Kali						DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan TPI	1.00	Unit/tahun						DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya	3845.95	Ton				2.956.852.885	2.714.075.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	340.00	Orang	Terselenggaranya pendampingan bagi kelompok budidaya melalui sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi kelompok pembudidaya			688.400.000	614.075.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Pelatihan Budidaya Ikan dan Sayuran Dalam Ember (BUDIKDAMBER)	200.00	Orang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20.00	Kelompok	688.400.000	614.075.000	DINAS PERIKANAN
			Honorarium Non ASN	4.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Pelatihan teknologi pakan ikan	20.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Panel raya ikan	100.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Sosialisasi hama dan penyakit ikan	20.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Pelatihan budidaya ikan di kolam terpal	100.00	Orang						DINAS PERIKANAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	Demplot budidaya udang di tambak	1.00	Kegiatan						DINAS PERIKANAN
			Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan/sosialisasi	60.00	Orang	Terlaksananya pembinaan /sosialisasi/pelatihan dalam rangka peningkatan pengelolaan ikan bagi UPR			2.268.452.885	2.100.000.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya induk ikan	4.00	Jenis	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.00	Unit	1.415.452.885	2.100.000.000	DINAS PERIKANAN
			Honor Non ASN	12.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Rehab pemeliharaan gedung BBI	4.00	Jenis						DINAS PERIKANAN
			Pembinaan UPR	3.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Rehab kolam dan saluran BBI	2.00	Jenis						DINAS PERIKANAN
			Tersedianya pakan ikan	3535.00	kilogram						DINAS PERIKANAN
			Tersedianya obat-obatan ikan	5.00	Jenis						DINAS PERIKANAN
			Lomba mancing	1.00	Kegiatan						DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat					Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.00	Orang	853.000.000	0	DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4.00	Kasus				283.192.355	212.385.000	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	Pelatihan POKMASWAS	50.00	Orang	Terlaksananya pelatihan POKMASWAS			283.192.355	212.385.000	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		FGD Ijin Usaha Perikanan	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1.00	Dokumen	283.192.355	212.385.000	DINAS PERIKANAN
			Pembinaan Pokmaswas	50.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Temu usaha perikanan	100.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Uji mutu hasil perikanan	1.00	Kegiatan						DINAS PERIKANAN
			Jasa konsultasi	1.00	Dokumen						DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi ikan olahan	17557.29	Ton				1.395.494.760	1.359.268.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	30.00	Orang	Terlaksananya penyampaian informasi tentang pengolahan ikan kepada kelompok pengolah ikan			207.134.760	244.000.000	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Bintek/magang	30.00	Orang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1.00	Dokumen	207.134.760	244.000.000	DINAS PERIKANAN
			Monev pedagang ikan hias	12.00	Kali						DINAS PERIKANAN
			Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	130.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Honorarium Non ASN	1.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Jasa konsultasi	1.00	dokumen						DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	150.00	Orang	Terlaksananya pelatihan pengolahan ikan			213.360.000	495.000.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan	40.00	Orang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15.00	Unit Usaha	213.360.000	495.000.000	DINAS PERIKANAN
			Jumlah peserta sosialisasi Gemarikan dan PMT anak sekolah	200.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	150.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk	300.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Jumlah peserta kegiatan Lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi	38.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK	50.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Cooking class	50.00	Orang						DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	4.00	Orang /Pengelola	Terlaksananya pembinaan pedagang ikan di PIH oleh pengelola PIH			975.000.000	620.268.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Sarana pasar ikan higienis Mina Rejomulyo	2.00	Jenis	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17000.00	Ton	975.000.000	620.268.000	DINAS PERIKANAN
			Honorarium Non ASN	4.00	Orang						DINAS PERIKANAN
			Jumlah pembangunan/perawatan gedung	3.00	Paket						DINAS PERIKANAN
			<b>NON URUSAN</b>								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	100.00	%				8.082.164.449	7.757.784.000	
			Peningkatan Kapasitas SDM	30.00	Orang						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Presentase Pementuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	%						
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8.00	Dokumen	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran			4.000.000	8.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	3.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00	Dokumen	1.500.000	2.000.000	DINAS PERIKANAN
			Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1.00	dokumen						DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	500.000	1.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen perubahan RKA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	500.000	1.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00	Dokumen	500.000	1.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen perubahan DPA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	500.000	1.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen LKjIP dan LKPJ	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	500.000	2.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100.00	%	Terlaksananya tertib administrasi keuangan			5.697.029.449	6.298.795.826	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32.00	Orang/bulan	5.464.569.449	6.064.795.826	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya honor pengelola keuangan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	231.860.000	230.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Pelaporan keuangan dan kinerja akhir tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	200.000	1.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Pelaporan keuangan semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	200.000	2.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Pelaporan dan prognosis keuangan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	200.000	1.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	2.00	Kegiatan	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian			43.400.000	20.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.00	Orang	10.000.000	15.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.00	Orang	33.400.000	5.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100.00	%	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga kantor			769.794.963	515.988.174	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.00	Paket	35.000.000	15.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor	35.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.00	Paket	76.462.399	35.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	8.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.00	Paket	51.252.450	15.999.174	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jamuan makan minum rapat	700.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24.00	Laporan	40.000.000	32.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan dinas luar daerah	36.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.00	Laporan	299.956.520	207.989.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Peralatan kantor elektronik	3.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	267.123.594	210.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3.00	Jenis	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			507.418.462	20.000.000	
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.00	Unit	423.953.400	0	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarpras pendukung gedung kantor	3.00	Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	83.465.062	20.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor			547.157.216	395.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	200.000.000	185.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa perlengkapan kantor	2.00	Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00	Laporan	74.964.816	60.000.000	DINAS PERIKANAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa pelayanan umum kantor	5.00	Orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00	Laporan	272.192.400	150.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100.00	%	Terlaksananya pemeliharaan aset dinas			513.364.359	500.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.313.180	50.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanangan		Jumlah kendaraan dinas operasional	28.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	369.266.497	400.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48.00	Unit	39.454.200	0	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor	2.00	Jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	64.330.482	50.000.000	DINAS PERIKANAN
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>								<b>55.351.247.450</b>	<b>72.683.916.000</b>	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>								<b>17.909.344.331</b>	<b>33.450.945.000</b>	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>		Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00	%				<b>13.500.000.000</b>	<b>27.494.557.000</b>	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78.00	buah	Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata			329.265.280	200.000.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Kajian Pariwisata	5.00	dokumen	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0.00	Lokasi	329.265.280	200.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100.00	persen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			DED Pengembangan Wisata Pantai Mangunharjo	1.00	dokumen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1293191.00	orang	Tersedianya Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata			12.500.720.960	26.995.029.402	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Kota Lama	12.00	bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.00	Unit	12.500.720.960	26.995.029.402	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	336.00	orang bulan						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100.00	persen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100.00	%	Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata			315.587.400	200.000.000	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pembinaan Daya Tarik Wisata	1.00	kegiatan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0.00	Lokasi	57.505.200	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1.00	Unit	200.577.000	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Sosialisasi Peningkatan Pariwisata	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0.00	Laporan	57.505.200	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100.00	%	Tersedianya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas			354.426.360	99.527.598	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata		Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	1500.00	orang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	0.00	Laporan	354.426.360	99.527.598	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Terlaksananya Administrasi Perizinan di Mall Pelayanan Publik	12.00	Bulan						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kajian Usaha Pariwisata	5.00	Dokumen						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>		Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00	%				<b>3.498.424.331</b>	<b>4.026.854.000</b>	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00	%	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan			3.498.424.331	4.026.854.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		FGD	3.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16.00	Dokumen	1.128.527.550	1.342.284.318	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Kajian	3.00	dokumen					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pembuatan Calendar of Events	100.00	buku					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pembuatan Guide Book	100.00	buku					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pembuatan Leaflet Pariwisata	5850.00	lembar					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pembuatan Souvenir	3.00	jenis					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1.00	tahun					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pengelolaan Media Sosial	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Promosi Media Cetak / Elektronik	1.00	tahun					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Branding Pemasaran Pariwisata Kota Semarang	4.00	Kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota		Duta Wisata	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.00	Laporan	1.299.905.391	1.342.284.840	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Pameran	3.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pemilihan Denok Kenang	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Sales Mission	1.00	Kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Roadshow Pariwisata ke Luar Daerah	1.00	Kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4.00	Dokumen	1.069.991.390	1.342.284.842	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Parade Duta Seni	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12.00	Bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		SDM Pariwisata	70.00	%				910.920.000	1.929.534.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan sektor pariwisata unggulan	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70.00	%	Terlaksananya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			910.920.000	1.929.534.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1.00	kegiatan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120.00	Orang	393.682.000	729.534.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Bintek Penata Usaha Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Bintek Sadar Wisata Untuk Ojek Online	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Di Destinasi Pariwisata	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Pemandu Geowisata	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton dan Candi)	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Digitalisasi : Branding, Pemasaran dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir dan Fotografi	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata	200.00	orang					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940.00	Orang	517.238.000	1.200.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Lomba Pokdarwis	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pembinaan Pokdarwis	4.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Tenaga Non ASN (1 orang)	12.00	bulan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Workshop Assesment Desa Wisata	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Peningkatan Aplikasi	1.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Fasilitasi Forum Komunikasi Desa Wisata dan Pokdarwis	2.00	kegiatan					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>							<b>32.198.237.245</b>	<b>25.376.029.000</b>		
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							<b>32.198.237.245</b>	<b>25.376.029.000</b>		
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		produksi hasil peternakan	35922.00	ton			5.918.669.202	5.467.384.000		
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50647.76	ton						
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	40.00	kelompok	Terwujudnya pengawasan penggunaan sarana pertanian			2.901.177.602	2.218.155.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	19.00	ha	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12.00	Laporan	688.192.200	1.023.155.000	DINAS PERTANIAN
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	4.00	kelompok						DINAS PERTANIAN
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	5.00	kelompok						DINAS PERTANIAN
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	2.00	kelompok						DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		jumlah fasilitas sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16.00	paket	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30.00	Laporan	2.212.985.402	1.195.000.000	DINAS PERTANIAN
			jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6.00	kelompok						DINAS PERTANIAN
			jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitas P2HP	8.00	kelompok						DINAS PERTANIAN
			Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	22750.00	batang						DINAS PERTANIAN
			Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3.00	kegiatan						DINAS PERTANIAN
			Jumlah pengembangan tanaman sukun	110.00	batang						DINAS PERTANIAN
			Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12.00	kali						DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase kebun dinas yang produktif	62.50	persen	Terwujudnya pengembangan sumber daya genetik tanaman			2.258.438.400	2.092.244.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah kebun dinas yang dikelola	16.00	unit	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6.00	Dokumen	2.258.438.400	2.092.244.000	DINAS PERTANIAN
			Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	1500.00	batang						DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45.00	persen	Terwujudnya peningkatan mutu pakan ternak di tingkat peternak			595.720.000	30.000.000	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12.00	laporan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12.00	Laporan	595.720.000	30.000.000	DINAS PERTANIAN
			Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitas penguatan pakan	2.00	kelompok						DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	70.00	ekor	Terwujudnya penyebaran dan pengembangan ternak di Kota Semarang			163.333.200	1.126.985.000	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang diadakan	70.00	ekor	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	60.00	Ekor	163.333.200	1.126.985.000	DINAS PERTANIAN
			Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16.00	kecamatan						DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38	ton/ha				5.181.664.800	322.130.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun	1.00	dokumen	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1.00	Laporan	97.680.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun	1.00	dokumen	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1.00	Dokumen	99.600.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	34.00	unit	Meningkatnya prasarana pertanian			4.984.384.800	322.130.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	3.00	unit	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2.00	Unit	349.400.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	2.00	unit	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1.00	Unit	199.800.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		Jumlah dam parit yg dibangun/ direhab	3.00	unit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2.00	Unit	274.400.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	25.00	unit	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23.00	Unit	4.160.784.800	322.130.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14.00	kelurahan	Terwujudnya kesehatan hewan di Kota Semarang			402.352.000	217.189.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	25.00	kali	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12.00	Laporan	402.352.000	217.189.000	DINAS PERTANIAN
			Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	3500.00	ekor						DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92.00	persen	Terwujudnya pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan dan produk asal hewan di Kota Semarang			92.300.000	150.000.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100.00	persen	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12.00	Laporan	92.300.000	150.000.000	DINAS PERTANIAN
			Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Vertitir (NKV)	100.00	persen						DINAS PERTANIAN
			Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	4.00	laporan						DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75.00	%				187.400.000	125.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	17.00	kelompok	Terwujudnya pengendalian & penanggulangan OPT dan DPI			187.400.000	125.000.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	10.00	kelompok	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100.00	Ha	125.780.000	75.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	7.00	kelompok	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	40.00	Ha	61.620.000	50.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28.00	kelompok				749.107.400	601.170.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40.00	persen	Terwujudnya penyuluhan pertanian kepada petani Kota Semarang			749.107.400	601.170.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	5.00	kegiatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5.00	Unit	148.200.000	80.000.000	DINAS PERTANIAN
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5.00	lembaga						DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5.00	kelompok	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40.00	Unit	546.986.200	446.170.000	DINAS PERTANIAN
			Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	840.00	orang						DINAS PERTANIAN
			Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	5.00	kegiatan						DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4.00	Unit	53.921.200	75.000.000	DINAS PERTANIAN
			<b>NON URUSAN</b>								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				19.666.743.843	18.493.156.000	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	31.00	dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja PD			11.439.366	10.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan	5.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00	Dokumen	5.952.265	5.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	21.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.00	Laporan	5.487.101	5.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7.00	dokumen	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pertanian			14.051.723.863	15.829.456.000	
			Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95.00	Orang/bulan	13.825.874.245	15.623.456.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	222.100.000	200.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00	Laporan	1.292.978	1.500.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan semesteran	4.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.00	Laporan	1.637.760	3.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	818.880	1.500.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Terwujudnya layanan administrasi umum Dinas Pertanian			1.481.592.614	802.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	68.832.000	40.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11.00	Paket	355.910.614	240.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak & penggandaan yang disediakan	10.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00	Paket	40.000.000	60.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3.00	Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00	Dokumen	10.080.000	7.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100.00	persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	36.000.000	75.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	284.823.000	180.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	Dokumen	685.947.000	200.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatnya barang milik daerah yang dikelola Dinas Pertanian untuk menunjang pelaksanaan urusan			703.630.000	133.200.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	13.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.00	Unit	604.016.000	50.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	6.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21.00	Unit	99.614.000	83.200.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Terwujudnya layanan jasa penunjang pelaksanaan urusan Dinas Pertanian			1.344.137.000	1.028.500.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	206.773.000	220.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	1.137.364.000	808.500.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengembangan ekonomi hijau (green economy)	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100.00	persen	Terpeliharanya barang milik daerah yg dikelola Dinas Pertanian dengan baik			2.074.221.000	690.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.314.000	40.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66.00	Unit	540.161.000	350.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	7.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210.00	Unit	193.746.000	125.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11.00	Unit	1.300.000.000	175.000.000	DINAS PERTANIAN
<b>3.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>								<b>68.644.999.286</b>	<b>159.079.433.000</b>	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>								<b>68.644.999.286</b>	<b>159.079.433.000</b>	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00	%				126.338.000	235.000.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100.00	%	Meningkatnya kelancaran distribusi perdagangan			126.338.000	235.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		penerbitan surat ijin tempat dasaran pedagang pasar dan PKL	1800.00	surat izin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800.00	Dokumen	126.338.000	235.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22.00	pasar				28.444.442.000	103.238.520.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	2.00	pasar	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan			22.483.601.000	97.188.520.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	2.00	pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52.00	Unit	14.341.461.000	89.688.520.000	DINAS PERDAGANGAN
			Pasar Barito Karya Mandiri di Sawah besar	1.00	pasar						DINAS PERDAGANGAN
			Revitalisasi Pasar Waru Kliithikan	1.00	pasar						DINAS PERDAGANGAN
			Revitalisasi Pasar Bangetayu	1.00	pasar						DINAS PERDAGANGAN
			Sewa Lahan MAJT untuk Pasar Barito Baru	1.00	lokasi						DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar rakyat yang terfasilitasi sarana prasarannya (kebersihan; operasional genset, hydrant, pompa)	52.00	pasar	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	52.00	Unit	8.142.140.000	7.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52.00	pasar	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan			5.960.841.000	6.050.000.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		keamanan dan ketertiban pasar dan PKL	52.00	pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12.00	Dokumen	3.688.161.000	3.178.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		optimalisasi pendapatan retribusi pasar dan PKL	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12.00	Dokumen	2.272.680.000	2.872.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.99	%				187.709.000	275.000.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100.00	%	Stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat			37.143.000	125.000.000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan harga harian melalui sistem informasi harga	12.00	laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12.00	Laporan	37.143.000	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100.00	%	Stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat			150.566.000	150.000.000	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan harga harian melalui sistem informasi harga	12.00	laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12.00	Laporan	150.566.000	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1615736908.00	US\$				590.552.000	800.000.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai investasi	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	18.00	%	Meningkatnya pemasaran produk lokal unggulan Kota Semarang			590.552.000	800.000.000	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional		Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	3.00	kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15.00	Pelaku Usaha	590.552.000	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76.00	%				804.852.000	1.076.136.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76.00	%	Meningkatnya perlindungan konsumen			804.852.000	1.076.136.000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	91960.00	unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	91960.00	Unit	552.044.000	644.322.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	64.00	persen	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300.00	Orang	252.808.000	431.814.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30.00	%				707.272.000	6.000.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan nilai investasi	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100.00	orang	Meningkatnya pemasaran produk lokal unggulan Kota Semarang			707.272.000	6.000.000.000	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan produk lokal (Semargres, Dugderan, Festival Angkringan)	3.00	kegiatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	180.00	UMKM	575.000.000	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk lokal	3.00	kegiatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	360.00	UMKM	132.272.000	5.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				37.783.834.286	47.454.777.000	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00	dokumen	Pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan			5.010.680	32.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rencana Kerja Perangkat Daerah	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	1.879.440	8.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		RKA, DPA, R-DPPA, DPPA	4.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4.00	Dokumen	1.789.280	12.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		LKPJ, LKJIP, LPPD	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	1.341.960	12.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100.00	%	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Perdagangan			26.371.280.969	33.404.777.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	214.00	orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214.00	Orang/bulan	25.960.951.529	32.908.777.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	408.000.000	484.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	776.480	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semester I	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	776.480	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan prognosis anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	776.480	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100.00	%	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor			997.597.600	1.725.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	10.000.000	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	22.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.00	Paket	30.000.000	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah alat tulis kantor yang disediakan	70.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	151.974.204	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	26.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.00	Paket	350.000.000	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		jumlah tamu yang berkunjung	4092.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	177.750.000	185.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	726.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	277.873.396	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor			148.424.316	100.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	148.424.316	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor			9.081.080.721	10.907.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		ketersediaan listrik, air, jaringan	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	7.840.419.721	10.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		kelancaran operasional kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	1.240.661.000	907.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100.00	%	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor			1.180.440.000	1.286.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar, suku cadang, perawatan, biaya perizinan	50.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.00	Unit	623.272.430	721.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		jumlah pemeliharaan mebel kantor	10.00	jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30.00	Unit	14.544.000	16.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan/mesin yang dipelihara	13.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13.00	Unit	311.603.570	316.000.000	DINAS PERDAGANGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah pemeliharaan/perbaikan gedung kantor	1.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	231.020.000	233.000.000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3.31.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN</b>								<b>14.917.740.261</b>	<b>35.028.699.000</b>	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								<b>14.917.740.261</b>	<b>35.028.699.000</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88.00	%				4.652.019.490	23.349.069.000	
			Persentase Pertambahan IKM	0.50	%						
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1.00	IKM	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kota			4.652.019.490	23.349.069.000	
			Jumlah Pertambahan IKM	20.00	IKM						
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RPK - PERDA	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1.00	Dokumen	100.000.000	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Penguatan Sentra IKM	4.00	Sentra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6.00	Dokumen	264.500.000	500.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1.00	Sentra						DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah Temu Usaha Industri	1.00	Kegiatan						DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Workshop/Sosialisasi/Pelatihan Industri kreatif/start up atau pelaku usaha/ link and match/ Semarang online sale	750.00	IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19.00	Dokumen	959.200.000	1.400.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah Partisipasi Promosi / Pameran IKM.	1.00	Kegiatan						DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah IKM yang terfasilitasi HKI	90.00	IKM						DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah IKM yang Terfasilitasi SNI	90.00	IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12.00	Dokumen	1.739.059.490	550.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah IKM yang terfasilitasi P-IRT / BPOM / HALAL	270.00	IKM						DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah Mesin pelinting yang terdata	10.00	mesin						DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Persentase Pengembangan sentra IKM	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.00	Dokumen	1.420.000.000	20.649.069.000	DINAS PERINDUSTRIAN
			Persentase Operasional Gedung Sentra IKM	100.00	persen						DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah Dokumen FS dan DED Creative Maker Space	1.00	Dokumen						DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah sosialisasi peningkatan SDM	3.00	Kegiatan						DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Terlaksananya Move Industri	2.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1.00	Dokumen	169.260.000	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00	%				176.460.000	300.000.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15.00	IKM	Terlaksananya penerbitan Izin Industri berupa IUI, IPUI, IUKI dan IPKI			176.460.000	300.000.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	34.00	izin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2.00	Dokumen	133.060.000	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, UIPI, UIKI, IPKI	42.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.00	Dokumen	43.400.000	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50	%				388.840.000	540.000.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4.00	%	Tersedianya informasi industri kota			388.840.000	540.000.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah IKM dan perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	20.00	IKM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2.00	Dokumen	265.000.000	300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas		Jumlah Diseminasi/ sosialisasi data informasi dan analisa industri	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	3.00	Dokumen	99.000.000	170.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah Profil Sentra IKM dan Kawasan Industri.	2.00	Buku						DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas		Jumlah IKM yang patuh dalam Penyampaian Data	20.00	IKM	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas	1.00	Dokumen	24.840.000	70.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100.00	%				9.700.420.771	10.839.630.000	
			Persentase tersedianya Sarana Dam Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00	%						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00	%						
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9.00	Dokumen	Terlaksananya perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			16.714.980	6.980.175	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja ,Renja Perubahan dan Restra Dinas Perindustrian	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	2.439.000	1.551.150	DINAS PERINDUSTRIAN
			Jumlah dokumen RTP	1.00	Dokumen						DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	2.536.000	775.575	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Document Perubahan RKA -Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.715.100	775.575	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Documetrn DPA Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.028.800	775.575	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Document DPA Perubahan Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.972.080	775.575	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Document LKJIP ; LKRJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00	Laporan	3.024.000	2.326.725	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100.00	%	Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah			6.634.178.260	8.203.175.419	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42.00	Orang/bulan	6.359.459.355	7.929.920.950	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	261.960.000	271.337.499	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.00	Dokumen	8.558.905	666.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	1.008.000	571.650	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	2.400.000	339.660	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	792.000	339.660	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100.00	%	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah			95.000.000	1.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.00	Orang	95.000.000	1.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	%	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah			711.146.621	632.753.966	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17.00	Paket	27.300.000	25.340.266	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	25.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24.00	Paket	40.000.000	75.148.405	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	40.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52.00	Paket	69.489.621	43.444.705	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	14.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	13.00	Paket	55.000.000	85.063.082	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	600.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	63.000.000	58.677.800	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	200.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.00	Laporan	257.507.000	145.079.708	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	9.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen	198.850.000	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	%	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26.100.000	12.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Tersedianya Mebel	40.00	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16.00	Unit	26.000.000	1.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.00	Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	50.000	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.00	Unit	50.000	1.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			1.897.026.510	1.513.473.527	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	964.020.510	340.279.120	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.00	Laporan	54.000.000	71.676.546	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	879.006.000	1.101.517.861	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100.00	%	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daeah			320.254.400	470.246.913	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.400.000	45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	20.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19.00	Unit	265.100.000	413.246.913	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	27.00	Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120.00	Unit	8.726.400	1.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.00	Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	10.000.000	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	Unit	28.000	1.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH</b>								<b>198.962.303.560</b>	<b>172.416.202.860</b>	
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								<b>198.962.303.560</b>	<b>172.416.202.860</b>	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Indek Pelayanan Publik	118.00	persen				47.104.561.945	33.154.052.000	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00	persen						
			Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00	Kegiatan						
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40.00	persen						
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00	Kecamatan	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			1.243.070.919	2.282.218.000	
			Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	40.00	persen						
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2.00	Dokumen	350.000.000	776.026.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.00	Dokumen	300.000.000	554.305.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6.00	Dokumen	593.070.919	951.887.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15.00	Dokumen			BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	Pelaksanaan kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00	kegiatan				33.648.595.679	22.047.122.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan MTQ & Pesarawi dan pembinaan tenaga pendidik keagamaan formal & non formal dan a pendidikan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.00	Dokumen	27.308.446.907	10.200.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Pelaksanaan kegiatan perawat jenazah dan pemberian sarana dan prasarana tempat ibadah dan pemberian honor kegiatan untuk petugas kemakmuran masjid	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11.00	Dokumen	5.594.949.562	9.847.122.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Pelaksanaan kegiatan pembinaan UKS, sosial kemasyarakatan dan penyuluhan bahaya narkoba dan aids bagi pelajar	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Lintas	7.00	Dokumen	745.199.210	2.000.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	118.00	persen	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum, Terfasilitasinya Bantuan Hukum dan Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			2.572.584.100	6.979.601.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Tersusunnya : Raperda 9 Perda, Raperwal 36 Perwal, SK Walikota 400 SK Walikota, Surat Perjanjian 120 Surat Perjanjian dan Pembaharuan Aplikasi Eling	100.00	Persen	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565.00	Dokumen	515.389.690	2.393.200.200	BAGIAN HUKUM
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terselesaikannya Penanganan Perkara Hukum litigasi di Lembaga Peradilan 20 Perkara, Bantuan Hukum Warga Miskin 35 Perkara, Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dan Penanganan perkara, Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan KADARKUM serta RANHAM	118.00	Persen	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55.00	Kasus	1.526.396.830	2.943.200.400	BAGIAN HUKUM
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55.00	Kasus			SEKRETARIS DAERAH
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Terlaksanakannya Sosialisasi Produk Hukum, Terdokumentasikannya Produk Hukum (Perda dan Perwal) dan Pengelolaan JDIH, terpenuhinya Perbaikan sarana dan prasarana Ruang JDIH	100.00	Persen	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1000.00	Dokumen	530.797.580	1.643.200.400	BAGIAN HUKUM
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1000.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	40.00	persen				9.640.311.247	1.845.111.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri	15.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15.00	Dokumen	1.105.200.523	100.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Laporan Sister City dengan Luar Negeri	5.00	Dokumen/tahun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5.00	Dokumen	8.535.110.724	1.745.111.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00	persen				4.537.339.432	4.767.881.860	
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00	persen						
			Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00	dokumen						
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00	persen						
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	11174169030.00	dokumen				1.300.838.200	1.005.910.860	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pengendalian dan distribusi perekonomian	12.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12.00	Laporan	318.188.798	375.663.236	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
											BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Koordinasi perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10.00	dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12.00	Laporan	602.629.125	630.247.624	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12.00	Dokumen			BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	9.00	Dokumen	380.020.277	0	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00	persen	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			683.498.400	1.207.474.000	
			Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00	dokumen						
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1.00	Dokumen	165.797.200	633.552.035	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12.00	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12.00	Laporan	387.821.560	289.025.450	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.00	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.00	Laporan	129.879.640	284.896.515	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100.00	persen				2.353.002.832	2.544.497.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	230.00	Dokumen	1.221.062.000	1.594.497.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12.00	Dokumen	568.850.832	450.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10.00	Orang	563.090.000	500.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10.00	dokumen				200.000.000	10.000.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10.00	Dokumen	200.000.000	10.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	persen				147.320.402.183	134.494.269.000	
			Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00	persen						
			OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	41.00	OPD						
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100.00	persen						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00	persen						
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00	persen						
			peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100.00	persen						
			Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	persen						
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	persen						
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	40.00	persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	persen				17.424.780	22.713.000	
			Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00	persen						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	5.041.600	22.713.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Jumlah Dokumen RTP Perangkat Daerah	1.00	Dokumen						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen			BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.268.000	0	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.905.910	0	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.363.680	0	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.845.590	0	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100.00	persen				37.410.568.199	41.115.023.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234.00	Orang/bulan	36.526.053.799	40.018.573.000	BAGIAN KEUANGAN
			Gaji dan Tunjangan PNS Setda Kota Semarang	100.00	persen						BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234.00	Orang/bulan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kinerja PA,KPA,PPK,PPTK dan Bendahara Setda Kota Semarang lebih baik	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	881.400.000	1.080.450.000	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Setda Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	695.200	8.000.000	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Setda Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.00	Laporan	2.419.200	8.000.000	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5.00	dokumen				1.429.031.720	110.034.000	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen perencanaan BMD	2.00	dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00	Dokumen	45.712.034	51.762.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00	Dokumen			
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen Pengelolaan BMD	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.00	Laporan	1.383.319.686	58.272.000	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00	persen				3.288.695.351	5.767.495.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	persen						
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4.00	jenis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.00	Paket	3.241.295.351	5.767.495.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00	Orang	47.400.000	0	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00	Orang			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100.00	persen				43.532.182.354	31.971.963.000	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00	persen						
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	5.00	paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	322.146.827	400.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	12.00	paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	3.222.967.256	1.500.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor	6.00	paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	837.239.512	1.600.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.00	Paket			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	4.00	paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Paket	504.931.999	625.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Paket			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bacaan Koran dan Majalah	100.00	persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	268.00	Dokumen	338.040.000	220.500.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jamuhan Makanan dan Minuman bagi tamu Pemerintah Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.00	Laporan	10.086.609.600	9.659.445.000	BAGIAN TATA USAHA
			Jamuhan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00	persen						BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00	Laporan	25.160.188.976	17.217.018.000	BAGIAN TATA USAHA
			Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00	persen						BAGIAN TATA USAHA
			Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00	persen						BAGIAN TATA USAHA
			Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.00	persen						BAGIAN TATA USAHA
			Kegiatan Peringatan HUT RI	100.00	persen						BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Peralatan dan perlengkapan kantor berbasis Teknologi informasi	2.00	paket	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen	3.060.058.184	750.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00	persen				8.730.483.416	14.351.216.000	
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas jabatan	3.00	unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.00	Unit	1.900.000.000	4.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas operasional/lapangan	21.00	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.00	Unit	4.527.080.692	5.342.523.895	BAGIAN RUMAH TANGGA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20.00	Unit		SEKRETARIS DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15.00	Unit		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Mebelair	66.00	unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66.00	Unit	271.535.833	900.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40.00	Unit			
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan kantor dan mesin lainnya	11.00	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	1.276.981.147	800.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit			
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan prasarana gedung kantor	1.00	unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	754.885.744	3.308.692.105	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	persen				10.153.130.772	9.371.714.000	
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	persen						
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Administrasi Surat Menyurat	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	Laporan	163.006.000	270.000.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, air bersih dan listrik	3.00	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00	Laporan	6.403.219.632	6.994.807.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00	Laporan			BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Laporan	1.672.656.439	981.530.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Iuran Forsesdasi	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00	Laporan	1.914.248.701	1.125.377.000	BAGIAN TATA USAHA
			Honor TPHL Setda Kota Semarang	100.00	persen						BAGIAN TATA USAHA
			Dokumen kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00	persen						BAGIAN TATA USAHA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00	Laporan			BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	persen				20.235.876.858	12.677.814.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	4.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.00	Unit	169.123.596	139.333.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	200.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200.00	Unit	3.248.791.512	2.238.292.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	1500.00	unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500.00	Unit	121.078.800	90.391.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	17.00	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17.00	Unit	12.702.266.022	8.000.889.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	650.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	650.00	Unit	2.779.788.694	1.506.389.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	650.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	725.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	725.00	Unit	1.214.828.234	702.520.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	725.00	Unit			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00	persen				4.132.488.432	5.185.672.000	
			Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00	Orang/Bulan	182.400.632	209.572.000	BAGIAN KEUANGAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00	Orang/Bulan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	24.00	paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24.00	Paket	850.336.800	850.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Dana Penunjang Operasional KDH dan KDH	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00	Orang/Bulan	3.099.751.000	4.126.100.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00	persen				3.955.000.000	4.568.025.000	
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Kebutuhan Rumah Tangga KDH	12.00	paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Paket	2.575.000.000	2.974.125.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Paket			BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12.00	paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Paket	1.380.000.000	1.593.900.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Paket			SEKRETARIS DAERAH
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12.00	Paket			BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00	indeks				849.666.396	1.065.951.000	
			Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	40.00	persen						
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.00	Dokumen	114.667.937	350.493.737	BAGIAN ORGANISASI
			Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	1.00	Dokumen						BAGIAN ORGANISASI
			Pembinaan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen						BAGIAN ORGANISASI
			Dokumen Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan	1.00	Dokumen						BAGIAN ORGANISASI
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Pengelolaan Proses Bisnis	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.00	Laporan	367.211.980	545.674.206	BAGIAN ORGANISASI
			Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25.00	OPD						BAGIAN ORGANISASI
			Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	25.00	OPD						BAGIAN ORGANISASI
			Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25.00	OPD						BAGIAN ORGANISASI
			Pembinaan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur	1.00	Dokumen						BAGIAN ORGANISASI
			Survey Kepuasan Masyarakat	1.00	Dokumen						BAGIAN ORGANISASI
			Pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan	1.00	dokumen						BAGIAN ORGANISASI
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.00	Laporan			SEKRETARIS DAERAH
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00	Dokumen	146.581.690	129.353.057	BAGIAN ORGANISASI
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00	Dokumen			SEKRETARIS DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20.00	Dokumen	221.204.789	40.430.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00	persen				13.585.853.905	8.286.649.000	
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12.00	Laporan	1.126.880.000	786.649.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12.00	Laporan	8.885.460.385	6.300.000.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.00	laporan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.00	Laporan	3.573.513.520	1.200.000.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								<b>129.984.475.359</b>	<b>76.620.828.000</b>	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								<b>129.984.475.359</b>	<b>76.620.828.000</b>	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16.00	dokumen				63.142.144.720	13.453.883.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Raperda yang diusulkan	16.00	dokumen	SEKRETARIAT DPRD			19.162.791.094	1.316.866.681	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	14.00	buah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17.00	Dokumen	19.162.791.094	1.316.866.681	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100.00	%	SEKRETARIAT DPRD			13.089.905.484	2.925.555.536	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Raperda 300 titik	100.00	persen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.00	Dokumen	785.600.000	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Dokumen Kajian	100.00	persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11.00	Orang	9.858.730.184	1.612.777.768	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Tersampainya Informasi melalui Baliho yang terpasang, Penerbitan Majalah Media dialog interaktif TV dan Radio	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.00	Dokumen	2.445.575.300	1.212.777.768	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	150.00	dokumen	SEKRETARIAT DPRD			6.063.055.494	3.841.177.010	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Reses 150	150.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50.00	Dokumen	6.063.055.494	3.841.177.010	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100.00	%	SEKRETARIAT DPRD			24.826.392.648	5.370.283.773	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.00	Dokumen	22.276.888.649	4.057.506.002	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik Rapat Paripurna	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.00	Dokumen	2.549.503.999	1.312.777.771	SEKRETARIAT DPRD
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100.00	%				66.842.330.639	63.166.945.000	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100.00	%						
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100.00	%						
			persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	9.00	dokumen	SEKRETARIAT DPRD			33.012.494	72.062.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	3.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	10.128.674	14.500.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA tersusun	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.117.280	5.950.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.199.030	5.950.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA tersusun	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00	Dokumen	8.392.480	11.850.000	SEKRETARIAT DPRD

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3.199.030	5.950.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	3.064.480	18.862.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	1.911.520	9.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terbit Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100.00	%	SEKRETARIAT DPRD			7.513.194.569	9.252.939.966	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47.00	Orang/bulan	7.140.519.359	8.713.989.966	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	362.871.050	538.950.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	3.708.000	0	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.00	Laporan	6.096.160	0	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.00	Dokumen	50.000.000	0	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81.00	orang	SEKRETARIAT DPRD			520.410.000	287.640.000	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	81.00	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.00	Orang	520.410.000	287.640.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100.00	%	SEKRETARIAT DPRD			5.297.189.645	4.077.110.409	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	100.00	persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	50.000.000	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	100.00	persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.00	Paket	417.627.845	250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100.00	persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	473.413.980	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100.00	persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	323.617.400	150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	100.00	persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00	Dokumen	339.944.180	257.646.268	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	100.00	persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	2.151.180.240	2.775.327.040	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	Laporan	1.541.406.000	394.137.101	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100.00	%	SEKRETARIAT DPRD			3.063.167.270	875.000.000	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100.00	persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.00	Unit	1.929.154.315	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100.00	persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50.00	Unit	878.332.835	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Ged Kantr/Bangunan Lainnya	100.00	persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25.00	Unit	255.680.120	550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12.00	bulan	SEKRETARIAT DPRD			2.504.332.256	2.606.886.256	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang terpakai	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	Laporan	20.000.000	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	167.162.256	167.162.256	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Honorarium tenaga kebersihan, pengemudi dan pantry terbayar	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	2.317.170.000	2.429.724.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100.00	%	SEKRETARIAT DPRD			2.144.272.760	1.603.346.460	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100.00	persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47.00	Unit	938.500.000	750.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	100.00	persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248.00	Unit	340.014.560	140.014.560	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpelihara	100.00	persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	561.044.000	500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.00	Unit	304.714.200	213.331.900	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terbit Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	50.00	orang/bulan	SEKRETARIAT DPRD			44.516.751.645	43.141.959.909		
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Laporan Keuangan DPRD	12.00	bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50.00	Orang/Bulan	43.508.088.950	42.217.737.654	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100.00	bulan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6.00	Paket	1.008.662.695	924.222.255	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terbit Pelayanan Administrasi DPRD	100.00	persen	SEKRETARIAT DPRD			1.200.000.000	1.250.000.000		
X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100.00	persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4.00	Paket	1.200.000.000	1.250.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)</b>									<b>27.003.436.010</b>	<b>25.425.524.034</b>	
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>									<b>24.955.986.010</b>	<b>24.065.524.034</b>	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00	%				2.317.020.000	1.830.000.000		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100.00	%	Tersedianya perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang			1.726.030.000	1.215.000.000		
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1.00	Kegiatan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2.00	Berita Acara	133.300.000	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1.00	Kegiatan							
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1.00	Kegiatan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1.00	Berita Acara	94.250.000	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1.00	Kegiatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1.00	Berita Acara	317.450.000	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1.00	Dokumen	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800.00	Usulan	132.180.000	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
			Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	1.00	Dokumen							
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2.00	Dokumen	1.048.850.000	930.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
			Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD	1.00	Dokumen							
			Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	1.00	Dokumen							
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	%	Terpenuhinya data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang			181.950.000	195.000.000		
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	1.00	Dokumen	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1.00	Masukan	88.000.000	180.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1.00	Dokumen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1.00	Buku	93.950.000	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100.00	%	Perencanaan pembangunan daerah yang terkendali dan terevaluasi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah			409.040.000	420.000.000		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2.00	Laporan	147.200.000	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5.00	Laporan	261.840.000	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	
			Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	4.00	Dokumen							
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00	%				7.794.837.500	6.113.149.000		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00	%						
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00	%						
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00	%	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			2.044.350.000	1.835.000.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.00	Dokumen	383.460.000	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1.00	aplikasi						
			Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.00	Laporan	40.910.000	160.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.00	Dokumen	846.580.000	850.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen Renum TMMD	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1.00	Dokumen						
			Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	1.00	Dokumen						
			Jumlah Perencanaan Kegiatan TOT / Bintek PPRG	1.00	Kegiatan						
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah LP2KD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.00	Perangkat Daerah	773.400.000	725.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.00	Dokumen						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1.00	Dokumen						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Movev PUG di Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1.00	Dokumen						
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100.00	%	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang perekonomian dan SD			1.880.800.000	1.628.149.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.00	Dokumen	1.121.000.000	600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	1.00	Dokumen						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Wisata Berbasis Potensi Lokal	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.00	Perangkat Daerah	302.300.000	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.00	Dokumen	279.500.000	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.00	Perangkat Daerah	178.000.000	28.149.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Laporan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.00	Dokumen	2.180.000.000	750.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen RISPK	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Reviu RAD AMPL	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.00	Perangkat Daerah	585.187.500	800.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen Fasilitas Pokja PKP dan Forum PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	1.00	Dokumen						
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPALTD	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.00	Dokumen	594.500.000	450.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	1.00	Dokumen						
			Jumlah Dokumen Kajian Sosial dan Ekonomi Semarang Lama	1.00	Dokumen						
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.00	Perangkat Daerah	510.000.000	650.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen Fasilitas Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1.00	Dokumen						
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100.00	%				14.844.128.510	16.122.375.034	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100.00	%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100.00	%						
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	8.00	Dokumen	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda beserta evaluasi kerjanya			14.991.560	8.500.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	537.480	1.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen RTP Bappeda	1.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.014.400	1.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.534.400	2.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.014.400	1.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3.534.400	2.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	1.356.480	500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1.00	Dokumen						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	1.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100.00	%	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Bappeda			12.465.738.490	14.714.924.616	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74.00	Orang/bulan	12.101.850.010	14.339.024.616	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.00	Dokumen	363.000.000	375.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	296.160	500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	296.160	200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	296.160	200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3.00	Kegiatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Bappeda			92.990.680	20.000.000	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi	6.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.00	Orang	92.990.680	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	%	Terpentuhnya pelayanan administrasi umum dan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bappeda			1.473.365.488	831.450.418	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	150.194.597	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.00	Paket	51.180.000	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.00	Paket	67.456.039	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.00	Paket	47.113.098	33.450.418	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang Berkunjung	6000.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.00	Laporan	63.900.000	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	210.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00	Laporan	489.420.000	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	8.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	Dokumen	604.101.754	73.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00	%	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bappeda			154.920.692	107.500.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00	Laporan	10.440.000	7.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Laporan	144.480.692	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100.00	%	Terpeliharanya aset kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bappeda			642.121.600	440.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.313.180	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29.00	Unit	368.502.820	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	233.305.600	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>								<b>167.934.451.827</b>	<b>190.172.965.000</b>	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>								<b>167.934.451.827</b>	<b>190.172.965.000</b>	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>63.203.258.455</b>	<b>77.361.003.000</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>3.253.359.150</b>	<b>8.734.003.000</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Persentase SILPA Terhadap APBD	1.22	%						
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100.00	%	Dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan			3.253.359.150	8.734.003.000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA PPAS	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2.00	Dokumen	139.117.766	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2.00	Dokumen	153.317.950	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100.00	persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51.00	Dokumen	74.575.433	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Persentase RKA perubahan terverifikasi	100.00	persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51.00	Dokumen	62.835.410	375.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100.00	persen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50.00	Dokumen	32.112.600	309.003.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100.00	persen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100.00	persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50.00	Dokumen	14.174.910	300.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100.00	persen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2.00	dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.00	Dokumen	570.935.347	300.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2.00	dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.00	Dokumen	435.153.667	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pegeresan anggaran dan perwal untuk ASB	3.00	dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12.00	Dokumen	242.919.203	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12.00	Dokumen	1.125.029.012	4.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Persentase Anggaran Belanja Daerah	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.00	Dokumen	130.122.042	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1.00	Dokumen	110.698.860	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200.00	Orang	162.366.950	1.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100.00	%	Penyerapan anggaran dapat maksimal			2.357.850.765	7.300.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Koordinasi	22.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	522.00	Dokumen	550.562.013	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Laporan Harian Kasda	6300.00	lembar						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12.00	bulan						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Laporan Pendapatan Transfer	52.00	dokumen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Bendel SPD	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250.00	Dokumen	215.636.850	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100.00	persen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100.00	persen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2.00	Dokumen	169.669.850	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100.00	persen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3.00	Dokumen	162.392.310	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.00	Dokumen	146.409.500	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2.00	dokumen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1.00	dokumen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah SP2D di selesaikan	17222.00	dokumen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24.00	Laporan	137.014.480	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	2.00	dokumen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah dan usaha pengembalian kerugian	12.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20.00	Dokumen	312.148.240	1.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1571.00	Dokumen	147.051.075	1.100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Terealisasinya belanja BRUS dan JKKJKM dan THT	1456.00	dokumen						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	765.00	Orang	516.966.447	1.200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100.00	%	OPD dapat menyusun LK tepat waktu			2.565.029.200	8.500.000.000	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12.00	Laporan	51.242.500	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Persentase hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja pembiayaan, dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12.00	Dokumen	135.215.500	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12.00	dokumen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12.00	Laporan	370.929.500	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Persentase laporan keuangan SKPD, BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100.00	persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12.00	Laporan	463.096.500	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2.00	dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4.00	Dokumen	335.491.500	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100.00	persen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.00	Dokumen	28.693.500	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3.00	Dokumen	127.665.500	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah data yang dikelola	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.00	Dokumen	75.957.200	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1.00	dokumen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.00	Dokumen	259.189.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sidur Keuangan Daerah terkelola	1.00	dokumen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.00	Dokumen	341.596.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1.00	dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	350.00	Orang	180.771.500	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan yang dilakukan	2.00	kegiatan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	40.00	Lembaga	195.181.000	500.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100.00	%	Penyaluran bantuan Pemerintah Kota dapat berjalan dengan lancar			55.027.019.340	52.827.000.000	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Monitoring dan evaluasi SKPD penerima bantuan provinsi	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.00	Laporan	27.019.340	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.00	Laporan	55.000.000.000	52.827.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Legalitas Aset	80.48	%				4.432.705.506	7.809.300.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Manajemen Aset	100.00	%	Aset dapat terurus dan teratur dengan baik			4.432.705.506	7.809.300.000	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga		Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1.00	dokumen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1.00	Dokumen	277.830.000	270.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2.00	dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.00	Dokumen	128.000.000	135.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3.00	dokumen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.00	Dokumen	168.000.000	289.300.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Persentase penatausahaan aset daerah	100.00	persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4.00	Laporan	372.216.600	460.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Persentase BMD baru yang diinventarisir	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4.00	Laporan	94.520.000	180.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah aset yang telah bersertifikat	20615.00	sertifikat	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10.00	Laporan	1.436.344.097	4.600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah		Persentase BMD yang dinilai	100.00	persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12.00	Laporan	1.036.612.190	750.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah pengawasan dan pengendalian	10.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	15.00	Laporan	157.563.608	165.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17.00	Dokumen	625.394.011	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102.00	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200.00	Orang	136.225.000	360.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100.00	%				100.298.487.866	105.002.662.000	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100.00	%						
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100.00	%						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8.00	dokumen	Dokumen dan laporan perencanaan kinerja dapat tersusun dengan baik			35.824.480	190.500.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00	Dokumen	6.486.400	65.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	6.383.510	17.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	7.619.420	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	4.745.810	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	7.619.420	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00	Laporan	2.969.920	33.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100.00	%	Administrasi keuangan berjalan baik			12.643.976.046	13.992.777.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84.00	Orang/bulan	12.189.075.406	13.186.777.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	454.300.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	300.320	3.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	300.320	3.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100.00	%	Administrasi pelayanan berjalan baik			126.213.309	680.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.00	Orang	126.213.309	680.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100.00	%	sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan			1.936.892.444	3.259.262.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	15.418.188	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	102.740.854	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00	Paket	32.731.556	65.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	170.248.333	90.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	6.737.600	15.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25.00	jumlah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.00	Dokumen	5.820.180	45.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	5500.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	149.00	Laporan	179.725.000	220.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1693.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.00	Laporan	1.000.831.000	1.600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100.00	persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2898.00	Dokumen	5.998.860	55.125.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.00	Dokumen	416.640.873	764.137.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	tersedia peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup			67.044.200	400.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	80.00	unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.00	Unit	67.044.200	400.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Kebutuhan jasa kantor tercukupi			84.800.006.400	84.601.000.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.00	Laporan	200.000	1.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	84.139.506.400	84.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	660.300.000	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100.00	%	aset dapat terpelihara dengan baik			688.530.987	1.879.123.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	35.326.170	44.123.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46.00	Unit	433.041.441	750.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250.00	unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50.00	Unit	4.035.960	80.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		pemeliharaan tanaman-tanaman	20.00	unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	24.00	Unit	49.480.137	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	64.871.000	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12.00	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128.00	Unit	101.776.279	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>								<b>97.046.778.157</b>	<b>93.612.969.728</b>	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>								<b>97.046.778.157</b>	<b>93.612.969.728</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00	%				28.334.173.757	15.962.382.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00	%	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			28.334.173.757	15.962.382.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	8.00	kajian/NA	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8.00	Dokumen	707.122.891	585.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	1500.00	wajib pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8.00	Laporan	4.008.229.871	3.143.012.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	2.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Waiib Paiaak Daerah berprestasi	1.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	3.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	4.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah validasi data pajak daerah	1050.00	NPWPD	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10.00	Laporan	3.859.903.422	407.528.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan pendapatan	12.00	dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12.00	Laporan	4.693.658.080	2.612.461.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	2.00	jenis						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Pengembangan SDM dan sistem informasi	2.00	jenis						BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah laporan supervisi tentang sistem informasi pendapatan daerah secara elektronik	12.00	dokumen						BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	1020.00	wajib pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000.00	Obyek Pajak	260.636.731	1.271.193.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	18150.00	wajib pajak						BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15750.00	SKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12.00	Dokumen	3.180.148.377	2.523.666.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	589600.00	SPPT						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah dokumen SPPT PBB yang tersampaikan ke wajib pajak	589600.00	SPPT						BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	12.00	kegiatan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12.00	Layanan	4.004.481.685	560.629.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	7875.00	SKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10.00	Dokumen	1.042.276.590	305.646.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	1.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	1050.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12.00	Dokumen	5.190.147.420	1.959.049.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 kecamatan dan 177 kelurahan	109140.00	SPPT						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	400000.00	lembar						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	5.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150.00	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12.00	Dokumen	30.000.020	108.756.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	165.00	SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10.00	Dokumen	939.665.250	2.190.466.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para wajib pajak	19.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	9.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.00	Laporan	417.903.420	294.976.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penerapan pendapatan daerah	2.00	kegiatan						BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00	%				68.712.604.400	77.650.587.728	
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00	%						
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00	%						
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00	dokumen	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			55.411.980	40.176.690	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	13.821.000	19.624.632	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen RTP Bapenda	1.00	Dokumen						BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	9.145.180	3.475.949	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	9.093.800	3.370.303	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	8.313.800	4.161.132	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	7.430.200	4.159.614	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	7.608.000	5.385.060	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	%	Tercapainya administrasi keuangan SKPD			57.451.142.743	67.847.215.765	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116.00	Orang/bulan	56.349.563.143	66.545.200.926	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.00	Dokumen	1.097.346.000	1.289.872.100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	1.411.200	3.700.902	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	1.411.200	4.490.810	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.411.200	3.951.027	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00	%	Tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah			87.042.170	52.442.295	
X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1.00	Laporan	50.620.280	32.190.598	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.00	Dokumen	36.421.890	20.251.697	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00	%	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah			260.073.005	323.353.313	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	1.00	paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.00	Paket	102.925.505	110.714.483	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, BinteK dan Workshop	48.00	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.00	Orang	157.147.500	212.638.830	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	%	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah			3.504.900.784	4.142.047.767	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	70.046.760	66.386.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45.00	Paket	89.878.109	84.998.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90.00	Paket	184.168.209	484.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25.00	Paket	852.351.307	968.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase langganan Surat Kabar	100.00	persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00	Dokumen	15.000.000	26.620.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2535.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72.00	Laporan	52.650.000	62.390.625	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.00	Laporan	1.051.281.000	1.195.353.325	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Penatausahaan Arsip	1.00	kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00	Dokumen	37.137.960	44.299.817	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.00	Dokumen	1.152.387.439	1.210.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			1.669.500.259	587.546.814	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel kantor tersedia	3.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.00	Unit	631.974.810	281.000.720	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.00	Unit	1.031.705.269	301.072.200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	7.00	buku	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	5.820.180	5.473.894	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00	%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			2.480.912.647	2.410.133.843	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		surat menyurat kedinasan	19360.00	dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00	Laporan	144.000.000	144.514.656	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	632.623.440	628.539.481	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168.00	Laporan	63.586.457	69.249.837	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa pelayanan umum kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.00	Laporan	1.640.702.750	1.567.829.869	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	%	Tersedianya pemeliharaan aset SKPD			3.203.620.812	2.247.671.241	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	43.737.580	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	131.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131.00	Unit	1.064.380.710	1.158.609.031	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	135.00	unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150.00	Unit	13.318.668	15.765.235	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520.00	Unit	564.089.510	513.634.127	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.00	jenis	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42.00	Unit	7.294.444	11.513.509	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00	Unit	1.518.219.300	504.411.759	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								<b>35.300.055.466</b>	<b>45.044.769.000</b>	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>								<b>26.694.710.466</b>	<b>22.008.528.000</b>	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								9.674.001.291	1.153.963.000	
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43	Persen						
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00	Persen						
			Persentase akurasi data kepegawaian	99.00	Persen						
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00	Persen						
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00	Persen						
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19	Persen						
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00	Persen						
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan dengan baik			2.235.951.478	337.610.235	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah peserta kegiatan	300.00	Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.00	Dokumen	51.405.520	21.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00	Buku						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah peserta seleksi CASN	12000.00	Orang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.00	Dokumen	1.517.957.100	150.510.235	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150.00	Orang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	753.00	Dokumen	417.997.381	93.900.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743.00	Surat Keputusan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3.00	aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.00	Dokumen	125.026.429	12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00	Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000.00	Dokumen	123.565.048	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Layanan pengurusan kartu istri	1000.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Layanan pengurusan kartu suami	1000.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Layanan update data pegawai	10000.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Pengelolaan arsip pegawai	10000.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Layanan kartu pegawai	300.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Layanan cetak id card	1150.00	buah						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3.00	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan dengan baik			3.147.966.060	240.143.154	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN		Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00	Kali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350.00	Dokumen	578.084.000	28.093.154	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Mutasi Intern PNS	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Perubahan Jabatan ASN	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Tes Mutasi Masuk PNS	3.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00	Kali	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300.00	Dokumen	465.387.770	51.970.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN		Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300.00	Dokumen	2.104.494.290	160.080.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penilaian mandiri sistem merit	1.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Tim Penilai kinerja PNS	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Uji kompetensi JPT Pratama	1.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Pelantikan struktural	3.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Uji Kompetensi Administrasi	4.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2.00	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan dengan baik			2.794.495.753	339.038.311	
			Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1.00	Kegiatan						
			Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1.00	Kegiatan						
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00	Orang	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500.00	Orang	1.175.733.813	168.728.693	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah peserta motivaiton achievment/ capacity building	100.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00	Buku						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00	Buku						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Penyelesaian ijin belajar	12.00	Bulan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30.00	Orang	1.242.565.450	40.309.618	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Pelaksanaan UKPPI	1.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00	Orang					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pelaksanaan ujian dinas	1.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karir PNS	1.00	Kegiatan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100.00	Orang	266.577.960	80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Kenaikan jabatan fungsional	3.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pembekalan jabatan fungsional	2.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Update data jabatan fungsional	3.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00	Orang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300.00	Orang	109.618.530	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00	Orang					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00	Orang					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00	Orang					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4.00	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan dengan baik			1.495.588.000	237.171.300	
			Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	1.00	Kegiatan						
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.00	Dokumen	285.220.276	57.900.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Monev penilaian kinerja ASN	1.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Pelaksanaan konseling	12.00	Bulan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300.00	Orang	771.598.685	97.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Pelaksanaan senam pegawai	22.00	Kali						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00	Buku						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00	Piagam						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00	berkas						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00	Orang					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Sosialisasi TPP	2.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Verifikasi e-cuti	250.00	berkas					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00	berkas					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN		Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00	Kegiatan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	900.00	Orang	350.864.210	63.910.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pelepasan haji	1.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Bimbingan mental	10.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Pembekalan disiplin	2.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Sosialisasi LHKASN	2.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Sosialisasi LHKPN	1.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00	Orang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12.00	Laporan	71.111.430	14.560.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00	Kasus					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00	Kegiatan					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
			Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00	Dokumen					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Pemrosesan ijin perceraian	28.00	Kasus	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25.00	Dokumen	16.793.399	3.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00	Persen				17.020.709.175	20.854.565.000	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00	Persen						
			Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00	Persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82.00	Nilai	Meningkatnya nilai SAKIP BKPP Kota Semarang			31.176.800	54.833.207	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	3.040.380	13.711.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00	Dokumen	5.717.290	7.192.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	5.717.290	7.056.400	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00	Dokumen	6.805.030	3.080.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00	Dokumen					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	5.717.290	2.812.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	Laporan	4.179.520	20.979.607	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5.00	Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan dengan baik			12.031.789.226	14.392.768.300	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00	Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84.00	Orang/bulan	11.672.312.466	14.011.536.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Belanja penunjang tugas ASN	12.00	Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	357.095.000	365.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	596.480	6.455.300	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	695.200	4.947.200	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.090.080	4.829.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1.00	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik			137.585.991	40.501.200	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta bintek internal	115.00	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.00	Orang	137.585.991	40.501.200	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8.00	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik			1.674.090.466	2.797.953.693	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12.00	Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	55.585.170	59.615.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12.00	Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00	Paket	268.844.200	237.124.690	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12.00	Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	99.229.200	179.041.403	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12.00	Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	101.144.550	278.215.900	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12.00	Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.00	Dokumen	1.940.060	2.305.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.00	Laporan	100.732.500	307.651.200	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyediaan makanan dan minuman tamu	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00	Laporan	377.229.692	1.199.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12.00	Bulan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	Dokumen	669.385.094	535.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan dengan baik			106.837.850	600.698.800	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12.00	Bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20.00	Unit	106.837.850	600.698.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00	Kegiatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan dengan baik			1.894.145.407	1.738.119.200	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00	Laporan	459.402.759	474.919.200	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Laporan	329.057.848	374.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Perbaikan peralatan kerja	12.00	Bulan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Belanja penunjang tugas ASN	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00	Laporan	1.105.684.800	889.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4.00	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan dengan baik			1.145.083.435	1.229.690.600	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12.00	Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	40.313.180	56.437.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12.00	Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33.00	Unit	509.651.239	537.197.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12.00	Bulan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300.00	Unit	73.696.630	89.057.100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.00	Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1.00	Unit	521.422.386	546.998.200	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								<b>8.605.345.000</b>	<b>23.036.241.000</b>	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00	Persen				8.605.345.000	23.036.241.000	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan dengan baik			1.694.660.000	17.520.047.885	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00	Kegiatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3.00	Dokumen	68.573.020	50.877.900	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00	Kegiatan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3.00	Dokumen	289.336.880	115.590.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00	Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306.00	Orang	1.197.480.000	17.258.073.785	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Evaluasi Pasca Diklat	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.00	Dokumen	139.270.100	95.505.400	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00	Kegiatan						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan dengan baik			6.910.685.000	5.516.193.115	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00	Orang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8.00	Laporan	6.910.685.000	5.516.193.115	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00	Orang						BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)</b>								<b>27.003.436.010</b>	<b>25.425.524.034</b>	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								<b>2.047.450.000</b>	<b>1.360.000.000</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>								<b>2.047.450.000</b>	<b>1.360.000.000</b>	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.00	%	Terwujudnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			93.500.000	110.000.000	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.00	Laporan	93.500.000	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100.00	%	Terwujudnya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			471.400.000	170.000.000	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial		Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	6.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	6.00	Dokumen	471.400.000	170.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100.00	%	Terwujudnya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			840.800.000	550.000.000	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	6.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6.00	Dokumen	420.400.000	220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6.00	Dokumen	420.400.000	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3.00	Dokumen						
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100.00	%	Terfasilitasinya pengembangan inovasi dan teknologi untuk dimanfaatkan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			641.750.000	530.000.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	1.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.00	Dokumen	255.000.000	170.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	1.00	Dokumen						
			Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	1.00	Kegiatan						
			Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	1.00	Kegiatan						
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2.00	Laporan	106.250.000	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1.00	Dokumen						
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2.00	Edisi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4.00	Laporan	255.000.000	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
			Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	1.00	Dokumen						
			Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	2.00	Kegiatan						
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	1.00	Dokumen						
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1.00	Laporan	25.500.000	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>								<b>27.889.644.124</b>	<b>27.419.910.000</b>	
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>								<b>27.889.644.124</b>	<b>27.419.910.000</b>	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00	leveling				2.949.636.853	9.240.748.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal	100.00	Persentase	Terselenggaranya Pengawasan Internal			2.494.124.703	8.040.748.000	
			Persentase Tindak Lanjut Temuan	87.00	Persentase						
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengawasan kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	50.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48.00	Laporan	236.374.169	540.748.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengawasan keuangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100.00	Laporan	498.715.364	1.300.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Reviu Laporan Kinerja Kota Semarang	1.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2.00	Laporan	307.628.600	600.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Reviu Laporan Keuangan Kota Semarang	1.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1.00	Laporan	60.040.000	100.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal (RIKMA BPKP, Saber Pungli dan Rakorwastias)	15.00	Kegiatan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15.00	Kesepakatan	1.142.515.135	5.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP		Jumlah kegiatan TL LHP, Rakorwas dan Larwasda	15.00	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	15.00	Dokumen	248.851.435	500.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100.00	persentase	Terselenggaranya Pengawasan dengan tujuan tertentu			455.512.150	1.200.000.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	2.00	laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2.00	Laporan	107.029.950	200.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan pemeriksaan khusus, kasus dan aduan yang ditangani	100.00	laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100.00	Laporan	348.482.200	1.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Maturitas SPIP	3.04	nilai				5.025.711.670	2.325.000.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100.00	persentase	Terselenggaranya perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan			363.834.420	700.000.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang pengawasan yang berhasil disusun (Program kerja berbasis resiko, Peta auditan RR dan RTP Inspektorat)	3.00	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3.00	Rekomendasi	68.421.400	200.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang berhasil disusun (SPIP, monitoring RR dan RTP Tk. Kota, WBS / benturan Kepentingan)	3.00	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3.00	Rekomendasi	295.413.020	500.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Indeks penerapan manajemen risiko	2.00	Indeks	Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi			4.661.877.250	1.625.000.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan konsultasi ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	51.00	kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51.00	perangkat daerah	696.330.000	500.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi PMPRB dan ZI	4.00	Kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35.00	perangkat daerah	485.151.100	225.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (SPAK, Laporan Gratifikasi, Korsupgah, LHKASN, UPG)	5.00	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5.00	Kegiatan	3.344.596.750	600.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas	1.00	Kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64.00	perangkat daerah	135.799.400	300.000.000	INSPEKTORAT
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				19.914.295.601	15.854.162.000	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00	%						
			persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00	%						
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15.00	dokumen	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi			32.174.500	450.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renja, Renstra, RKT, IKU, PK (Murni dan Perubahan)	3.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.00	Dokumen	13.544.580	200.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Murni	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	5.414.580	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	5.414.580	50.000.000	INSPEKTORAT

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Murni	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.707.290	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.707.290	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	2.386.180	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100.00	%	Terselenggaranya administrasi keuangan			12.746.237.804	11.657.594.548	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	14.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75.00	Orang/bulan	12.451.857.124	10.907.594.548	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	288.040.000	600.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan	12.00	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00	Dokumen	3.617.280	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.00	Laporan	2.209.000	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan prognosis	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.00	Dokumen	514.400	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00	%	Terselenggaranya diklat dan bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat			1.844.767.600	1.000.000.000	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Persentase APIP yang mengikuti Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	100.00	persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	225.00	Orang	1.160.777.600	500.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225.00	Orang	683.990.000	500.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	%	Terlaksananya administrasi umum			2.806.354.980	1.606.567.452	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27.00	Paket	184.136.639	100.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75.00	Paket	89.008.516	100.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17.00	Paket	210.257.745	100.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	10.00	Buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00	Dokumen	5.982.068	25.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	1200.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200.00	Laporan	245.700.000	250.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	Laporan	876.938.000	681.567.452	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang dikelola	350.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350.00	Dokumen	323.220.904	100.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung SPBE pada SKPD	3.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	350.00	Dokumen	871.111.108	250.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	Tersedianya fasilitas kedinasan , pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			1.832.255.527	500.000.000	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	5.00	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.00	Unit	1.326.386.217	0	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan sarana prasarana mebeleur	3.00	Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30.00	Unit	137.815.443	250.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	3.00	Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70.00	Unit	368.053.867	250.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			18.780.000	15.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	18.780.000	15.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	%	Terselenggaranya pemeliharaan aset			633.725.190	625.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan dinas jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.668.180	40.000.000	INSPEKTORAT

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	36.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36.00	Unit	348.386.120	500.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah pemeliharaan mebeleur	3.00	jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250.00	Unit	10.530.800	10.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	3.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120.00	Unit	157.470.605	50.000.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70.00	Unit	80.669.485	25.000.000	INSPEKTORAT
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG SELATAN</b>								<b>38.419.238.041</b>	<b>38.770.476.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>38.419.238.041</b>	<b>38.770.476.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)</b>	<b>92.00</b>	<b>persen</b>				<b>2.543.940.100</b>	<b>2.928.314.000</b>	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	angka	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			95.446.800	90.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.00	dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.00	Dokumen	95.446.800	90.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.538.850.000	1.842.850.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.538.850.000	1.842.850.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	12.00	kegiatan						KECAMATAN SEMARANG SELATAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BULUSTALAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BARUSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN RANDUSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MUGASSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PLEBURAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN WONODRI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PETERONGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN LAMPER LOR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN LAMPER KIDUL
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal			909.643.300	995.464.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4.00	kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	909.643.300	995.464.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>98.00</b>	<b>persen</b>				<b>23.836.928.000</b>	<b>22.734.467.000</b>	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.00	kegiatan	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang			13.222.800.000	22.444.467.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	363.00	kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	100.950.000	119.525.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	16.00	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit	10.912.850.000	11.935.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN BULUSTALAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN BARUSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN RANDUSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN MUGASSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PLEBURAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN WONODRI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN PETERONGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN LAMPER LOR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN LAMPER KIDUL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.00	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas	2.209.000.000	10.389.942.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BULUSTALAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BARUSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN RANDUSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MUGASSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PLEBURAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN WONODRI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PETERONGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN LAMPER LOR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN LAMPER KIDUL
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pengembangan Kampung Tematik produktif	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8.00	dokumen	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan			10.614.128.000	290.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	10.564.550.000	235.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BULUSTALAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BARUSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN RANDUSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MUGASSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PLEBURAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WONODRI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PETERONGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN LAMPER LOR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN LAMPER KIDUL
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00	Laporan	49.578.000	55.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2.00	kegiatan						KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				87.930.000	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52.00	angka	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban			87.930.000	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.00	Laporan	87.930.000	0	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				83.000.000	75.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00	kegiatan	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat			83.000.000	75.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60.00	Orang	83.000.000	75.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				11.867.439.941	13.032.695.000	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00	%						
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	dokumen	Terwujudnya laporan kinerja OPD			18.999.200	36.000.000	
			Jumlah Dokumen pelaporan	2.00	dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	2.222.600	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
			Jumlah Dokumen RTP	1.00	dokumen						KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.200.000	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	2.760.700	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.200.000	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3.320.700	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	2.121.600	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	2.173.600	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD			10.664.562.841	11.599.195.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63.00	Orang/bulan	10.346.738.041	11.189.494.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	311.040.000	392.581.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	2.261.600	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.00	Laporan	2.261.600	5.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	2.261.600	5.470.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100.00	Persen	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan			375.442.400	489.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	11.811.900	22.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	45.900.000	80.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	40.637.900	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1.00	Paket	39.746.600	32.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2833.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	61.800.000	90.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	250.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	78.946.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	Dokumen	96.600.000	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan			31.500.000	150.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya	1.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00	Unit	31.500.000	150.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan			224.280.000	178.500.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	109.500.000	138.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	114.780.000	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	persen	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD			552.655.500	580.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	40.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36.00	Unit	235.900.000	275.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Gedung	1.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11.00	Unit	74.700.000	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	32.965.500	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	1.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	209.090.000	95.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG UTARA</b>								<b>42.868.026.091</b>	<b>40.925.052.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>42.868.026.091</b>	<b>40.925.052.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	<b>92.00</b>	<b>persen</b>				<b>3.066.793.880</b>	<b>3.542.446.000</b>	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	65.00	Kegiatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			3.000.000	15.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.00	Dokumen	3.000.000	15.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			3.063.793.880	3.527.446.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.00	Laporan	3.063.793.880	3.527.446.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00	Persen						KECAMATAN SEMARANG UTARA
			Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00	Persen						KECAMATAN SEMARANG UTARA
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PLOMBOKAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN BULU LOR	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.00	Laporan		KELURAHAN PURWOSARI	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KUNINGAN	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN PANGGUNG LOR	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.00	Laporan		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN BANDARHARJO	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TANJUNG MAS	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN DADAPSARI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00	Persen					27.873.761.780	25.982.770.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321.00	Kegiatan		Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			12.651.561.780	25.773.495.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	105.00	Kegiatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	53.561.780	70.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	15.00	Kegiatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit	10.948.000.000	10.856.200.000	KELURAHAN DADAPSARI
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KECAMATAN SEMARANG UTARA
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit			KELURAHAN PLOMBOKAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN BULU LOR
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN PURWOSARI
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN KUNINGAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN PANGGUNG LOR
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN BANDARHARJO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.00	Kegiatan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas	1.650.000.000	14.847.295.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PLOMBOKAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BULU LOR
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PURWOSARI
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KUNINGAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PANGGUNG LOR
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BANDARHARJO
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TANJUNG MAS



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.120.420	2.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	253.600	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Semarang Utara			11.372.987.491	10.578.236.642	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66.00	Orang/bulan	10.830.605.091	10.334.931.642	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.00	Dokumen	539.560.000	243.305.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
			Pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00	Persen						KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	201.600	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	2.419.200	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	201.600	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	Persen	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Semarang Utara			162.808.850	198.500.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik yang tersedia	17.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17.00	Paket	4.186.200	6.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	13.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00	Paket	82.758.880	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Logistik Kantor	48.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48.00	Paket	14.846.770	23.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan	5.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket	2.517.000	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Fasilitas kunjungan tamu	65.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48.00	Laporan	41.400.000	88.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat yang terselenggara	70.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.00	Laporan	17.100.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Semarang Utara			177.000.000	160.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	177.000.000	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Semarang Utara			127.218.030	194.100.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.00	Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.00	Unit	99.327.180	81.600.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya	14.00	Jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.00	Unit	20.000.000	45.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	2.00	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	26.00	Unit	7.890.850	67.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG BARAT</b>								<b>61.368.563.101</b>	<b>60.318.890.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>61.368.563.101</b>	<b>60.318.890.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	Persen				4.079.931.398	4.525.083.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00	Angka	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			2.850.778.023	2.850.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	2.850.778.023	2.850.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			1.210.128.452	1.453.083.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.210.128.452	1.453.083.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4.00	Kegiatan						KECAMATAN SEMARANG BARAT
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	100.00	Persen						KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN NGEPLAK SIMONGAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN MANYARAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KRAPYAK
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TAMBAKHARJO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KALIBANTENG KULON
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN GISIKDRONO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN BONGSARI
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN BOJONGSALAMAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SALAMAN MLOYO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN CABEAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KARANGAYU
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KROBOKAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TAWANGSARI
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TAWANGMAS
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			19.024.923	222.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	5.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	19.024.923	222.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	Persen				39.716.555.539	38.654.600.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00	Kegiatan	Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan			20.111.134.978	38.514.600.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.00	Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.00	Lembaga Kemasyarakatan	76.280.480	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	16.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit	16.943.000.000	19.468.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit			KELURAHAN NGEPLAK SIMONGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN MANYARAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN KRAPYAK
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN TAMBAKHARJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN KALIBANTENG KULON
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN GISIKDRONO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit			KELURAHAN BONGSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN BOJONGSALAMAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN SALAMAN MLOYO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN CABEAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN KARANGAYU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN KROBOKAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN TAWANGSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN TAWANGMAS
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	107.00	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.00	Pokmas / Ormas	3.091.854.498	18.946.600.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MANYARAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KRAPYAK
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TAMBAKHARJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALIBANTENG KULON
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN GISIKDRONO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BONGSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BOJONGSALAMAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SALAMAN MLOYO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN CABEAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGAYU
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KROBOKAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TAWANGSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TAWANGMAS
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00	Dokumen	Meningkatkan Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan			19.605.420.561	140.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	17.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	0.00	Lembaga Kemasyarakatan	19.595.900.472	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MANYARAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KRAPYAK
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TAMBAKHARJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALIBANTENG KULON

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GISIKDRONO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BONGSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BOJONGSALAMAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SALAMAN MLOYO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN CABEAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KARANGAYU
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KROBOKAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TAWANGSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TAWANGMAS
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	16.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	9.520.089	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	Kelurahan						KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	Persen				14.232.061	20.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20.00	Angka	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani			14.232.061	20.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.00	Laporan	14.232.061	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	Persen				84.043.922	40.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00	Angka	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			84.043.922	40.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.00	Orang	84.043.922	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen				17.473.800.181	17.079.207.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah			11.291.637	29.500.000	
			Dokumen pelaporan	2.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	1.566.286	4.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
			Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang Barat	1.00	Dokumen						KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	1.735.291	4.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	2.114.331	4.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	2.091.788	4.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.895.173	4.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	1.151.290	3.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	737.478	3.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	Dokumen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan			15.585.787.196	15.809.500.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80.00	Orang/bulan	14.725.508.393	15.000.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	857.000.000	800.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan akhir tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	1.262.093	3.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	1.008.355	3.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.008.355	3.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00	Bulan	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			390.545.824	600.207.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	68.270.200	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	50.850.465	45.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	45.250.104	35.207.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	28.777.404	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	100.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	58.651.616	60.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	69.650.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Jenis	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dokumen	69.096.035	300.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			508.840.275	200.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya	5.00	Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	337.565.687	140.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan Kantor	5.00	Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00	Unit	171.274.588	60.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran			201.300.616	200.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	163.887.840	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Laporan	37.412.776	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	Persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran			776.034.633	240.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	58.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58.00	Unit	587.051.950	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Gedung	2.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	130.570.585	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	36.194.038	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	22.218.060	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG TIMUR</b>								<b>41.634.104.531</b>	<b>41.507.726.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>41.634.104.531</b>	<b>41.507.726.000</b>	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen				3.080.253.499	3.112.757.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00	angka	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			70.607.920	40.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	70.607.920	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	persen	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			2.005.048.104	2.125.600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100.00	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	2.005.048.104	2.125.600.000	KELURAHAN KEMIJEN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KECAMATAN SEMARANG TIMUR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN REJOMULYO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MLATIBARU
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MLATIHARJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KEBONAGUNG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BUGANGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN SARIREJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN REJOSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KARANGTURI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			1.004.597.475	947.157.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	1.004.597.475	947.157.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	persen				25.385.200.000	24.545.900.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391.00	kegiatan	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.422.000.000	24.271.900.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	391.00	angka	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94.00	Lembaga Masyarakat	65.000.000	68.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatihario	8.00	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit	11.167.000.000	12.517.225.000	KELURAHAN MLATIHARJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.00	Unit			KECAMATAN SEMARANG TIMUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN KEMIJEN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN REJOMULYO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN MLATIBARU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN KEBONAGUNG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN BUGANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN SARIREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN REJOSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit			KELURAHAN KARANGTURI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	24.00	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	2.190.000.000	11.686.675.000	KELURAHAN REJOMULYO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KECAMATAN SEMARANG TIMUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KEMIJEN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MLATIBARU
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MLATIHARJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KEBONAGUNG
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BUGANGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SARIREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN REJOSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGTURI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	94.00	dokumen	Terwujudnya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	11.963.200.000			274.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	11.913.200.000	174.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KEMIJEN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN REJOMULYO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MLATIBARU
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MLATIHARJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KEBONAGUNG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BUGANGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SARIREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN REJOSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KARANGTURI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00	Laporan	50.000.000	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
			Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	kelurahan						KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				35.000.000	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00	angka	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan			35.000.000	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.00	angka	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.00	Laporan	35.000.000	0	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				88.300.000	25.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	kegiatan	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan			88.300.000	25.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200.00	Orang	88.300.000	25.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				13.045.351.032	13.824.069.000	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen pelaporan	10.00	dokumen				25.058.043	17.200.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	4.141.123	3.500.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
			Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	4.702.950	2.700.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4.261.150	2.400.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumrn	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	4.702.950	2.800.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	4.261.150	2.800.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	1.079.360	1.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	1.909.360	2.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen	Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD			10.877.152.083	12.053.493.723	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66.00	Orang/bulan	10.343.477.531	11.417.826.212	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	528.560.000	630.500.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	3.157.760	3.767.511	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	1.060.320	700.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	896.472	700.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Tersedianya Administrasi Umum SKPD			851.408.680	743.375.277	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	8.000.000	7.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	301.500.395	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	48.080.755	22.375.277	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00	Paket	12.966.770	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2040.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	118.609.958	84.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.00	Laporan	182.930.474	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	179.320.328	300.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor			37.467.640	225.000.000		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.00	Unit	37.467.640	225.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			635.546.316	305.000.000		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	269.599.756	155.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.00	Laporan	365.946.560	150.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100.00	persen	Terwujudnya Pemeliharaan Aset Daerah			618.718.270	480.000.000		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	26.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26.00	Unit	177.717.970	180.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	122.032.710	150.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	220.898.860	115.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	98.068.730	35.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG TENGAH</b>									<b>51.222.538.734</b>	<b>50.587.221.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>									<b>51.222.538.734</b>	<b>50.587.221.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen				3.597.428.550	4.304.912.000		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	Peningkatan mutu pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan			24.620.000	25.300.000		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	24.620.000	25.300.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	persen	terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			2.462.923.381	3.081.212.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100.00	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan	2.462.923.381	3.081.212.000	KELURAHAN MIROTO	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN BRUMBUNGAN	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN JAGALAN	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN KRANGGAN	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN GABAHAN	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN KEMBANGSARI	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN SEKAYU	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN PANDANSARI	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN BANGUNHARJO	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN KAUMAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN PURWODINATAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN KARANGKIDUL
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN PEKUNDEN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan			KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			1.109.885.169	1.198.400.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.00	Laporan	1.109.885.169	1.198.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92.00	Persen				29.570.558.177	28.812.787.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00	kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan			29.394.982.756	28.603.787.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	220.00	angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	57.900.000	83.187.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	9.00	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit	15.400.000.000	16.718.220.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN MIROTO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN BRUMBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN JAGALAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN KRANGGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit			KELURAHAN GABAHAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN KEMBANGSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN SEKAYU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN PANDANSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN BANGUNHARJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN KAUMAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit			KELURAHAN PURWODINATAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN KARANGKIDUL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN PEKUNDEN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas	13.937.082.756	11.802.380.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MIROTO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BRUMBUNGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN JAGALAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KRANGGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
						URAIAN	TARGET	SATUAN				URAIAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN GABAHAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KEMBANGSARI
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SEKAYU
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PANDANSARI
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BANGUNHARJO
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KAUMAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PURWODINATAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGKIDUL
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PEKUNDEN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00	dokumen	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan			175.575.421	209.000.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	135.549.538	134.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00	Laporan	40.025.883	75.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan						KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.00	Persen				22.500.000	30.000.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34.00	angka	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani			22.500.000	30.000.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.00	Laporan	22.500.000	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00	persen				82.455.000	30.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan			82.455.000	30.000.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45.00	Orang	82.455.000	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	
	<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				17.949.597.007	17.409.522.000		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%							
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%							
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00	dokumen	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh			43.740.000	44.000.000		
			Jumlah Dokumen pelaporan	14.00	dokumen							

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	6.380.000	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	1.00	dokumen						KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	5.400.000	7.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	5.400.000	7.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.580.000	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3.580.000	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	berkas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Laporan	16.160.000	1.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	3.240.000	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8.00	dokumen	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh			16.602.419.734	16.110.522.000	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	Orang/bulan	15.892.729.734	15.294.304.707	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	Dokumen	700.020.000	810.217.293	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	3.660.000	3.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	6.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.00	Laporan	4.540.000	1.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.470.000	1.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	persen	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah			311.660.798	402.500.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	7.500.000	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	19.777.020	35.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.00	Paket	30.000.000	25.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.00	Paket	12.500.000	12.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.00	Laporan	110.000.000	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00	Laporan	43.500.000	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.00	Dokumen	88.383.778	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor			9.421.458	100.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	9.421.458	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya jasa kantor			205.000.000	220.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00	Laporan	140.000.000	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	9.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Laporan	65.000.000	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	persen	Terwujudnya pemeliharaan aset SKPD			777.355.017	532.500.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.00	Unit	332.390.820	350.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	209.972.602	75.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	2.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	89.991.595	57.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	145.000.000	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN GUNUNGPATI</b>								<b>54.152.779.933</b>	<b>53.710.675.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>54.152.779.933</b>	<b>53.710.675.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)</b>	<b>92.00</b>	<b>persen</b>				<b>3.753.773.720</b>	<b>3.861.894.000</b>	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2.00	Angka	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			55.750.000	55.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	55.750.000	55.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan			2.014.000.000	2.650.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	2.014.000.000	2.650.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KECAMATAN GUNUNGPATI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN SUKOREJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN SADENG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KANDRI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN SEKARAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PONGANGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KALISEGORO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN JATIREJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN NGLJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PATEMON
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN CEPOKO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN GUNUNGPATI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MANGUNSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PAKINTELAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PLALANGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN SUMURREJO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.684.023.720	1.156.894.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	1.684.023.720	1.156.894.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	Persen				32.259.967.518	32.190.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.00	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			19.772.167.518	31.790.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.00	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	171.300.000	160.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	21.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21.00	Unit	16.559.530.000	18.795.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN SUKOREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN SADENG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN KANDRI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN SEKARAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN PONGANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN KALISEGORO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN JATIREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN NGLJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19.00	Unit			KELURAHAN PATEMON
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN NONGKOSAWIT
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN CEPOKO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit			KELURAHAN GUNUNGPATI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN MANGUNSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit			KELURAHAN PAKINTELAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN PLALANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit			KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	29.00	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.00	Pokmas / Ormas	3.041.337.518	12.835.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.00	Pokmas / Ormas			KECAMATAN GUNUNGPATI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SUKOREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SADENG
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KANDRI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SEKARAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PONGANGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALISEGORO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN JATIREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN NGLJO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PATEMON
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN CEPOKO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN GUNUNGPATI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MANGUNSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PAKINTELAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PLALANGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	148.00	dokumen	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan			12.487.800.000	400.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	12.237.800.000	200.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SUKOREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SADENG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KANDRI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SEKARAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PONGANGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALISEGORO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN JATIREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN NGLJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PATEMON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN NONGKOSAWIT
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN CEPOKO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GUNUNGPATI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MANGUNSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PAKINTELAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PLALANGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	250.000.000	200.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
			Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan						KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				48.522.200	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00	Angka	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan			48.522.200	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.00	Laporan	48.522.200	0	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	Persen				75.675.000	80.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	kegiatan	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan			75.675.000	80.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	Orang	75.675.000	80.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80.00	%				18.014.841.495	17.578.781.000	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	Dokumen	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah			11.011.860	41.000.000	
			Dokumen pelaporan	2.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	487.800	10.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
			Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.108.110	5.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.720.020	5.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.470.410	5.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.770.320	5.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	201.600	3.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	253.600	8.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan	Administrtasi keuangan SKPD	100.00	Persen	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan			16.579.435.733	16.180.197.864	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117.00	Orang/bulan	15.764.630.933	15.405.197.864	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	814.200.000	760.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	201.600	5.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	201.600	5.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	201.600	5.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00	bulan	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah			602.072.379	517.583.136	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	20.000.000	37.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	190.935.119	100.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	52.000.000	40.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	20.809.842	40.583.136	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	3300.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	8.925.000	70.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	84.167.000	80.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	225.235.418	150.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.091.788		76.091.788	30.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	3.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	76.091.788	30.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran	144.132.000		144.132.000	220.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	96.232.000	120.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00	Laporan	47.900.000	100.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00	persen	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran	602.097.735		602.097.735	590.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55.00	Unit	245.097.735	290.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	225.000.000	100.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	62.000.000	100.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	70.000.000	100.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN TUGU</b>								<b>26.580.288.045</b>	<b>26.164.461.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>26.580.288.045</b>	<b>26.164.461.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen				2.087.256.917	2.006.313.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4.00	angka	Meningkatnya inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	26.037.510		26.037.510	1.105.561.757	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	26.037.510	1.105.561.757	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	persen	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1.428.105.036		1.428.105.036	747.582.813	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.428.105.036	747.582.813	KELURAHAN KARANGANYAR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.00	Laporan			KECAMATAN TUGU
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN JERAKAH
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN TUGUREJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN RANDUGARUT
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MANGKANG WETAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MANGUNHARJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	633.114.371		633.114.371	153.168.430	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3302.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	633.114.371	153.168.430	KECAMATAN TUGU
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00	persen				14.641.600.509	14.085.500.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.00	kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.928.120.910		9.928.120.910	13.747.950.931	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.00	Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	58.125.000	64.147.270	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit	8.150.000.000	8.857.155.343	KECAMATAN TUGU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN JERAKAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit			KELURAHAN TUGUREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN KARANGANYAR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN RANDUGARUT
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN MANGKANG WETAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6.00	Unit			KELURAHAN MANGUNHARJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	18.00	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas	1.719.995.910	4.826.648.318	KELURAHAN JERAKAH
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KECAMATAN TUGU
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TUGUREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGANYAR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN RANDUGARUT
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MANGKANG WETAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MANGUNHARJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27.00	dokumen	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat			4.713.479.599	337.549.069	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	24.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	4.681.409.599	98.720.000	KECAMATAN TUGU
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN JERAKAH
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TUGUREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KARANGANYAR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN RANDUGARUT
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MANGKANG WETAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MANGUNHARJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.00	Laporan	32.070.000	238.829.069	KECAMATAN TUGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				22.500.000	30.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00	angka	Aman dan Tertib			22.500.000	30.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.00	Laporan	22.500.000	30.000.000	KECAMATAN TUGU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				72.667.550	100.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	kegiatan	Terwujudnya Lingkungan yang Berwawasan Kebangsaan			72.667.550	100.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	Orang	72.667.550	100.000.000	KECAMATAN TUGU
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				9.756.263.069	9.942.648.000	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00	dokumen	Tersedianya Dokumen dan Pelaporan Perencanaan dan Evaluasi			5.689.660	12.950.168	
			Jumlah Dokumen Pelaporan	4.00	dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	487.800	3.960.000	KECAMATAN TUGU
			Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	924.510	1.309.110	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	1.120.420	1.210.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	924.510	1.210.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.120.420	1.210.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00	Laporan	604.800	1.420.456	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	507.200	2.630.602	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan dan Administrasi Keuangan			8.707.601.845	8.543.077.157	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50.00	Orang/bulan	8.352.937.045	8.160.653.716	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	354.060.000	378.762.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	201.600	1.252.272	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan semesteran	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	201.600	1.157.465	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	201.600	1.251.704	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Terwujudnya pelaksanaan administrasi umum			509.837.584	672.848.473	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	9.800.000	10.311.958	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	124.776.916	66.306.016	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00	Paket	79.824.100	84.000.000	KECAMATAN TUGU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	15.000.000	15.783.610	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	150.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.00	Laporan	33.163.200	110.000.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00	Laporan	37.249.200	144.394.403	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	210.024.168	242.052.486	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			48.883.430	14.693.104	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya	3.00	Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.00	Unit	48.883.430	14.693.104	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			163.375.550	204.299.948	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	115.494.000	131.687.916	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	47.881.550	72.612.032	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	persen	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			320.875.000	494.779.150	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	18.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18.00	Unit	120.875.000	229.905.915	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi gedung	1.00	Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	100.000.000	87.000.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	50.000.000	86.306.016	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	50.000.000	91.567.219	KECAMATAN TUGU
<b>7.01.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN MIJEN</b>								<b>53.460.064.934</b>	<b>50.069.020.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>53.460.064.934</b>	<b>50.069.020.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>3.542.321.200</b>	<b>3.788.214.000</b>	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	Persen						
7.01.02.2.01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			172.400.000	50.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.00	Dokumen	172.400.000	50.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			2.072.421.200	2.325.714.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	2.072.421.200	2.325.714.000	KELURAHAN CANGKIRAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KECAMATAN MIJEN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BUBAKAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KARANGMALANG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN POLAMAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PURWOSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN TAMBANGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN WONOLOPO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MIJEN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN JATIBARANG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KEDUNGPALE
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN NGADIRGO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN WONOPLUMBON
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN JATISARI
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN PESANTREN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.297.500.000	1.412.500.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan		1.297.500.000	1.412.500.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00	Persen					29.165.235.000	28.509.600.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498.00	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan				17.424.435.000	28.104.600.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	498.00	Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan		49.435.000	65.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	14.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		14.650.000.000	16.312.800.000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN CANGKIRAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN BUBAKAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN KARANGMALANG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN POLAMAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PURWOSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit			KELURAHAN TAMBANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN WONOLOPO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN MIJEN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN JATIBARANG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN KEDUNGPALE
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN NGADIRGO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN WONOPLUMBON
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN JATISARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	30.00	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas		2.725.000.000	11.726.800.000
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN CANGKIRAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BUBAKAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGMALANG
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN POLAMAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PURWOSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TAMBANGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN WONOLOPO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MIJEN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN JATIBARANG
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KEDUNGPALE
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN NGADIRGO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN WONOPLUMBON
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN JATISARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130.00	Dokumen	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang seharusnya			11.740.800.000	405.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	11.490.800.000	115.000.000	KECAMATAN MIJEN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN CANGKIRAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BUBAKAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KARANGMALANG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN POLAMAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PURWOSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TAMBANGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WONOLOPO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MIJEN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN JATIBARANG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KEDUNGPALE
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN NGADIRGO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WONOPLUMBON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN JATISARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	250.000.000	290.000.000	KECAMATAN MIJEN
			Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1.00	Kelurahan						KECAMATAN MIJEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.00	Persen				50.830.000	84.900.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84.00	Angka	Menurunya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani			50.830.000	84.900.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.00	Laporan	50.830.000	84.900.000	KECAMATAN MIJEN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	Persen				90.692.000	84.900.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	Kegiatan	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			90.692.000	84.900.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	Orang	90.692.000	84.900.000	KECAMATAN MIJEN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				20.610.986.734	17.601.406.000	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00	%						
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00	Dokumen	Tertib Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kecamatan Mijen			17.663.000	20.500.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	2.330.000	4.000.000	KECAMATAN MIJEN
			Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Mijen	1.00	Dokumen						KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.884.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4.469.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.675.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.870.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	972.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	2.463.000	4.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD			17.397.539.642	15.779.906.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107.00	Orang/bulan	16.573.379.642	15.100.536.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	821.160.000	671.870.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	775.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	1.549.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	676.000	2.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kecamatan Mijen			1.277.661.848	686.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	6.753.000	7.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00	Paket	454.085.848	200.000.000	KECAMATAN MIJEN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	41.870.000	66.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	11.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12.00	Paket	17.000.000	27.500.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2000.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	32.175.000	85.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	127.248.000	100.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00	Dokumen	598.530.000	200.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Mijen			11.250.000	100.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4.00	Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	11.250.000	100.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Kecamatan Mijen			221.157.244	255.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	167.045.244	175.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.00	Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	54.112.000	80.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	Persen	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD Kecamatan Mijen			1.685.715.000	760.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	32.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32.00	Unit	171.150.000	225.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi gedung	3.00	Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00	Unit	66.565.000	210.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00	Unit	1.078.000.000	100.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	370.000.000	225.000.000	KECAMATAN MIJEN
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KECAMATAN GENUK</b>								<b>53.551.718.618</b>	<b>50.173.409.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>53.551.718.618</b>	<b>50.173.409.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)</b>	<b>92.00</b>	<b>persen</b>				<b>3.292.260.490</b>	<b>3.540.624.000</b>	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1.00	angka	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			156.772.240	65.335.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.00	dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.00	Dokumen	156.772.240	65.335.000	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	persen	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			2.108.016.280	1.946.071.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100.00	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	2.108.016.280	1.946.071.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KECAMATAN GENUK
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN SEMBUNGHARJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KUDU
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KARANGROTO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN GENUKSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BANJARDOWO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN GEBANGSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TRIMULYO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN PENGGARON LOR
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TERBOYO KULON
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.027.471.970	1.529.218.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	kegiatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	1.027.471.970	1.529.218.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	persen					32.883.632.793	31.647.027.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279.00	kegiatan		Meningkatkan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.422.334.583	31.255.027.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	240.00	angka		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.00	Lembaga Kemasyarakatan	111.064.635	67.250.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11.00	kegiatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit	14.275.000.000	14.744.177.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit		KELURAHAN SEMBUNGHARJO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.00	Unit		KELURAHAN KUDU
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit		KELURAHAN KARANGROTO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit		KELURAHAN GENUKSARI
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		KELURAHAN BANJARDOWO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit		KELURAHAN GEBANGSARI
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit		KELURAHAN TRIMULYO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit		KELURAHAN PENGGARON LOR
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit		KELURAHAN BANGETAYU KULON
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit		KELURAHAN TERBOYO KULON
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit		KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	17.00	kegiatan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas	3.036.269.948	16.443.600.000
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas		KECAMATAN GENUK
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN SEMBUNGHARJO
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN KUDU
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN KARANGROTO
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN GENUKSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
						URAIAN	TARGET	SATUAN				URAIAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN GEBANGSARI
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TRIMULYO
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PENGGARON LOR
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BANGETAYU KULON
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BANGETAYU WETAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TERBOYO KULON
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11.00	angka	Terpenuhinya Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya			15.461.298.210	392.000.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8.00	angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	15.411.620.160	124.000.000		KECAMATAN GENUK
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SEMBUNGHARJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KUDU
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KARANGROTO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN GENUKSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BANJARDOWO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN GEBANGSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TRIMULYO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PENGGARON LOR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BANGETAYU KULON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BANGETAYU WETAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TERBOYO KULON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	12.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.00	Laporan	49.678.050	268.000.000		KECAMATAN GENUK
			Jumlah Kampung Keluarga Berkwalitas di Kecamatan Genuk	1.00	kelurahan							KECAMATAN GENUK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				68.535.710	33.610.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27.00	persen	Menurunnya Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani			68.535.710	33.610.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.00	angka	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.00	Laporan	68.535.710	33.610.000		KECAMATAN GENUK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				108.581.540	47.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6.00	angka	Meningkatnya Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			108.581.540	47.000.000		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300.00	angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300.00	Orang	108.581.540	47.000.000	KECAMATAN GENUK
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	persen				17.198.708.085	14.905.148.000	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	persen						
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD	2.00	dokumen	Tersedianya dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan			24.593.140	15.566.380	
			Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00	dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	3.096.120	3.424.800	KECAMATAN GENUK
			Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	4.158.110	2.193.820	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.069.290	2.367.250	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	4.558.290	1.096.260	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	4.558.290	1.096.250	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJP dan LKJIP yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Laporan	2.242.960	3.500.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	2.910.080	1.888.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen	Tercapainya persentase administrasi keuangan SKPD			15.288.399.218	13.972.048.010	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	6.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	Orang/bulan	14.693.408.618	13.625.621.210	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	589.830.000	341.590.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00	Laporan	3.075.320	1.250.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	1.583.680	2.500.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	501.600	1.086.800	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	persen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum di kecamatan			761.678.807	330.106.630	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	13.744.810	12.126.470	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	442.908.500	124.500.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	48.741.400	25.930.160	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	4.00	Paket	22.597.837	7.650.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	1900.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	54.750.000	41.400.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	114.895.500	113.500.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.00	Dokumen	64.040.760	5.000.000	KECAMATAN GENUK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor			304.769.220	5.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya	5.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	304.769.220	5.000.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			267.667.030	228.306.980	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	149.329.440	159.306.980	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	118.337.590	69.000.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100.00	persen	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor			551.600.670	354.120.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47.00	Unit	286.362.040	300.120.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	182.144.000	13.000.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.00	Unit	35.272.000	30.000.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	47.822.630	11.000.000	KECAMATAN GENUK
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN GAJAHMUNGKUR</b>								<b>33.350.181.442</b>	<b>31.946.589.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>33.350.181.442</b>	<b>31.946.589.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94.00	%				2.741.415.000	3.151.169.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Angka	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			62.020.000	120.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	62.020.000	120.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00	Persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.495.855.000	1.845.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Benda Duwur	100.00	Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.495.855.000	1.845.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BENDAN NGISOR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KARANGREJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN LEMPONGSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PETOMPON
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN SAMPANGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Perumahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.183.540.000	1.186.169.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	1.183.540.000	1.186.169.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00	%				18.434.750.000	17.766.800.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	324.00	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan			10.816.250.000	17.572.800.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	352.00	Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	175.500.000	100.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Benda Duwur	17.00	Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit	8.875.000.000	9.801.280.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN BENDAN NGISOR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN KARANGREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN LEMPONGSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PETOMPON
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit			KELURAHAN SAMPANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	30.00	Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	1.765.750.000	7.671.520.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BENDAN DUWUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BENDAN NGISOR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN LEMPONGSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PETOMPON
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SAMPANGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	78.00	Dokumen	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya			7.618.500.000	194.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	4.00	Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	7.572.200.000	174.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BENDAN DUWUR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BENDAN NGISOR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KARANGREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN LEMPONGSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PETOMPON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SAMPANGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	46.300.000	20.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	Kelurahan						KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	%				79.800.000	0	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN					
						TARGET	SATUAN				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35.00	Angka	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani			79.800.000	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.00	Laporan	79.800.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85.00	%				77.000.000	30.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	Kegiatan	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			77.000.000	30.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	Orang	77.000.000	30.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				12.017.216.442	10.998.620.000	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec. Gajahmungkur	6.00	Dokumen	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec. Gajahmungkur			28.696.000	31.750.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	6.295.000	7.525.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
			Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Gajahmungkur	1.00	Dokumen						KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	4.390.000	4.750.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4.898.000	4.750.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	3.050.000	3.350.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	3.307.000	3.350.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	2.176.000	2.675.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	4.580.000	5.350.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec. Gajahmungkur	100.00	Persen	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec. Gajahmungkur			10.735.399.442	9.918.870.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74.00	Orang/bulan	10.332.283.442	9.626.980.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	396.381.000	280.680.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	2.375.000	3.260.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	2.180.000	6.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	2.180.000	1.950.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN					
						TARGET	SATUAN				
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100.00	Persen	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur			584.822.000	507.810.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	5.925.000	10.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	106.250.000	60.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	71.000.000	70.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	14.936.000	12.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	20.925.000	100.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	77.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.00	Laporan	128.879.000	125.810.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Dokumen	236.907.000	130.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00	Persen	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur			71.298.000	15.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5.00	Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57.00	Unit	71.298.000	15.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00	Persen	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur			198.926.000	235.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	124.500.000	160.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	15.00	Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	74.426.000	75.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00	Persen	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur			398.075.000	290.190.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.00	Unit	156.250.000	140.190.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00	Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	149.325.000	50.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	42.000.000	50.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	50.500.000	50.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>KECAMATAN TEMBALANG</b>								<b>59.760.618.417</b>	<b>58.135.219.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>59.760.618.417</b>	<b>58.135.219.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00	persen				2.931.990.000	3.652.023.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00	angka	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			63.500.000	80.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	63.500.000	80.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.888.140.000	2.570.023.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmuljo	100.00	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.888.140.000	2.570.023.000	KELURAHAN SENDANGMULJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KECAMATAN TEMBALANG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN METESEH
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN MANGUNHARJO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN TANDANG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SENDANGGUWO	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN JANGLI	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KEDUNGUMUNDU	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TEMBALANG	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN BULUSAN	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KRAMAS	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN ROWOSARI	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SAMBIROTO	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			980.350.000	1.002.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	kegiatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	980.350.000	1.002.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	persen					41.619.350.000	39.321.720.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415.00	kegiatan		Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.841.150.000	39.166.720.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415.00	angka		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	82.150.000	80.720.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	10.00	kegiatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit	15.466.000.000	17.673.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00	Unit			KECAMATAN TEMBALANG
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23.00	Unit			KELURAHAN METESEH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit			KELURAHAN TANDANG
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit			KELURAHAN SENDANGGUWO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN JANGLI
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN TEMBALANG
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22.00	Unit			KELURAHAN SENDANGMULYO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN BULUSAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN KRAMAS
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit			KELURAHAN ROWOSARI
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	21.00	kegiatan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	2.293.000.000	21.413.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN METESEH
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MANGUNHARJO
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TANDANG
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SENDANGGUWO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)						
						URAIAN	TARGET	SATUAN				URAIAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN JANGLI
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TEMBALANG
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SENDANGMULYO
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BULUSAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KRAMAS
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN ROWOSARI
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112.00	dokumen	Meningkatnya Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya			23.778.200.000	155.000.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	23.148.200.000	105.000.000		KECAMATAN TEMBALANG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN METESEH
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN MANGUNHARJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TANDANG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SENDANGGUWO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN JANGLI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TEMBALANG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SENDANGMULYO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BULUSAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KRAMAS
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN ROWOSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.00	Laporan	630.000.000	50.000.000		KECAMATAN TEMBALANG
			Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1.00	kelurahan							KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				50.000.000	0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00	angka	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani			50.000.000	0		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	50.000.000	0		KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70.00	persen				96.000.000	61.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00	kegiatan	Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			96.000.000	61.000.000		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150.00	Orang	96.000.000	61.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				15.063.278.417	15.100.476.000	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00	dokumen	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.090.000	29.180.000	
			Jumlah Dokumen pelaporan	3.00	dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	300.000	650.000	KECAMATAN TEMBALANG
			Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Tembalang	1.00	Dokumen						KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	1.730.000	11.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	2.030.000	4.502.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.440.000	4.608.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.750.000	4.395.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	440.000	525.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	400.000	3.500.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan keuangan			14.040.888.417	13.184.596.000	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	Orang/bulan	13.420.308.417	12.554.296.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	Dokumen	619.590.000	621.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	330.000	7.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	330.000	1.150.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	330.000	1.150.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Meningkatnya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum			579.300.000	967.700.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	20.000.000	15.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	108.150.000	150.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	40.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	22.700.000	37.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5.00	Paket	4.950.000	37.505.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2700.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	102.300.000	139.995.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	267.600.000	188.200.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	53.600.000	400.000.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Meningkatnya Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000.000	100.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00	Unit	5.000.000	100.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Meningkatnya Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor			195.000.000	195.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	120.000.000	133.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	75.000.000	62.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	persen	Meningkatnya Pemeliharaan Aset SKPD			235.000.000	624.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00	Unit	110.000.000	174.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	90.000.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	25.000.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	10.000.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>KECAMATAN CANDISARI</b>								<b>33.204.494.580</b>	<b>31.372.393.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>33.204.494.580</b>	<b>31.372.393.000</b>	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	2	Angka				2.698.777.036	2.400.661.000	
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	Persen						
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00	Angka	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			187.244.950	100.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00	Dokumen	187.244.950	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100.00	persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.709.226.826	1.544.718.636	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten	100.00	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.709.226.826	1.544.718.636	KECAMATAN CANDISARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN JATINGALEH
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN WONOTINGAL
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN TEGALSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KALIWIRU
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN CANDI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN JOMBLANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			802.305.260	755.942.364	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	802.305.260	755.942.364	KECAMATAN CANDISARI
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>19.614.220.590</b>	<b>18.888.800.000</b>	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.00	kegiatan	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan			10.029.620.590	18.314.800.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	276.00	kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	51.395.590	25.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	10.00	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit	8.511.125.000	9.195.311.500	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KECAMATAN CANDISARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN JATINGALEH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN WONOTINGAL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00	Unit			KELURAHAN TEGALSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN KALIWIRU
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN CANDI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22.00	Unit			KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatingaleh	19.00	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	1.467.100.000	9.094.488.500	KELURAHAN JATINGALEH
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KECAMATAN CANDISARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN WONOTINGAL
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TEGALSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALIWIRU
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN CANDI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	67.00	kegiatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya			9.584.600.000	574.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	9.539.600.000	174.000.000	KECAMATAN CANDISARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN JATINGALEH
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WONOTINGAL
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TEGALSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALIWIRU
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN CANDI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00	Laporan	45.000.000	400.000.000	KECAMATAN CANDISARI
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	Kelurahan						KECAMATAN CANDISARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				80.000.000	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52.00	angka	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani			80.000.000	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.00	Laporan	80.000.000	0	KECAMATAN CANDISARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				75.338.500	45.000.000	
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00	angka						
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	kegiatan	Terlaksananya Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			75.338.500	45.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.00	Orang	75.338.500	45.000.000	KECAMATAN CANDISARI
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	%				10.736.158.454	10.037.932.000	
			Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100.00	%						
			Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2.00	Dokumen	Tertibnya penyusunan dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan oleh Kecamatan Candisari			28.100.640	50.250.000	
			Presentase Dokumen pelaporan	100.00	persen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	2.887.800	6.750.000	KECAMATAN CANDISARI
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Candisari	1.00	Dokumen						KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	4.088.870	6.750.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	5.141.150	6.750.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	5.582.950	6.750.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	5.141.150	6.750.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	3.099.360	3.750.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	2.159.360	12.750.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	Tertibnya pengelolaan Administrasi Keuangan di Kecamatan Candisari			8.674.106.540	8.411.592.347	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51.00	Orang/bulan	8.263.615.580	7.911.307.318	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	402.390.000	480.785.029	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	2.700.320	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	2.700.320	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	2.700.320	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Terpenuhinya Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kecamatan Candisari			1.024.065.702	530.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	20.148.080	60.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00	Paket	325.822.781	85.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	80.447.860	67.500.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00	Paket	17.517.297	7.500.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	1000.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	97.875.000	55.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	111.700.000	75.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.00	Dokumen	370.554.684	180.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			109.819.117	20.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10.00	Unit	109.819.117	20.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00	Persen	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor di Kecamatan Candisari			191.837.150	210.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	166.701.000	190.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	25.136.150	20.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	Persen	tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Candisari			708.229.305	816.089.653	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29.00	Unit	305.150.685	517.240.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	300.000.000	198.849.653	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	20.306.170	50.000.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113.00	Unit	82.772.450	50.000.000	KECAMATAN CANDISARI
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KECAMATAN BANYUMANIK</b>								<b>50.326.189.483</b>	<b>49.179.820.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>50.326.189.483</b>	<b>49.179.820.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen				2.782.930.570	3.092.722.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	angka	Peningkatan mutu pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan			67.454.624	50.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00	Dokumen	67.454.624	50.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	persen	Peningkatan kinerja kelurahan dalam pelayanan masyarakat			1.647.976.036	1.915.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.647.976.036	1.915.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
			Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	persen						KECAMATAN BANYUMANIK
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BANYUMANIK
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN GEDAWANG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN JABUNGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN NGESREP
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PADANGSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN PEDALANGAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SRONDOL KULON
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SRONDOL WETAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SUMURBOTO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen		Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			1.067.499.910	1.127.722.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10.00	kegiatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.00	Laporan	1.067.499.910	1.127.722.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	persen					32.075.320.000	30.931.386.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450.00	kegiatan		Peningkatan pembangunan fisik dan non fisik kelurahan			14.644.300.000	30.232.700.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	170.00	angka		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.00	Lembaga Kemasyarakatan	66.300.000	50.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12.00	kegiatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170.00	Unit	12.183.000.000	13.868.630.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit		KELURAHAN BANYUMANIK
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		KELURAHAN GEDAWANG
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit		KELURAHAN JABUNGAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit		KELURAHAN NGESREP
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		KELURAHAN PADANGSARI
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit		KELURAHAN PEDALANGAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00	Unit		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit		KELURAHAN SRONDOL KULON
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit		KELURAHAN SRONDOL WETAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit		KELURAHAN SUMURBOTO
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit		KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudukpayung	20.00	kegiatan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas	2.395.000.000	16.314.070.000
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas		KECAMATAN BANYUMANIK
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN BANYUMANIK
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN GEDAWANG
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN JABUNGAN
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas		KELURAHAN NGESREP
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		KELURAHAN PADANGSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PEDALANGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SRONDOL WETAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SUMURBOTO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro dan koperasi	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5.00	dokumen	Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan taraf kualitas hidupnya			17.431.020.000	698.686.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5.00	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	17.374.200.000	174.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BANYUMANIK
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GEDAWANG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN JABUNGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN NGESREP
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PADANGSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PEDALANGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PUDAKPAYUNG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SRONDOL WETAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SUMURBOTO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.00	Laporan	56.820.000	524.686.000	KECAMATAN BANYUMANIK
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	keturahan						KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				16.200.000	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32.00	Angka	Terciptanya suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat			16.200.000	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	16.200.000	0	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				70.579.764	55.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	kegiatan	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan			70.579.764	55.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200.00	Orang	70.579.764	55.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				15.381.159.149	15.100.712.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00	dokumen	Tersedianya Dokumen yang sah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan/operasional perkantoran			4.500.000	11.200.000	
			Jumlah Dokumen pelaporan	2.00	dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	500.000	3.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL)	1.00	Dokumen						KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	500.000	1.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	500.000	1.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.000.000	1.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.000.000	1.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Laporan	500.000	1.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	500.000	1.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			13.849.845.483	13.515.445.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85.00	Orang/bulan	13.277.265.483	12.965.195.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	571.080.000	544.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	500.000	2.750.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	500.000	1.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	500.000	1.500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	Persen	Tersedianya kebutuhan operasional kantor			756.452.202	657.817.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.00	Paket	15.000.000	36.300.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	415.934.379	181.517.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50.00	Paket	60.000.000	45.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00	Paket	22.764.955	20.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.00	Laporan	89.100.000	75.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.00	Laporan	105.373.000	100.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	48.279.868	200.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan			16.129.654	80.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	2.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00	Unit	16.129.654	80.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor			330.441.150	321.250.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	116.235.600	151.250.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00	Laporan	126.363.150	60.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA	
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN				
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	87.842.400	110.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	persen	Terpeliharanya barang milik daerah dari kerusakan			423.790.660	515.000.000		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.00	Unit	223.790.660	240.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	150.000.000	150.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	Unit	30.000.000	50.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	5.00	Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00	Unit	20.000.000	75.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>KECAMATAN NGALIYAN</b>									<b>49.668.402.192</b>	<b>48.794.811.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>									<b>49.668.402.192</b>	<b>48.794.811.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)</b>	<b>92.00</b>	<b>Persen</b>				<b>2.686.896.000</b>	<b>3.365.520.000</b>		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1.00	Angka	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			62.492.000	100.000.000		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00	Dokumen	62.492.000	100.000.000	KECAMATAN NGALIYAN	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00	Persen	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.353.804.000	2.035.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100.00	persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.353.804.000	2.035.000.000	KELURAHAN WATES	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KECAMATAN NGALIYAN	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN KALIPANCUR	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BAMBANKEREP	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN NGALIYAN	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN TAMBAKAJI	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN WONOSARI	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PODOREJO	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN PURWOYOSO	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN BRINGIN	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan			KELURAHAN GONDORIYO	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.270.600.000	1.230.520.000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00	Laporan	1.270.600.000	1.230.520.000	KECAMATAN NGALIYAN	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>98.00</b>	<b>persen</b>				<b>32.754.762.000</b>	<b>31.131.600.000</b>		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279.00	kegiatan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.169.489.000	30.797.600.000		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngalayan	109.00	Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.00	Lembaga Kemasyarakatan	50.374.000	25.000.000	KECAMATAN NGALIYAN	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	5.00	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5.00	Unit	12.053.000.000	13.978.800.000	KELURAHAN WATES
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KECAMATAN NGALIAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN KALIPANCUR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN BAMBANKEREP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN NGALIAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN TAMBAKAJI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN WONOSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PODOREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PURWOYOSO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN BRINGIN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	23.00	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas	2.066.115.000	16.793.800.000	KELURAHAN BRINGIN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KECAMATAN NGALIAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALIPANCUR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN BAMBANKEREP
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN NGALIAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN WATES
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TAMBAKAJI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN WONOSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PODOREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PURWOYOSO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8.00	dokumen	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan			18.585.273.000	334.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8.00	dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	18.374.000.000	134.000.000	KECAMATAN NGALIAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALIPANCUR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BAMBANKEREP
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN NGALIAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WATES
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TAMBAKAJI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WONOSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PODOREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PURWOYOSO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BRINGIN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GONDORIYO

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00	Laporan	211.273.000	200.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	kelurahan						KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				63.283.000	50.000.000	
			Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen						
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00	Angka				63.283.000	50.000.000	
			Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35.00	angka						
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Kerttiban Umum	5.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.00	Laporan	63.283.000	50.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				92.469.000	30.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00	kegiatan	Meningkatnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional			92.469.000	30.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	200.00	Orang	92.469.000	30.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
<b>NON URUSAN</b>											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				14.070.992.192	14.217.691.000	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00	dokumen	Tersedianya Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.516.000	17.000.000	
			Jumlah Dokumen pelaporan	2.00	dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	2.098.000	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
			Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Ngaliyan	1.00	dokumen						KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	5.530.000	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	4.855.000	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.925.000	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	2.159.000	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Laporan	1.093.000	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	Laporan	856.000	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah			12.795.614.192	12.207.399.924	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86.00	Orang/bulan	12.306.355.192	11.699.399.924	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	486.035.000	499.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	1.333.000	3.200.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00	Laporan	896.000	3.100.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	995.000	2.700.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	persen	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			365.081.000	1.008.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	6.000.000	8.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	132.763.000	100.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	30.000.000	55.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	9.111.000	13.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	2000.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	8.892.000	65.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.00	Laporan	70.956.000	100.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	Dokumen	107.359.000	667.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			59.912.000	100.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10.00	Unit	59.912.000	100.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			221.714.000	235.291.076	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	121.348.000	175.291.076	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	Laporan	100.366.000	60.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	persen	Terpeliharanya aset SKPD			610.155.000	650.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34.00	Unit	158.100.000	200.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	271.400.000	200.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	5.125.000	100.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00	Unit	175.530.000	150.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>KECAMATAN GAYAMSARI</b>								<b>32.213.546.228</b>	<b>31.627.150.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>32.213.546.228</b>	<b>31.627.150.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPPE)	92.00	persen				<b>2.028.424.226</b>	<b>2.249.862.000</b>	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00	angka	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			2.250.000	93.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.00	Dokumen	2.250.000	93.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persentase	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.338.854.786	1.379.462.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00	Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.338.854.786	1.379.462.000	KECAMATAN GAYAMSARI
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	1.00	angka						KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN TAMBAKREJO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN KALIGAWA
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SAWAH BESAR
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SIWALAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN SAMBIREJO
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN PANDEAN LAMPER
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan		KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persentase	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			687.319.440	777.400.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	600.00	angka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00	Laporan	687.319.440	777.400.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	Persentase				19.026.951.848	18.405.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.00	angka	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.676.696.938	18.031.200.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80.00	angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.00	Lembaga Kemasyarakatan	36.289.350	25.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	12.00	angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit	7.963.000.000	8.804.340.000	KELURAHAN GAYAMSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KECAMATAN GAYAMSARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN TAMBAKREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN KALIGAWA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9.00	Unit			KELURAHAN SAWAH BESAR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN SIWALAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN SAMBIREJO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PANDEAN LAMPER
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	21.00	angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas	1.677.407.588	9.201.860.000	KELURAHAN GAYAMSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KECAMATAN GAYAMSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TAMBAKREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALIGAWA
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SAWAH BESAR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SIWALAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN SAMBIREJO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PANDEAN LAMPER
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768.00	angka	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan			9.350.254.910	374.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	768.00	angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	9.290.000.000	174.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TAMBAKREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALIGAWA
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SAWAH BESAR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SIWALAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN SAMBIREJO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PANDEAN LAMPER
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.00	Laporan	60.254.910	200.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
			Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	1.00	Angka						KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.00	Persen				18.850.000	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24.00	angka	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat			18.850.000	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	18.850.000	0	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				76.750.000	30.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6.00	kegiatan	Meningkatnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional			76.750.000	30.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120.00	Orang	76.750.000	30.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen				11.062.570.154	10.942.088.000	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen						
			Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00	Dokumen	Tersedianya Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.182.830	15.000.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	454.690	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
			Jumlah Dokumen RTP	1.00	Dokumen						KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	454.690	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	454.690	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	454.690	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	454.690	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Laporan	454.690	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	454.690	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah			9.585.143.005	9.602.716.978	
			Administrasi Keuangan SKPD	100.00	persen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65.00	Orang/bulan	9.200.848.935	9.222.052.978	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	382.930.000	373.664.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	454.690	4.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00	Laporan	454.690	1.500.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	454.690	1.500.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	Persen	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			699.029.848	550.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	10.157.110	8.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.00	Paket	343.834.579	100.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	40.912.290	30.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	9.664.472	12.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	120.00	Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	11.250.000	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	133.974.000	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.00	Dokumen	149.237.397	300.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			38.606.022	200.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin lainnya	1.00	Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	38.606.022	200.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor			136.145.280	172.371.022	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	114.000.000	122.371.022	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100.00	Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	22.145.280	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	persen	Terpeliharanya aset SKPD			600.463.169	402.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.00	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.00	Unit	114.239.069	102.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	400.000.000	180.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	56.224.100	70.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00	Unit	30.000.000	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>KECAMATAN PEDURUNGAN</b>								<b>60.651.145.810</b>	<b>60.514.018.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								<b>60.651.145.810</b>	<b>60.514.018.000</b>	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00	persen				2.959.987.338	3.713.566.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	angka	meningkatnya Inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan			112.970.400	100.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	112.970.400	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	persen	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.754.570.948	2.250.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.00	kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.754.570.948	2.250.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
			Persentase Kecamatan dan Kelurahan Yang Memenuhi Standar PATEN	100.00	persen						KECAMATAN PEDURUNGAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN TLOGOSARI KULON
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN TLOGOMULYO
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN KALICARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN PLAMONGANSARI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN GEMAH
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN PALEBON
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00	Laporan			KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.092.445.990	1.363.566.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	1.092.445.990	1.363.566.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00	persen				40.337.923.512	38.155.100.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.00	kegiatan	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			16.548.234.172	37.816.100.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	147.00	angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pedurungan	13.00	kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit	13.983.982.992	15.976.290.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00	Unit			KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00	Unit			KELURAHAN TLOGOSARI KULON
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN TLOGOMULYO
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN KALICARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14.00	Unit			KELURAHAN PLAMONGANSARI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
						(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11.00	Unit			KELURAHAN GEMAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00	Unit			KELURAHAN PALEBON
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00	Unit			KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00	Unit			KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pedurungan	38.00	kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.00	Pokmas / Ormas	2.514.251.180	21.789.810.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TLOGOSARI KULON
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN TLOGOMULYO
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALICARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PLAMONGANSARI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN GEMAH
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PALEBON
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.00	Pokmas / Ormas			KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8.00	jenis	Terselesaikan dan terfilitasi laporan lembaga kemasyarakatan			23.789.689.340	339.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	jenis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	175.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TLOGOSARI KULON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TLOGOMULYO
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALICARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PLAMONGANSARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GEMAH
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PALEBON
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PENGGARON KIDUL

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN (INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6.00	kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00	Laporan	57.704.760	164.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
			Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan	1.00	kelurahan						KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	persen				64.000.000	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00	angka	Tertanganinya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			64.000.000	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.00	kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	64.000.000	0	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	persen				50.980.350	25.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi masyarakat , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2.00	kegiatan	Terlaksanakannya Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi masyarakat , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan			50.980.350	25.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	2.00	kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150.00	Orang	50.980.350	25.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
	<b>NON URUSAN</b>										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				17.238.254.610	18.620.352.000	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00	dokumen	Tersusunnya Dokumen dan laporan Perencanaan an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan			24.779.770	29.000.000	
			Jumlah Dokumen pelaporan	3.00	dokumen						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Rencana SKPD) yang disusun	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00	Dokumen	2.704.440	3.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
			Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Pedurungan	1.00	dokumen						KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.00	Dokumen	4.449.180	3.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.00	Dokumen	5.617.790	3.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2.00	Dokumen	3.988.590	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.00	Dokumen	2.394.290	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Pelaporan koordinasidan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	2.187.520	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	3.437.960	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD 100%	100.00	persen	Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan Pelaporan Keuangan SKPD			15.015.100.690	16.838.246.358	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	Orang/bulan	14.419.764.810	16.173.246.358	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	587.821.720	650.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00	Laporan	947.760	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00	Laporan	5.369.920	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	1.196.480	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	persen	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			648.044.792	590.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia	5.00	jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	25.000.000	10.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	214.738.932	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	25.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	54.777.600	50.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan	6.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.00	Paket	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu yang berkunjung	3350.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.00	Laporan	69.709.560	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	106.956.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	8.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen	146.862.700	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%	100.00	persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			395.818.108	250.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	3.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.00	Unit	395.818.108	250.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100%	100.00	persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			437.629.130	325.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	260.312.160	250.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00	jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00	Laporan	177.316.970	75.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	persen	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			716.882.120	588.105.642	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	30.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29.00	Unit	192.081.570	250.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah pemeliharaan / Rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00	gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00	Unit	25.200.550	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00	Unit	349.600.000	138.105.642	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	3.00	jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00	Unit	150.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								<b>51.131.882.876</b>	<b>153.971.844.000</b>	
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								<b>51.131.882.876</b>	<b>153.971.844.000</b>	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>Indeks Pengamalan Pancasila</b>	<b>2.00</b>	<b>Indeks</b>				<b>1.091.118.000</b>	<b>3.823.570.000</b>	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2.00	Kejadian	Dapat meminimalisir kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun			1.091.118.000	3.823.570.000	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	900.00	orang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	27.00	Dokumen	614.802.000	1.448.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	120.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	50.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	100.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	120.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	190.00	orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	60.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Hibah yang disalurkan	1.00	organisasi						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	5.00	kali	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5.00	Dokumen	113.000	740.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	6.00	Kali						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kampung Tematik Pancasila	3.00	Lokasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	540.00	Orang	405.158.000	875.570.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	5.00	Forum	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	520.00	Orang	51.879.000	550.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumih Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1.00	kali	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.00	Laporan	19.166.000	210.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	3.00	Dokumen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1.00	kali						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Kebebasan Sipil	64.00	angka indeks				36.517.196.000	132.584.460.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemil	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6000.00	laporan dan usulan	Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			36.517.196.000	132.584.460.000	
			Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6000.00	laporan dan usulan						
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	5.00	konten	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	26.00	Dokumen	227.165.000	510.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10.00	konten						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	600.00	orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	20.00	paket						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	4.00	kali						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	70.00	orang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12.00	Dokumen	35.733.853.000	120.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100.00	persen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100.00	persen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	50.00	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.00	Orang	25.997.000	131.319.460.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	10.00	event	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1281.00	Orang	323.090.000	300.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah peserta bimtek pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik	45.00	orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah peserta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	36.00	orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Monitoring Fasilitas Pemilu/Pemilukada	60.00	dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	220.00	Laporan	207.091.000	335.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12.00	dokumen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1.00	kali						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	120.00	dokumen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	27.00	dokumen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Indeks Kinerja Ormas	57.00	indeks				1.673.762.000	3.192.199.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Ormas Aktif	34.00	%	Meningkatnya jumlah ormas aktif di Kota Semarang			1.673.762.000	3.192.199.000	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	6.00	organisasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	19.00	Dokumen	808.282.000	2.608.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	2.00	organisasi						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah peserta ormas expo	30.00	organisasi						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10.00	organisasi						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40.00	orang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1.00	Dokumen	500.000.000	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	90.00	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90.00	Orang	205.500.000	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120.00	dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120.00	Laporan	159.980.000	464.199.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	15.00	ormas						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		indeks kerukunan umat beragama	71.00	indeks			3.143.816.000	2.344.009.000		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1.00	kejadian	Menurunnya jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan		3.143.816.000	2.344.009.000		
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6.00	konten	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11.00	Dokumen	72.750.000	568.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	3.00	konten						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	200.00	orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	150.00	orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	200.00	orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	12.00	dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	165.00	Orang	114.980.000	216.009.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		jumlah peserta event Fasilitas Paguyuban Petamas	200.00	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.00	Orang	2.956.086.000	1.560.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	9.00	kali						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	4.00	organisasi						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82.00	prosentase			2.511.924.000	5.254.098.000		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	24.00	kejadian	Dapat meminimalisir jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan		2.511.924.000	5.254.098.000		
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	75.00	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	660.00	Orang	350.229.000	1.900.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Pelatihan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	75.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100.00	persen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Fasilitas Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18.00	Kali						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24.00	Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1070.00	Orang	383.532.000	1.904.098.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1.00	Kelompok						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	475.00	Orang						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
			Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3.00	Konten						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Situasi Daerah	365.00	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377.00	Laporan	173.565.000	550.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12.00	Kali						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	12.00	Kali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12.00	Dokumen	1.604.598.000	900.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			<b>NON URUSAN</b>								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	%				6.194.066.876	6.773.508.000	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	%						
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	%						
			Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	%						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11.00	dokumen	Tersusunnya dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			12.103.000	8.652.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	Dokumen	847.000	2.052.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah dokumen RTP	1.00	dokumen						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.269.000	800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.219.000	800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.611.000	800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.962.000	800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	Laporan	639.000	1.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00	Laporan	556.000	1.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	%	Tersusunnya Administrasi Keuangan SKPD			5.094.162.876	5.604.334.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35.00	Orang/bulan	4.824.045.876	5.055.882.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	Dokumen	267.320.000	520.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	815.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan semesteran	1.00	dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.00	Laporan	1.582.000	12.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	Dokumen	400.000	6.452.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100.00	%	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian			26.075.000	32.037.000	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55.00	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.00	Orang	26.075.000	32.037.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	%	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum			444.320.000	587.100.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			HASIL KEGIATAN / HASIL SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	UNIT PELAKSANA
			URAIAN	TARGET	SATUAN	(INDIKATOR PEMUTAKHIRAN)					
						URAIAN	TARGET	SATUAN			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	Paket	10.015.000	7.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10.00	Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.00	Paket	14.984.000	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20.00	Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00	Paket	55.053.000	110.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5.00	Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	10.554.000	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	100.00	Buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.00	Dokumen	432.000	1.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	1000.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.00	Laporan	65.005.000	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100.00	Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	Laporan	214.005.000	168.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	Dokumen	74.272.000	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	%	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			24.523.000	60.009.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3.00	Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50.00	Unit	19.523.000	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2.00	Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.00	Unit	5.000.000	45.009.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	tersedianya kebutuhan jasa kantor			272.903.000	169.950.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	37.103.000	49.950.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan honorarium TPHP dan driver yang dibayarkan	100.00	persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24.00	Laporan	235.800.000	120.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	%	terperuhnya Pemeliharaan Aset SKPD			319.980.000	311.426.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.319.000	45.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22.00	Unit	251.300.000	218.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel k	10.00	Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50.00	Unit	6.750.000	8.426.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50.00	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00	Unit	25.611.000	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>JUMLAH</b>									<b>4.856.150.468.912</b>	<b>5.550.495.769.622</b>	

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang.

**6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2023**

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.1.  
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

**6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2.

## Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Secara administrasi kependudukan)	%	0,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
3	Laju inflasi	%	2,5 ±1
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,77
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,70
	Fokus Kesejahteraan Sosial		
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai indeks	83,60-84,00
a.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. /thn	15.800
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,49
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,59
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,58
7	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga		
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	55,17
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)		
	a.Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
	b.Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	57,14
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	51,43

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
6	Angka Partisipasi Kasar		
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	81,70
	b. SD/MI	%	100
	c. SLTP/MTs	%	100
7	Angka Partisipasi Murni :		
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80
8	Angka Putus Sekolah:		
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03
9	Angka Kelulusan:		
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9
10	Angka Melanjutkan (AM):		
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100
11	Fasilitas Pendidikan:		
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	96
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,2
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata		
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
	a. Jenjang PAUD	%	98,4
	b. Jenjang SD/MI	%	99
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100
I.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,37
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	90,60
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,33
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,07
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	6,90
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	77
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A+
I.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	96,17
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,17
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	83,00
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	90,86
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	93,50
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	62,1
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,14
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	52
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	27
I.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100 (30 Unit)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100 (84 Unit)
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	48 (48% x 431,54 Ha = 207,144 Ha)
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1.000
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100 (10 perumahan)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	18,49
I.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	66
3	Indeks Resiko Bencana	%	111
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100
5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,31
I.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	65
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	56 (150 kasus)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,65
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,012
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	14,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,69
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	64,58
7	Rasio KDRT	Rasio	0,025
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	254,318
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	4
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	81,5
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,01
	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	52,43
	b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	95,60
	c. Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	56,50
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Persentase pengurangan timbulan sampah b. Persentase penanganan timbulan sampah	% %	27 72
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,60
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	71,00
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,20
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,40
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase LPM aktif	%	100
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2,00
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,56

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,14
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	14.554.892
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	3
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	1970
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,33
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1	Persentase koperasi aktif	%	76,50
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	13
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	54
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	492
2	Persentase peningkatan investasi	%	7
3	Nilai investasi	Rp (dlm juta)	25.684.059
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	38
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,04
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	75
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	77,85
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	435
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	10
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	32,5
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	47
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	28
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	59
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	79
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	58
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	149.500
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	6.901,85
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita / thn	40,18
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	17.557
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/ tahun	3.055,90
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/ tahun	3.845,95
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6 (3.883.073)
2	Tingkat hunian akomodasi	%	41,24
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	6,38
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	132
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	5
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	45
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81,0
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	64
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10%
4	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	Sentra	1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,50%
4	UNSUR PENDUKUNG		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	74,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	88,00
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>74/BB
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,46/ST
4.02	SEKRETARIAT DPRD		
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100
5	UNSUR PENUNJANG		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
5.01.	PERENCANAAN		
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100
5.02	KEUANGAN		
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,22
5.03	KEPEGAWAIAN		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	1,22
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	239,43
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	19,19
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	%	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	35,29
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	64
6	UNSUR PENGAWAS		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		
1	Indeks Penerapan Managemen Resiko	Indeks	2,60
2	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai)	Nilai	2,69
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN		
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	92,84
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	88,52
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	92
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	98
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,40
2	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	73,50
C.	ASPEK DAYA SAING		
1.	Kemampuan Ekonomi Daerah		
1	PDRB per kapita berlaku	juta Rp	103,54
2	Nilai Ekspor	US\$	3.403.172.949,10
2.	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur		
2.1	Aksesibilitas Daerah		
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5818
2.2	Penataan Wilayah		
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,05
2.	Kesesuaian tata ruang	%	100
3.	Fasilitasi Iklim Berinvestasi		
3.1	Ketentraman dan Ketertiban		
1	Angka Kriminalitas	kejadian	1290
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
3.2	Kemudahan Perijinan		
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	95,50
4.	Sumber Daya Manusia		
4.1	Kualitas Tenaga Kerja		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,10
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	77
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk (Dt. Disdukcapil)	%	41,05

## BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan tahun 2023 mengikuti prinsip *money follows program* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penyusunan RKPD tahun 2023 juga dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengambil tema “Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Daya Saing Daerah yang Didukung Potensi Unggulan Daerah”, diharapkan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat meningkat dan segera pulih setelah terkena dampak pandemi Covid-19. Dokumen RKPD ini sekaligus juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004